



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

2024

TAHUN ANGGARAN



**KAJIAN RANCANGAN RENCANA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2025-2029**

LAPORAN AKHIR



KATA PENGANTAR

Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan **Laporan Akhir** dengan judul **"Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029"** ini. Kajian ini disusun sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung upaya pemerintah daerah Kabupaten Cianjur dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Penyusunan kajian ini didasarkan pada data dan informasi terkini serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menghasilkan strategi dan rencana aksi yang relevan, realistis, dan berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa kajian ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan, khususnya dalam mendukung terwujudnya pengurangan kemiskinan di Kabupaten Cianjur sesuai dengan visi pembangunan daerah tahun 2025-2029. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan kajian ini.

Cianjur, Desember 2024

Tim Penyusun





DAFTAR ISI

Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii

BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1 LATAR BELAKANG	1-1
1.2 LANDASAN HUKUM	1-4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	1-5
1.4 KELUARAN	1-6
1.5 RUANG LINGKUP	1-6
1.6 PENGERTIAN	1-7
1.7 SISTEMATIKA	1-8

BAB 2 KONDISI UMUM DAERAH	2-1
2.1 KONDISI FISIK	2-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi Dan Wilayah	2-1
2.1.2 Kondisi Kawasan Dan Potensi Pengembangan Wilayah	2-21
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana	2-22
2.1.4 Kondisi Infrastruktur	2-42
2.2 KONDISI SOSIAL EKONOMI	2-43
2.2.1 Kondisi Demografis Wilayah	2-43
2.2.2 Kondisi Sosial	2-48

2.2.3	Kondisi Ekonomi	2-49
2.2.4	Pandemi Covid-19 di Kabupaten Cianjur	2-52
2.3	KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN.....	2-54
2.3.1	Legislasi	2-54
2.3.2	Kelembagaan	2-56
2.3.3	Penganggaran	2-58

BAB 3 PROFIL KEMISKINAN KABUPATEN CIANJUR ----- 3-1

3.1	KONSEP KEMISKINAN	3-1
3.1.1	Pengertian Kemiskinan	3-1
3.1.2	Jenis-Jenis Kemiskinan	3-2
3.2	ANALISIS KONDISI KEMISKINAN DAERAH	3-2
3.2.1	Kondisi Kemiskinan Makro	3-2
3.2.2	Kondisi Kemiskinan Mikro.....	3-8
3.3	ANALISIS KARAKTERISTIK PERMASALAHAN KEMISKINAN KONSUMSI----	3-18
3.3.1	Permasalahan Kemiskinan Dalam Dimensi Kemiskinan Konsumsi	3-18
3.3.2.	Prioritas Permasalahan Kemiskinan Dalam Dimensi Kemiskinan Konsumsi	3-27
3.4	ANALISIS KARAKTERISTIK PERMASALAHAN KEMISKINAN KETENAGAKERJAAN	3-28
3.4.1	Permasalahan Kemiskinan Dalam Dimensi Ketenagakerjaan	3-28
3.4.2	Prioritas Permasalahan Kemiskinan Dalam Dimensi Ketenagakerjaan	3-34
3.5	ANALISIS KARAKTERISTIK PERMASALAHAN KEMISKINAN KESEHATAN----	3-35
3.5.1	Permasalahan Kemiskinan Dalam Dimensi Kesehatan	3-35
3.5.2	Prioritas Permasalahan Kemiskinan Dalam Dimensi Kesehatan --	3-43
3.6	ANALISIS KARAKTERISTIK PERMASALAHAN KEMISKINAN PENDIDIKAN --	3-44
3.6.1	Permasalahan Kemiskinan Dalam Dimensi Pendidikan	3-44
3.6.2	Prioritas Permasalahan Kemiskinan Dalam Dimensi Pendidikan -	3-65
3.7	ANALISIS KARAKTERISTIK PERMASALAHAN KEMISKINAN INFRASTRUKTUR DASAR	3-66
3.7.1	Permasalahan Kemiskinan Dalam Dimensi Infrastruktur Dasar --	3-66
3.7.2	Prioritas Permasalahan Kemiskinan Dalam Dimensi Infrastruktur Dasar.....	3-79
3.8	ANALISIS KARAKTERISTIK PERMASALAHAN KEMISKINAN KETAHANAN PANGAN.....	3-79

BAB 4 PROGRAM PRIORITAS ----- 4-1

4.1	ANALISIS DETERMINAN KEMISKINAN -----	4-1
4.1.1	Prioritas Intervensi Bidang Kemiskinan Konsumsi -----	4-1
4.1.2	Prioritas Intervensi Bidang Kemiskinan Ketenagakerjaan -----	4-4
4.1.3	Prioritas Intervensi Bidang Kemiskinan Kesehatan -----	4-6
4.1.4	Prioritas Intervensi Bidang Kemiskinan Pendidikan -----	4-9
4.1.5	Prioritas Intervensi Bidang Kemiskinan Infrastruktur Dasar -----	4-12
4.1.6	Prioritas Intervensi Bidang Kemiskinan Ketahanan Pangan -----	4-15
4.2	ANALISIS KONDISI FISKAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN ---	4-16
4.2.1	Kondisi Umum Fiskal -----	4-16
4.2.2	Analisis Kemandirian Fiskal-----	4-17
4.2.3	Analisis Kondisi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan -----	4-18
4.3	ANALISIS FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT INTERVENSI -----	4-27
4.4	STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN -----	4-29
4.2.1	Strategi Dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Nasional --	4-29
4.2.2	Strategi Dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Jawa Barat	4-32
4.2.3	Strategi Dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Cianjur ----	4-35
4.2.4	Program Penanggulangan Kemiskinan -----	4-40
4.2.4	Target Penurunan Angka Kemiskinan -----	4-52

BAB 5 PENUTUP----- 5-1



DAFTAR TABEL

Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Cianjur -----	2-2
Tabel 2.2	Elevasi Topografi Kabupaten Cianjur Menurut Kecamatan -----	2-4
Tabel 2.3	Kemiringan Lereng Kabupaten Cianjur Menurut Kecamatan -----	2-6
Tabel 2.4	Morfologi Kabupaten Cianjur Menurut Kecamatan -----	2-9
Tabel 2.5	Jenis Tanah di Kabupaten Cianjur -----	2-11
Tabel 2.6	Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Cianjur -----	2-14
Tabel 2.7	Cekungan Air Tanah di Kabupaten Cianjur -----	2-15
Tabel 2.8	Curah Hujan Kabupaten Cianjur Menurut Kecamatan -----	2-17
Tabel 2.9	Penutup Tanah di Kabupaten Cianjur -----	2-19
Tabel 2.10	Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Cianjur -----	2-22
Tabel 2.11	Rawan Bencana Gerakan Tanah Kabupaten Cianjur -----	2-25
Tabel 2.12	Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Cianjur -----	2-27
Tabel 2.13	Rawan Bencana Gunung Api Kabupaten Cianjur -----	2-29
Tabel 2.14	Rawan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Cianjur -----	2-31
Tabel 2.15	Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Kabupaten Cianjur -----	2-36
Tabel 2.16	Rawan Bencana Kekeringan Kabupaten Cianjur -----	2-39
Tabel 2.17	Jumlah Sarana Perdagangan Kabupaten Cianjur -----	2-42
Tabel 2.18	Jumlah Penduduk Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023 -----	2-43
Tabel 2.19	Kepadatan Penduduk Kabupaten Cianjur Tahun 2023 -----	2-45
Tabel 2.20	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2023 -----	2-46
Tabel 2.21	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Cianjur Tahun 2023	2-47
Tabel 2.22	Jumlah Penduduk Menurut Umur Kabupaten Cianjur Tahun 2023 -----	2-48
Tabel 2.23	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Cianjur Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 -----	2-49
Tabel 2.24	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Cianjur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 -----	2-51
Tabel 2.25	Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Cianjur Tahun 2023 --	2-58
Tabel 3.1	Jumlah Rumah Tangga dan Anggota Rumah Tangga -----	3-9



LAPORAN AKHIR

Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029

Tabel 3.2	Jumlah Rumah Tangga dengan Tingkat Kesejahteraan Sosial Desil 1 s/d Desil 4 per Kecamatan/Kelurahan/Desa di Kabupaten Cianjur -----	3-10
Tabel 3.3	Jumlah Individu Berdasarkan Kelompok Usia dan Jumlah Kelamin per Kelurahan di Kabupaten Cianjur -----	3-12
Tabel 3.4	Partisipasi Sekolah Anak Bersekolah dan Tidak Bersekolah Usia 7-18 Tahun per Kelurahan di Kabupaten Cianjur -----	3-14
Tabel 3.5	Jumlah Kepala Rumah Tangga yang Bekerja dan Tidak Bekerja Menurut Kelompok Usia diatas 15 Tahun per Kelurahan di Kabupaten Cianjur -----	3-15
Tabel 3.6	Status Kedudukan Dalam Pekerjaan Utama (Individu Usia Produktif 15-64 Tahun) -----	3-17
Tabel 3.7	Masalah Kemiskinan Konsumsi -----	3-27
Tabel 3.8	Masalah Kemiskinan Bidang Ketenagakerjaan -----	3-35
Tabel 3.9	Masalah Kemiskinan Bidang Kesehatan -----	3-44
Tabel 3.10	Masalah Kemiskinan Bidang Pendidikan -----	3-66
Tabel 3.11	Masalah Kemiskinan Bidang Infrastruktur Dasar -----	3-79
Tabel 4.1	Parameter Bidang Kemiskinan Konsumsi -----	4-2
Tabel 4.2	Parameter Bidang Kemiskinan Ketenagakerjaan -----	4-5
Tabel 4.3	Parameter Bidang Kemiskinan Kesehatan -----	4-7
Tabel 4.4	Parameter Bidang Kemiskinan Pendidikan -----	4-10
Tabel 4.5	Parameter Bidang Kemiskinan Infrastruktur Dasar -----	4-13
Tabel 4.6	APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2020-2023 -----	4-17
Tabel 4.7	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2023 -----	4-18
Tabel 4.8	Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Cianjur Tahun 2023 --	4-19
Tabel 4.9	Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Cianjur Menurut Program Tahun 2023 -----	4-19
Tabel 4.10	Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Cianjur Menurut OPD Penyelenggara Tahun 2023 -----	4-21
Tabel 4.11	Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Cianjur Menurut Strategi dan OPD Penyelenggara Tahun 2023 -----	4-21
Tabel 4.12	Distribusi Anggaran Per Kelompok Program Pengentasan Kemiskinan Tahun 2023 -----	4-24
Tabel 4.13	Faktor Pendorong dan Penghambat -----	4-27
Tabel 4.14	Program Pendukung Penurunan Kemiskinan Tahun 2025 -----	4-40
Tabel 4.15	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Paket Pekerjaan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 -----	4-43
Tabel 4.16	Pekerjaan Strategis Penanggulangan Kemiskinan Terinterasi Dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 -----	4-49
Tabel 4.17	Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029 -----	4-51
Tabel 4.18	Indikator dan Target Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029 -----	4-56





DAFTAR GAMBAR

Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029

Gambar 1.1	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Cianjur dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 (Persen), (BPS, 2023) -----	I-2
Gambar 1.2	Jumah Penduduk Miskin Kabupaten Cianjur dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 (Jiwa), (BPS Provinsi Jawa Barat, 2024) -----	I-2
Gambar 1.3	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten Cianjur dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023 (Persen), (BPS Provinsi Jawa Barat dan ** Kemenko PMK, 2024)-----	I-3
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Cianjur -----	2-3
Gambar 2.2	Peta Topografi Kabupaten Cianjur -----	2-7
Gambar 2.3	Peta Kelerengan Kabupaten Cianjur -----	2-8
Gambar 2.4	Peta Jenis Tanah Kabupaten Cianjur -----	2-12
Gambar 2.5	Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Cianjur -----	2-18
Gambar 2.6	Peta Tutupan Lahan Kabupaten Cianjur -----	2-20
Gambar 2.7	Peta Bahaya Bencana Tsunami Kabupaten Cianjur -----	2-24
Gambar 2.8	Peta Bahaya Bencana Gerakan Tanah Kabupaten Cianjur-----	2-26
Gambar 2.9	Peta Bahaya Bencana Bencana Gempa Bumi Kabupaten Cianjur -----	2-33
Gambar 2.10	Peta Bahaya Bencana Letusan Gunung Api Kabupaten Cianjur-----	2-34
Gambar 2.11	Peta Bahaya Bencana Tanah Longsor Kabupaten Cianjur-----	2-35
Gambar 2.12	Peta Bahaya Bencana Cuaca Ekstrem Kabupaten Cianjur-----	2-38
Gambar 2.13	Peta Bahaya Bencana Kekeringan Kabupaten Cianjur-----	2-41
Gambar 2.14	Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023 -----	2-44
Gambar 2.15	Trend Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Cianjur Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023-----	2-50
Gambar 2.16	Trend Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Cianjur Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023-----	2-51
Gambar 2.17	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023-----	2-52



LAPORAN AKHIR

Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029

Gambar 3.1	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Cianjur dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 (Persen) -----	3-3
Gambar 3.2	Jumah Penduduk Miskin Kabupaten Cianjur dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 (Jiwa) -----	3-3
Gambar 3.3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2019-2023 -----	3-5
Gambar 3.4	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2019-2023 -----	3-6
Gambar 3.5	Garis Kemiskinan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2019-2023 -----	3-6
Gambar 3.6	Garis Kemiskinan Kabupaten Cianjur, Kabupaten yang Berbatasan dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-----	3-7
Gambar 3.7	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten Cianjur dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023 (Persen) -----	3-8
Gambar 3.8	Grafik Posisi Relatif Penduduk Miskin Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional (%) Tahun 2023 -----	3-18
Gambar 3.9	Grafik Perkembangan Antar Waktu Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Cianjur (%) Tahun 2019-2023 -----	3-19
Gambar 3.10	Grafik Analisis Efektivitas Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Cianjur (%) Tahun 2019-2023-----	3-20
Gambar 3.11	Grafik Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Cianjur (%) Tahun 2019-2023-----	3-20
Gambar 3.12	Grafik Posisi Relatif Tingkat Kedalaman Penduduk Miskin (P1) Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2023-----	3-21
Gambar 3.13	Grafik Perkembangan Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023 -----	3-22
Gambar 3.14	Grafik Analisis Efektivitas Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) Tahun 2019-2023-----	3-23
Gambar 3.15	Grafik Tingkat Relevansi Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023 -----	3-23
Gambar 3.16	Grafik Posisi Relatif Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2023 -----	3-24
Gambar 3.17	Grafik Perkembangan Antar Waktu Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023-----	3-25
Gambar 3.18	Grafik Perkembangan Antar Waktu Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023-----	3-26
Gambar 3.19	Grafik Relevansi Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2019-2023 -----	3-27
Gambar 3.20	Grafik Posisi Relatif Pengangguran Terbuka Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2019-2023 -----	3-29
Gambar 3.21	Grafik Perkembangan Antar Waktu Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023-----	3-30

Gambar 3.22	Grafik Perkembangan Antar Waktu Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023 -----	3-30
Gambar 3.23	Grafik Analisis Relevansi Pengangguran Terbuka Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023 -----	3-31
Gambar 3.24	Grafik Posisi Relatif Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2019-2023 -----	3-32
Gambar 3.25	Grafik Perkembangan Antar Waktu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Kabupaten Cianjur, Tahun 2019-2023 -----	3-33
Gambar 3.26	Grafik Efektivitas Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Kabupaten Cianjur, Tahun 2019-2023 -----	3-33
Gambar 3.27	Grafik Relevansi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2019-2023-----	3-34
Gambar 3.28	Grafik Perkembangan Antar Waktu Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023 -----	3-36
Gambar 3.29	Grafik Analisis Efektivitas Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023 -----	3-37
Gambar 3.30	Grafik Perkembangan Antar Waktu Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023 -----	3-38
Gambar 3.31	Grafik Analisis Efektivitas Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023 -----	3-39
Gambar 3.32	Grafik Perkembangan Antar Waktu Angka Harapan Hidup (tahun) Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023-----	3-40
Gambar 3.33	Grafik Perkembangan Antar Waktu Angka Harapan Hidup (tahun) Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023-----	3-40
Gambar 3.34	Grafik Relevansi Angka Harapan Hidup Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023 -----	3-41
Gambar 3.35	Grafik Perkembangan Antar Waktu Stunting Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023 -----	3-42
Gambar 3.36	Grafik Efektivitas Intervensi Stunting Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023---	3-42
Gambar 3.37	Grafik Relevansi Perkembangan Antar Waktu Stunting Kabupaten Cianjur dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2023 -----	3-43
Gambar 3.38	Grafik Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 -----	3-43
Gambar 3.39	Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022 -----	3-46
Gambar 3.40	Grafik Efektivitas Angka Partisipasi Kasar SD/MI Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022 -----	3-46
Gambar 3.41	Grafik Analisa Relevansi Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022 -----	3-47
Gambar 3.42	Grafik Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Pprovinsi Jawa Barat Tahun 2022 -----	3-48



LAPORAN AKHIR

Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029

Gambar 3.43	Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022	3-49
Gambar 3.44	Grafik Efektivitas Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022	3-50
Gambar 3.45	Grafik Relevansi Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022	3-50
Gambar 3.46	Grafik Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022	3-51
Gambar 3.47	Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kabupaten Cianjur Tahun 2022	3-52
Gambar 3.48	Grafik Efektivitas Angka Partisipasi Kasar SMA/MA Kabupaten Cianjur Tahun 2022	3-52
Gambar 3.49	Grafik Relevansi Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022	3-53
Gambar 3.50	Grafik Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022	3-54
Gambar 3.51	Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022	3-54
Gambar 3.52	Grafik Efektivitas Angka Partisipasi Murni SD/MI Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022	3-56
Gambar 3.53	Grafik Analisa Relevansi Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022	3-56
Gambar 3.54	Grafik Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Pprovinsi Jawa Barat Tahun 2022	3-57
Gambar 3.55	Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022	3-57
Gambar 3.56	Grafik Efektivitas Angka Partisipasi Kasar SMP/MtsKabupaten Cianjur Tahun 2018-2022	3-58
Gambar 3.57	Grafik Relevansi Angka Partisipasi Murni (APK) SMP/MTs (%) Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022	3-59
Gambar 3.58	Grafik Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022	3-60
Gambar 3.59	Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022	3-60
Gambar 3.60	Grafik Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022	3-61
Gambar 3.61	Grafik Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022	3-62
Gambar 3.62	Grafik Posisi Relatif Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	3-63
Gambar 3.63	Grafik Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2021	3-64



LAPORAN AKHIR

Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029

Gambar 3.64	Grafik Efektivitas Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2023 -----	3-64
Gambar 3.65	Grafik Relevansi Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2023 -----	3-65
Gambar 3.66	Grafik Posisi Relatif Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak (%) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 -----	3-67
Gambar 3.67	Grafik Perkembangan Antar Waktu Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak (%) Ksupaten Cianjur Tahun 2017-2021	3-68
Gambar 3.68	Grafik Efektifitas Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak (%) Kabupaten Cianjur Tahun 2017-2021-----	3-68
Gambar 3.69	Grafik Relevansi Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak (%) Kabupaten Cianjur Tahun 2017-2021-----	3-69
Gambar 3.70	Grafik Posisi Relatif Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak (%) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-----	3-70
Gambar 3.71	Grafik Perkembangan Antar Waktu Persentase Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2023 -----	3-71
Gambar 3.72	Grafik Perkembangan Antar Waktu Persentase Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2023 -----	3-71
Gambar 3.73	Grafik Perkembangan Antar Waktu Persentase Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2023 -----	3-72
Gambar 3.74	Grafik Posisi Relatif Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan dari Listrik (%) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 -----	3-73
Gambar 3.75	Grafik Perkembangan Antar Waktu Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan dari Listrik (%) Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2023 -----	3-74
Gambar 3.76	Grafik Efektivitas Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan dari Listrik (%) Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2023-----	3-74
Gambar 3.77	Grafik Relevansi Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan dari Listrik (%) Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2023-----	3-75
Gambar 3.78	Grafik Posisi Relatif Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau (%) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 -----	3-76
Gambar 3.79	Grafik Perkembangan Antar Waktu RT Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau di Kabupaten Cianjur Tahun 2023 -----	3-77
Gambar 3.80	Grafik Efektivitas Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau di Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023 -----	3-78
Gambar 3.81	Grafik Efektivitas Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau di Kabupaten Cianjur, Provinsi, dan Nasional Tahun 2019-2023-----	3-78
Gambar 3.82	Produktivitas Padi Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023 -----	3-80
Gambar 3.83	Produktivitas Padi Per Kecamatan Tahun 2023-----	3-81
Gambar 3.84	Produksi Telur Ayam Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2023 -----	3-81

LAPORAN AKHIR

Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029

Gambar 3.85	Produksi Telur Ayam Kabupaten Cianjur dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 -----	3-82
Gambar 3.86	Produksi Ayam Ras Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2023 -----	3-82
Gambar 3.87	Produksi Ayam Ras Kabupaten Cianjur dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023-----	3-83
Gambar 3.88	Sebaran Rasio Sarana Prasarana Penyedia Pangan berdasarkan Prioritas Tahun 2019 -----	3-84
Gambar 3.89	Grafik Rasio Sarana Prasarana Penyedia Pangan Tahun 2019 -----	3-84
Gambar 4.1	Analisis Intervensi Bidang Kemiskinan Konsumsi-----	4-3
Gambar 4.2	Analisis Intervensi Bidang Kemiskinan Ketenagakerjaan -----	4-5
Gambar 4.3	Analisis Intervensi Bidang Kemiskinan Kesehatan -----	4-8
Gambar 4.4	Analisis Intervensi Bidang Kemiskinan Pendidikan -----	4-11
Gambar 4.5	Analisis Intervensi Bidang Kemiskinan Infrastruktur Dasar -----	4-14
Gambar 4.6	Analisis Intervensi Bidang Kemiskinan Ketahanan Pangan-----	4-16
Gambar 4.7	Program Pengentasan Kemiskinan-----	4-23
Gambar 4.8	Persentase Distribusi Anggaran Per Kelompok Program Pengentasan Kemiskinan Tahun 2023 -----	4-26
Gambar 4.9	Realisasi dan Target Capaian Presentase Kemiskinan Tahun 2019-2029 -	4-53
Gambar 4.10	Realisasi dan Target Capaian Presentase Kemiskinan Ekstrim Tahun 2019-2029-----	4-54



BAB 1

PENDAHULUAN

Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029

1.1 LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang atau kelompok tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Di banyak negara, kemiskinan bukan hanya hasil dari kurangnya pendapatan, tetapi juga ketimpangan akses terhadap kesempatan, pendidikan yang rendah, pengangguran, serta kurangnya dukungan sosial. Situasi ini diperburuk oleh masalah struktural seperti diskriminasi, korupsi, dan ketimpangan distribusi kekayaan. Akibatnya, masyarakat miskin seringkali terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit diputus, karena terbatasnya kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dan akses terhadap layanan yang dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan. Dengan demikian, penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan holistik yang mencakup kebijakan ekonomi, pendidikan, dan akses kesehatan yang berkeadilan.

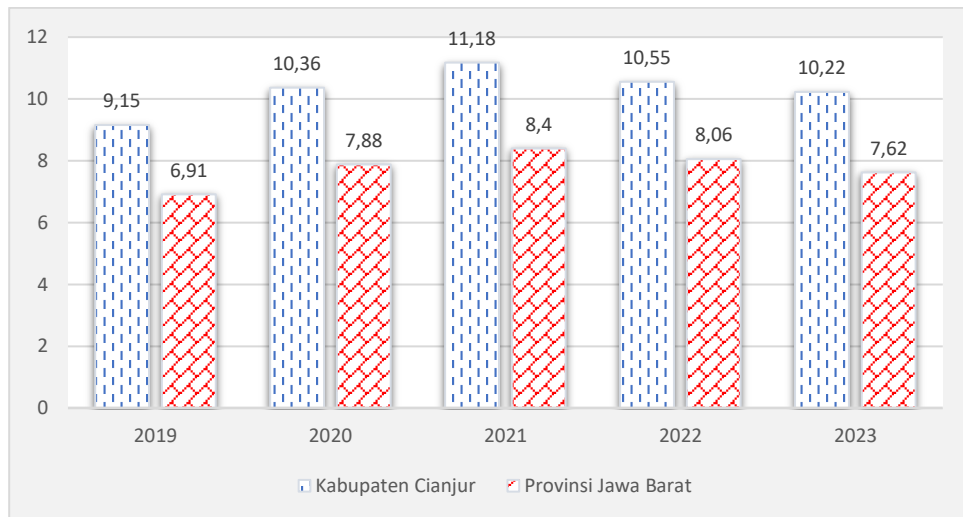
Pandemi Covid-19 yang terjadi pada Tahun 2019 sampai dengan awal Tahun 2023 yang menghantam seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia, telah menimbulkan permasalahan dan tantangan sosialekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hasil penelitian dan laporan yang dipublikasikan menyebutkan bahwa pandemi ini berdampak besar pada pelambatan ekonomi, peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran, penurunan kualitas pendidikan dan guncangan sosial-ekonomi lainnya.

Pada 2019 sampai 2023 terjadi fluktuasi tingkat kemiskinan di Kabupaten Cianjur. Sebagai dampak Pandemi COVID-19, tahun 2019 sampai dengan 2021 persentase penduduk miskin di Kabupaten Cianjur mengalami peningkatan sebesar 2,03 persen dan mengalami penurunan sebesar 0,96 persen menjadi 10,22 persen pada tahun 2023 seiring dengan menurunnya kasus covid-19 dan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Covid-19 di Indonesia (Gambar 1.1). Kondisi ini selaras dengan kondisi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat yang mengalami penurunan kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, yaitu 7,62 persen pada tahun 2023.



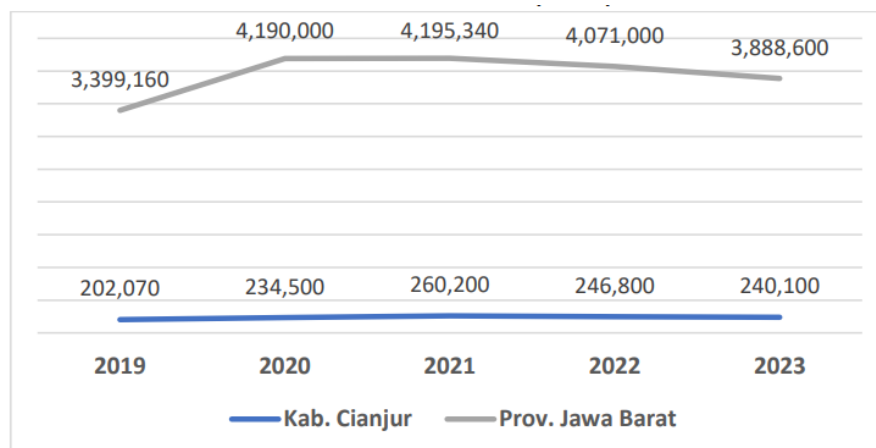
LAPORAN AKHIR

Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029



Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Cianjur dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 (Persen), (BPS, 2023)

Berdasarkan Gambar 1.2 terlihat bahwa tahun 2019 sampai tahun 2023 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cianjur mengalami penurunan sebesar 6.700 jiwa atau berjumlah 240.100 jiwa dari tahun sebelumnya, bila melihat kondisi jumlah penduduk miskin ditingkat Provinsi Jawa Barat, maka 6,17 persen penduduk miskin di Jawa Barat berada di wilayah Kabupaten Cianjur.



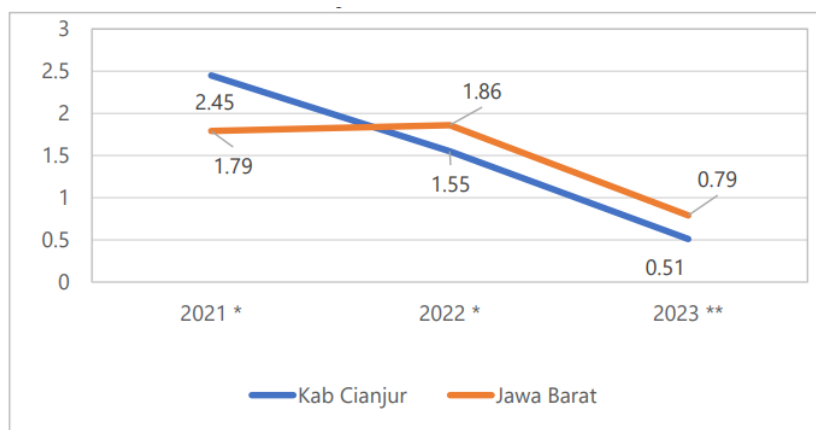
Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Cianjur dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 (Jiwa), (BPS Provinsi Jawa Barat, 2024)

Berdasarkan komparasi infografik persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin, capaian Kabupaten Cianjur masih diatas rata-rata Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, perlu upaya sistematis penanggulangan kemiskinan yang dikoordinasikan oleh

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Cianjur secara simultan dan terukur dalam rangka mencapai target Indikator Kinerja Daerah.

Selain kemiskinan umum, kemiskinan ekstrem juga menjadi permasalahan utama yang ada di Kabupaten Cianjur dan menjadi agenda prioritas pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah. Pada bulan Agustus 2022, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menetapkan wilayah prioritas kemiskinan ekstrem, dimana Kabupaten Cianjur termasuk didalamnya bersama 4 Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Jawa Barat berdasarkan pendekatan penargetan geografis (*geographical targeting*).

Secara umum, kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem - setara dengan USD 1.9 PPP (*purchasing power parity*). Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan "*absolute poverty measure*" yang konsisten antar negara dan antar waktu. Berdasarkan data persentase penduduk miskin ekstrem, capaian angka miskin ekstrem di Kabupaten Cianjur mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2023 persentase penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Cianjur sebesar 0.51 persen dan berada dibawah garis rata-rata Provinsi Jawa Barat dengan persentase sebesar 0.79 persen. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, capaian persentase penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Cianjur mengalami penurunan sebesar 1.94 persen.



Gambar 1.3 Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten Cianjur dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023 (Persen), (BPS Provinsi Jawa Barat dan ** Kemenko PMK, 2024)

Upaya penanggulangan kemiskinan menuju *no poverty* atau menghilangkan kemiskinan ekstrem sesuai program pemerintah pusat menjadi lebih sulit. Terlebih potret kenaikan angka kemiskinan pasca pandemi di Kabupaten Cianjur menjadi signal yang harus direspon dengan segera. Kemiskinan masih menjadi isu strategis pembangunan baik nasional maupun internasional. Kemiskinan menjadi agenda utama dalam Sustainable Development Goals (SDGs) sesuai tema tujuan 1 (satu) yaitu No poverty. Sedangkan pada agenda



nasional, kemiskinan menjadi salah satu isu utama pembangunan sekaligus prioritas utama yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 dan rancangan 2025-2029. Selain itu, perlunya perencanaan yang matang melalui koordinasi lintas sektor untuk mengintegrasikan dan memaksimalkan seluruh sumber daya dan potensi yang ada sesuai kebutuhan dan kriteria permasalahan di lapangan.

Sesuai amanat Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, ada tujuh fungsi TKPK kabupaten/kota yaitu: (1) a. penyusunan RPKD dan rencana aksi kabupaten/kota; (2) koordinasi penyusunan rancangan RPKD kabupaten/kota di bidang Penanggulangan Kemiskinan; (3) koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan; (4) fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan; (5) penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan; (6) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan (7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota. Dokumen RPKD disusun oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang merupakan wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.

Untuk melaksanakan amanat tersebut serta sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam percepatan penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam sasaran pokok RPJPD Kabupaten Cianjur 2025-2045 yakni **“Terwujudnya masyarakat mandiri, sejahtera, mampu dan sesuai standar hidup yang layak”**, Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur perlu menyusun Rancangan Rencana penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029 berdasarkan latar belakang permasalahan kondisi dan capaian indikator kemiskinan, yang selanjutnya dijabarkan kedalam rencana aksi tahunan penanggulangan kemiskinan.

1.2 LANDASAN HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;



LAPORAN AKHIR

Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029

- e. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
- g. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
- h. Peraturan Presiden Nomor 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- i. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 15 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- j. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
- l. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
- n. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 - 2044
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
- q. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Bantuan Sosial Dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Cianjur.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari kegiatan penyusunan Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur adalah:

- 1) Sebagai referensi dalam memberikan arah dan pedoman bagi pemerintah daerah untuk menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai arus utama (mainstreaming) dalam penyusunan program kerja di daerah.
- 2) Sebagai pedoman dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan peran pemerintah, swasta, perguruan tinggi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cianjur.
- 3) Sebagai pedoman dalam menentukan target yang harus dicapai pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan

b. Tujuan

Tujuan dari kegiatan penyusunan Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur adalah:

- 4) Menggambarkan kondisi umum kemiskinan saat ini dan memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai 5 (lima) tahun kedepan;
- 5) Menegaskan komitmen dan mendorong sinergi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Cianjur;
- 6) Menjadi salah satu tolok ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

1.4 KELUARAN

Target luaran kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen RPKD Kabupaten Cianjur yang memuat:

- Analisa kebijakan penanggulangan kemiskinan.
- Strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
- Rencana aksi daerah penanggulangan kemiskinan.

1.5 RUANG LINGKUP

1.5.1 Lingkup Wilayah

Ruang lingkup kegiatan meliputi wilayah administratif Kabupaten Cianjur. Kabupaten Cianjur berada di tengah Provinsi Jawa Barat, dengan jarak sekitar 65 Km dari Ibu Kota Provinsi Jawa Barat (Bandung) dan 120 Km dari Ibu Kota Negara (Jakarta). Secara geografis Kabupaten Cianjur terletak pada koordinat 106o 42' – 107o 25' Bujur Timur dan 6o 21' – 7o

25' Lintang Selatan, dengan rentang ketinggian 7 – 2.962 mdpl dan kemiringan rata-rata 0 – 40%. Batas-batas wilayah meliputi:

- Sebelah Utara : Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta;
- Sebelah Timur : Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Garut;
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia;
- Sebelah Barat : Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor;

Secara administrasi pemerintahan, jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Cianjur tercatat sebanyak 32 Kecamatan, 354 desa dan 6 kelurahan, serta mencakup 2.751 Rukun Warga (RW) dan 10.402 Rukun Tetangga (RT) dengan luas wilayah 363.192 ha. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Cidaun dengan luas 29.773,77 ha (8,20%), sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Cianjur dengan luas 2.646,48 ha (0,73%).

1.5.2 Lingkup Materi

Ruang lingkup materi meliputi mendiskripsikan tentang kondisi kemiskinan konsumsi dan non konsumsi periode lima tahun terakhir; melakukan analisis dimensi kemiskinan dalam menentukan prioritas kebijakan penanggulangan kemiskinan; menentukan lokasi prioritas penanggulagn kemiskinan; memanfaatkan data mikro untuk menentukan sasaran program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan; melakukan kajian kebijakan nasional dan daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan; melakukan kajian anggaran daerah dalam penanggulangan kemiskinan; dan menyusun isu strategis dan rencana aksi daerah dalam penanggulangan kemiskinan;

1.6 PENGERTIAN

- **Kemiskinan** adalah suatu kondisi ketidakmampuan sosial dan ekonomi seseorang atau sekelompok orang untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- **Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin** jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
- **Garis Kemiskinan (GK)** mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan.
- **Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1)** merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.



Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

- **Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2)** memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

1.7 SISTEMATIKA

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang; dasar hukum; tujuan dan sasaran; ruang lingkup pekerjaan dan wilayah; serta sistematika laporan.

BAB II : KONDISI UMUM DAERAH

Berisikan kondisi fisik, kondisi sosial ekonomi serta kebijakan penanggulangan kemiskinan.

BAB III : PROFIL KEMISKINAN KABUPATEN CIANJUR

Membahas kondisi konsep kemiskinan, kondisi kemiskinan daerah, karakteristik permasalahan kemiskinan konsumsi, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, dan ketahanan pangan.

BAB IV : PROGRAM PRIORITAS

Bab ini berisikan analisis determinasi kemiskinan, kondisi fiskal untuk penanggulanngan kemiskinan, serta strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

BAB V : PENUTUP

Memuat intisari kajian yang dihasilkan dan sejumlah rencana yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan kajian yang telah dilakukan.



BAB 2

KONDISI UMUM WILAYAH

Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029

2.1 KONDISI FISIK

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Cianjur terletak di Provinsi Jawa Barat dan memiliki luas wilayah sekitar 363.192,32 hektare, yang mencakup berbagai topografi seperti dataran rendah, perbukitan, dan pegunungan. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Sukabumi di utara, Kabupaten Bandung Barat dan Garut di timur, Samudera Hindia di selatan, serta Kabupaten Sukabumi di barat. Lokasi strategis ini menjadikan Cianjur sebagai wilayah dengan aksesibilitas yang baik, baik ke pusat provinsi maupun kawasan pesisir. Secara administratif, Kabupaten Cianjur terbagi menjadi 32 kecamatan, 354 desa, dan 6 kelurahan, dengan ibu kota kabupaten terletak di Kecamatan Cianjur.

Kabupaten Cianjur secara administratif berada di tengah Provinsi Jawa Barat, dengan jarak sekitar 65 Km dari Ibu Kota Provinsi Jawa Barat (Bandung) dan 120 Km dari Ibu Kota Negara (Jakarta). Secara administrasi pemerintahan, jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Cianjur tercatat sebanyak 32 Kecamatan, 360 Desa/Kelurahan, serta mencakup 2.751 Rukun Warga dan 10.402 Rukun Tetangga. Batas administrasi wilayah Kabupaten Cianjur dapat dilihat sebagai berikut:

- Sebelah utara : Berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta;
- Sebelah timur : Berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Garut;
- Sebelah selatan : Berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
- Sebelah barat : Berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor.

Luas Kabupaten Cianjur berdasarkan administrasi wilayah desa/kelurahan dapat dilihat pada tabel dan peta wilayah perencanaan pada Tabel 2.1 berikut.



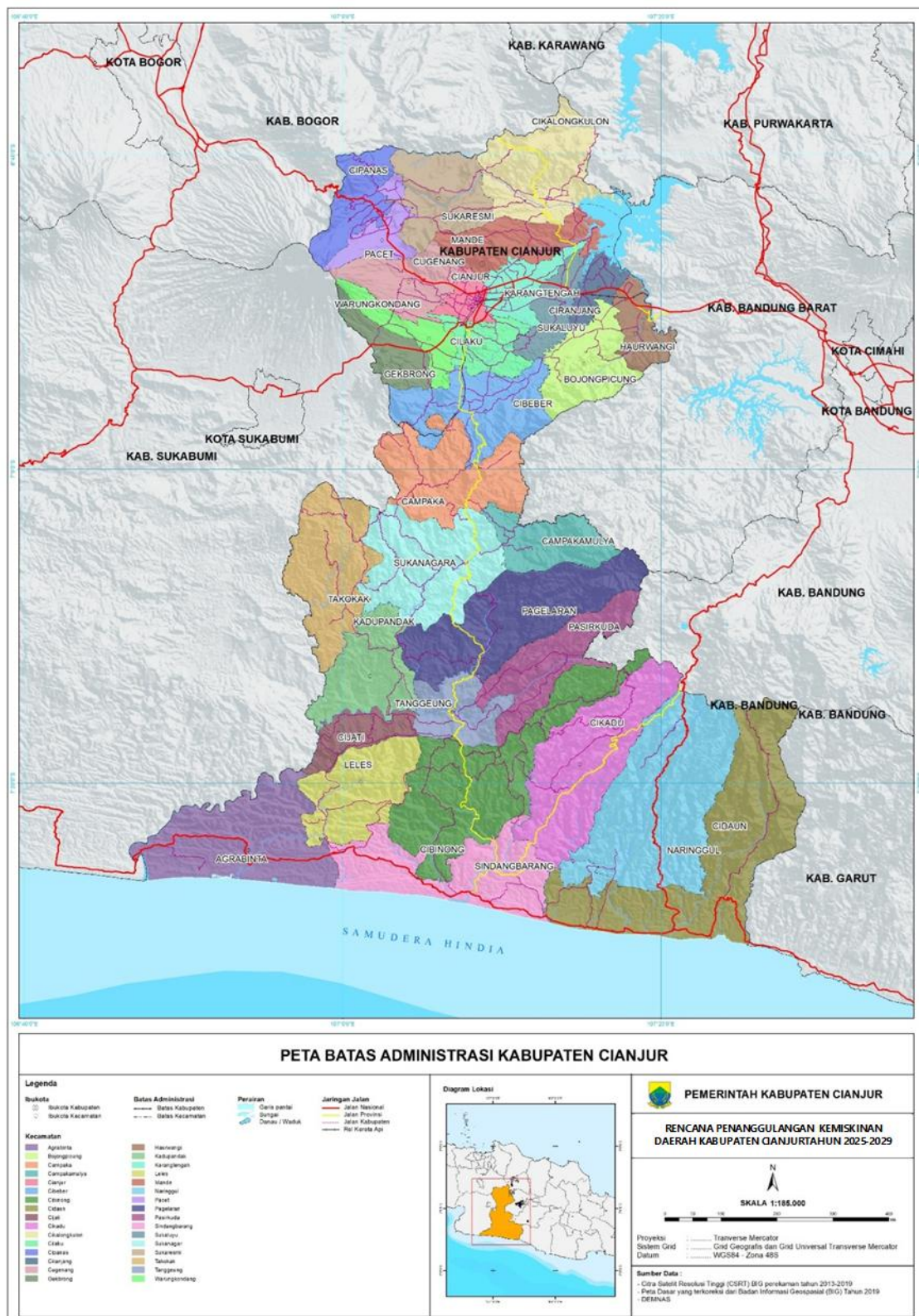
Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Cianjur

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Presentase (%)
1	Agrabinta	19.630,05	5,40
2	Bojongpicung	8.954,02	2,47
3	Campaka	14.163,06	3,90
4	Campakamulya	7.435,83	2,05
5	Cianjur	2.646,48	0,73
6	Cibeber	12.334,59	3,40
7	Cibinong	24.027,15	6,62
8	Cidaun	29.773,77	8,20
9	Cijati	4.869,58	1,34
10	Cikadu	19.500,36	5,37
11	Cikalongkulon	14.317,13	3,94
12	Cilaku	5.288,48	1,46
13	Cipanas	6.819,12	1,88
14	Ciranjang	3.409,62	0,94
15	Cugenang	7.647,78	2,11
16	Gekbrong	5.030,39	1,39
17	Haurwangi	4.590,97	1,26
18	Kadupandak	10.427,90	2,87
19	Karangtengah	4.847,71	1,33
20	Leles	11.478,69	3,16
21	Mande	9.431,73	2,60
22	Naringgul	28.763,80	7,92
23	Pacet	4.167,32	1,15
24	Pagelaran	20.139,59	5,55
25	Pasirkuda	10.517,72	2,90
26	Sindangbarang	15.859,59	4,37
27	Sukaluyu	4.776,75	1,32
28	Sukanagara	17.016,37	4,69
29	Sukaesmi	9.605,04	2,64
30	Takokak	14.549,86	4,01
31	Tanggeung	6.596,09	1,82
32	Warungkondang	4.569,77	1,26
Total		363.192,32	100

Sumber: Perhitungan Tematik Tahun, 2024

Kabupaten Cianjur merupakan Kabupaten yang terdiri dari tiga puluh dua (32) Kecamatan. Dilihat secara batas administrasi Kabupaten Cianjur diapit oleh 6 Kabupaten yaitu Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada peta wilayah kajian berikut ini.

Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029



Gambar 2.1 **Peta Batas Administrasi Kabupaten Cianjur**

Sumber : Pengolahan Data GIS pada Tahun 2024

2.1.1.1 Topografi

Elevasi (ketinggian) adalah beda tinggi suatu objek terhadap satu titik tertentu (datum). Datum ketinggian umumnya mengacu pada permukaan laut maupun permukaan geoid WGS-84 yang digunakan pada GPS (*Global Positioning System*). Dalam menggambarkan perbedaan ketinggian topografi di Kabupaten Cianjur, nilai elevasi dibagi ke dalam 5 kelas, yaitu: 0 – 200 meter; 200 – 500 meter; 500 – 1500 meter; 1500 – 3000 meter; dan >3000 meter. Berdasarkan pengklasifikasian tersebut, Kabupaten Cianjur didominasi ketinggian 0-200 meter, terkait topografi Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2.2 Elevasi Topografi Kabupaten Cianjur Menurut Kecamatan (Ha)

Kecamatan	Topografi (Ha)					Grand Total
	<200 m	> 3000 m	1500-3000 m	200 - 500 m	500 - 1500 m	
Agrabinta	9.369,46	4,77	928,46	5.140,16	4.192,44	19.635,28
Bojongpicung	3.319,52	4,24	2.153,57	807,87	2.668,83	8.954,02
Campaka	2.451,21	40,85	2.114,85	4.488,80	5.067,35	14.163,06
Campakamulya	884,69	2,13	707,88	2.811,05	3.030,08	7.435,83
Cianjur	2.342,28			277,16	27,04	2.646,48
Cibeber	4.548,13	8,47	1.584,30	2.562,18	3.631,51	12.334,59
Cibinong	4.420,58	260,90	3.562,19	8.118,36	7.665,13	24.027,15
Cidaun	8.215,57	305,74	6.579,53	6.027,53	8.645,39	29.773,77
Cijati	2.934,89	3,07	136,62	1.327,09	467,92	4.869,58
Cikadu	2.334,18	494,67	5.117,08	4.947,03	6.607,39	19.500,36
Cikalongkulon	4.442,92	27,07	1.254,97	4.440,98	4.151,18	14.317,13
Cilaku	4.715,42		2,93	478,58	91,56	5.288,48
Cipanas	1.401,01	149,76	1.741,12	1.688,02	1.839,21	6.819,12
Ciranjang	3.299,65		0,05	98,23	11,69	3.409,62
Cugenang	2.949,23	38,13	1.455,31	1.688,57	1.516,54	7.647,78
Gekbrong	2.114,44	20,47	979,63	883,18	1.032,66	5.030,39
Haurwangi	2.478,67	46,88	639,80	640,26	785,37	4.590,97
Kadupandak	4.359,66	0,16	250,66	4.014,60	1.802,83	10.427,90
Karangtengah	4.828,49			18,58	0,64	4.847,71
Leles	1.627,73	17,79	1.591,77	3.958,40	4.283,00	11.478,69
Mande	5.056,49	0,91	1.017,73	1.540,31	1.816,29	9.431,73
Naringgul	2.160,05	989,81	8.338,94	6.365,67	10.909,33	28.763,80
Pacet	1.874,65	19,37	665,20	893,96	714,14	4.167,32
Pagelaran	4.352,91	74,22	2.742,49	6.298,99	6.670,98	20.139,59
Pasirkuda	1.309,18	180,82	1.973,92	3.096,76	3.957,05	10.517,72
Sindangbarang	11.364,42	3,14	458,12	2.625,57	1.408,34	15.859,59
Sukaluyu	4.300,57		0,06	405,06	71,05	4.776,75
Sukanagara	2.754,97	10,07	658,53	7.740,46	5.852,34	17.016,37
Sukaresmi	2.507,40	10,67	789,91	3.911,22	2.385,84	9.605,04
Takokak	2.485,66	0,01	269,56	7.730,57	4.064,05	14.549,86
Tanggeung	2.317,61	84,01	576,78	2.269,30	1.348,38	6.596,09
Warungkondang	2.905,86	11,94	585,01	519,77	547,19	4.569,77
Grand Total	116.427,49	2.810,06	48.876,96	97.814,28	97.262,76	363.191,55

Sumber : Hasil Interpretasi Citra, 2024



2.1.1.2 Kelerengan

Pada umumnya daerah di Kabupaten Cianjur berada di lereng kurang dari 8% seluas 116.411,57 hektar. Setelah itu daerah yang berada pada lereng 8 % - 15 % seluas 97.820,96 hektar. Daerah yang memiliki lereng antara 16 % - 25 % seluas 97.265,57 hektar. Sementara daerah yang lerengnya lebih dari 40 % sekitar 2.809,93 hektar pada Tabel dan Gambar berikut. Adapun karakteristik kelerengan yang terdapat di Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut:

a. Dataran

Merupakan daerah dengan kemiringan lereng yang berkisar antara 0 – 8 % yang menempati daerah pantai, daerah alluvial sungai dan dataran lahar. Daerah yang termasuk satuan morfologi ini mempunyai tingkat erosi yang rendah yang terdistribusi pada daerah Sukaresmi, Cikalongkulon, Cianjur, Ciranjang, Bojong Picung, sebelah Utara Cibeber, Pagelaran, Tanggeung, Kadupandak, dan sepanjang Pantai Selatan mulai dari Agrabinta sampai Cidaun.

b. Perbukitan Berelief Halus

Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang halus dengan kemiringan lereng 8 – 15% yang terdapat pada daerah Utara Pacet, Warungkondang, Takokak sebelah Barat, Cidaun, dan sebelah Timur Sindangbarang.

c. Perbukitan Berelief Sedang

Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang sedang dengan kemiringan lereng 15 – 25% yang tersebar pada daerah Utara Mande, sebelah selatan Kadupandak, dan sebelah selatan Cibeber.

d. Perbukitan Berelief Agak Kasar

Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang agak kasar dengan kemiringan lereng 24 – 40% yang terdapat pada daerah Takokak, bagian Utara dan Selatan Kadupandak, Bagian Utara Sukanagara, Agrabinta, Sebelah Utara Cidaun, Sebelah Selatan Pagelaran, dan Sebelah Barat Tanggeung.

e. Perbukitan Berelief Kasar

Bentuk permukaan pada bagian ini adalah bergelombang kasar – sangat kasar dengan kemiringan lereng > 40% yang terdistribusi pada daerah Selatan Sukaresmi, sebelah selatan Bojongpicung, Sukanagara, Gunung Buleud, sebelah timur Takokak dan Gunung Sambul. Timur Pagelaran, bagian Selatan dan Utara Kadupandak serta Karangtengah yang membentuk gawir gerakan tanah yang hampir tegak lurus. Daerah lain yang memiliki bentuk permukaan seperti ini adalah daerah Gunung Pangrango, Pasir Besar, Pasir Taman sampai Pasir Gambir, Pasir Negrok, Gunung Pondokcabang, Gunung

Berenuk, dan Pasir Gook. Dilihat dari ketinggian yang ada di Kabupaten Cianjur, pada umumnya ketinggiannya berada di angka < 200 meter dengan luas sebesar 116.422,26 hektar.

Tabel 2.3 Kemiringan Lereng Kabupaten Cianjur Menurut Kecamatan

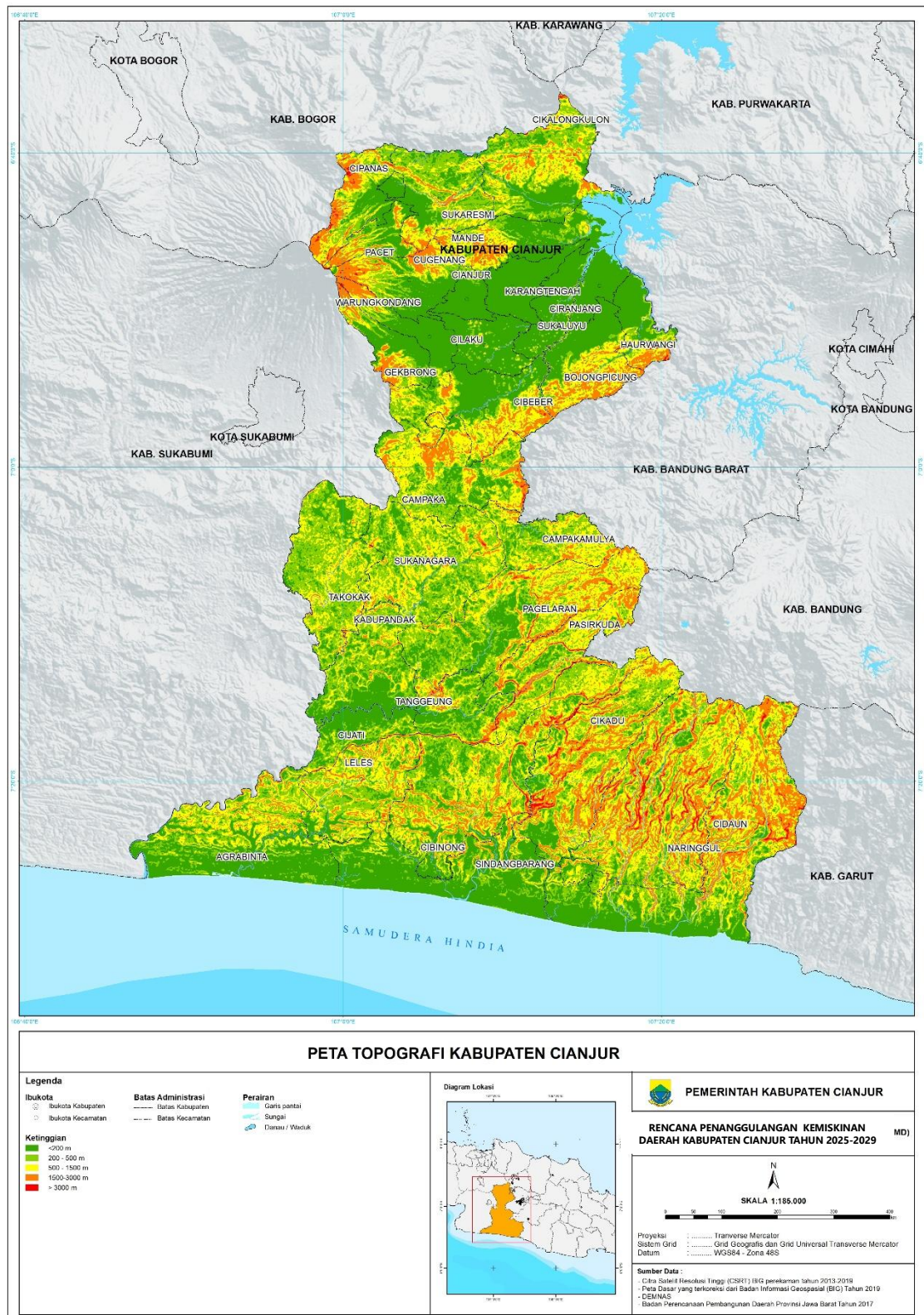
Kecamatan	Kemiringan Lereng (Ha)					
	< 8 %	> 40 %	16 % - 25 %	26 % - 40 %	8 % - 15 %	Grand Total
Agrabinta	9.366,43	4,77	4.193,78	928,54	5.141,77	19.635,28
Bojongpicung	3.321,06	4,24	2.667,38	2.152,65	808,69	8.954,02
Campaka	2.452,07	40,85	5.066,84	2.115,37	4.487,93	14.163,06
Campakamulya	885,73	2,09	3.028,52	707,28	2.812,21	7.435,83
Cianjur	2.341,70		27,31		277,47	2.646,48
Cibeber	4.549,43	8,47	3.631,15	1.583,60	2.561,95	12.334,59
Cibinong	4.419,54	261,41	7.665,12	3.561,47	8.119,61	24.027,15
Cidaun	8.209,38	305,61	8.648,63	6.580,48	6.029,68	29.773,77
Cijati	2.938,62	3,02	466,88	134,16	1.326,90	4.869,58
Cikadu	2.333,27	495,26	6.606,99	5.118,49	4.946,36	19.500,36
Cikalongkulon	4.440,86	27,14	4.152,18	1.255,76	4.441,19	14.317,13
Cilaku	4.715,47		91,56	2,93	478,53	5.288,48
Cipanas	1.400,33	149,73	1.839,67	1.741,27	1.688,12	6.819,12
Ciranjang	3.299,07		11,76	0,05	98,74	3.409,62
Cugenang	2.947,28	38,17	1.517,35	1.456,22	1.688,76	7.647,78
Gekbrong	2.115,15	20,55	1.032,04	979,77	882,87	5.030,39
Haurwangi	2.480,19	46,82	784,65	639,21	640,11	4.590,97
Kadupandak	4.357,89	0,16	1.803,20	250,70	4.015,95	10.427,90
Karangtengah	4.828,43		0,66		18,63	4.847,71
Leles	1.626,34	17,84	4.283,40	1.593,60	3.957,51	11.478,69
Mande	5.055,27	0,91	1.816,40	1.017,75	1.541,40	9.431,73
Naringgul	2.160,39	989,83	10.909,12	8.339,67	6.364,80	28.763,80
Pacet	1.874,87	19,37	714,35	664,55	894,19	4.167,32
Pagelaran	4.352,63	74,26	6.671,14	2.741,71	6.299,85	20.139,59
Pasirkuda	1.308,73	180,75	3.957,89	1.975,08	3.095,28	10.517,72
Sindangbarang	11.360,49	3,15	1.410,06	459,16	2.626,73	15.859,59
Sukaluyu	4.302,58		70,28	0,05	403,83	4.776,75
Sukanagara	2.754,51	10,07	5.853,37	658,10	7.740,32	17.016,37
Sukaesmi	2.508,84	10,67	2.385,26	789,30	3.910,97	9.605,04
Takokak	2.485,28	0,01	4.063,64	270,17	7.730,76	14.549,86
Tanggeung	2.319,07	82,95	1.348,20	575,55	2.270,32	6.596,09
arungkondang	2.905,95	11,86	546,78	585,64	519,53	4.569,77
Grand Total	116.416,80	2.809,93	97.265,57	48.878,28	97.820,96	363.191,55

Sumber : Hasil Interpretasi Citra, 2024



LAPORAN AKHIR

Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029

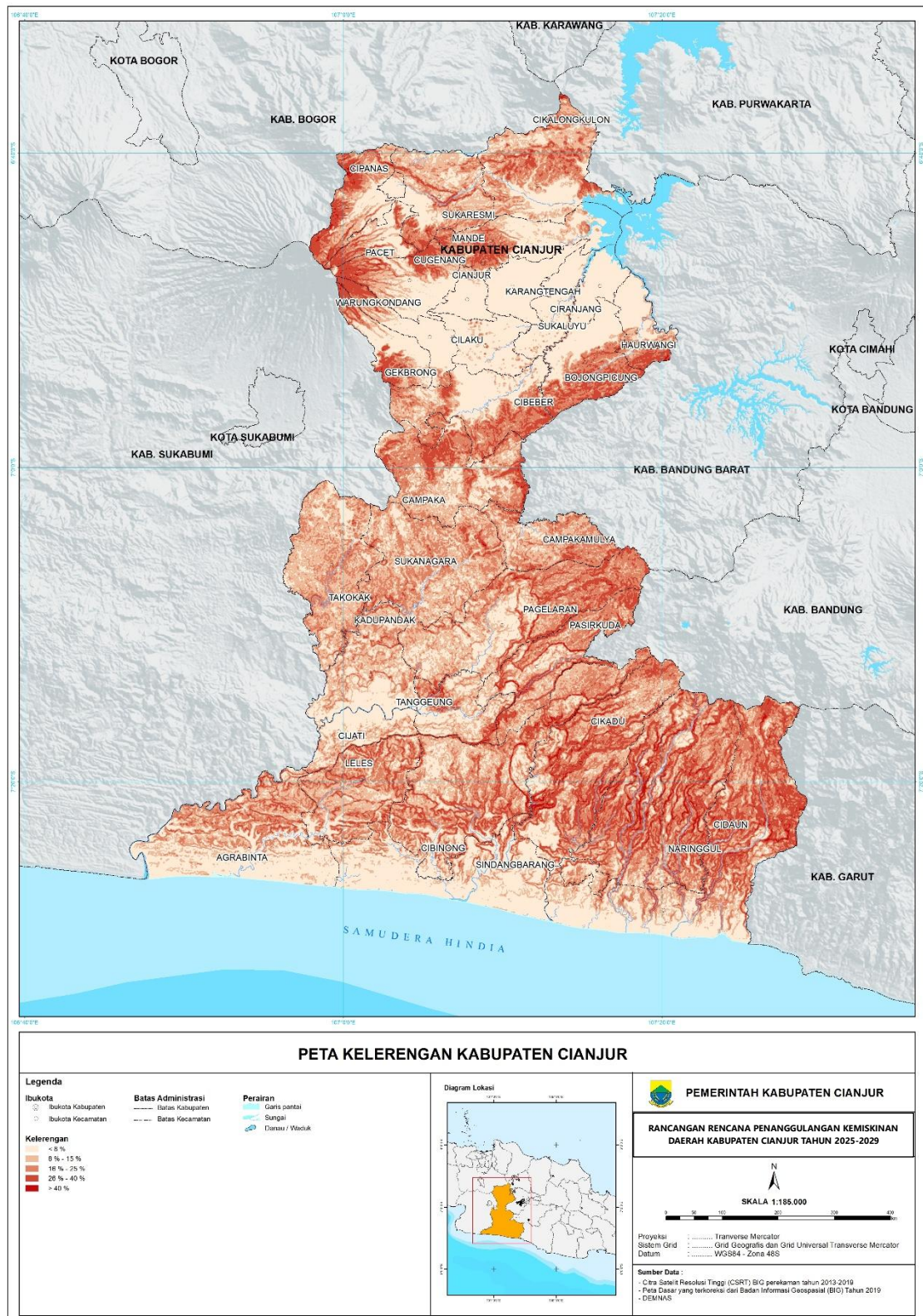


Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Cianjur

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sistem Informasi Geospasial, Tahun 2024

LAPORAN AKHIR

Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029



Gambar 2.3 Peta Keterlegan Kabupaten Cianjur

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sistem Informasi Geospasial, Tahun 2024



2.1.1.3 Morfologi

Adapun karakteristik morfologi yang terdapat di Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut :

1. Dataran : Merupakan daerah dengan kemiringan lereng yang berkisar antara 0 - 8 % yang menempati daerah pantai, daerah alluvial sungai dan dataran lahar. Daerah yang termasuk satuan morfologi ini mempunyai tingkat erosi yang rendah yang terdistribusi pada daerah Sukaresmi, Cikalongkulon, Cianjur, Ciranjang, Bojong Picung, sebelah Utara Cibeber, Pagelaran, Tanggeung, Kadupandak, dan sepanjang Pantai Selatan mulai dari Agrabinta sampai Cidaun.
2. Perbukitan Berelief Halus: Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang halus dengan kemiringan lereng 8 - 15% yang terdapat pada daerah Utara Pacet, Warungkondang, Takokak sebelah Barat, Cidaun, dan sebelah Timur Sindangbarang.
3. Perbukitan Berelief Sedang: Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang sedang dengan kemiringan lereng 16 - 25% yang tersebar pada daerah Utara Mande, sebelah Selatan Kadupandak, dan sebelah Selatan Cibeber.
4. Perbukitan Berelief Agak Kasar: Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang agak kasar dengan kemiringan lereng 26 – 40% yang tersebar pada daerah Takokak, bagian Utara dan Selatan Kadupandak, bagian Utara Sukanagara, Agrabinta, sebelah Utara Cidaun, sebelah Selatan Pagelaran, dan sebelah Barat Tanggeung.
5. Perbukitan Berelief Kasar: Bentuk permukaan pada bagian ini adalah bergelombang kasar - sangat kasar dengan kemiringan lereng > 40 % yang terdistribusi pada daerah Selatan Sukaresmi, sebelah Selatan Bojong Picung, Sukanagara, Gunung Buleud, sebelah Timur Takokak dan Gunung Sambul. Timur Pagelaran, bagian Selatan dan Utara Kadupandak serta Karangtengah yang membentuk gawir gerakan tanah yang hampir tegak lurus. Daerah lain yang memiliki bentuk permukaan seperti ini adalah daerah Gunung Pangrango, Pasir Beser, Pasir Taman sampai Pasir Gambir, Pasir Negrog, Gunung Pondokcabang, Gunung Berenuk, dan Pasir Gook.

Tabel 2.4 Morfologi Kabupaten Cianjur Menurut Kecamatan

Kecamatan	Morfologi (Ha)					
	Agak Curam	Curam	Datar	Landai	Sangat Curam	Grand Total
Agrabinta	4.193,78	928,54	9.366,43	5.141,77	4,77	19.635,28
Bojongpicung	2.667,38	2.152,65	3.321,06	808,69	4,24	8.954,02
Campaka	5.066,84	2.115,37	2.452,07	4.487,93	40,85	14.163,06
Campakamulya	3.028,52	707,28	885,73	2.812,21	2,09	7.435,83
Cianjur	27,31		2.341,70	277,47		2.646,48
Cibeber	3.631,15	1.583,60	4.549,43	2.561,95	8,47	12.334,59
Cibinong	7.665,12	3.561,47	4.419,54	8.119,61	261,41	24.027,15



LAPORAN AKHIR

Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029

Kecamatan	Morfologi (Ha)					
	Agak Curam	Curam	Datar	Landai	Sangat Curam	Grand Total
Cidaun	8.648,63	6.580,48	8.209,38	6.029,68	305,61	29.773,77
Cijati	466,88	134,16	2.938,62	1.326,90	3,02	4.869,58
Cikadu	6.606,99	5.118,49	2.333,27	4.946,36	495,26	19.500,36
Cikalongkulon	4.152,18	1.255,76	4.440,86	4.441,19	27,14	14.317,13
Cilaku	91,56	2,93	4.715,47	478,53		5.288,48
Cipanas	1.839,67	1.741,27	1.400,33	1.688,12	149,73	6.819,12
Ciranjang	11,76	0,05	3.299,07	98,74		3.409,62
Cugenang	1.517,35	1.456,22	2.947,28	1.688,76	38,17	7.647,78
Gekbrong	1.032,04	979,77	2.115,15	882,87	20,55	5.030,39
Haurwangi	784,65	639,21	2.480,19	640,11	46,82	4.590,97
Kadupandak	1.803,20	250,70	4.357,89	4.015,95	0,16	10.427,90
Karangtengah	0,66		4.828,43	18,63		4.847,71
Leles	4.283,40	1.593,60	1.626,34	3.957,51	17,84	11.478,69
Mande	1.816,40	1.017,75	5.055,27	1.541,40	0,91	9.431,73
Naringgul	10.909,12	8.339,67	2.160,39	6.364,80	989,83	28.763,80
Pacet	714,35	664,55	1.874,87	894,19	19,37	4.167,32
Pagelaran	6.671,14	2.741,71	4.352,63	6.299,85	74,26	20.139,59
Pasirkuda	3.957,89	1.975,08	1.308,73	3.095,28	180,75	10.517,72
Sindangbarang	1.410,06	459,16	11.360,49	2.626,73	3,15	15.859,59
Sukaluyu	70,28	0,05	4.302,58	403,83		4.776,75
Sukanagara	5.853,37	658,10	2.754,51	7.740,32	10,07	17.016,37
Sukaesmi	2.385,26	789,30	2.508,84	3.910,97	10,67	9.605,04
Takokak	4.063,64	270,17	2.485,28	7.730,76	0,01	14.549,86
Tanggeung	1.348,20	575,55	2.319,07	2.270,32	82,95	6.596,09
Warungkondang	546,78	585,64	2.905,95	519,53	11,86	4.569,77
Grand Total	97.265,57	48.878,28	116.416,80	97.820,96	2.809,93	363.191,55

Sumber : Hasil Interpretasi Citra, 2024

2.1.1.4 Jenis Tanah

Jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Cianjur menurut klasifikasi Dudal dan Soepraptohardjo (1957 – 1961), terdiri dari tanah Aluvial, Regosol, Andosol, Grumosol, Mediteran dan Podsolik.

Karakteristik dan penyebaran jenis tanah tersebut adalah Tanah Aluvial, tersebar di Kecamatan Agrabinta, Kecamatan Cianjur, Cibeber, Kecamatan Cikalongkulon, Kecamatan Cilaku, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Mande, dan Kecamatan Sukaluyu.

Tanah Andosol terdapat di Kecamatan Campakamulya, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Cidaun, Kecamatan Cikadu, Kecamatan Cipanas, Kecamatan, Kecamatan Cugenang, Kecamatan Gekbrong, Kecamatan Pacet, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pasirkuda, dan Kecamatan Sukaesmi.

Tanah Grumosol terdapat di Kecamatan Bojongpicung, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cikalongkulon, Kecamatan Cilaku, Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Haurwangi, Kecamatan Kadupandak, Kecamatan Mande, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Sukaluyu, Kecamatan



LAPORAN AKHIR*Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029*

Sukanagara, Kecamatan Takokak, dan Kecamatan Tanggeung. Tanah Latosol terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Cianjur kecuali Kecamatan Ciranjang. Tanah Mediterania terdapat di Kecamatan Agrabinta.

Tanah Podsol Merah Kuning terdapat di Kecamatan Agrabinta, Kecamatan Campaka, Kecamatan Campakamulya, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Cidaun, Kecamatan Cijati, Kecamatan Cikadu, Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Haurwangi, Kecamatan Leles, Kecamatan Mande, Kecamatan Naringgul, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pasirkuda, Kecamatan Sindangbarang, Kecamatan Sukanagara, dan Kecamatan Tanggeung. Tanah Regosol tersebar di Kecamatan Cipanas, Kecamatan Cugenang, Kecamatan Gekbrong, Kecamatan Pacet, Kecamatan Sukaresmi, dan Kecamatan Warungkondang.

Tabel 2.5 Jenis Tanah di Kabupaten Cianjur

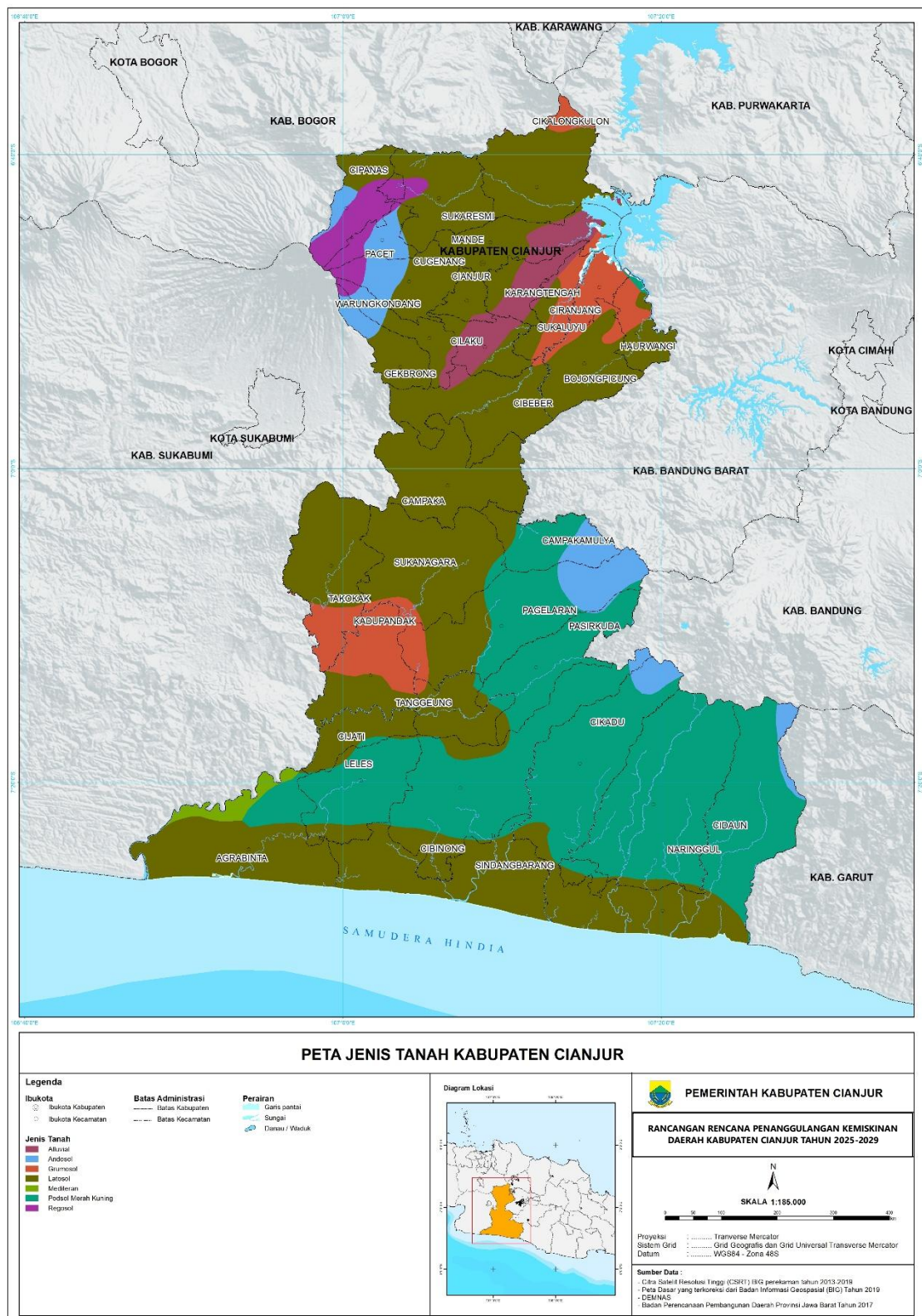
Kecamatan	Jenis Tanah (Ha)								Grand Total
	Alluvial	Andosol	Grumosol	Latosol	Mediteran	Podsol Merah Kuning	Regosol	Waduk/Danau/Situ	
Agrabinta	0,80			14.240,29	2.408,74	2.985,44			19.635,28
Bojongpicung			1.339,75	7.614,27					8.954,02
Campaka				14.156,97		6,09			14.163,06
Campakamulya		2.132,20		1.242,96		4.060,67			7.435,83
Cianjur	232,33			2.414,15					2.646,48
Cibeber	442,68		95,61	11.796,30					12.334,59
Cibinong		404,74		4.397,42		19.224,98			24.027,15
Cidaun		1.119,83		12.097,56		16.556,37			29.773,77
Cijati				4.595,07		274,51			4.869,58
Cikadu		1.618,16		1.235,61		16.646,58			19.500,36
Cikalongkulon	175,17		1.175,92	12.361,54				604,50	14.317,13
Cilaku	2.810,11		16,38	2.461,99					5.288,48
Cipanas		951,31		2.300,23			3.567,58		6.819,12
Ciranjang			3.086,76			24,06		298,81	3.409,62
Cugenang		2.053,79		4.732,00			861,99		7.647,78
Gekbrong		1.189,66		3.731,94			108,78		5.030,39
Haurwangi			1.530,76	2.856,07		177,39		26,75	4.590,97
Kadupandak			5.841,28	4.586,63					10.427,90
Karangtengah	3.173,54			1.674,17					4.847,71
Leles				1.852,69		9.626,00			11.478,69
Mande	2.894,30		361,54	5.098,97		75,03		1.001,89	9.431,73
Naringgul				1.674,00		27.089,80			28.763,80
Pacet		1.827,66		511,55			1.828,11		4.167,32
Pagelaran		4.552,33	1.656,66	5.222,76		8.707,84			20.139,59
Pasirkuda		122,99		670,53		9.724,21			10.517,72
Sindangbarang				15.367,65		491,94			15.859,59
Sukaluyu	456,83		2.475,07	1.693,48				151,37	4.776,75
Sukanagara			924,01	15.655,29		437,07			17.016,37
Sukaresmi		51,58		8.910,55			642,91		9.605,04
Takokak			3.144,34	11.405,52					14.549,86
Tanggeung			206,25	5.824,28		565,56			6.596,09
Warungkondang	492,07	995,95		2.787,86			293,89		4.569,77
Grand Total	10.677,83	17.020,20	21.854,32	185.170,33	2.408,74	116.673,56	7.303,26	2.083,31	363.191,55

Sumber : Hasil Interpretasi Citra, 2024



LAPORAN AKHIR

Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029



Gambar 2.4 Peta Jenis Tanah Kabupaten Cianjur

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sistem Informasi Geospasial, Tahun 2024



2.1.1.5 Geologi

Wilayah Kabupaten Cianjur pada umumnya terdiri dari sistem dataran, sistem perbukitan, dan sistem vulkan. Sistem dataran dijumpai di sekitar Kecamatan Cianjur dan Kecamatan Ciranjang serta di sepanjang jalur aliran sungai. Sistem perbukitan umumnya terdapat di wilayah bagian tengah dan selatan, sedangkan sistem vulkan terutama di bagian utara Kabupaten Cianjur yang merupakan lereng timur Gunung Gede. Sistem dataran terdiri dari dataran vulkan yang cukup luas di sebelah barat sampai Ciranjang serta dataran aluvial berupa cekungan dan teras sungai di sepanjang aliran Sungai Citarum, Sungai Cikundul, Sungai Cisokan, dan Sungai Cibuni. Dataran terbentuk dari bahan endapan sungai, breksi, dan lahar Gunung Gede yang bersifat basal dan intermediet. Sistem perbukitan terbentuk dari batuan sedimen tua tersier dari Formasi Bentang Atas dan Bentang Bawah, tersusun terutama atas batu pasir bertufa dan batu liat.

Formasi Bentang Atas tersusun atas batu pasir bertufa berlapis, breksi tufa batu apung dan breksi tufa andesit, sedangkan Formasi Bentang Bawah tersusun atas batu pasir tufa berlapis, tufa batu apung dengan sisipan liat bernapal dan breksi andesit. Sistem vulkan terutama terdapat Kabupaten Cianjur bagian barat yang merupakan bagian timur Gunung Gede dan di sekitar Gunung Wayang. Lereng atas Gunung Gede terbentuk dari bahan vulkan muda yang tersusun dari lava breksi dan lahar bersifat andesitik dari Gunung Gede. Luasan satuan geologi yang mendominasi di Kabupaten Cianjur yaitu jenis batuan Sedimen Neogen (Mio-Plio) dengan luas 105.447,9 hektar tersebar di 12 Kecamatan. Jenis batuan Gunung Api Kuartar dan batuan gunung api plio-plistosen yang tersebar di 20 kecamatan dengan luas 69.580,3 hektar dan 82.664,2 hektar. Jenis batu Gamping Oligo-Miosen hanya tersebar di Kecamatan Campaka, Cijati dan Takokak dengan luas 498,9 hektar.

2.1.1.6 Hidrogeologi

Sumber daya air yang terdapat di Kabupaten Cianjur meliputi air permukaan (sungai-sungai), mata air, dan air tanah. Sumber daya air tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pertanian, industri, dan lain-lain.

a. Mata Air

Zona mata air yang sangat vital atau berpotensi di Kabupaten Cianjur terutama berada pada kawasan lereng bagian timur Gunung Gede. Air yang berasal dari mata air dalam zona ini terutama ditampung oleh sungai Cilaku, Cisarua, Cicaringin, dan Cikundul. Sumber air bersih ini terutama dimanfaatkan untuk kepentingan domestik (rumah tangga), pertanian, dan waduk Cirata. Zona mata air yang berada pada lereng bukit di dataran tinggi Sukanagara-Campaka bagian utara selain untuk kepentingan domestik dan pertanian juga dimanfaatkan untuk waduk Cirata yang disalurkan melalui Sungai Cikondang dan Cisokan.





LAPORAN AKHIR*Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029*

Kecamatan	DAS (Ha)								Total
	Cibuni	Cilaki	Cimandiri	Cipandak	Cisadea	Cisokan	Citarum	Ciujung	
Cikalongkulon							14.317,13		14.317,13
Cilaku							5.288,48		5.288,48
Cipanas							6.819,12		6.819,12
Ciranjang							3.409,62		3.409,62
Cugenang							7.647,78		7.647,78
Gekbrong							5.030,39		5.030,39
Haurwangi							4.590,97		4.590,97
Kadupandak	10.427,90								10.427,90
Karangtengah							4.847,71		4.847,71
Leles	427,83				374,05	10.676,81			11.478,69
Mande							9.431,73		9.431,73
Naringgul		12.153,87		10.895,90	641,28			5.072,77	28.763,80
Pacet							4.167,32		4.167,32
Pagelaran	18.590,63						1.548,96		20.139,59
Pasirkuda	10.167,55				350,17				10.517,72
Sindangbarang					10.599,20	2.084,08		3.176,31	15.859,59
Sukaluyu							4.776,75		4.776,75
Sukanagara	16.388,36						628,01		17.016,37
Sukaresmi							9.605,04		9.605,04
Takokak	14.549,86								14.549,86
Tanggeung	6.573,75				22,02	0,32			6.596,09
Warungkondang							4.569,77		4.569,77
Grand Total	93.183,99	36.295,33	1.126,00	13.042,19	47.726,97	24.407,77	129.119,46	18.289,83	363.191,55

*Sumber : Hasil Interpretasi Citra, 2024***Tabel 2.7 Cekungan Air Tanah di Kabupaten Cianjur**

Kecamatan	CAT (Ha)					Total
	Banjarsari	Bogor	Cianjur	Cibuni	Sukabumi	
Bojongpicung			37,04			37,04
Campakamulya				513,13		513,13
Cianjur			2.244,75			2.244,75
Cibeber			2.531,97			2.531,97
Cibinong				4.079,30		4.079,30
Cidaun	191,44			6.214,90		6.406,33
Cikadu				6.228,79		6.228,79
Cikalongkulon			133,16			133,16
Cilaku			5.285,92			5.285,92
Cipanas		85,75	3.500,80		79,22	3.665,77
Ciranjang			9,34			9,34
Cugenang			6.181,43			6.181,43
Gekbrong			2.916,65		32,96	2.949,61
Karangtengah			4.847,71			4.847,71
Mande			3.584,52			3.584,52
Naringgul				6.877,95		6.877,95
Pacet			3.520,97		7,52	3.528,48
Pagelaran				8.357,51		8.357,51
Pasirkuda				8.284,29		8.284,29
Sukaluyu			4.326,68			4.326,68



LAPORAN AKHIR

Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029

Kecamatan	CAT (Ha)					
	Banjarsari	Bogor	Cianjur	Cibuni	Sukabumi	Total
Sukaesmi			996,73			996,73
Tanggeung				159,09		159,09
Warungkondang			4.114,61			4.114,61
Grand Total	191,44	85,75	44.232,29	40.714,96	119,70	85.344,13

Sumber : Hasil Interpretasi Citra, 2024

2.1.1.7 Klimatologi

Kabupaten Cianjur beriklim tropis, wilayah yang termasuk iklim tropis dapat dibedakan menjadi daerah tropis kering yang meliputi stepa, savanna kering, dan gurun pasir dan daerah tropis lembap yang meliputi hutan hujan tropis. Kabupaten Cianjur merupakan daerah tropis lembab yang meliputi hutan hujan tropis. Kondisi ini menjadikan kondisi alam Kabupaten Cianjur subur dan mengandung keanekaragaman kekayaan sumber daya alam yang potensial sebagai modal dasar pembangunan dan potensi investasi yang menjanjikan.

Tropis digunakan dalam arti umum untuk iklim tropis yang berarti hangat hingga panas dan lembap sepanjang tahun, sering kali dengan perasaan vegetasi yang subur. Banyak daerah tropis memiliki musim kemarau dan musim hujan. Di bawah klasifikasi iklim Köppen, untuk iklim tropis, bulan musim hujan didefinisikan sebagai bulan di mana curah hujan rata-rata adalah 60 milimeter (2,4 in) atau lebih. Hutan hujan tropis secara teknis tidak memiliki musim kemarau atau hujan, karena curah hujannya terdistribusi secara merata sepanjang tahun. Berdasarkan klasifikasi Junghuhn, Kabupaten Cianjur terbagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu: Zona iklim panas: Ketinggian 0-700 meter, suhu rata-rata tahunan lebih 220 celsius; Zona iklim sedang: Ketinggian 700-1.500 meter, suhu rata-rata tahunan antara 15-220 celsius; Zona iklim sejuk: Ketinggian 1.500-2.500 meter, suhu rata-rata tahunan 11-150 celsius; dan Zona iklim dingin: Ketinggian 2.500-4000 meter, suhu rata-rata tahunan 110.

Cuaca di Indonesia maupun Kabupaten Cianjur khususnya sangat sulit diprediksi. Hal ini disebabkan oleh pemanasan global (*global warming*) yang semakin terasa. Pemanasan global kini menjadi isu yang diisyaratkan dan dipertimbangkan dalam pengembangan dan pembangunan wilayah di seluruh dunia. Dampak pemanasan global di Kabupaten Cianjur umumnya akan terasa di seluruh wilayah kabupaten namun wilayah Kabupaten Cianjur bagian selatan yang berbatasan dengan Samudra Indonesia akan mengalami dampak yang paling signifikan.

Dampak terbesar perubahan iklim di tersebut berupa peningkatan muka air laut serta cuaca yang tidak menentu. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem serta kehidupan para nelayan. Di bagian selatan dan utara, dampak pemanasan global berupa cuaca ekstrim akan berdampak pada dan petani dalam menentukan musim tanam.



LAPORAN AKHIR*Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029*

Secara umum Kabupaten Cianjur beriklim tropis lembab dengan suhu udara minimum 18 derajat yang biasanya terjadi pada bulan Maret – April, sedangkan suhu maksimal adalah 24 derajat yang biasanya terjadi pada bulan Oktober – November dengan kelembaban nisbi berkisar antara 80-90%. Pada bulan November – Maret angin bertiup ke arah tenggara yang biasanya berkaitan dengan musim kemarau. Adapun puncak musim kemarau terjadi pada bulan Agustus sedangkan puncak musim hujan terjadi pada bulan Desember- Januari. Kondisi curah hujan di Kabupaten Cianjur sangat bervariasi. Curah hujan rata-rata di mayoritas berada di kelompok 3000-3500 mm yaitu 3.156,23 mm/tahun.

Tabel 2.8 Curah Hujan Kabupaten Cianjur Menurut Kecamatan

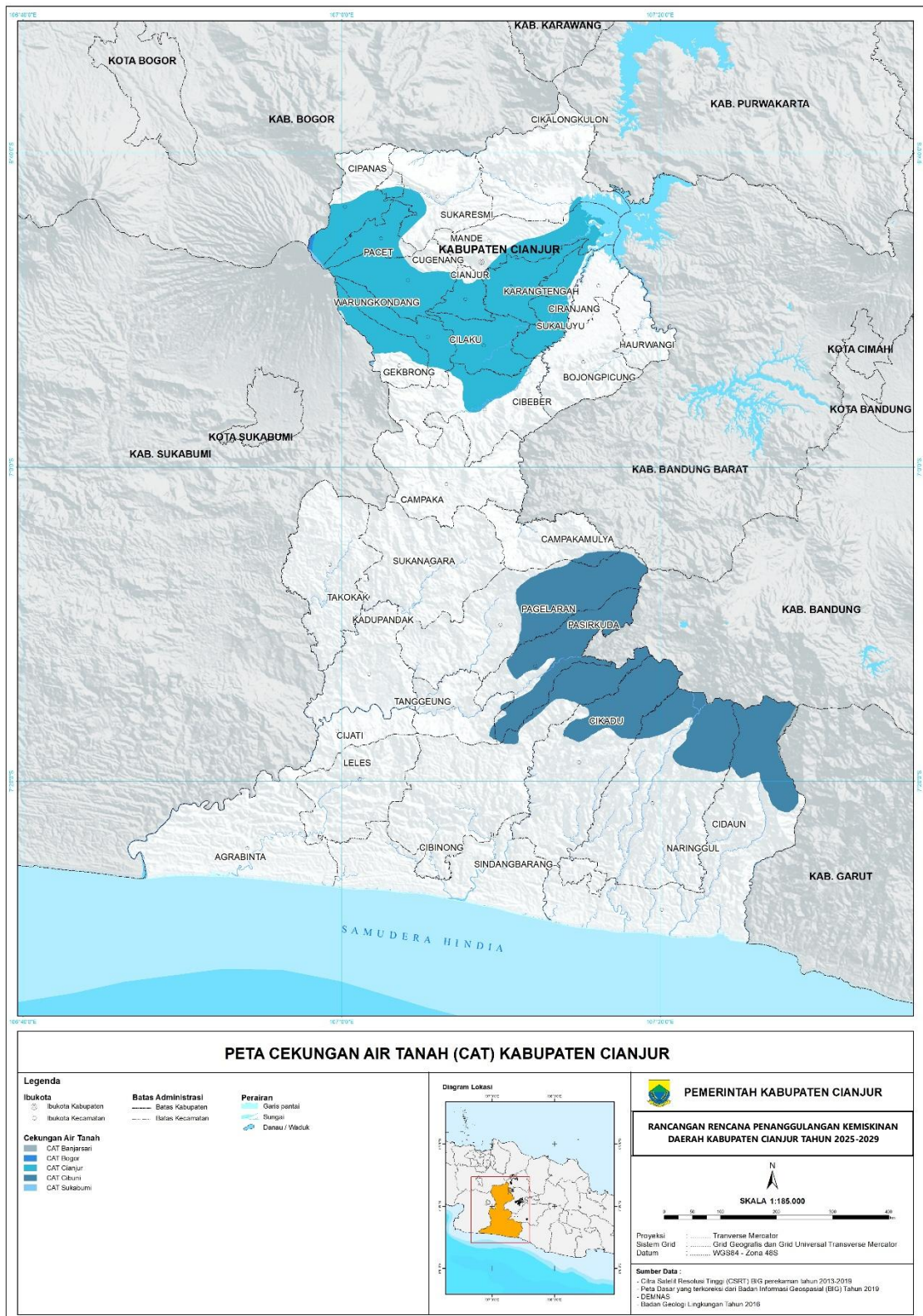
Kecamatan	Curah Hujan (Ha)					Danau/ Waduk /Situ	Total
	2000 - 2500 mm	2500 - 3000 mm	3000 - 3500 mm	3500 - 4000 mm	4000 - 4500 mm		
Agrabinta			19.593,39	41,90			19.635,28
Bojongpicung	3.200,38	5.753,65					8.954,02
Campaka		11.860,01	2.303,05				14.163,06
Campakamulya			7.359,24	76,59			7.435,83
Cianjur	188,78	2.457,70					2.646,48
Cibeber	26,49	12.308,10					12.334,59
Cibinong			1.887,26	17.215,28	4.924,61		24.027,15
Cidaun		12.782,28	3.108,61	5.936,56	7.946,31		29.773,77
Cijati			592,76	4.276,82			4.869,58
Cikadu			2.609,03	5.700,90	11.190,43		19.500,36
Cikalongkulon	979,31	10.925,04	1.807,28			605,49	14.317,13
Cilaku	704,52	4.583,96					5.288,48
Cipanas			1.654,29	5.164,83			6.819,12
Ciranjang	2.235,96	875,84				297,82	3.409,62
Cugenang		3.858,67	3.354,56	434,55			7.647,78
Gekbrong		2.498,57	1.469,83	1.061,99			5.030,39
Haurwangi	1.819,31	2.745,23				26,44	4.590,97
Kadupandak			434,26	9.990,75	2,89		10.427,90
Karangtengah	4.775,29	72,42					4.847,71
Leles			3.971,18	7.507,52			11.478,69
Mande	2.978,54	5.450,97				1.002,21	9.431,73
Naringgul		1.547,67	8.015,49	7.131,68	12.068,97		28.763,80
Pacet		1.093,97	2.543,75	529,60			4.167,32
Pagelaran			5.705,21	7.746,58	6.687,80		20.139,59
Pasirkuda			1.041,66	9.476,07			10.517,72
Sindangbarang		2.989,27	11.879,67	990,65			15.859,59
Sukaluyu	4.336,47	288,73				151,55	4.776,75
Sukanagara		578,35	6.303,74	7.083,45	3.050,82		17.016,37
Sukaesmi		5.836,68	3.055,48	712,87			9.605,04
Takokak		2.099,51	10.879,80	1.570,55			14.549,86
Tanggeung				6.595,92	0,17		6.596,09
Warungkondang		2.705,18	1.436,26	428,33			4.569,77
Grand Total	21.245,04	93.311,79	101.005,81	99.673,38	45.872,00	2.083,52	363.191,55

Sumber : Hasil Interpretasi Citra, 2024



LAPORAN AKHIR

Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029



Gambar 2.5 Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Cianjur

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sistem Informasi Geospasial, Tahun 2024



2.1.1.8 Tutupan Lahan

Pengunaan lahan di Kabupaten Cianjur didominasi oleh hutan seluas 94.067,6 Ha (30,90%), kebun/perkebunan seluas 76.683,4 Ha (25,19%), kebun campuran seluas 63.854,9 Ha (20,98%), sawah irigasi teknis seluas 43.440,5 Ha (14,27%) pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2.9 Penutup Tanah di Kabupaten Cianjur (Ha)

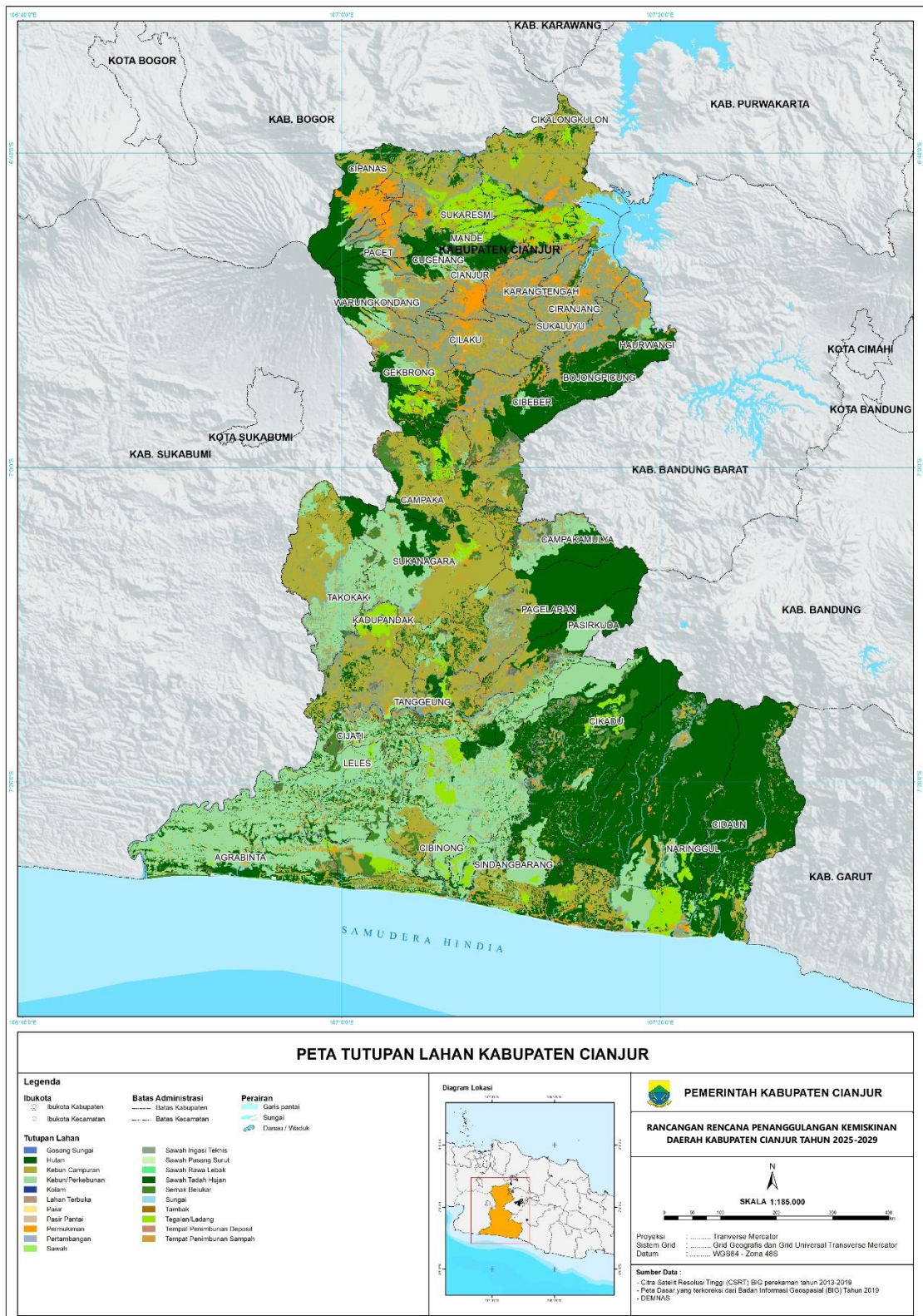
Kecamatan	Tutupan Lahan (Ha)																							
	Danau	Gosong Sungai	Hutan	Kebun Campuran	Kebun/ Perkebunan	Kolam	Lahan Terbuka	Pasir	Pasir Pantai	Permu kiman	Pertam bangan	Sawah	Sawah Irigasi Teknis	Sawah Pasang Surut	Sawah Rawa Lebak	Sawah Tadah Hujan	Semak Belukar	Sungai	Tambak	Tegalan /Ladang	Tempat Penimbunan Deposit	Tempat Penimbunan Sampah	Waduk	Grand Total
Agrabinta	17,64	6,14		333,16	14.170,80		2,90		45,11	716,61						3.410,45	568,51	242,33		121,62				19.635,29
Bojongpicung			5.190,13	153,06	17,86					766,65			2.617,28			109,62	56,12	42,89		0,39				8.954,02
Campaka		0,07	1.661,17	6.475,24	494,18					910,36			1.116,39			787,98	1.943,60	27,78		746,29				14.163,06
Campaka mulya		0,44	2.327,28	1.157,72	2.012,15					400,06			785,21			420,05	311,06	21,86						7.435,83
Cianjur			0,00	99,42	266,40	5,34	0,02			1.107,63			1.146,81			0,68	4,84			15,33				2.646,48
Cibeber	0,32		3.607,22	2.397,77	287,51		11,28			1.556,27			1.744,37			1.547,78	300,90	73,47		807,69				12.334,59
Cibinong			2.933,62	1.536,97	14.585,52					696,89			1.433,59			942,07	552,13	70,44		1.275,91				24.027,15
Cidaun	14,70	7,00	15.971,15	2.293,28	2.199,35			15,75	178,77	1.206,18		34,30	1.194,04			3.638,94	365,54	296,82		2.357,93				29.773,77
Cijati		0,23			2.516,51					499,28			502,23			903,88	354,69	77,24		15,52				4.869,58
Cikadu		0,16	14.059,23	265,76	1.086,49					497,54			1.334,51			945,78	595,57	86,50		628,84				19.500,36
Cikalongkulon		0,97		7.599,79	131,41	4,68	35,95			875,02	25,25		1.341,23	16,83		1.176,35	141,79	61,44	6,23	2.145,40			754,79	14.317,13
Cilaku				1.508,91	92,42	0,33	131,17			1.000,36			2.508,32			16,13	0,29	19,25		7,10	1,69	2,50		5.288,48
Cipanas			2.909,17	1.580,88	117,24	4,13				1.419,33			300,62			229,64	105,49	1,75		150,86				6.819,12
Ciranjang				463,73	3,17					762,79			1.836,93	12,90		3,37	7,25	39,56		0,89			279,04	3.409,62
Cugenang			2.105,88	342,66	1.636,01	0,68				830,83		0,19	2.525,97			117,91	72,99			14,66				7.647,78
Gekbrong	6,48		1.630,52	133,78	1.066,20		57,65			510,28			1.125,39			10,68	6,26			483,14				5.030,39
Haurwangi		1,40	1.751,08	436,42	389,49					553,99			1.320,96	0,07			27,96	105,19		4,17			0,26	4.590,97
Kadupandak		1,48		5.052,50	74,23					610,41		121,74	2.094,40			946,48	125,42	138,96		1.262,27				10.427,90
Karangtengah			16,96	307,21	6,44	9,38	27,90			1.230,42			3.213,35			0,14	25,25	1,31		9,35				4.847,71
Leles				7,65	8.414,90					637,58			47,04			1.748,18	471,68	39,27		112,40				11.478,69
Mande			1.808,36	314,02	241,58	0,28	9,44			751,20			808,90	11,47		615,88	572,99	14,97	1,22	2.960,66			1.320,76	9.431,73
Naringgul		3,23	20.781,27	1.156,34	1.768,90					655,95			920,45			2.639,33	167,84	282,22		388,27				28.763,80
Pacet			772,71	465,69	215,61					1.069,23			1.504,05			8,98	82,46	2,36		46,23				4.167,32
Pagelaran	1,85	0,81	8.047,41	6.060,38	1.290,05		7,39			836,15			2.197,11			1.367,12	160,44	50,74		120,16				20.139,59
Pasirkuda		2,41	2.851,13	1.544,25	3.823,48		10,72			426,76			1.059,66			522,69	196,73	33,76		46,13				10.517,72
Sindangbarang			354,13	3.628,53	6.117,71		36,61	0,69	99,19	817,78			34,25			2.531,12	758,54	213,34	31,93	1.235,77				15.859,59
Sukaluyu		0,43		1.025,28	21,39		8,30			943,67			2.432,70	0,36		132,89	75,50	73,86		1,95			60,43	4.776,75
Sukanagara	3,76		2.416,02	7.050,68	5.396,20					549,98			335,72			372,66	452,40	50,03		388,97				17.016,43
Sukaresmi		3,68	479,39	3.265,39	121,91	0,26	14,86			773,91			1.583,25		0,79	903,54	130,85	56,47		2.270,76				9.605,04
Takokak		0,55	854,84	5.121,24	6.111,24					561,55			1.443,15			279,47	105,23	68,84		3,75				14.549,86
Tanggeung	3,84	9,72	700,80	1.521,05	1.610,68					633,22			811,32			812,58	142,60	71,03		279,24				6.596,09
Warung kondang			838,14	556,14	396,33	0,08	2,87			507,32			2.121,33				57,62		0,08	89,85				4.569,77
Grand Total	48,60	38,71	94.067,60	63.854,92	76.683,36	25,15	357,07	16,44	323,07	25.315,18	25,25	156,22	43.440,53	41,64	0,79	27.142,37	8.940,55	2.263,70	39,47	17.991,51	1,69	2,50	2.415,28	363.191,61

Sumber : Hasil Interpretasi Citra, 2024



LAPORAN AKHIR

Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029



Gambar 2.6 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Cianjur

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sistem Informasi Geospasial, Tahun 2024

2.1.2 Kondisi Kawasan Dan Potensi Pengembangan Wilayah

Cianjur, sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, memiliki potensi pengembangan wilayah yang cukup besar, didukung oleh kondisi geografis, sumber daya alam, dan posisi strategisnya. Berikut adalah beberapa potensi pengembangan wilayah di Cianjur beserta penjelasannya:

1. Pertanian dan Perkebunan

- Cianjur dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Barat. Pada tahun 2022, luas panen padi di Cianjur mencapai lebih dari 110 ribu hektare dengan produksi padi sekitar 600 ribu ton per tahun. Selain itu, komoditas lain seperti teh, kopi, dan sayuran juga menjadi andalan.
- Pengembangan teknologi pertanian modern, diversifikasi tanaman, dan pengolahan hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah.

2. Pariwisata

- Cianjur memiliki destinasi wisata terkenal seperti Situs Gunung Padang (situs megalitik terbesar di Asia Tenggara), Kebun Raya Cibodas, dan kawasan wisata Cipanas.
- Peningkatan infrastruktur pariwisata, pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, dan promosi destinasi wisata baru.

3. Energi Terbarukan

- Potensi energi terbarukan di Cianjur, seperti mikrohidro, cukup besar karena topografi yang berbukit dan banyaknya aliran sungai. Selain itu, potensi energi surya dan biomassa juga dapat dikembangkan.
- Pengembangan pembangkit listrik mikrohidro, pembangkit listrik tenaga surya, dan pemanfaatan limbah pertanian untuk energi biomassa.

4. Industri dan UMKM

- Cianjur memiliki sektor industri kecil dan menengah yang cukup berkembang, seperti makanan olahan (berbasis beras dan hasil pertanian lainnya), kerajinan, dan tekstil.
- Peningkatan akses pasar, pelatihan keterampilan, dan penguatan branding produk lokal.

5. Perikanan dan Peternakan

- Potensi perikanan darat di Cianjur cukup besar, dengan banyaknya kolam ikan dan waduk, seperti Waduk Cirata. Sektor peternakan juga cukup berkembang, khususnya sapi perah, domba Garut, dan ayam pedaging.
- Modernisasi budidaya ikan, pengembangan agribisnis peternakan, dan pengolahan hasil peternakan.

6. Infrastruktur dan Transportasi



- Pembangunan infrastruktur, seperti Jalan Tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi) dan rencana pengembangan jaringan kereta api, dapat meningkatkan aksesibilitas Cianjur.
 - Peningkatan konektivitas antarwilayah dan pengembangan kawasan ekonomi baru.
7. Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Cianjur memiliki kawasan hutan lindung dan konservasi, seperti Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Kawasan ini penting untuk keseimbangan ekologi dan penyediaan air.
 - Pengelolaan hutan berbasis masyarakat, pengembangan jasa lingkungan, dan program rehabilitasi lahan kritis.
8. Pendidikan dan Kesehatan
- Cianjur memiliki beberapa institusi pendidikan yang berkembang serta program peningkatan akses kesehatan di wilayah pedesaan.
 - Pengembangan pusat pendidikan vokasi dan peningkatan layanan kesehatan berbasis teknologi.
9. Tantangan:
- Meskipun potensi tersebut besar, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan infrastruktur, bencana alam (longsor dan banjir), serta tekanan terhadap lahan pertanian akibat alih fungsi lahan.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

2.1.3.1 Rawan Bencana Tsunami

Kondisi rawan bencana tsunami di Kabupaten Cianjur termasuk kategori tinggi, yang berdampak pada 7 kecamatan di Kabupaten Cianjur bagian selatan. Untuk lebih jelasnya mengenai rawan bencana tsunami di Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2.10 Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Cianjur

Kecamatan	Rawan Bencana Tsunami (Ha)			
	Zona Rawan Rendah	Zona Rawan Menengah	Zona Rawan Tinggi	Grand Total
Agrabinta	2.924,10	4.243,30	3.672,30	10.839,70
Cibinong	791,97	384,49	420,05	1.596,51
Cidaun	2.122,69	1.171,41	2.382,88	5.676,98
Cikadu	123,23	39,00	27,86	190,09
Leles	604,19	727,69		1.331,89
Naringgul	94,31	25,57	13,42	133,30
Sindangbarang	3.380,09	1.945,87	3.140,90	8.466,87
Grand Total	10.040,58	8.537,33	9.657,40	28.235,32

Sumber : BPBD Provinsi Jawa Barat, 2016 dalam KLHS RTRW Kab.Cianjur



Analisis berdasarkan Tabel 2.2 mengindikasikan Total luas area yang berpotensi terdampak tsunami di Kabupaten Cianjur adalah 28.235,32 hektar. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di Kabupaten Cianjur memiliki risiko terkena dampak tsunami.

Berdasarkan distribusi tingkat kerawanan ternyata Kecamatan Agrabinta, Cidaun, dan Sindangbarang memiliki luas area zona rawan tinggi yang cukup signifikan, menunjukkan potensi dampak tsunami yang lebih besar di wilayah-wilayah tersebut. Sebagian besar kecamatan memiliki luas area zona rawan menengah yang cukup besar, mengindikasikan adanya risiko sedang terhadap bencana tsunami. Beberapa kecamatan memiliki luas area zona rawan rendah yang relatif kecil, namun tetap perlu diwaspadai.

Berdasarkan tingkat risiko tertinggi Kecamatan Agrabinta, Cidaun, dan Sindangbarang adalah tiga kecamatan dengan total luas area rawan tsunami tertinggi. Ini menunjukkan bahwa kecamatan-kecamatan ini memiliki risiko paling tinggi terkena dampak bencana tsunami.

Potensi dampak bencana dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, permukiman, dan fasilitas umum di wilayah yang terdampak. Gelombang tsunami yang besar dapat menyebabkan korban jiwa yang sangat banyak. Bencana tsunami dapat mengganggu aktivitas ekonomi, seperti pariwisata dan perikanan, serta menyebabkan kerusakan lingkungan.

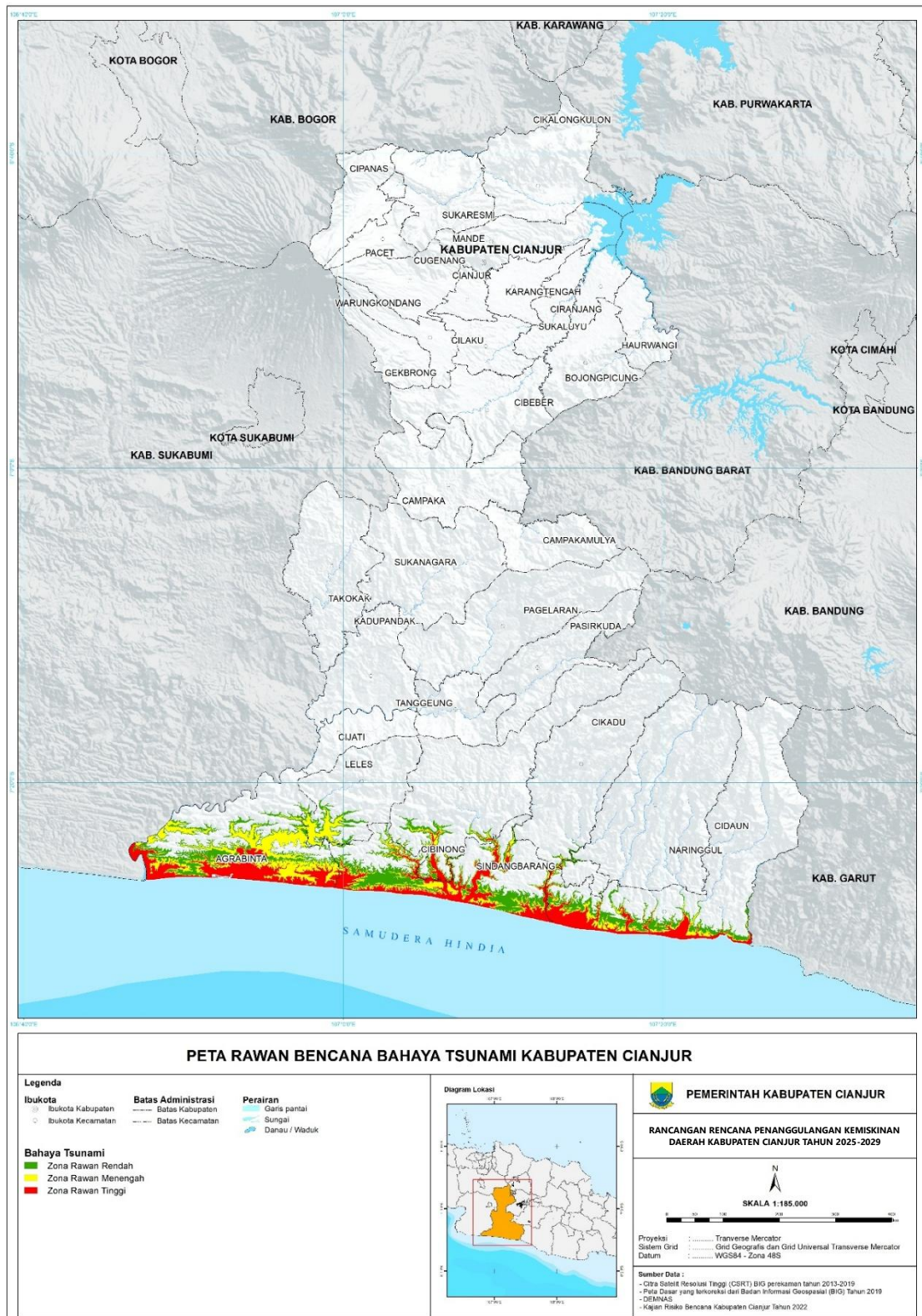
Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan adaptasi dan mitigasi seperti Perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap rencana tata ruang wilayah, terutama di kecamatan-kecamatan dengan risiko tinggi, untuk memastikan bahwa pembangunan tidak dilakukan di daerah yang rawan bencana. Perlu diperkuat sistem peringatan dini untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang ancaman tsunami. Perlu disusun rencana evakuasi yang jelas dan simulasi evakuasi secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Masyarakat perlu diberikan edukasi tentang risiko bencana tsunami dan cara-cara untuk mengurangi dampaknya. Perlu dibangun infrastruktur yang tahan terhadap bencana, seperti bangunan tahan gempa dan sistem drainase yang baik. Perlu dilakukan kerjasama yang baik antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana tsunami.

Data yang ada menunjukkan bahwa Kabupaten Cianjur memiliki risiko yang cukup tinggi terhadap bencana tsunami. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang komprehensif untuk mengurangi dampak bencana, baik melalui upaya mitigasi maupun adaptasi.



LAPORAN AKHIR

Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029



Gambar 2.7 Peta Rawan Bencana Tsunami

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sistem Informasi Geospasial, Tahun 2024



2.1.3.2 Rawan Bencana Gerakan Tanah

Kategori rawan bencana gerakan tanah di Kabupaten Cianjur terdiri dari alur aliran bahan, rombakan danau, sangat rendah, rendah, menengah, tinggi, dengan total luas rawan bencana gerakan tanah sebesar 363.186,32 Ha. Dimana rawan bencana gerakan tanah didominasi oleh klasifikasi menengah seluas 178.550,77 Ha. Lihat Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2.11 Rawan Bencana Gerakan Tanah Kabupaten Cianjur

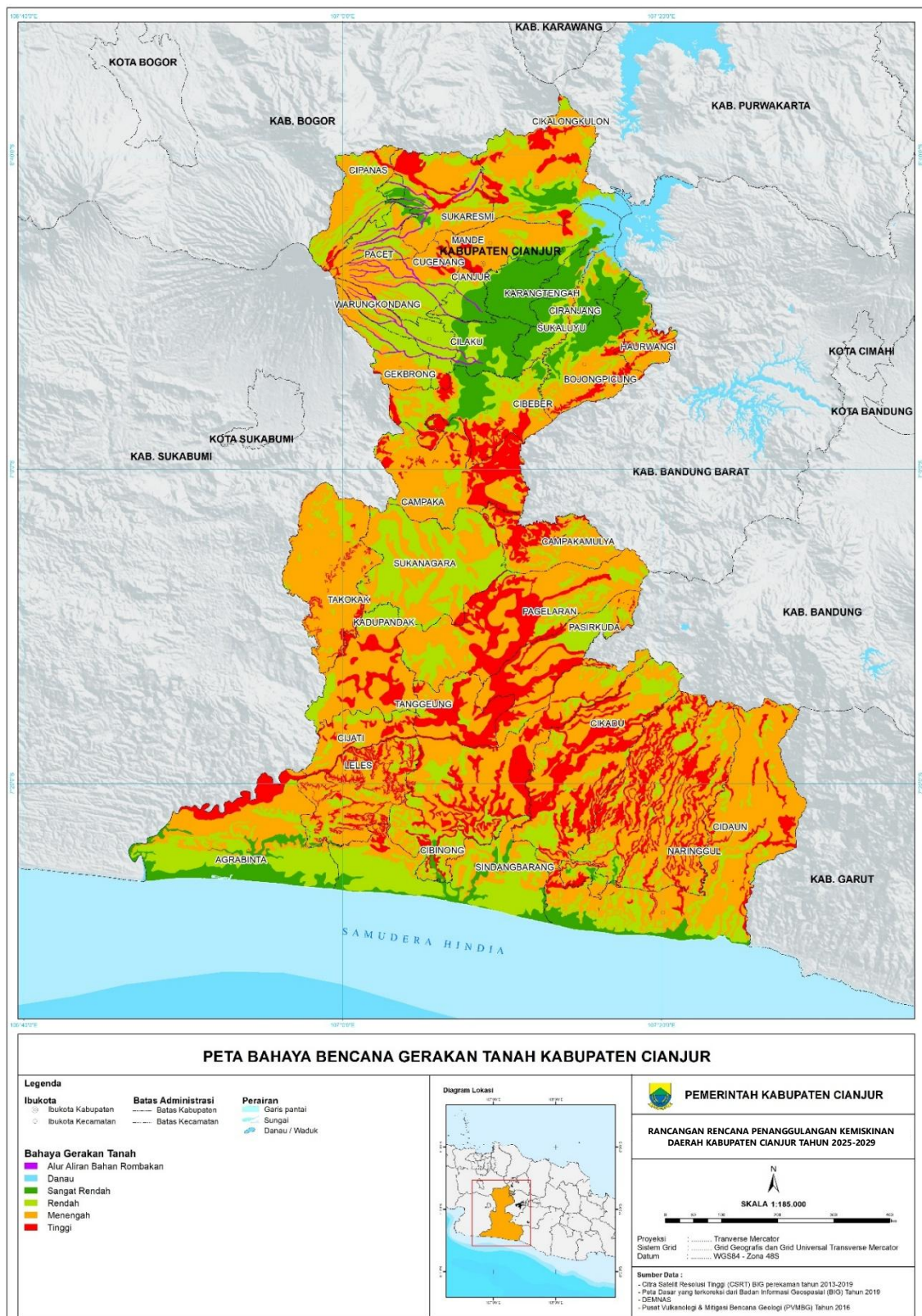
Kecamatan	Rawan Bencana Gerakan Tanah (Ha)						
	Alur Aliran Bahan Rombakan	Danau	Sangat Rendah	Rendah	Menengah	Tinggi	Grand Total
Agrabinta			4.311,56	7.120,58	6.169,07	2.028,84	19.630,05
Bojongpicung			2.485,45	1.702,29	3.896,38	869,91	8.954,02
Campaka			84,06	1.477,28	8.708,55	3.893,17	14.163,06
Campakamulya				945,22	4.635,03	1.855,57	7.435,83
Cianjur	98,05		1.093,52	1.055,28	352,50	47,14	2.646,48
Cibeber			2.042,37	3.754,61	4.219,54	2.318,06	12.334,59
Cibinong			251,02	4.953,51	13.029,81	5.792,80	24.027,15
Cidaun			1.940,52	5.902,09	19.710,79	2.220,37	29.773,77
Cijati				783,96	3.295,87	789,75	4.869,58
Cikadu			0,00	3.287,77	9.877,64	6.334,95	19.500,36
Cikalongkulon	1,49	773,98	1.280,12	3.629,02	6.802,93	1.829,59	14.317,13
Cilaku	139,37		3.534,44	1.600,26	14,41		5.288,48
Cipanas	109,28		18,73	2.994,19	3.464,11	232,82	6.819,12
Ciranjang		284,21	1.732,97	863,72	528,72		3.409,62
Cugenang	482,77			2.580,27	4.132,35	452,39	7.647,78
Gekbrong	254,12			2.110,63	2.639,87	25,76	5.030,39
Haurwangi		63,44	1.682,48	568,17	1.765,96	510,92	4.590,97
Kadupandak				1.778,87	6.502,58	2.146,45	10.427,90
Karangtengah			4.475,10	368,14	4,48		4.847,71
Leles			67,78	1.548,23	6.955,94	2.906,74	11.478,69
Mande		1.251,51	1.058,58	1.483,66	4.919,34	718,65	9.431,73
Naringgul			212,19	4.190,51	16.140,99	8.220,11	28.763,80
Pacet	376,50		271,13	2.115,06	1.294,82	109,82	4.167,32
Pagelaran				3.779,70	11.100,72	5.259,17	20.139,59
Pasirkuda				2.151,36	5.200,27	3.166,10	10.517,72
Sindangbarang			2.026,04	9.341,40	4.112,91	379,24	15.859,59
Sukaluyu		72,05	3.263,97	1.120,87	319,86		4.776,75
Sukanagara				9.636,08	7.139,39	240,90	17.016,37
Sukaesmi	351,59		522,66	2.329,86	4.937,77	1.463,16	9.605,04
Takokak				1.179,16	12.646,43	724,27	14.549,86
Tanggeung				531,40	3.023,41	3.041,28	6.596,09
Warungkondang	393,32		10,57	2.950,98	1.008,34	206,56	4.569,77
Grand Total	2.206,49	2.445,19	32.365,25	89.834,13	178.550,77	57.784,49	363.186,32

Sumber : PVMG Bencana Geologi, 2016



LAPORAN AKHIR

Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029



Gambar 2.8 Peta Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sistem Informasi Geospasial, Tahun 2024



Sebagian besar kecamatan di Kabupaten Cianjur memiliki luas area zona rawan menengah yang cukup besar. Ini mengindikasikan bahwa risiko gerakan tanah di wilayah tersebut berada pada tingkat sedang. Beberapa kecamatan seperti Cidaun, Sindangbarang, dan Naringgul memiliki luas area zona rawan tinggi yang signifikan, menunjukkan potensi risiko gerakan tanah yang lebih besar di wilayah-wilayah tersebut. Terdapat variasi yang cukup signifikan dalam distribusi tingkat kerawanan antara kecamatan satu dengan yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi geologi, topografi, dan penggunaan lahan di setiap kecamatan sangat bervariasi.

Adaptasi dan Mitigasi yang diperlukan seperti melakukan pemetaan risiko gerakan tanah secara lebih detail dengan mempertimbangkan faktor-faktor geologi, topografi, dan penggunaan lahan. Membangun sistem monitoring gerakan tanah untuk mendeteksi tanda-tanda awal terjadinya gerakan tanah. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang tanda-tanda bahaya gerakan tanah dan tindakan yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Membangun sistem peringatan dini yang efektif untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Menyusun peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan daerah rawan bencana. Melatih masyarakat dalam melakukan evakuasi mandiri dan memberikan pertolongan pertama.

Berdasarkan data yang ada, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Cianjur memiliki potensi risiko gerakan tanah yang cukup tinggi, terutama di beberapa kecamatan tertentu. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya mitigasi yang komprehensif untuk mengurangi dampak bencana gerakan tanah.

2.1.3.3 Rawan Bencana Gempa Bumi

Kategori rawan bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur terdiri dari rendah, sedang dan tinggi dengan luas keseluruhan 363.186,32 ha. Dimana rawan bencana gempa bumi didominasi oleh klasifikasi sedang seluas 204.244,92 Ha. Selanjutnya mengenai rawan bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada Tabel 3.61 dan Gambar 3.74.

Tabel 2.12 Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Cianjur

Kecamatan	Bahaya Gempa Bumi			
	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Agrabinta	-	19.630,05	-	19.630,05
Bojongpicung	-	8.954,02	-	8.954,02
Campaka	-	14.163,06	-	14.163,06
Campakamulya	-	-	7.435,83	7.435,83
Cianjur	-	-	2.646,48	2.646,48
Cibeber	-	12.334,59	-	12.334,59
Cibinong	24.027,15	-	-	24.027,15
Cidaun	-	29.773,77	-	29.773,77



LAPORAN AKHIR

Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029

Kecamatan	Bahaya Gempa Bumi			
	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Cijati	-	4.869,58	-	4.869,58
Cikadu	19.500,36	-	-	19.500,36
Cikalongkulon	-	14.317,13	-	14.317,13
Cilaku	-	-	5.288,48	5.288,48
Cipanas	-	-	6.819,12	6.819,12
Ciranjang	-	3.409,62	-	3.409,62
Cugenang	-	-	7.647,78	7.647,78
Gekbrong	-	-	5.030,39	5.030,39
Haurwangi	-	4.590,97	-	4.590,97
Kadupandak	-	10.427,90	-	10.427,90
Karangtengah	-	4.847,71	-	4.847,71
Leles	11.478,69	-	-	11.478,69
Mande	-	9.431,73	-	9.431,73
Naringgul	28.763,80	-	-	28.763,80
Pacet	-	-	4.167,32	4.167,32
Pagelaran	-	20.139,59	-	20.139,59
Pasirkuda	-	10.517,72	-	10.517,72
Sindangbarang	-	15.859,59	-	15.859,59
Sukaluyu	-	4.776,75	-	4.776,75
Sukanagara	-	-	17.016,37	17.016,37
Sukaesmi	-	9.605,04	-	9.605,04
Takokak	-	-	14.549,86	14.549,86
Tanggeung	-	6.596,09	-	6.596,09
Warungkondang	-	-	4.569,77	4.569,77
Grand Total	83.770,00	204.244,92	75.171,39	363.186,32

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sistem Informasi Geospasial, Tahun 2024

Berkaitan dengan distribusi kerentanan gempa bumi mengindikasikan Sebagian besar kecamatan di Kabupaten Cianjur memiliki luas area zona rawan sedang yang cukup besar. Ini mengindikasikan bahwa risiko gempa bumi di wilayah tersebut berada pada tingkat sedang. Beberapa kecamatan seperti Cidaun, Sindangbarang, dan Naringgul memiliki luas area zona rawan tinggi yang signifikan, menunjukkan potensi risiko gempa bumi yang lebih besar di wilayah-wilayah tersebut. Terdapat variasi yang cukup signifikan dalam distribusi tingkat kerawanan antara kecamatan satu dengan yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi geologi dan tektonik di setiap kecamatan sangat bervariasi.

Faktor yang mempengaruhi kerentanan antara lain keberadaan sesar aktif seperti Sesar Cugenang merupakan faktor utama yang mempengaruhi kerentanan gempa bumi. Jenis batuan dan struktur geologi yang lemah dapat memperkuat getaran gempa bumi. Daerah dengan kemiringan lereng yang curam lebih rentan terhadap longsor akibat gempa bumi.

Adaptasi dan Mitigasi yang perlu dilakukan antara lain perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap rencana tata ruang wilayah, terutama di kecamatan-kecamatan dengan risiko tinggi, untuk memastikan bahwa pembangunan tidak dilakukan di daerah yang rawan gempa. Bangunan-bangunan di daerah rawan gempa perlu didesain dan dibangun dengan



standar tahan gempa. Perlu diperkuat sistem peringatan dini untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang gempa bumi. Perlu disusun rencana evakuasi yang jelas dan simulasi evakuasi secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Masyarakat perlu diberikan edukasi tentang risiko gempa bumi dan cara-cara untuk mengurangi dampaknya. Perlu dibangun infrastruktur yang tahan gempa, seperti jalan, jembatan, dan bangunan publik.

2.1.3.4 Rawan Bencana Letusan Gunung Api

Kategori rawan bencana letusan gunung api di Kabupaten Cianjur terdiri dari rendah, sedang dan tinggi dengan luas keseluruhan 15.438,87 ha. Dimana rawan bencana letusan gunung api didominasi oleh klasifikasi rendah seluas 12.396,83 Ha. Mengenai rawan bencana gunung api di Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada Tabel 3.62 dan Gambar 3.75.

Tabel 2.13 Rawan Bencana Letusan Gunung Api Kabupaten Cianjur

Kecamatan	Luas Bahaya (Ha)			Total Luas
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Agrabinta	-	-	-	-
Bojongpicung	-	-	-	-
Campaka	-	-	-	-
Campakamulya	-	-	-	-
Cianjur	168,41	-	-	168,41
Cibeber	-	-	-	-
Cibinong	-	-	-	-
Cidaun	-	-	-	-
Cijati	-	-	-	-
Cikadu	-	-	-	-
Cikalongkulon	43,67	-	-	43,67
Cilaku	190,32	-	-	190,32
Cipanas	2.529,07	1.433,31	164,12	4.126,50
Ciranjang	-	-	-	-
Cugenang	3.470,43	376,09	81,50	3.928,02
Gekbrong	1.521,48	88,45	-	1.609,93
Haurwangi	-	-	-	-
Kadupandak	-	-	-	-
Karangtengah	0,28	-	-	0,28
Leles	-	-	-	-
Mande	-	-	-	-
Naringgul	-	-	-	-
Pacet	2.425,44	558,44	148,75	3.132,62
Pagelaran	-	-	-	-
Pasirkuda	-	-	-	-
Sindangbarang	-	-	-	-
Sukaluyu	-	-	-	-
Sukanagara	-	-	-	-
Sukaresmi	569,23	-	-	569,23
Takokak	-	-	-	-
Tangeung	-	-	-	-
Warungkondang	1.478,50	191,38	-	1.669,89
Grand Total	12.396,83	2.647,67	394,37	15.438,87

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sistem Informasi Geospasial, Tahun 2024



Berdasarkan analisis terhadap distribusi risiko mengindikasikan Kecamatan Cipanas, Ciranjang, Naringgul, dan Tanggeung memiliki luas area dengan tingkat bahaya tinggi yang signifikan. Ini mengindikasikan bahwa kecamatan-kecamatan ini memiliki potensi risiko letusan gunung api yang lebih besar. Beberapa kecamatan seperti Campakamulya, Cikadu, Cilaku, dan Sukaresmi juga memiliki luas area dengan tingkat bahaya sedang yang cukup besar. Sebagian besar kecamatan memiliki luas area dengan tingkat bahaya rendah atau tidak ada data, menunjukkan potensi risiko yang lebih rendah.

Total luas area di Kabupaten Cianjur yang berpotensi terdampak letusan gunung api adalah 15.438,87 hektar. Ini menunjukkan bahwa sebagian wilayah di Kabupaten Cianjur memiliki risiko terkena dampak letusan gunung api.

Adapun potensi dampak bencana seperti letusan gunung api dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, permukiman, dan lahan pertanian. Awan panas, lahar dingin, dan material vulkanik lainnya dapat menyebabkan korban jiwa. Letusan gunung api dapat mengganggu aktivitas ekonomi, seperti pertanian, pariwisata, dan perindustrian. Abu vulkanik dan gas beracun dapat mencemari udara, tanah, dan sumber air.

Adaptasi dan Mitigasi yang perlu dilakukan antara lain perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap rencana tata ruang wilayah, terutama di kecamatan-kecamatan dengan risiko tinggi, untuk memastikan bahwa pembangunan tidak dilakukan di daerah yang rawan bencana. Perlu diperkuat sistem peringatan dini untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang ancaman letusan gunung api. Perlu disusun rencana evakuasi yang jelas dan simulasi evakuasi secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Masyarakat perlu diberikan edukasi tentang risiko bencana gunung api dan cara-cara untuk mengurangi dampaknya. Perlu dibangun infrastruktur yang tahan terhadap bencana, seperti shelter atau tempat evakuasi sementara. Perlu dilakukan kerjasama yang baik antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana gunung api.

Kabupaten Cianjur memiliki potensi risiko letusan gunung api yang cukup tinggi, terutama di beberapa kecamatan tertentu. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya mitigasi yang komprehensif untuk mengurangi dampak bencana gunung api.

2.1.3.5 Rawan Bencana Tanah Longsor

Kategori rawan bencana longsor di Kabupaten Cianjur terdiri dari rendah, sedang dan tinggi dengan luas keseluruhan 250.900,35 Ha. Dimana rawan bencana longsor didominasi oleh klasifikasi rendah seluas 138.592,81 Ha. Kemudian mengenai rawan bencana longsor di Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.



Tabel 2.14 Rawan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Cianjur

Kecamatan	Bahaya Tanah Longsor (Ha)			
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total
Agrabinta	6.793,59	1.236,77	2.209,77	10.240,13
Bojongpicung	2.135,22	393,03	3.331,53	5.859,77
Campaka	6.282,09	2.063,58	3.497,39	11.843,06
Campakamulya	3.413,29	1.143,96	1.745,90	6.303,15
Cianjur	518,40	38,72	7,29	564,41
Cibeber	4.264,44	1.285,17	2.758,43	8.308,04
Cibinong	10.386,56	2.188,41	6.896,67	19.471,65
Cidaun	10.684,74	845,27	10.927,40	22.457,41
Cijati	1.576,59	453,58	433,30	2.463,47
Cikadu	7.333,79	1.320,13	8.352,62	17.006,54
Cikalongkulon	5.707,00	1.086,16	3.275,46	10.068,61
Cilaku	1.446,03	0,86	1,77	1.448,65
Cipanas	2.750,80	133,07	2.435,36	5.319,23
Ciranjang	497,79	56,03	69,56	623,37
Cugenang	2.442,47	324,61	1.750,78	4.517,86
Gekbrong	1.638,08	92,96	1.157,89	2.888,93
Haurwangi	1.009,11	326,22	1.127,90	2.463,22
Kadupandak	3.964,89	1.151,29	698,88	5.815,06
Karangtengah	242,50	4,70	1,10	248,30
Leles	4.430,34	1.460,95	3.473,73	9.365,02
Mande	2.791,47	488,55	1.630,38	4.910,40
Naringgul	9.109,65	2.247,03	14.570,99	25.927,67
Pacet	1.236,69	69,33	854,24	2.160,26
Pagelaran	8.255,08	2.761,09	4.682,41	15.698,59
Pasirkuda	4.764,40	1.085,82	3.188,07	9.038,30
Sindangbarang	6.081,18	366,89	1.451,69	7.899,75
Sukaluyu	948,46	34,10	61,92	1.044,49
Sukanagara	11.909,49	303,31	1.126,55	13.339,35
Sukaresmi	4.045,29	862,78	1.857,06	6.765,14
Takokak	9.103,08	497,31	839,79	10.440,18
Tanggeung	1.716,01	1.540,88	1.381,27	4.638,16
Warungkondang	1.114,30	150,44	497,41	1.762,16
Grand Total	138.592,81	26.013,01	86.294,53	250.900,35

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sistem Informasi Geospasial, Tahun 2024

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terkait risiko bencana longsor ternyata sebagian besar kecamatan di Kabupaten Cianjur memiliki luas area zona rawan sedang yang cukup besar. Ini mengindikasikan bahwa risiko longsor di wilayah tersebut berada pada tingkat sedang. Beberapa kecamatan seperti Cidaun, Naringgul, dan Sukanagara memiliki luas area zona rawan tinggi yang signifikan, menunjukkan potensi risiko longsor yang lebih besar di wilayah-wilayah tersebut. Terdapat variasi yang cukup signifikan dalam distribusi tingkat



kerawanan antara kecamatan satu dengan yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi geologi, topografi, dan penggunaan lahan di setiap kecamatan sangat bervariasi.

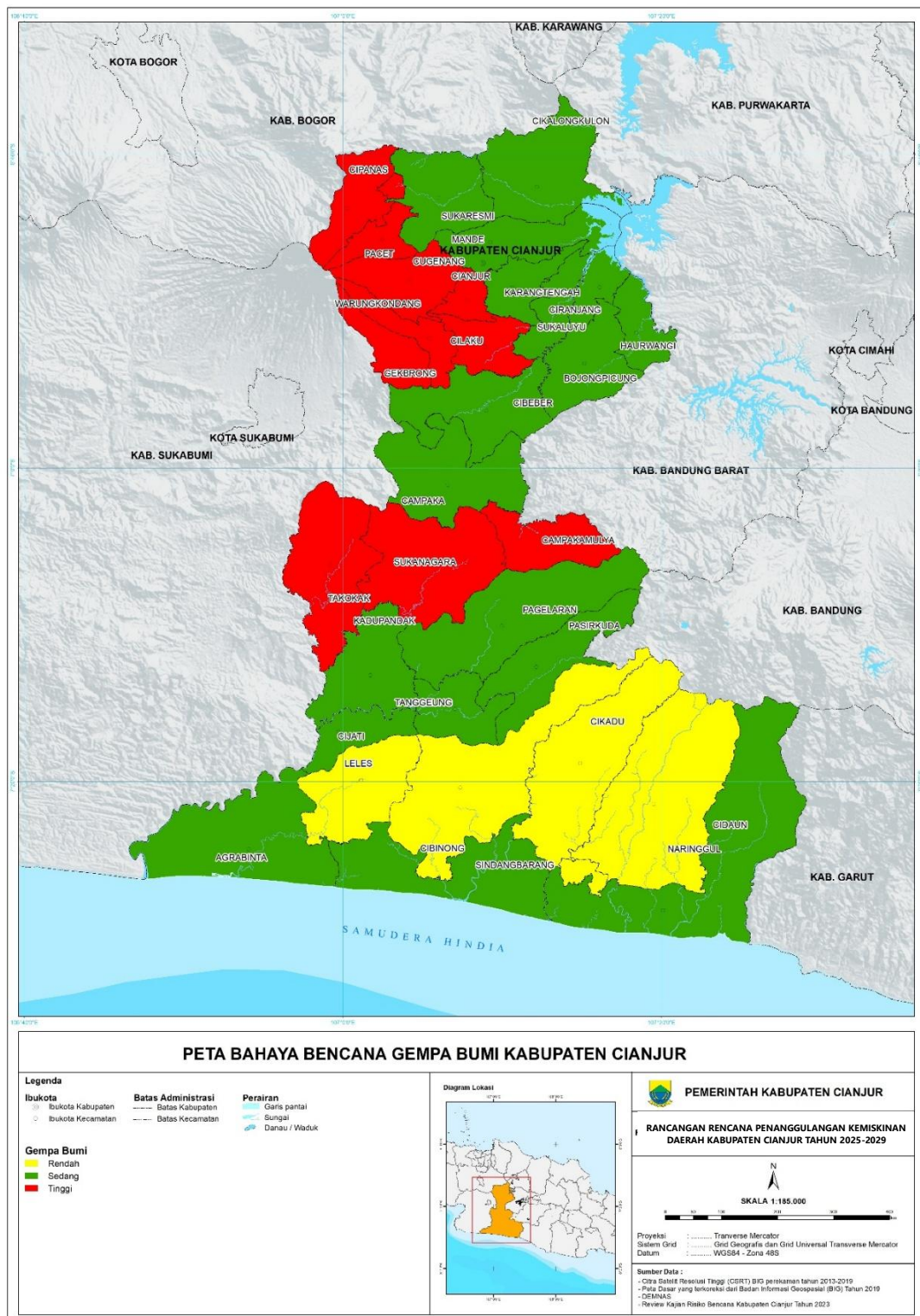
Faktor yang mempengaruhi kerentanan adalah daerah dengan kemiringan lereng yang curam dan ketinggian yang tinggi cenderung lebih rentan terhadap longsor. Jenis batuan dan struktur geologi yang lemah dapat mempermudah terjadinya longsor. Curah hujan yang tinggi dan intensitas hujan yang besar dapat memicu terjadinya longsor. Perubahan penggunaan lahan, seperti alih fungsi hutan menjadi permukiman atau pertanian, dapat meningkatkan kerentanan terhadap longsor.

Adaptasi dan mitigasi yang perlu dilakukan antara lain perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap rencana tata ruang wilayah, terutama di kecamatan-kecamatan dengan risiko tinggi, untuk memastikan bahwa pembangunan tidak dilakukan di daerah yang rawan longsor. Perlu diperkuat sistem peringatan dini untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang potensi terjadinya longsor, terutama saat musim hujan. Perlu disusun rencana evakuasi yang jelas dan simulasi evakuasi secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Masyarakat perlu diberikan edukasi tentang risiko longsor dan cara-cara untuk mengurangi dampaknya. Perlu dibangun infrastruktur yang tahan terhadap bencana, seperti sistem drainase yang baik dan bangunan yang tahan gempa. Perlu dilakukan upaya rehabilitasi lahan, seperti reboisasi dan terasering, untuk mengurangi risiko longsor. Perlu dilakukan kerjasama yang baik antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana longsor.



LAPORAN AKHIR

Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029

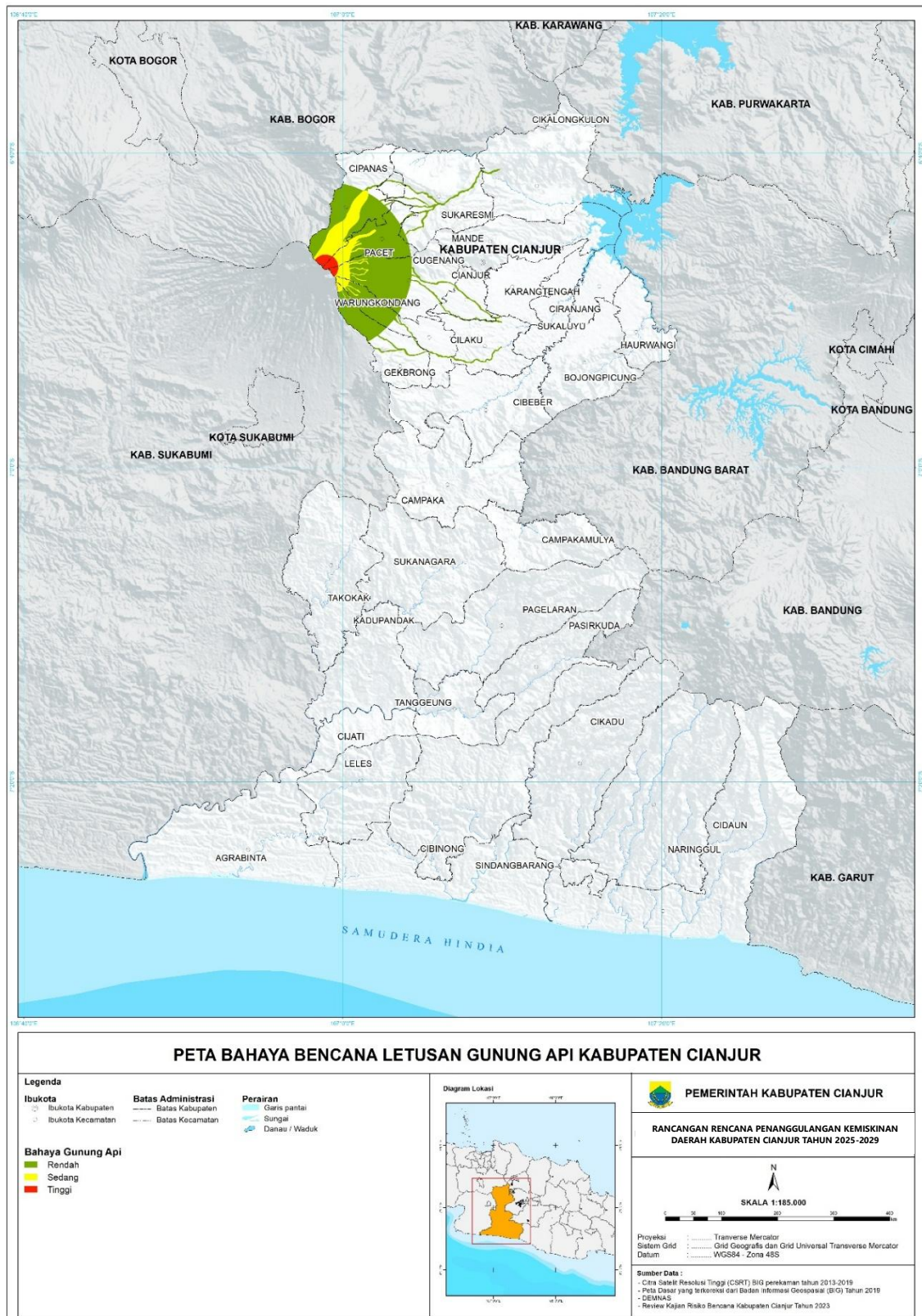


Gambar 2.9 Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sistem Informasi Geospasial, Tahun 2024

LAPORAN AKHIR

Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029

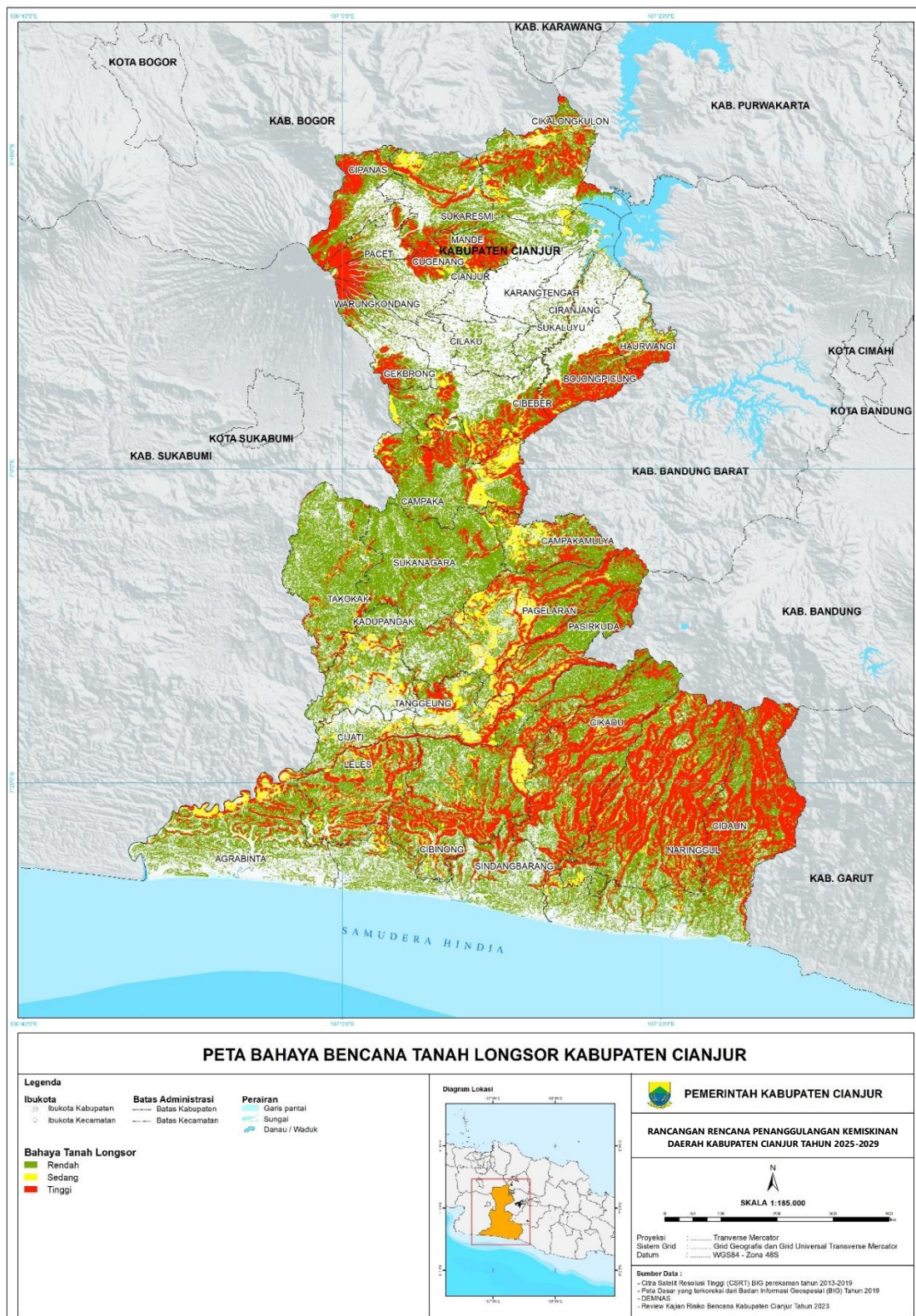


Gambar 2.10 Peta Rawan Bencana Letusan Gunung Api

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sistem Informasi Geospasial, Tahun 2024

LAPORAN AKHIR

Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029



Gambar 2.11 Peta Rawan Bencana Tanah Longsor

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sistem Informasi Geospasial, Tahun 2024



2.1.3.6 Rawan Bencana Cuaca Ekstrem

Kategori bahaya bencana cuaca ekstrem di Kabupaten Cianjur terdiri dari rendah, sedang dan tinggi dengan luas keseluruhan 280.645,07 Ha. Dimana bahaya bencana cuaca ekstrem didominasi oleh klasifikasi rendah seluas 211.890,64 Ha. Kemudian mengenai bahaya cuaca ekstrem di Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut

Tabel 2.15 Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Kabupaten Cianjur

Kecamatan	Bahaya Bencana Cuaca Ekstrem			Total Luas
	Luas Bahaya (Ha)			
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Agrabinta	14.205,84	2.533,87	2.827,67	19.567,38
Bojongpicung	1.428,52	323,96	2.737,81	4.490,29
Campaka	6.260,60	144,18	36,44	6.441,22
Campakamulya	3.410,57			3.410,57
Cianjur	417,64	86,39	2.142,44	2.646,48
Cibeber	4.697,26	919,26	1.540,40	7.156,92
Cibinong	22.257,36	582,71	234,51	23.074,58
Cidaun	13.389,01	1.523,35	2.834,39	17.746,74
Cijati	3.415,39	410,15	1.038,50	4.864,04
Cikadu	12.965,27	302,85	14,64	13.282,76
Cikalongkulon	9.880,92	714,65	1.965,45	12.561,02
Cilaku	2.326,14	1.137,75	1.824,59	5.288,48
Cipanas	1.977,25	317,49	989,16	3.283,90
Ciranjang	18,57	46,61	3.341,57	3.406,75
Cugenang	3.399,52	1.336,71	1.532,93	6.269,16
Gekbrong	1.859,25	485,55	1.260,02	3.604,82
Haurwangi	947,41	254,84	1.813,09	3.015,34
Kadupandak	8.353,10	1.051,26	1.012,35	10.416,71
Karangtengah	18,57	246,05	4.583,09	4.847,71
Leles	11.102,53	258,88	117,28	11.478,69
Mande	5.125,63	1.118,19	3.183,41	9.427,23
Naringgul	17.663,07	55,54		17.718,61
Pacet	1.191,38	866,53	1.261,14	3.319,06
Pagelaran	10.315,27	1.393,77	633,77	12.342,81
Pasirkuda	7.727,11	12,31		7.739,42
Sindangbarang	9.009,47	3.046,11	3.793,07	15.848,65
Sukaluyu	872,67	761,54	3.142,54	4.776,75
Sukanagara	8.745,98			8.745,98
Sukaesmi	8.541,01	307,98	741,17	9.590,17
Takokak	13.693,02	173,04	85,70	13.951,76
Tanggeung	5.648,07	529,63	418,38	6.596,09
Warungkondang	1.027,23	267,08	2.440,70	3.735,00
Grand Total	211.890,64	21.208,23	47.546,20	280.645,07

Sumber : Inarisk, 2023 dalam KLHS RTRW Kab.Cianjur



Tabel tersebut mengindikasikan sebagian besar kecamatan di Kabupaten Cianjur memiliki luas area dengan tingkat bahaya sedang yang cukup besar. Ini mengindikasikan bahwa risiko bencana cuaca ekstrim di wilayah tersebut berada pada tingkat sedang. Beberapa kecamatan seperti Agrabinta, Cidaun, Naringgul, dan Sindangbarang memiliki luas area dengan tingkat bahaya tinggi yang signifikan. Ini menunjukkan potensi risiko bencana cuaca ekstrim yang lebih besar di wilayah-wilayah tersebut. Terdapat variasi yang cukup signifikan dalam distribusi tingkat bahaya antara kecamatan satu dengan yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi geografis, topografi, dan faktor lainnya di setiap kecamatan sangat bervariasi.

Total luas area di Kabupaten Cianjur yang berpotensi terdampak bencana cuaca ekstrim adalah 280.645,07 hektar. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di Kabupaten Cianjur memiliki risiko terkena dampak bencana cuaca ekstrim. Luas area dengan tingkat bahaya sedang mendominasi total luas area yang berpotensi terdampak. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di Kabupaten Cianjur memiliki risiko bencana cuaca ekstrim pada tingkat sedang. Meskipun luas area dengan tingkat bahaya tinggi lebih kecil dibandingkan dengan tingkat bahaya sedang, namun kontribusinya terhadap total luas area yang berpotensi terdampak cukup signifikan. Ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah dengan risiko tinggi perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya mitigasi.

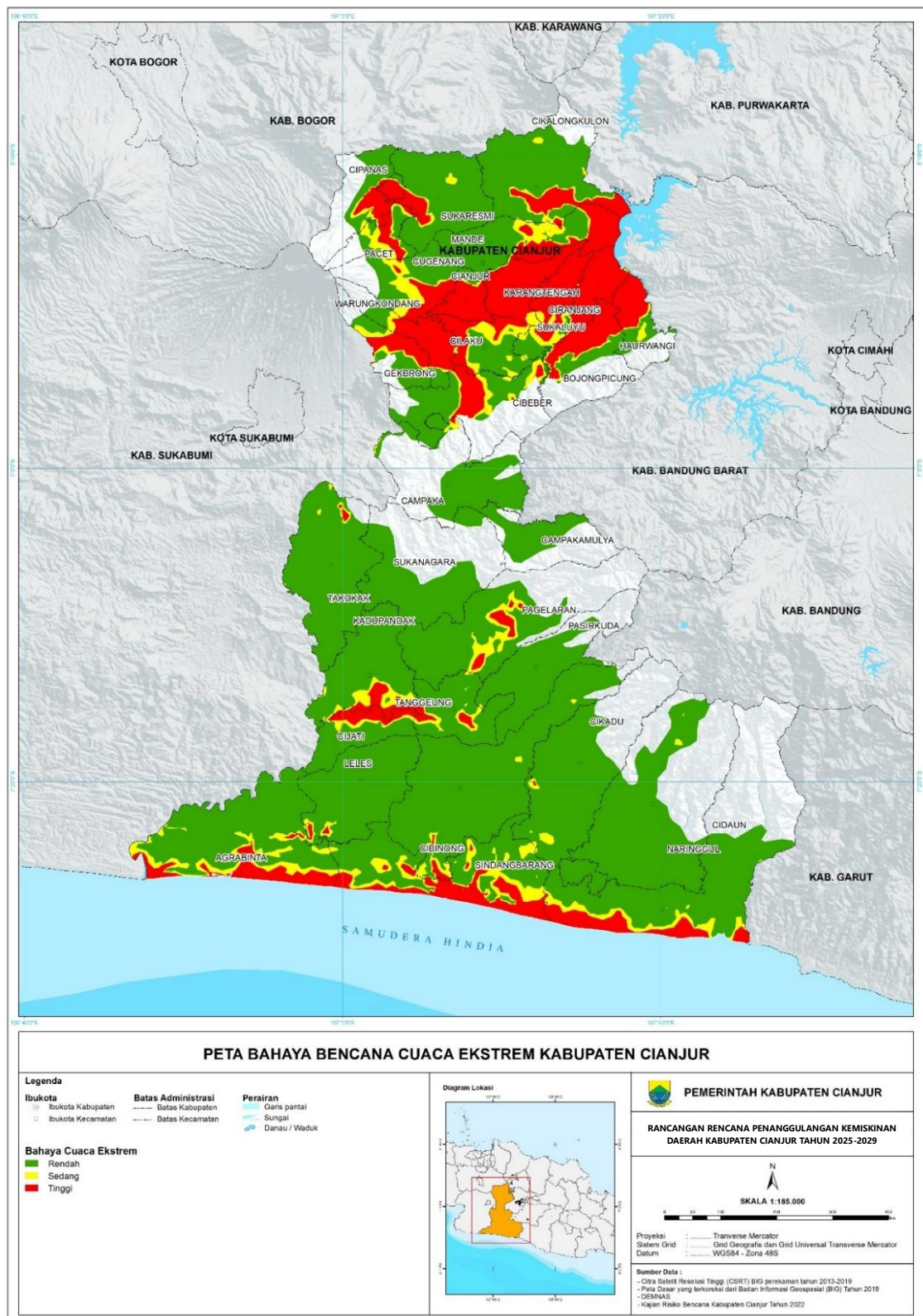
Beberapa kecamatan yang memiliki luas area dengan tingkat bahaya tinggi yang signifikan adalah Kecamatan Agrabinta, Cidaun, Naringgul, dan Sindangbarang. Kecamatan-kecamatan ini perlu menjadi fokus utama dalam upaya mitigasi bencana cuaca ekstrim.

Adaptasi dan mitigasi yang diperlukan antara lain peninjauan ulang terhadap rencana tata ruang wilayah, terutama di kecamatan-kecamatan dengan risiko tinggi, untuk memastikan bahwa pembangunan tidak dilakukan di daerah yang rawan bencana. Perlu diperkuat sistem peringatan dini untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang potensi bencana cuaca ekstrim. Perlu disusun rencana evakuasi yang jelas dan simulasi evakuasi secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Masyarakat perlu diberikan edukasi tentang risiko bencana cuaca ekstrim dan cara-cara untuk mengurangi dampaknya. Perlu dibangun infrastruktur yang tahan terhadap bencana, seperti sistem drainase yang baik, bangunan yang kuat, dan tempat evakuasi sementara. Perlu dilakukan upaya rehabilitasi lahan, seperti reboisasi dan terasering, untuk mengurangi risiko bencana. Perlu dilakukan kerjasama yang baik antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana.



LAPORAN AKHIR

Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029



Gambar 2.12 Peta Bahaya Bencana Cuaca Ekstrem

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sistem Informasi Geospasial, Tahun 2024



2.1.3.7 Rawan Bencana Kekeringan

Total luas area di Kabupaten Cianjur yang berpotensi terdampak kekeringan adalah 363.186,32 hektar. Ini merupakan angka yang cukup besar dan menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Cianjur rentan terhadap kekeringan. Kemudian mengenai bahaya kekeringan di Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut

Tabel 2.16 Rawan Bencana Kekeringan Kabupaten Cianjur

Kecamatan	Rawan Bencana Kekeringan		Luas Total
	Luas Bahaya (Ha)		
	Sedang	Tinggi	
Agrabinta		19.630,05	19.630,05
Bojongpicung	8.954,02		8.954,02
Campaka	5.330,25	8.832,81	14.163,06
Campakamulya		7.435,83	7.435,83
Cianjur	2.646,48		2.646,48
Cibeber	12.325,86	8,73	12.334,59
Cibinong		24.027,15	24.027,15
Cidaun		29.773,77	29.773,77
Cijati		4.869,58	4.869,58
Cikadu		19.500,36	19.500,36
Cikalongkulon	14.317,13		14.317,13
Cilaku	5.288,48		5.288,48
Cipanas	6.819,12		6.819,12
Ciranjang	3.409,62		3.409,62
Cugenang	7.647,78		7.647,78
Gekbrong	5.030,39		5.030,39
Haurwangi	4.590,97		4.590,97
Kadupandak		10.427,90	10.427,90
Karangtengah	4.847,71		4.847,71
Leles		11.478,69	11.478,69
Mande	9.431,73		9.431,73
Naringgul		28.763,80	28.763,80
Pacet	4.167,32		4.167,32
Pagelaran		20.139,59	20.139,59
Pasirkuda		10.517,72	10.517,72
Sindangbarang		15.859,59	15.859,59
Sukaluyu	4.776,75		4.776,75
Sukanagara		17.016,37	17.016,37
Sukaesmi	9.605,04		9.605,04
Takokak		14.549,86	14.549,86
Tanggeung		6.596,09	6.596,09
Warungkondang	4.569,77		4.569,77
Grand Total	113.758,41	249.427,90	363.186,32

Sumber : Inarisk, 2023 dalam KLHS RTRW Kab.Cianjur



Sebagian besar kecamatan dikategorikan sebagai "Sedang" dalam hal rawan bencana kekeringan. Ini menunjukkan bahwa secara umum, Kabupaten Cianjur memiliki risiko kekeringan yang cukup signifikan. Luas area dengan bahaya kekeringan tinggi bervariasi antar kecamatan. Beberapa kecamatan memiliki luas area bahaya tinggi yang cukup besar, menunjukkan potensi dampak kekeringan yang lebih parah. Beberapa kecamatan seperti Agrabinta, Cidaun, Naringgul, dan Sindangbarang memiliki luas area bahaya tinggi yang signifikan, mengindikasikan bahwa kecamatan-kecamatan ini memiliki risiko kekeringan yang paling tinggi.

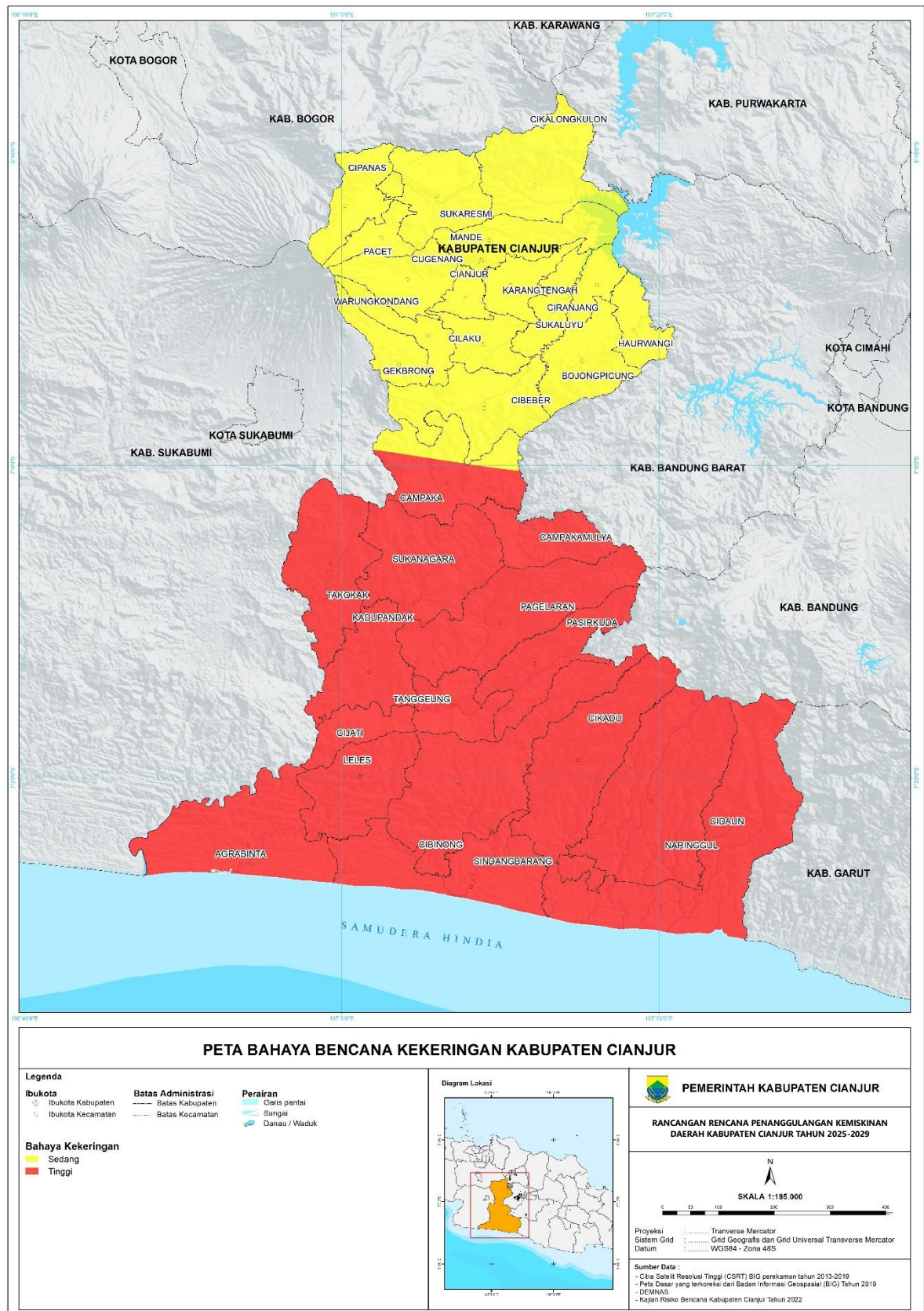
Meskipun tidak semua kecamatan memiliki luas bahaya tinggi yang besar, namun secara keseluruhan, kontribusi luas bahaya tinggi terhadap total luas area yang terdampak cukup signifikan. Ini menunjukkan bahwa kekeringan dengan tingkat keparahan tinggi dapat terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Cianjur.

Adaptasi dan Mitigasi yang diperlukan seperti peninjauan ulang terhadap rencana tata ruang wilayah, terutama di kecamatan-kecamatan dengan luas bahaya tinggi, untuk memastikan bahwa pembangunan tidak terlalu bergantung pada sumber daya air yang terbatas. Perlu dilakukan upaya konservasi air, seperti pembangunan sumur resapan, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), dan efisiensi penggunaan air. Petani perlu diberikan pelatihan dan dukungan untuk menerapkan teknologi pertanian yang tahan kekeringan. Perlu dilakukan pemantauan kondisi kekeringan secara berkala untuk dapat memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Masyarakat perlu diberikan edukasi tentang pentingnya menghemat air dan cara-cara untuk menghadapi kekeringan.



LAPORAN AKHIR

Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029



Gambar 2.13 Peta Bahaya Bencana Kekeringan

Sumber: Hasil Pengolahan Data Sistem Informasi Geospasial, Tahun 2024

2.1.4 Kondisi Infrastruktur

2.1.4.1 Sarana

Sarana yang terkait dengan pengembangan dan pengoptimalan pemasaran hasil produksi perkebunan sawit adalah sarana perdagangan dan jasa. Sarana perdagangan dan jasa berfungsi melayani dan menyediakan kebutuhan sehari-hari penduduk yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung yang dibutuhkan. Sarana perdagangan dan jasa akan selalu dibutuhkan penduduk karena menyangkut pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Jenis-jenis Sarana perdagangan dan jasa. Sarana perdagangan dan niaga ini tidak selalu berdiri sendiri dan terpisah dengan bangunan sarana yang lain. Dasar penyediaan selain berdasarkan jumlah penduduk yang akan dilayaninya, juga mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan / blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu.

Tabel 2.17 Jumlah Sarana Perdagangan di Kabupaten Cianjur

Jenis Sarana Perdagangan	Tahun (Unit)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pasar	24	24	24	24	26
Toko	52	52	58	154	154
Kios				5.962	6.258
Warung				58	5.762
Jumlah	76	76	82	6.198	12.200

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka, 2024

2.1.4.2 Prasarana

Prasarana yang terkait dengan pengembangan dan pengoptimalan pemasaran hasil produksi perkebunan kelapa sawit yaitu jaringan irigasi. Jaringan irigasi merupakan bagian infrastruktur penting untuk mendukung peningkatan produksi pertanian yang merupakan sektor dominan dalam perekonomian di Kabupaten Cianjur. Daerah Irigasi (D.I) yang ada di Kabupaten Cianjur terbagi dalam kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten berdasarkan Permen PUPR No 14 Tahun 2015. Dengan jumlah daerah irigasi kewenangan pusat sebanyak 1 daerah irigasi dengan luasan sebesar 5.484 hektar dan kewenangan provinsi sebanyak 7 daerah irigasi dengan luasan sebesar 9.176 hektar sedangkan kewenangan Kabupaten sebanyak 161 daerah irigasi dengan luasan 18.901 hektar. Pada tahun 2023, jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 57,65 persen.

Sistem jaringan irigasi berupa jaringan irigasi teknis dan irigasi non-teknis tersebar di seluruh kecamatan, terdiri atas:



- a. rehabilitasi tuntas DI Cidadali;
- b. rehabilitasi DI Kewenangan Pusat yaitu DI Cihea, meliputi Kecamatan Bojongpicung, Kecamatan Ciranjang dan Kecamatan Haurwangi;
- c. rehabilitasi DI Kewenangan Provinsi;
- d. rehabilitasi DI Kewenangan Kabupaten;
- e. peningkatan dan rehabilitasi DI Gempol di Desa Girimukti, Desa Muaracikadu, dan Desa Sirnagalih Kecamatan Sindangbarang;
- f. peningkatan dan rehabilitasi DI Jaya Harapan/Cisiluman/Cibural di Desa Cibuluh, Desa Cimaragang dan Desa Neglasari Kecamatan Cidaun; g. rencana pembangunan jaringan irigasi baru DI Cilandak, DI Tonjong Panto, DI Cidadali dan DI Curugdendeng, DI Parungbangkong;
- g. Rehabilitasi Daerah Irigasi pedesaan tersebar di Kabupaten Cianjur; dan
- h. Rencana peningkatan irigasi pedesaan menjadi irigasi kabupaten tersebar di Kabupaten Cianjur.

2.2 KONDISI SOSIAL EKONOMI

2.2.1 Kondisi Demografi Wilayah

2.2.1.1 Jumlah Penduduk

Peninjauan kependudukan dalam perencanaan tata ruang merupakan hal yang sangat penting, karena kependudukan sangat berperan dalam sistem tata ruang dan menjadi subjek serta objek daripada pembangunan. Kondisi kependudukan meliputi jumlah, penyebaran, perkembangan, dan kepadatan penduduk. Terdapat penurunan jumlah penduduk pada tahun 2023 yang mencapai 2.535.002 jiwa, jumlah tersebut menurun dari tahun 2022 sebanyak 2.542.793 jiwa. Adanya penurunan jumlah penduduk pada tahun 2023 disebabkan oleh penyesuaian satu data Indonesia dimana pada tahun 2019-2022 menggunakan proyeksi dari Badan Pusat Statistik sedangkan pada tahun 2023 menggunakan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur.

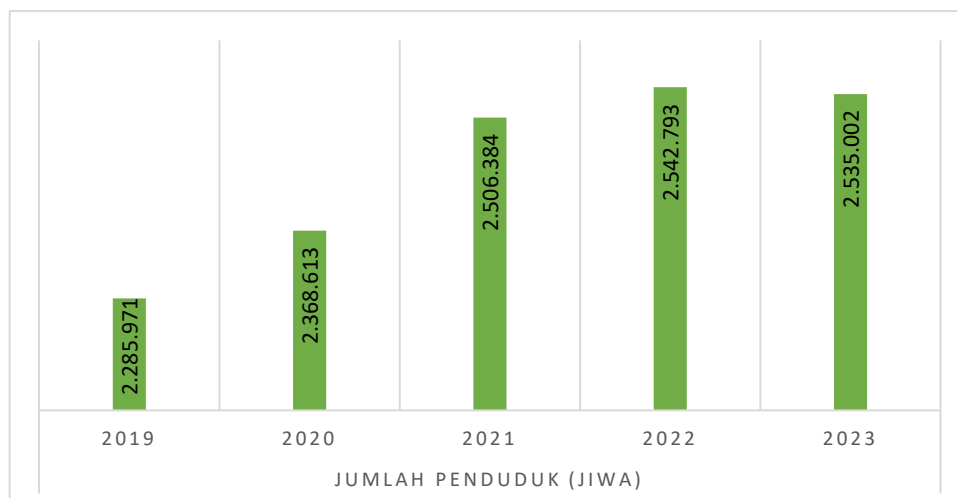
Tabel 2.18 Jumlah Penduduk Kabupaten Cianjur 2019-2023

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Agrabinta	35.547	37.003	39.299	41.323	39.861
2	Leles	28.461	29.231	30.900	31.730	32.150
3	Sindangbarang	52.131	55.009	58.689	59.912	59.560
4	Cidaun	57.084	60.967	67.127	70.642	69.114
5	Naringgul	42.164	43.863	45.846	48.036	47.065
6	Cibinong	57.350	59.038	64.002	65.469	64.566
7	Cikadu	32.615	34.802	37.051	37.508	37.617
8	Tanggeung	46.704	48.198	50.940	51.393	51.727

LAPORAN AKHIR*Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029*

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2019	2020	2021	2022	2023
9	Pasirkuda	32.849	33.670	35.189	38.898	35.939
10	Kadupandak	47.878	50.313	53.525	53.792	53.960
11	Cijati	31.252	32.203	35.350	34.796	35.929
12	Takokak	48.159	49.604	53.381	52.308	54.573
13	Sukanagara	53.282	54.682	57.195	57.201	57.408
14	Pagelaran	70.393	72.565	76.920	77.227	78.343
15	Campaka	64.314	67.286	70.627	70.930	71.311
16	Campakamulya	22.082	22.842	23.495	24.073	23.690
17	Cibeber	122.656	128.467	136.232	137.561	138.117
18	Warungkondang	71.922	75.649	80.972	80.525	82.411
19	Gekbrong	54.430	58.120	61.366	63.048	62.859
20	Cilaku	108.621	112.332	119.425	122.188	121.056
21	Sukaluyu	83.212	86.404	92.837	93.892	93.999
22	Bojongpicung	80.537	81.903	86.064	86.111	86.388
23	Haurwangi	60.258	62.244	64.895	65.998	65.179
24	Ciranjang	84.102	86.231	89.523	91.833	89.727
25	Mande	76.159	78.037	82.134	84.222	83.111
26	Karangtengah	153.643	158.594	166.638	170.927	167.556
27	Cianjur	168.851	171.154	178.012	176.368	177.314
28	Cugenang	108.284	111.953	119.540	120.961	121.370
29	Pacet	102.328	106.422	111.838	113.981	113.103
30	Cipanas	105.616	109.737	114.257	115.574	115.127
31	Sukaresmi	82.504	86.191	92.615	93.720	93.772
32	Cikalongkulon	100.583	103.899	110.500	110.646	111.100
Kabupaten Cianjur		2.285.971	2.368.613	2.506.384	2.542.793	2.535.002

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka Tahun 2020-2024

**Gambar 2.14 Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023**

2.2.1.2 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pembangunan. Kepadatan penduduk digunakan untuk mengetahui persebaran penduduk suatu wilayah dan penataan ruang khususnya distribusi permukiman. Kepadatan penduduk merupakan indikator awal untuk mendeteksi tingkat perkembangan wilayah beserta seluruh kemungkinan dampak yang di timbulkan. Kabupaten Cianjur memiliki kepadatan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Cikalongkulon sebanyak 69 jiwa/Ha. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini.

Tabel 2.19 Kepadatan Penduduk Kabupaten Cianjur Tahun 2023

No.	Kecamatan	Luas Wilayah Terbangun (Ha)	Jumlah Penduduk (jiwa) 2023	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha) 2023
1	Agrabinta	19.318,43	39.861	2
2	Leles	1.103,71	32.150	29
3	Sindangbarang	11.357,66	59.560	5
4	Cidaun	4.301,03	69.114	16
5	Naringgul	1.494,33	47.065	31
6	Cibinong	6.909,22	64.566	9
7	Cikadu	19.589,50	37.617	2
8	Tanggeung	12.095,52	51.727	4
9	Pasirkuda	4.289,88	35.939	8
10	Kadupandak	4.019,97	53.960	13
11	Cijati	12.122,54	35.929	3
12	Takokak	2.756,38	54.573	20
13	Sukanagara	3.603,44	57.408	16
14	Pagelaran	1.254,10	78.343	62
15	Campaka	3.015,25	71.311	24
16	Campakamulya	2.268,01	23.690	10
17	Cibeber	1.412,09	138.117	98
18	Warungkondang	8.193,05	82.411	10
19	Gekbrong	1.606,72	62.859	39
20	Cilaku	11.392,39	121.056	11
21	Sukaluyu	5.477,24	93.999	17
22	Bojongpicung	6.776,63	86.388	13
23	Haurwangi	1.888,21	65.179	35
24	Ciranjang	9.841,67	89.727	9
25	Mande	6.570,76	83.111	13
26	Karangtengah	15.126,06	167.556	11
27	Cianjur	2.209,33	177.314	80
28	Cugenang	14.210,89	121.370	9
29	Pacet	7.482,00	113.103	15
30	Cipanas	12.182,48	115.127	9
31	Sukaresmi	4.999,37	93.772	19
32	Cikalongkulon	1.610,14	111.100	69
Kabupaten Cianjur		220.477,98	2.535.002	11

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2024



2.2.1.3 Laju Perkembangan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah rasio antara pertambahan penduduk dalam interval selama satu tahun terhadap jumlah penduduk di tahun sebelumnya. Semakin cepat laju pertumbuhan penduduk mengindikasikan bahwa jumlah populasi suatu wilayah semakin banyak. Sebaliknya, laju pertumbuhan penduduk yang lambat menunjukkan jumlah populasi suatu wilayah sedikit. Berdasarkan kriteria tersebut, LPP Kabupaten Cianjur pada tahun 2022-2023 yaitu sebesar 1,14%.

Tabel 2.20 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2023

Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)	
	2021-2022	2022-2023
Agrabinta	1,09	1,43
Leles	0,24	4,05
Sindangbarang	1,36	1,48
Cidaun	0,90	2,96
Naringgul	0,68	2,66
Cibinong	1,16	0,88
Cikadu	0,74	1,53
Tanggeung	1,39	1,54
Pasirkuda	1,12	2,13
Kadupandak	0,92	0,81
Cijati	0,57	1,64
Takokak	0,26	2,23
Sukanagara	1,50	0,37
Pagelaran	1,17	1,85
Campaka	0,98	0,97
Campakamulya	0,13	0,83
Cibeber	1,60	1,38
Warungkondang	2,02	1,78
Gekbrong	1,98	2,43
Cilaku	2,18	1,37
Sukaluyu	2,75	1,25
Bojongpicung	1,81	0,38
Haurwangi	1,94	0,44
Ciranjang	1,97	0,23
Mande	1,85	1,19
Karangtengah	2,26	0,55
Cianjur	1,02	-0,39
Cugenang	1,82	1,53
Pacet	1,54	1,13
Cipanas	0,99	0,76
Sukaresmi	1,48	1,25
Cikalongkulon	1,50	0,54
Jumlah	1,50	114

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka, 2024



2.2.1.4 Struktur Penduduk

Struktur penduduk merupakan komposisi karakteristik penduduk yang dilihat dari jenis kelamin, kelompok umur dan mata pencaharian. Adapun struktur penduduk di Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

A. Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Struktur penduduk menurut jenis kelamin adalah pengelompokan penduduk berdasarkan jenis kelaminnya. Berdasarkan data BPS Kabupaten Cianjur, sex ratio rata-rata di Kabupaten Cianjur berbanding sama yaitu 100, yaitu dalam 100 penduduk perempuan terdapat 100 penduduk laki-laki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.21 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Cianjur Tahun 2023

Kecamatan	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Sex Ratio	Jumlah (Jiwa)
Agrabinta	20.498	19.363	106	39.861
Leles	16.965	15.185	114	32.150
Sindangbarang	30.238	29.322	103	59.560
Cidaun	36.092	33.022	110	69.114
Naringgul	25.078	21.987	115	47.065
Cibinong	33.110	31.456	10+	64.566
Cikadu	20.044	17.573	115	37.617
Tanggeung	26.287	25.440	103	51.727
Pasirkuda	19.170	16.769	115	35.939
Kadupandak	27.563	26.397	104	53.960
Cijati	18.154	17.775	102	35.929
Takokak	27.840	26.733	105	54.573
Sukanagara	29.253	28.155	104	57.408
Pagelaran	39.947	38.396	104	78.343
Campaka	36.657	34.654	106	71.311
Campakamulya	12.565	11.125	114	23.690
Cibeber	70.160	67.957	103	138.117
Warungkondang	42.065	40.346	104	82.411
Gekbrong	32.801	30.058	110	62.859
Cilaku	61.131	59.925	102	121.056
Sukaluyu	48.037	45.962	105	93.999
Bojongpicung	43.622	42.766	102	86.388
Haurwangi	33.836	31.343	108	65.179
Ciranjang	45.389	44.338	102	89.727
Mande	42.488	40.623	104	83.111
Karangtengah	84.766	82.790	103	167.556
Cianjur	89.013	88.301	101	177.314
Cugenang	62.623	58.747	107	121.370
Pacet	58.192	54.911	106	113.103
Cipanas	60.026	55.101	110	115.127
Sukaesmi	48.423	45.349	107	93.772
Cikalongkulon	56.913	54.187	105	111.100
Kabupaten Cianjur	1.298.946	1.236.056	105	2.535.002

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka, 2024



B. Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Struktur penduduk menurut umur dalam arti demografi adalah komposisi penduduk menurut kelompok umur tertentu. Komposisi menurut umur dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- Usia Belum Produktif (Kelompok Umur < 14 Tahun),
- Usia Produktif (Kelompok Umur Antara 15 - 59 Tahun),
- Usia Tidak Produktif (Kelompok Umur > 60 Tahun)

Jumlah usia produktif di Kabupaten Cianjur lebih banyak daripada jumlah penduduk dengan usia belum produktif dan tidak produktif, seperti terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.22 Jumlah Penduduk Menurut Umur Kabupaten Cianjur Tahun 2023

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Menurut Umur (Jiwa)			Keterangan
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
0-4	105.414	99.166	204.580	Usia Belum Produktif
5-9	127.158	120.138	247.296	
10-14	123.165	116.034	239.199	
15-19	69.952	68.417	138.369	Usia Produktif
20-24	113.312	106.349	219.661	
25-29	108.151	97.435	205.586	
30-34	98.644	92.141	190.785	
35-39	93.587	90.220	183.807	
40-44	92.388	93.285	185.673	
45-49	83.679	87.185	170.864	
50-54	79.952	77.859	157.811	
55-59	63.309	61.117	124.426	
60-64	53.726	48.305	102.031	
65-69	36.610	32.417	69.027	Usia Tidak Produktif
70-74	25.242	21.006	46.248	
75+	24.657	24.982	49.639	
Jumlah	1.298.946	1.236.056	2.535.002	

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka, 2024

2.2.2 Kondisi Sosial

Kabupaten Cianjur memiliki kondisi sosial budaya yang kuat, dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional Sunda yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Kehidupan sehari-hari masyarakat diwarnai oleh adat istiadat yang berakar pada nilai religius dan harmoni dengan alam. Kesenian tradisional seperti *calung*, *kendang pencak*, dan *jaipongan* masih dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya. Tradisi seperti *nyorog* (memberi hantaran kepada kerabat dalam rangka perayaan hari besar Islam) dan *mapag waktu* (ritual menyambut masa tanam atau panen) menggambarkan keterikatan masyarakat pada pola hidup agraris.



Gotong royong juga menjadi bagian integral dalam kehidupan sosial, terlihat dalam pembangunan infrastruktur desa dan kegiatan adat.

Kearifan lokal masyarakat Cianjur banyak tercermin dalam cara mereka mengelola lingkungan. Prinsip "leuweung hejo, masyarakat ngejo" (hutan hijau, masyarakat sejahtera) menjadi panduan dalam menjaga keseimbangan alam, terutama di kawasan pegunungan dan hutan lindung. Tradisi *ngababakan* (membuka lahan secara adat) dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Selain itu, pola hidup berbasis kearifan lokal terlihat dalam pengelolaan air irigasi untuk pertanian, yang dilakukan secara adil melalui musyawarah. Praktik ini tidak hanya menjaga produktivitas lahan pertanian, tetapi juga mencegah konflik antarwarga.

Religiusitas menjadi pilar penting dalam kehidupan masyarakat Cianjur. Mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan praktik keagamaan yang menyatu dengan adat setempat, seperti pengajian rutin di masjid dan tradisi ziarah kubur pada waktu tertentu. Hubungan sosial yang harmonis juga didukung oleh prinsip hidup "silih asah, silih asih, silih asuh" (saling mengasah, mengasihi, dan mengasuh), yang mencerminkan semangat toleransi dan solidaritas. Dengan kekuatan sosial budaya dan kearifan lokal ini, masyarakat Cianjur memiliki fondasi yang kokoh untuk menghadapi tantangan modernisasi tanpa kehilangan jati diri mereka.

2.2.3 Kondisi Ekonomi

2.2.3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur berdasarkan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Cianjur dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 mengalami laju pertumbuhan rata-rata 4,18%. Pertumbuhan tersebut didukung oleh peningkatan sektor produksi dan investasi. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, masih tetap menjadi andalan dalam memberikan sumbangan terbesar terhadap struktur PDRB daerah pada tahun 2019-2023. Disusul oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Tabel 2.23 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Cianjur Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

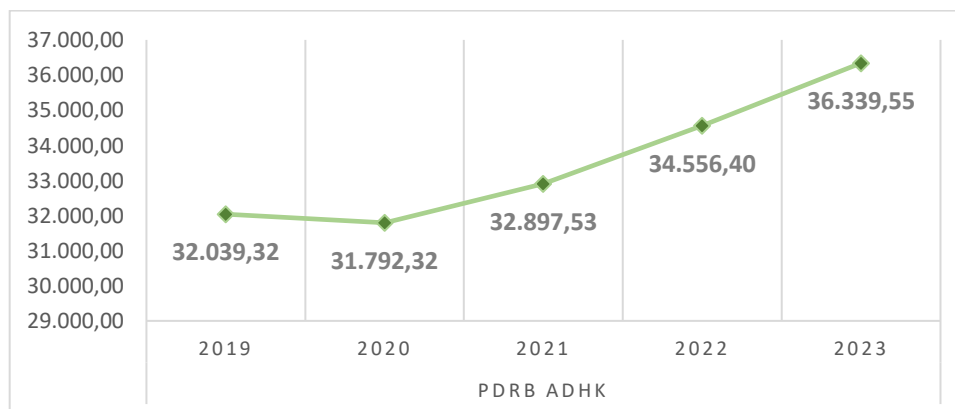
Kategori	Lapangan Usaha	PDRB ADHK				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.109,61	9.263,12	9.568,56	9.944,80	10.357,26
B	Pertambangan dan Penggalian	80,86	80,83	87,59	91,86	97,89
C	Industri Pengolahan	2.226,79	2.242,74	2.357,52	2.510,49	2.641,95
D	Pengadaan Listrik dan Gas	27,58	27,06	29,88	32,02	33,66



LAPORAN AKHIR*Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029*

Kategori	Lapangan Usaha	PDRB ADHK				
		2019	2020	2021	2022	2023
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,53	12,37	13,54	13,27	13,16
F	Konstruksi	2.846,55	2.659,81	2.841,36	2.898,47	3.204,88
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.654,88	5.253,15	5.422,59	5.683,99	5.910,47
H	Transportasi dan Pergudangan	2.985,39	2.913,89	2.919,17	3.168,05	3.356,87
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.074,23	2.013,50	2.017,63	2.210,20	2.380,09
J	Informasi dan Komunikasi	1.405,92	1.716,22	1.840,59	1.951,39	2.032,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	733,49	739,16	792,15	791,99	809,17
L	Real Estate	757,22	757,31	856,24	922,17	982,01
M,N	Jasa Perusahaan	239,42	200,58	218,45	236,40	250,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	777,6	763,45	747,68	738,34	756,88
P	Jasa Pendidikan	1.484,32	1.548,95	1.555,01	1.600,88	1.664,63
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	284,31	289,51	308,56	322,44	337,15
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.340,62	1.310,67	1.321,02	1.439,64	1.510,93
PDRB		32.039,32	31.792,32	32.897,53	34.556,40	36.339,55

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka, 2019-2023



Gambar 2.15 Trend Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Cianjur Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka, 2019-2023

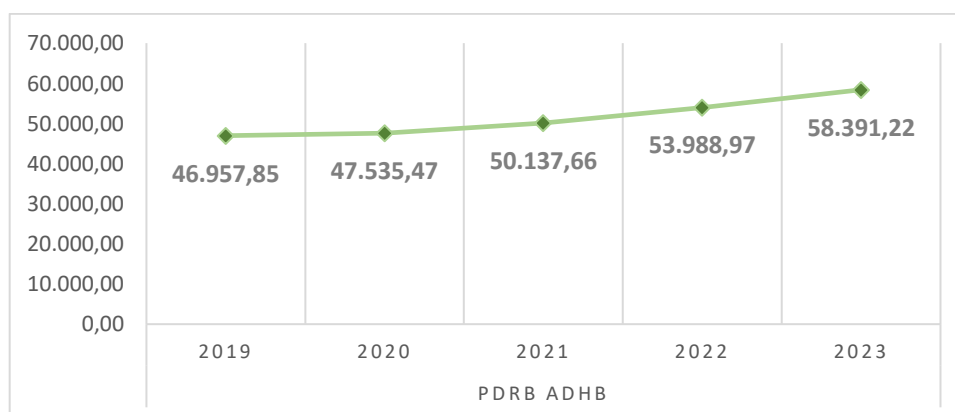
Secara umum, PDRB ADHK Kabupaten Cianjur menurut lapangan usaha Tahun 2019-2023 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan setiap tahunnya. PDRB ADHK hanya mengalami penurunan pada tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19.



Tabel 2.24 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Cianjur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Kategori	Lapangan Usaha	PDRB ADHB				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15.107,97	15.645,96	16.441,35	17.507,76	18.864,37
B	Pertambangan dan Penggalan	98,67	99,47	114,65	1.222,23	133,65
C	Industri Pengolahan	3.275,49	3.358,80	3.585,17	3.924,20	4.243,19
D	Pengadaan Listrik dan Gas	42,57	41,66	46,34	49,68	52,44
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17,47	20,62	22,66	22,54	22,93
F	Konstruksi	3.852,94	3.616,19	4.147,66	4.424,52	5.056,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.896,13	7.497,56	7.846,69	8.450,64	9.095,26
H	Transportasi dan Pergudangan	4.583,22	4.635,12	4.739,83	5.331,91	5.819,61
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.934,93	2.980,42	3.019,11	3.394,87	3.713,52
J	Informasi dan Komunikasi	1.372,31	1.672,05	1.755,90	1.820,64	1.897,18
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1064,31	1072,73	1184,94	1.248,70	1.291,18
L	Real Estate	893,17	911,14	1034,35	1.125,97	1.215,35
M,N	Jasa Perusahaan	326,52	280,06	307,72	347,42	376,61
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1151,67	1152,64	1142,55	1.122,27	1.165,67
P	Jasa Pendidikan	2.107,37	2.287,22	2.438,69	2.592,15	2.758,89
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	383,25	397,13	428,74	448,23	477,73
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.849,86	1.866,69	1.881,32	2.055,24	2.206,78
PDRB		46.957,85	47.535,47	50.137,66	53.988,97	58.391,22

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka, 2019-2023



Gambar 2.16 Trend Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Cianjur Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

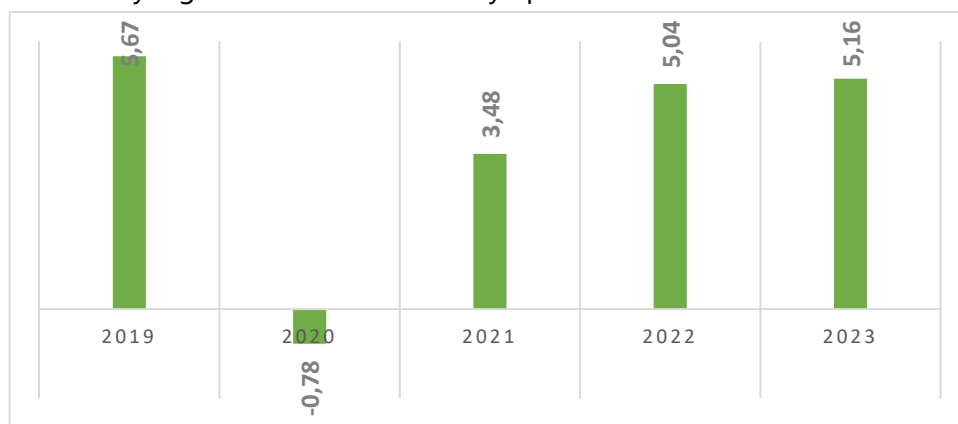
Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka, 2019-2023

Secara umum, PDRB ADHB Kabupaten Cianjur menurut lapangan usaha Tahun 2019-2023 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan setiap tahunnya. PDRB ADHB hanya mengalami penurunan pada tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19.



2.2.3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang. Laju pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dari analisis laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dengan data dasar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah. Untuk Kabupaten Cianjur, LPE berdasarkan PDRB Kabupaten Cianjur Menurut Lapangan Usaha Atas Harga Konstan memiliki karakteristik LPE fluktuatif atau mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi berada di tahun 2019-2020 yang diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19.



Gambar 2.17 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur

Pada tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur kembali tumbuh menjadi 3,48 persen dan tahun 2022 tumbuh menjadi 5,04 persen. Pertumbuhan ekonomi diyakini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan jumlah kemiskinan. Namun demikian pengaruh tersebut dapat saja berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Keadaan distribusi pendapatan, jumlah penduduk, urbanisasi memiliki kaitan penting dalam menentukan pengaruh yang terjadi antara pertumbuhan ekonomi dengan penurunan jumlah kemiskinan.

2.2.4 Pandemi Covid-19 di Kabupaten Cianjur

Pandemi COVID-19 yang melanda Kabupaten Cianjur sejak awal tahun 2020 memberikan dampak yang signifikan pada berbagai sektor kehidupan. Sebagai salah satu wilayah yang padat penduduk, penyebaran virus di Cianjur sempat meningkat pesat, terutama pada masa awal pandemi ketika pemahaman masyarakat tentang protokol kesehatan masih minim. Data dari pemerintah daerah menunjukkan bahwa puncak kasus terjadi pada pertengahan tahun 2021, saat varian Delta meluas. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)



dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diterapkan untuk mengendalikan penyebaran virus, tetapi kepatuhan masyarakat menjadi tantangan utama.

Dampak ekonomi sangat terasa di Cianjur, terutama karena banyak penduduknya bergantung pada sektor informal dan pertanian. Penutupan pasar, pembatasan transportasi, dan pengurangan aktivitas perdagangan menyebabkan penurunan pendapatan bagi banyak keluarga. Tidak sedikit pelaku usaha kecil yang terpaksa menghentikan operasional akibat minimnya permintaan. Pemerintah Kabupaten Cianjur merespons dengan menyalurkan bantuan sosial dan menggalakkan program padat karya untuk mendukung masyarakat terdampak, meskipun distribusi bantuan tersebut terkadang menghadapi kendala logistik dan ketidakmerataan.

Di sektor kesehatan, pandemi menyoroiti keterbatasan fasilitas medis di Cianjur. Rumah sakit rujukan seperti RSUD Sayang mengalami kelebihan kapasitas, terutama selama lonjakan kasus. Keterbatasan alat pelindung diri (APD), jumlah tenaga medis, dan fasilitas ICU menjadi tantangan besar. Namun, upaya vaksinasi yang dimulai pada awal tahun 2021 memberikan harapan baru. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan lembaga keagamaan, untuk meningkatkan kesadaran pentingnya vaksinasi. Hingga akhir 2022, cakupan vaksinasi di Kabupaten Cianjur meningkat secara signifikan, meskipun masih terdapat kesenjangan di daerah terpencil.

Dari sisi sosial, pandemi memicu perubahan perilaku masyarakat. Kesadaran akan pentingnya kesehatan meningkat, tetapi dampak psikososial seperti stres, kecemasan, dan konflik keluarga juga meningkat. Pembelajaran daring bagi anak sekolah menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi keluarga dengan keterbatasan akses internet dan perangkat digital. Meski demikian, solidaritas masyarakat tampak melalui gerakan bantuan sosial dan komunitas lokal yang mendukung kelompok rentan. Pandemi COVID-19 di Kabupaten Cianjur menjadi momentum penting untuk memperkuat ketahanan sosial, sistem kesehatan, dan kesiapan menghadapi krisis di masa mendatang.

Dampak sosial dari pandemi juga terlihat dalam perubahan perilaku masyarakat. Banyak individu kehilangan pekerjaan akibat pengurangan karyawan di berbagai sektor, terutama di bidang pariwisata dan perdagangan. Situasi ini meningkatkan angka kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi di Kabupaten Cianjur. Masyarakat terpaksa beradaptasi dengan cara baru dalam bekerja dan berinteraksi sosial. Di sisi lain, beberapa inovasi muncul dalam bentuk pelayanan publik berbasis online untuk memenuhi kebutuhan masyarakat meskipun dalam kondisi terbatas.

Secara keseluruhan, pandemi Covid-19 telah memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di Kabupaten Cianjur. Masyarakat yang sebelumnya sudah rentan kini semakin terpuruk karena kurangnya akses terhadap informasi dan layanan dasar. Kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi perlu lebih memperhatikan aspek kesenjangan



digital dan menyediakan dukungan bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pemulihan pasca-pandemi.

Pandemi COVID-19 memberikan dampak besar terhadap kelangsungan UMKM di Kabupaten Cianjur, yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Untuk memulihkan sektor ini, pemerintah daerah melakukan berbagai penyesuaian program dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan daya saing pelaku usaha. Pelatihan kewirausahaan berbasis digital menjadi prioritas untuk membantu pelaku UMKM beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi masyarakat menuju platform daring. Selain itu, akses pembiayaan dengan suku bunga rendah dan bantuan modal usaha diberikan untuk mendukung keberlanjutan usaha. Program-program ini dirancang untuk membekali pelaku UMKM dengan keterampilan baru dan meningkatkan daya saing mereka di pasar lokal maupun global.

Selain penguatan kompetensi SDM, kolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas lokal juga menjadi strategi kunci. Pemerintah Kabupaten Cianjur menggandeng platform e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar UMKM, serta membentuk klaster usaha yang memungkinkan kolaborasi antar pelaku usaha. Langkah ini didukung oleh penguatan infrastruktur digital di wilayah pedesaan untuk memperluas akses internet. Meski demikian, pelaksanaan program menghadapi kendala seperti rendahnya tingkat literasi digital dan resistensi terhadap perubahan. Penyesuaian program pemulihan UMKM di Kabupaten Cianjur menunjukkan pentingnya pendekatan holistik yang mencakup peningkatan kapasitas individu, penguatan kolaborasi, dan penyediaan akses pasar untuk membangun daya tahan sektor UMKM di tengah krisis. (Rohmah, et all, 2022, <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20526024&lokasi=lokal>).

2.3 KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

2.3.1 Legislasi

1. Kerangka Hukum dan Kebijakan Daerah

Pengurangan kemiskinan di Kabupaten Cianjur didukung oleh berbagai peraturan daerah (Perda) dan kebijakan yang mengacu pada regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Pemerintah Kabupaten Cianjur telah menetapkan Perda tentang pengentasan kemiskinan, yang memuat pedoman implementasi program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi lokal. Kebijakan ini dikuatkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang menetapkan target pengurangan angka kemiskinan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Namun, penerapan legislasi sering kali



terhambat oleh kurangnya pengetahuan masyarakat dan aparatur pemerintah terhadap isi regulasi tersebut.

Kebijakan yang menjadi dasar dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cianjur antara lain :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Bantuan Sosial Dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Cianjur.

2. Regulasi tentang Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa yang menjadi salah satu instrumen pengurangan kemiskinan di pedesaan dikelola berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) yang diadaptasi oleh pemerintah daerah melalui kebijakan teknis. Di Cianjur, penggunaan Dana Desa untuk pengentasan kemiskinan diatur secara rinci dalam petunjuk teknis yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten. Fokusnya adalah pada pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan berbasis desa. Meski demikian, pengawasan terhadap implementasi regulasi ini masih lemah, sehingga muncul potensi penyalahgunaan dana atau ketidakefektifan program.

Regulasi yang menjadi dasar dalam pengelolaan dana desa antara lain :

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023

3. Legislasi untuk Program Bantuan Sosial

Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) diatur oleh regulasi nasional dan dilaksanakan di daerah berdasarkan peraturan kepala daerah. Di Cianjur, peraturan ini diperkuat dengan keputusan bupati yang menetapkan mekanisme penyaluran dan pemantauan bantuan sosial. Upaya legislasi ini bertujuan memastikan bantuan tepat sasaran dan sampai kepada masyarakat miskin yang membutuhkan. Namun, keterbatasan data terpadu sering menjadi kendala dalam memastikan efektivitas kebijakan, sehingga beberapa kelompok rentan belum terjangkau oleh program bantuan.



4. Dukungan Legislasi untuk Pemberdayaan Ekonomi

Legislasi di Cianjur juga mendukung pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Perda tentang pengembangan UMKM dan koperasi menyediakan kerangka hukum bagi penguatan ekonomi lokal. Pemerintah kabupaten juga mendorong pengembangan sektor keuangan mikro melalui regulasi yang memfasilitasi akses masyarakat miskin terhadap pembiayaan. Meski demikian, efektivitas regulasi ini terkadang terhambat oleh kurangnya sinergi antara peraturan yang ada dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Sebagai contoh, prosedur untuk mengakses program sering kali dianggap terlalu rumit oleh masyarakat miskin.

5. Rekomendasi Strategis untuk Penguatan Legislasi

Untuk meningkatkan efektivitas legislasi dalam pengurangan kemiskinan, beberapa langkah strategis dapat dilakukan. Pertama, harmonisasi regulasi di tingkat daerah dengan kebijakan nasional untuk memastikan keselarasan dalam pelaksanaan program. Kedua, penyederhanaan prosedur administratif untuk meningkatkan aksesibilitas program bagi masyarakat miskin. Ketiga, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan regulasi yang ada. Keempat, penguatan mekanisme pengawasan terhadap implementasi kebijakan untuk mencegah penyimpangan. Kelima, pelibatan masyarakat dan organisasi lokal dalam proses legislasi untuk memastikan kebijakan yang dibuat relevan dengan kebutuhan di lapangan. Dengan langkah-langkah ini, legislasi dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mendukung pengentasan kemiskinan di Cianjur.

2.3.2 Kelembagaan

1. Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Cianjur memainkan peran utama dalam pengurangan kemiskinan melalui berbagai program strategis yang dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait. Dinas Sosial, misalnya, bertanggung jawab atas pelaksanaan program bantuan sosial seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan daya beli masyarakat miskin. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi aktif dalam program pelatihan keterampilan kerja yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat usia produktif agar mampu memasuki pasar kerja atau mengembangkan usaha mandiri. Meskipun demikian, koordinasi antardinas sering kali menjadi tantangan, terutama dalam hal sinkronisasi data penerima manfaat dan evaluasi efektivitas program.

2. Peran Lembaga Non-Pemerintah dan Komunitas Lokal

Lembaga non-pemerintah (NGO) dan komunitas lokal di Cianjur berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengurangan kemiskinan. Beberapa NGO fokus pada program



pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan kewirausahaan, peningkatan literasi keuangan, dan pengembangan koperasi. Komunitas lokal juga berkontribusi melalui kegiatan berbasis gotong royong, seperti pembangunan infrastruktur dasar (jalan desa, saluran irigasi) yang mendukung produktivitas masyarakat. Namun, keterbatasan dana dan kapasitas teknis menjadi kendala utama bagi keberlanjutan inisiatif yang dipimpin oleh NGO dan komunitas ini.

3. Kelembagaan Keuangan Mikro

Lembaga keuangan mikro seperti koperasi dan Bank Wakaf Mikro di pesantren-pesantren di Cianjur memberikan akses permodalan kepada masyarakat miskin, khususnya yang tidak dapat menjangkau layanan perbankan formal. Program-program ini membantu masyarakat dalam memulai atau mengembangkan usaha kecil. Namun, kendala seperti rendahnya literasi keuangan dan risiko kredit macet masih perlu diatasi melalui pendampingan intensif dan pelatihan keuangan. Penguatan kelembagaan keuangan mikro ini berpotensi meningkatkan inklusi keuangan yang secara langsung mendukung pengurangan kemiskinan.

4. Dukungan dari Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, turut berperan dalam mengurangi kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Beberapa program pelatihan berbasis keterampilan kerja telah diimplementasikan di sekolah vokasi dan balai pelatihan kerja untuk mendukung generasi muda memasuki pasar tenaga kerja. Namun, tantangan utama adalah kurangnya link and match antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri lokal, sehingga lulusan sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lebih erat antara lembaga pendidikan, dunia usaha, dan pemerintah.

5. Tantangan dan Rekomendasi Strategis

Meskipun berbagai kelembagaan telah berkontribusi dalam pengurangan kemiskinan, beberapa tantangan utama masih perlu diatasi, seperti ketidakmerataan akses program, duplikasi kebijakan, dan kurangnya data terpadu untuk memetakan kelompok sasaran. Untuk mengoptimalkan peran kelembagaan, perlu dilakukan penguatan koordinasi lintas sektor melalui pembentukan tim terpadu di tingkat kabupaten. Selain itu, integrasi teknologi informasi dalam pengelolaan data kemiskinan dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi program. Pendekatan berbasis partisipasi masyarakat juga penting untuk memastikan program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan lokal dan berkelanjutan. Dengan sinergi yang lebih baik antara pemerintah, NGO, lembaga keuangan, dan pendidikan, pengurangan kemiskinan di Cianjur dapat lebih efektif dan menyeluruh.



2.3.3 Penganggaran

1. Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah

Pengurangan kemiskinan di Kabupaten Cianjur menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Alokasi anggaran untuk program pengentasan kemiskinan dialokasikan melalui beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Tenaga Kerja. Pada tahun anggaran terakhir, persentase belanja langsung untuk program pengentasan kemiskinan mencapai sekitar 10-12% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana ini digunakan untuk mendukung program bantuan sosial, pelatihan keterampilan kerja, peningkatan layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar. Namun, tantangan muncul dalam realisasi anggaran, di mana serapan anggaran sering kali tidak optimal akibat perencanaan yang kurang matang dan kendala administrasi.

Anggaran dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cianjur Tahun 2023, sebagai bentuk upaya intervensi dalam bentuk program dan kegiatan serta pekerjaan strategis Kabupaten Cianjur Tahun 2023 berdasarkan dari Rencana Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.25 Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Cianjur Tahun 2023

No	Penanggulangan Kemiskinan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	203.572.939.688	193.726.044.008	95,16
2	Meningkatkan Pendapatan	7.921.033.130	7.629.129.600	96,31
3	Menurunkan Beban Pengeluaran	600.766.315.252	594.384.124.948	98,94
	Total	812.260.288.070	795.739.298.556	97,97

Sumber: TKPKD Kabupaten Cianjur, 2023

2. Pemanfaatan Dana Desa

Dana Desa menjadi instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan. Di Cianjur, sebagian besar desa mengalokasikan dana ini untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, irigasi, dan fasilitas air bersih, yang berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, dana desa juga digunakan untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti pelatihan UMKM, pengadaan peralatan usaha, dan pengembangan koperasi desa. Namun, implementasi dana desa menghadapi tantangan dalam bentuk transparansi pengelolaan, kurangnya kapasitas aparatur desa, dan potensi tumpang tindih dengan program lain dari pemerintah daerah.



3. Dukungan Anggaran dari Pemerintah Pusat

Selain alokasi dari APBD, Cianjur juga menerima dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui program nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan subsidi pupuk untuk petani miskin. Anggaran ini dikelola oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan instansi pusat dan lembaga terkait. Meski efektif dalam meningkatkan daya beli masyarakat miskin, program-program ini sering kali menghadapi kendala berupa keterbatasan cakupan penerima manfaat, ketidaktepatan sasaran, dan kurangnya monitoring yang sistematis. Penguatan mekanisme pengawasan sangat diperlukan untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif.

4. Efektivitas dan Efisiensi Anggaran

Meskipun anggaran pengurangan kemiskinan terus meningkat, efektivitas penggunaannya masih menjadi isu utama. Beberapa program cenderung berfokus pada intervensi jangka pendek seperti bantuan langsung tunai, sementara program pemberdayaan ekonomi jangka panjang masih kurang mendapat alokasi yang memadai. Selain itu, birokrasi yang rumit sering kali menyebabkan keterlambatan penyaluran dana, sehingga mengurangi dampak positif program terhadap masyarakat miskin. Optimalisasi anggaran dapat dilakukan dengan meningkatkan perencanaan berbasis data yang akurat, menyelaraskan program dengan kebutuhan lokal, dan memperkuat evaluasi berbasis hasil. Berdasarkan tabel 2.25 terlihat efektivitas anggaran yang dilaksanakan pemerintah Cianjur sebesar 97,97%.

5. Rekomendasi Strategis

Untuk meningkatkan dampak anggaran dalam pengurangan kemiskinan, perlu dilakukan beberapa langkah strategis. Pertama, integrasi anggaran lintas sektor melalui perencanaan yang terpadu antara OPD, pemerintah desa, dan mitra pembangunan lainnya. Kedua, penguatan kapasitas aparatur di tingkat desa dan kecamatan untuk mengelola dana dengan transparansi dan akuntabilitas. Ketiga, penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat penyaluran dan memantau efektivitas anggaran. Keempat, peningkatan alokasi anggaran untuk program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan UMKM, dan peningkatan akses keuangan mikro. Dengan strategi ini, anggaran pengentasan kemiskinan di Cianjur dapat memberikan manfaat yang lebih signifikan dan berkelanjutan bagi masyarakat.





BAB 3

PROFIL KEMISKINAN KABUPATEN CIANJUR

Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029

3.1 KONSEP KEMISKINAN

3.1.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan sosial dan ekonomi seseorang atau sekelompok orang untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Definisi kemiskinan yang dipergunakan oleh Badan Pusat Statistik yakni kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Adapun Garis Kemiskinan (GK) menurut BPS mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Selain garis kemiskinan, BPS juga menggunakan Persentase Penduduk Miskin (Head Count Index (HCI-P0)) yang merupakan persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). Adapun Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan



gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

3.1.2 Jenis-Jenis Kemiskinan

Kemiskinan dapat dikaji baik secara absolut maupun relatif. Kemiskinan absolut dan relatif adalah konsep kemiskinan yang mengacu pada kepemilikan materi dikaitkan dengan standar kelayakan hidup seseorang atau keluarga. Kedua istilah itu menunjuk pada perbedaan sosial (social distinction) yang ada dalam masyarakat berangkat dari distribusi pendapatan. Namun demikian, kemiskinan absolut ukurannya sudah terlebih dahulu ditentukan dengan angka-angka nyata (garis kemiskinan) dan atau indikator atau kriteria yang digunakan, sementara pada kemiskinan relatif kategori kemiskinan ditentukan berdasarkan perbandingan relatif tingkat kesejahteraan antar penduduk. Dalam mengukur tingkat ketimpangan di Indonesia, BPS menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. Gini ratio adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran yang digunakan. Nilai Gini ratio berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai Gini ratio yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Ukuran Bank Dunia adalah salah satu ukuran ketimpangan yang mengacu pada persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah.

Adapun kriteria Tingkat ketimpangan berdasarkan Ukuran Bank Dunia adalah sebagai berikut : (i) Apabila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan tinggi, (ii) Apabila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan moderat/sedang/menengah, (iii) Apabila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan rendah.

3.2 ANALISIS KONDISI KEMISKINAN DAERAH

3.2.1 Kondisi Kemiskinan Makro

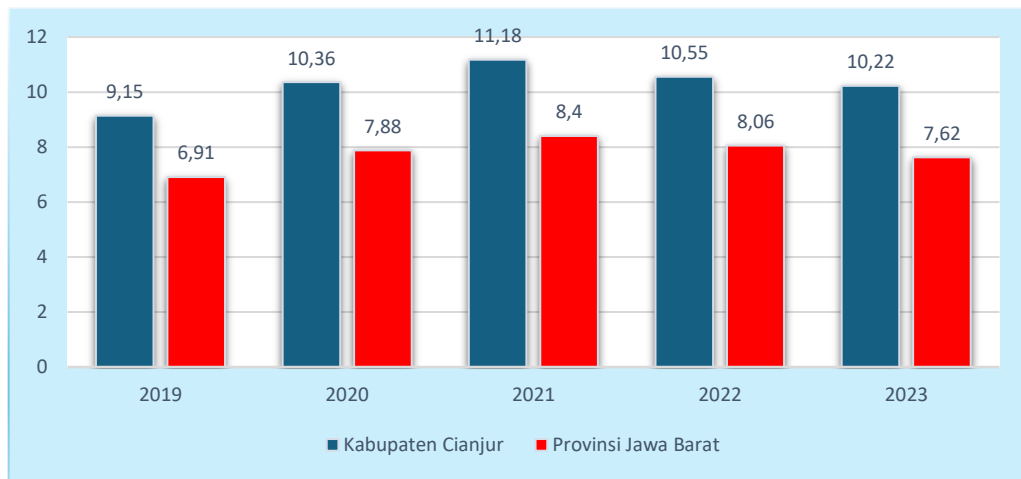
3.2.1.1 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin

Pada 2019 sampai 2023 terjadi fluktuasi tingkat kemiskinan di Kabupaten Cianjur. Sebagai dampak Pandemi COVID-19, tahun 2019 sampai dengan 2021 persentase penduduk miskin di Kabupaten Cianjur mengalami peningkatan sebesar 2,03 persen dan mengalami penurunan sebesar 0,96 persen menjadi 10,22 persen pada tahun 2023 seiring dengan menurunnya kasus covid-19 dan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Covid-19 di Indonesia (**Gambar 3.1**).

LAPORAN AKHIR

Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029

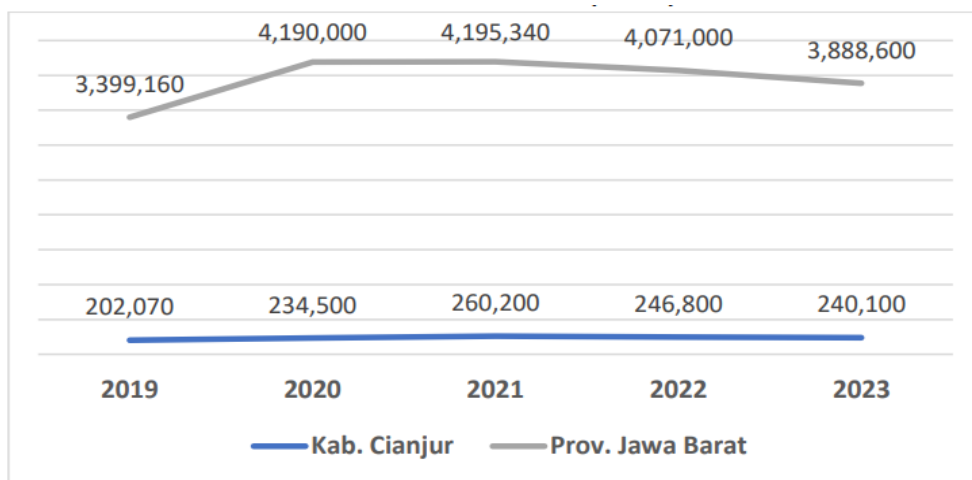
Kondisi ini selaras dengan kondisi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat yang mengalami penurunan kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, yaitu 7,62 persen pada tahun 2023.



Gambar 3. 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Cianjur dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 (Persen), (BPS, 2023)

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka (diolah), 2024

Berdasarkan **Gambar 3.2** terlihat bahwa tahun 2019 sampai tahun 2023 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cianjur mengalami penurunan sebesar 6.700 jiwa atau berjumlah 240.100 jiwa dari tahun sebelumnya, bila melihat kondisi jumlah penduduk miskin ditingkat Provinsi Jawa Barat, maka 6,17 persen penduduk miskin di Jawa Barat berada di wilayah Kabupaten Cianjur.



Gambar 3. 2 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Cianjur dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 (Jiwa), (BPS Provinsi Jawa Barat, 2024)

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka (diolah), 2024



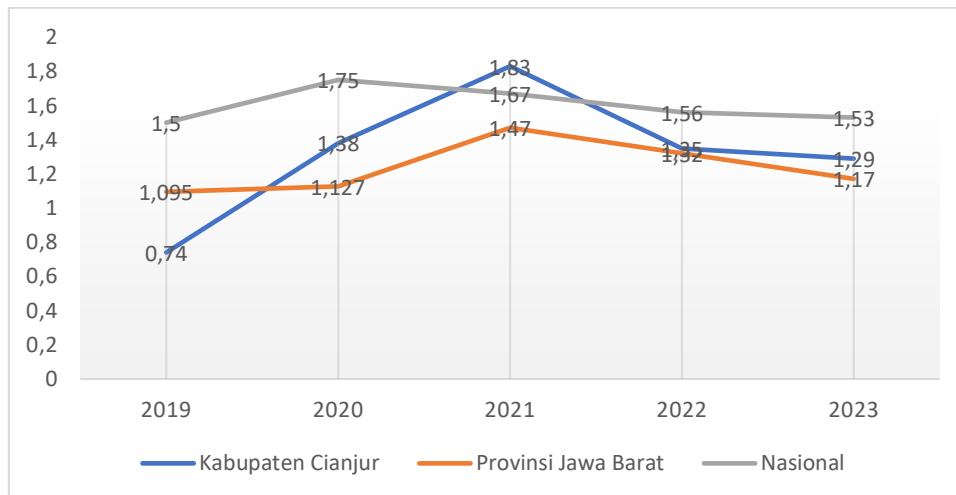
3.2.1.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan tidak hanya bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin, tetapi bagaimana mengatasi kedalaman kemiskinan di Kabupaten Cianjur menjadi sangat penting. Kedalaman kemiskinan adalah ukuran kesenjangan pengeluaran rata-rata untuk setiap orang miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi skor indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index/P1) yaitu Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Nilai agregat dari poverty gap index menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai poverty gap index, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program.

Tingkat Kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Cianjur cenderung mengalami dinamika tiap tahun dari tahun 2019-2023. Tahun 2019 kemiskinan (P1) Kabupaten Cianjur sebesar 0,74. Pada tahun 2020 tingkat kedalaman kemiskinan Kabupaten Cianjur kenaikan sebesar 0,64 poin atau menjadi 1,38. Tahun 2021 mengalami kenaikan kembali sampai titik 1,83. Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,48 atau menjadi 1,35, serta tahun 2022 mengalami penurunan kembali sebesar 0,06 atau menjadi 1,29. Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan (P1) Kabupaten Cianjur kurun waktu 5 tahun terakhir paling tinggi pada tahun 2021 yakni sebesar 1,83 dan paling rendah pada tahun 2019 sebesar 0,74. Namun, kenaikan paling tinggi pada tahun 2019-2020 yakni sebesar 0,64 poin dan penurunan paling tinggi pada tahun 2021-2022 sebesar 0,48.

Tingkat kedalaman kemiskinan Kabupaten Cianjur berada pada posisi hampir sejajar dibandingkan dengan tingkat kedalaman kemiskinan nasional dan Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan Kabupaten Cianjur lebih baik dari Nasional dan Jawa Barat, serta Nasional lebih baik dari Jawa Barat. Secara lebih detail dapat dilihat pada **Gambar 3.3** berikut .



Gambar 3. 3 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Jawa Barat (diolah), 2024

3.2.1.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan

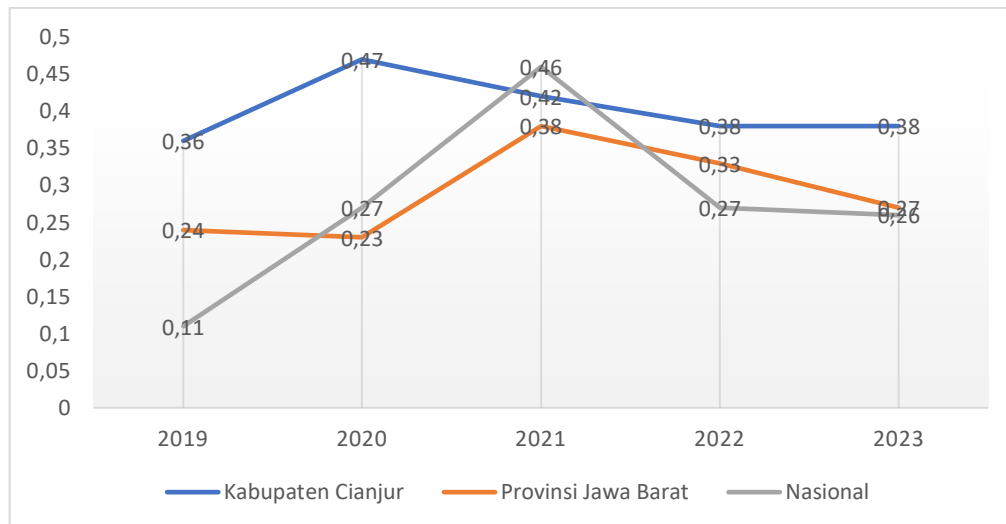
Tingkat keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Cianjur cenderung mengalami dinamika tiap tahun dari tahun 2019-2023. Tahun 2019 tingkat keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Cianjur sebesar 0,11. Pada tahun 2020 tingkat kedalaman kemiskinan Kabupaten Cianjur kenaikan sebesar 0,06 poin atau menjadi 0,27. Tahun 2021 mengalami kenaikan kembali sampai titik 0,46. Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,19 atau menjadi 0,27, serta tahun 2022 mengalami penurunan kembali sebesar 0,01 atau menjadi 0,26. Secara keseluruhan, tingkat keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Cianjur kurun waktu 5 tahun terakhir paling tinggi pada tahun 2021 yakni sebesar 0,46 dan paling rendah pada tahun 2019 sebesar 0,11. Namun, kenaikan paling tinggi pada tahun 2020-2021 yakni sebesar 0,19 poin dan penurunan pada tahun 2022-2023 sebesar 0,01.

Tingkat keparahan kemiskinan Kabupaten Cianjur berada pada posisi tidak terlalu jauh dibandingkan dengan tingkat kedalaman kemiskinan nasional dan Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan Kabupaten Cianjur lebih baik dari Nasional dan Jawa Barat, serta Nasional lebih baik dari Jawa Barat. Secara lebih detail dapat dilihat pada **Gambar 3.4** berikut .



LAPORAN AKHIR

Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029

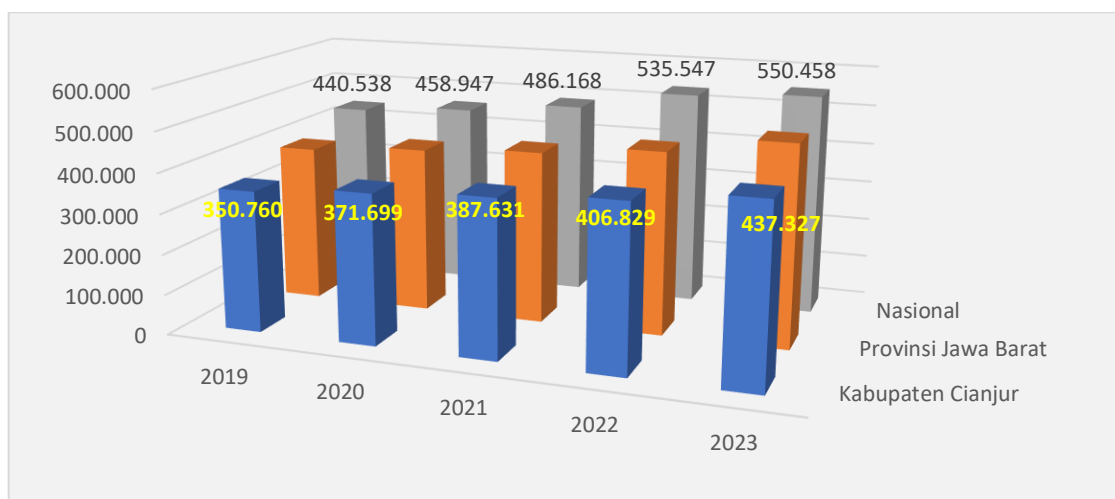


Gambar 3. 4 Tingkat Keperahan Kemiskinan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Jawa Barat (diolah), 2024

3.2.1.4 Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

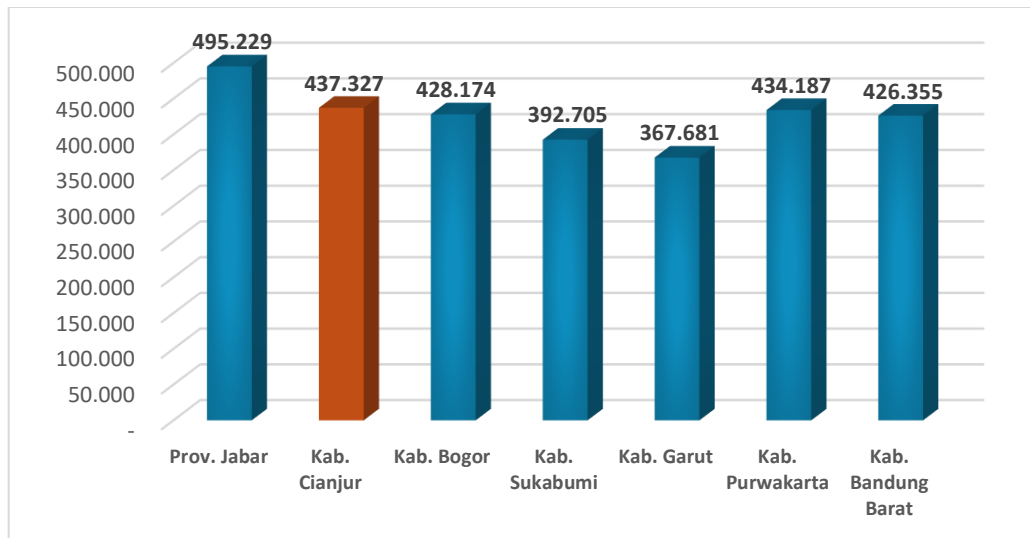


Gambar 3. 5 Garis Kemiskinan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2019-2023

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka (diolah), 2024



Dibandingkan dengan wilayah yang berbatasan langsung, Kabupaten Cianjur pada tahun 2023 mengalami peningkatan per kapita per bulan tetapi masih di bawah angka Jawa Barat, yaitu dengan jumlah pendapatan per kapita per bulan penduduk miskin Rp. 437.327. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain yang berbatasan Kabupaten Cianjur masih berada di atas Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bandung Barat, pada **Gambar 3.6** berikut.



Gambar 3. 6 Garis Kemiskinan Kabupaten Cianjur, Kabupaten yang Berbatasan dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

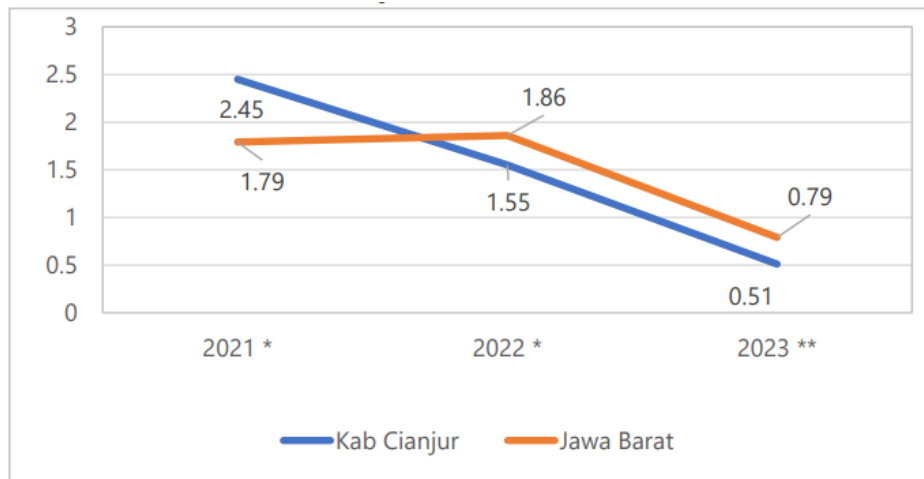
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (diolah), 2024

3.2.1.5 Penduduk Miskin Ekstrem

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem - setara dengan USD 1.9 PPP (purchasing power parity). Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan "absolute poverty measure" yang konsisten antar negara dan antar waktu.

Berdasarkan data persentase penduduk miskin esktrim, capaian angka miskin esktrim di Kabupaten Cianjur mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2023 persentase penduduk miskin esktrim di Kabupaten Cianjur sebesar 0.51 persen dan berada dibawah garis rata-rata Provinsi Jawa Barat dengan persentase sebesar 0.79 persen. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, capaian persentase penduduk miskin esktrim di Kabupaten Cianjur mengalami penurunan sebesar 1.94 persen.





Gambar 3. 7 Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten Cianjur dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023 (Persen),

Sumber: BPS Jawa Barat (diolah), 2024

Jumlah penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Cianjur pada tahun 2021 berjumlah 57,04 ribu orang kemudian menurun menjadi 36,16 ribu orang pada tahun 2022 atau terjadi penurunan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 20,88 ribu orang. Lalu pada tahun 2023 terus menurun menjadi 12,92 ribu orang.

Berdasarkan hasil identifikasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, termasuk pengurangan kemiskinan ekstrem, yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2021 sudah cukup besar, yang terbagi dalam dua kelompok program, yaitu program/kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem melalui bantuan sosial dan subsidi, dan program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonominya.

3.2.2 Kondisi Kemiskinan Mikro

3.2.2.1 Jumlah Penduduk Miskin Desil 1 sampai dengan Desil 4

Kemiskinan tidak hanya diukur melalui indikator kemiskinan konsumsi yang berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasar, namun juga bisa diukur melalui kemiskinan non konsumsi melalui indikator pada bidang-bidang esensial, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sandang.

Berdasarkan Data P3KE Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Cianjur dengan status kesejahteraan sebanyak 18.623 rumah tangga dengan jumlah anggota rumah tangga sebanyak 42.512 anggota rumah tangga. Adapun jumlah penduduk rumah tangga dalam kondisi 10 persen terendah (Desil 1) atau sangat miskin sebanyak 15.202 jiwa dengan 5.086



rumah tangga. Sedangkan jumlah penduduk dengan kondisi 10-20% terendah (Desil 2) atau miskin yaitu sebanyak 10.426 jiwa dengan 4.133 rumah tangga. Rumah tangga dalam kondisi 20-30% terendah (Desil 3) atau status hampir miskin yaitu sebanyak 4.151 rumah tangga dengan 9.346 jiwa. Adapun rumah tangga dalam kondisi 30-40% terendah (desil 4) atau rentan miskin sebanyak 5.253 rumah tangga atau 7.538 jiwa. Berikut ini jumlah rumah tangga dan anggota rumah tangga dijelaskan pada **Tabel 3.1**.

Tabel 3.1 Jumlah Rumah Tangga dan Anggota Rumah Tangga

No	Desi	Rumah Tangga (Unit)	Anggota Rumah Tangga (Jiwa)
1	Desil 1	5.086	15.202
2	Desil 2	4.133	10.426
3	Desil 3	4.151	9.346
4	Desil 4	5.253	7.538
Total		18.623	42.512

Sumber : P3KE, 2024

Adapun dari kondisi rumah tangga dengan status kesejahteraan tersebut diidentifikasi per kecamatan/kelurahan di Kabupaten Cianjur menunjukkan penduduk dengan kondisi kesejahteraan 10 persen terendah (Desil 1) terbanyak berada di Kecamatan Campaka dengan jumlah rumah tangga sebanyak 3.204 rumah tangga. Sedangkan kecamatan dengan status kesejahteraan terbawah paling sedikit yaitu di Kecamatan Cipanas yaitu sebanyak 1.093 rumah tangga. Jumlah rumah tangga dengan status kesejahteraan 10-20 persen (Desil 2) terbanyak di Kecamatan Cianjur sebanyak 2.422 rumah tangga dan kecamatan dengan status kesejahteraan paling bawah yaitu di Kecamatan Cidaun dengan jumlah rumah tangga sebanyak 1.191 rumah tangga. Penduduk dengan tingkat kesejahteraan 20-30 persen terendah (Desil 3) tertinggi berada di Kecamatan Cianjur khususnya di Kelurahan Sayang dengan jumlah rumah tangga 1.358 rumah tangga, dan tingkat kesejahteraan terendah berada di Kecamatan Cibeber dengan jumlah rumah tangga sebanyak 962 rumah tangga. Sementara itu, paling sedikit dengan status kesejahteraan 30-40 persen (Desil 4) terendah yaitu di Kecamatan Cidaun dengan 878 rumah tangga. Sementara itu, Kecamatan Cianjur yang notabene merupakan wilayah perkotaan menduduki jumlah rumah tangga terbanyak dengan status kesejahteraan 30-40 persen (Desil 4) yaitu sebanyak 2.489 rumah tangga, artinya penduduk dengan status mampu berada di Kecamatan Cianjur dibandingkan di Kecamatan lainnya (**Tabel 3.2**).



Tabel 3.2 Jumlah Rumah Tangga dengan Tingkat Kesejahteraan Sosial Desil 1 s/d Desil 4 per Kecamatan/Kelurahan/Desa di Kabupaten Cianjur

Kecamatan/Desa/ Kelurahan	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Total (Unit)
BOJONGPICUNG	1.611	1.552	1.676	1.537	6.376
1. Cibarengkok	301	263	352	449	1.365
2. Jati	1.026	973	876	789	3.664
3. Neglasari	284	316	448	299	1.347
CAMPAKA	3.204	1.580	1.085	1.110	6.979
1. Margaluyu	699	509	301	359	1.868
2. Mekarjaya	981	515	360	318	2.174
3. Susukan	1.524	556	424	433	2.937
CIANJUR	2.852	2.422	2.475	2.489	10.238
1. Babakan karet	1.455	768	725	588	3.536
2. Pamoyanan	420	451	493	543	1.907
3. Sayang	977	1.203	1.257	1.358	4.795
CIBEBER	1.924	1.297	962	1.021	5.204
1. Karangnunggal	796	463	255	300	1.814
2. Peteuycondong	736	529	359	413	2.037
3. Sukamanah	392	305	348	308	1.353
CIDAUN	2.456	1.191	1.061	878	5.586
1. Cidamar	642	334	278	233	1.487
2. Karyabakti	476	294	259	276	1.305
3. Kertajati	1.338	563	524	369	2.794
CIPANAS	1.093	1.355	1.480	1.491	5.419
1. Ciloto	390	450	535	451	1.826
2. Cipanas	376	450	417	434	1.677
3. Palasari	327	455	528	606	1.916
MANDE	1.684	1.341	1.446	1.100	5.571
1. Jamali	839	638	696	583	2.756
2. Kademangan	272	277	338	262	1.149
3. Sukamanah	573	426	412	255	1.666
PACET	3.098	2.304	2.244	2.108	9.754
1. Cibodas	772	569	624	616	2.581
2. Ciputri	1.175	754	646	618	3.193
3. Sukanagalih	1.151	981	974	874	3.980
TANGGEUNG	2.366	1.517	1.066	1.057	6.006
1. Margaluyu	779	425	327	266	1.797
2. Padaluyu	799	456	320	322	1.897
3. Pasirjambu	788	636	419	469	2.312
TOTAL	20.288	14.559	3.495	12.791	61.133

Sumber : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, 2024



3.2.2.2 Jumlah Individu Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin per Kelurahan di Kabupaten Cianjur

Berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, jumlah penduduk Kabupaten Cianjur usia kurang dari 1-6 tahun dengan status kesejahteraan desil 1 s/d desil 4 sebanyak 1.906 jiwa, dengan rincian penduduk perempuan lebih banyak dari pada laki-laki yaitu 980 jiwa penduduk perempuan dan 926 jiwa penduduk laki-laki. Adapun penduduk terbanyak usia kurang dari 6 tahun yaitu di Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet sebanyak 120 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Cianjur usia 6-14 tahun dengan status kesejahteraan desil 1 s/d desil 4 sebanyak 10.661 jiwa, dengan rincian penduduk laki laki sebanyak 5.274 jiwa dan perempuan sebanyak 5.387 jiwa. Adapun Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur menduduki urutan pertama jumlah individu usia 6-14 tahun sebanyak 800 jiwa. Sementara itu, Desa Cibarengkok Kecamatan Bojongpicung terdapat jumlah individu usia 16-14 tahun paling sedikit yaitu sebanyak 191 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Cianjur usia 15-44 tahun dengan status kesejahteraan desil 1 s/d desil 4 sebanyak 30.090 jiwa dengan rincian penduduk laki laki 15.551 jiwa dan perempuan sebanyak 14.539 jiwa. Penduduk dengan usia produktif tersebut berada paling banyak di Kelurahan Sayang sebanyak 2.332 jiwa dan di Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet sebanyak 2.102 jiwa. Adapun Desa Kademangan Kecamatan Mande memiliki penduduk usia produktif 15-44 tahun paling sedikit dibandingkan Kelurahan/Desa yang lain yaitu sebanyak 554 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Cianjur usia 45-59 tahun dengan status kesejahteraan desil 1 s/d desil 4 sebanyak 11.698 jiwa. Dengan penduduk laki laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan yaitu sebesar 6.304 jiwa penduduk laki-laki dan penduduk perempuan sebanyak 5.394 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Cianjur dengan usia lansia atau usia lebih 60 tahun dengan status kesejahteraan desil 1/d desil 4 sebanyak 3.502 jiwa. Usia lansia perempuan lebih banyak yaitu sebesar 1.877 jiwa dan usia lansia laki-laki sebanyak 1.625 jiwa. Adapun penduduk usia lansia paling banyak berada di Kelurahan Sayanag Kecamatan Cianjur sebanyak 431 jiwa dan di Desa Sukamanah Kecamatan Mande sebanyak 54 jiwa.

Di Kabupaten Cianjur jumlah penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif yaitu usia 15-60 tahun dengan status kesejahteraan desil 1 sld desil 4 yaitu sebanyak 41.788 jiwa. Adapun usia non produktif yaitu usia kurang dari 14 tahun dan lebih dari 15 tahun yaitu sebanyak 45.290 jiwa. Secara lebih detail, jumlah individu berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin per Kelurahan di Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada Tabel 3.3.



LAPORAN AKHIR*Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029***Tabel 3.3 Jumlah Individu Berdasarkan Kelompok Usia dan Jumlah Kelamin per Kelurahan di Kabupaten Cianjur**

Kecamatan	Usia Individu <6 tahun			Usia Individu 6-14 tahun			Usia Individu 15-44 tahun			Usia Individu 45-59 tahun			Usia Individu >60 tahun			Total
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	
BOJONGPICUNG	109	107	216	589	590	1.179	1.578	1.558	3.136	636	559	1.195	122	144	266	5.992
Cibarengkok	25	18	43	91	100	191	338	329	667	150	128	278	35	55	90	145
Jati	56	66	122	380	363	743	901	892	1.793	360	323	683	57	55	112	167
Neglasari	28	23	51	118	127	245	339	337	676	126	108	234	30	34	64	98
CAMPAKA	117	122	239	555	626	1.181	1.765	1.651	3.416	780	681	1.461	171	139	310	6.607
Margaluyu	24	21	45	119	151	270	404	408	812	228	190	418	45	29	74	103
Mekarjaya	29	48	77	192	195	387	568	535	1.103	242	205	447	53	44	97	141
Susukan	64	53	117	244	280	524	793	708	1.501	310	286	596	73	66	139	205
CIANJUR	113	121	234	875	895	1.770	2.597	2.433	5.030	985	819	1.804	381	523	904	9.742
Babakan karet	69	72	141	304	316	620	957	837	1.794	328	284	612	140	146	286	432
Pamoyanan	23	23	46	184	166	350	462	442	904	189	158	347	76	111	187	298
Sayang	21	26	47	387	413	800	1.178	1.154	2.332	468	377	845	165	266	431	697
CIBEBER	62	57	119	446	447	893	1.294	1.234	2.528	478	506	984	296	336	632	5.156
Karangnunggal	10	14	24	160	139	299	418	406	824	163	194	357	139	153	292	445
Peteuycondong	30	24	54	153	165	318	524	502	1.026	183	206	389	103	126	229	355
Sukamanah	22	19	41	133	143	276	352	326	678	132	106	238	54	57	111	168
CIDAUN	83	120	203	475	462	937	1.348	1.267	2.615	634	576	1.210	141	106	247	5.212
Cidamar	22	19	41	119	123	242	367	324	691	191	164	355	37	37	74	111
Karyabakti	17	44	61	140	131	271	329	299	628	122	134	256	37	22	59	81
Kertajati	44	57	101	216	208	424	652	644	1.296	321	278	599	67	47	114	161
CIPANAS	96	100	196	535	513	1.048	1.413	1.336	2.749	562	410	972	92	132	224	5.189



LAPORAN AKHIR*Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029*

Kecamatan	Usia Individu <6 tahun			Usia Individu 6-14 tahun			Usia Individu 15-44 tahun			Usia Individu 45-59 tahun			Usia Individu >60 tahun			Total
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	
Ciloto	24	36	60	174	168	342	447	457	904	191	124	315	40	63	103	166
Cipanas	31		31	156	147	303	452	415	867	182	142	324	26	31	57	88
Palasari	41	64	105	205	198	403	514	464	978	189	144	333	26	38	64	102
MANDE	103	103	206	461	460	921	1.358	1.328	2.686	572	518	1.090	103	107	210	5.113
Jamali	31	51	82	202	180	382	683	651	1.334	284	275	559	43	37	80	117
Kademangan	32	13	45	106	119	225	284	270	554	117	105	222	37	39	76	115
Sukamanah	40	39	79	153	161	314	391	407	798	171	138	309	23	31	54	85
PACET	133	151	284	883	898	1.781	2.728	2.394	5.122	1.013	762	1.775	176	206	382	9.344
Cibodas	31	36	67	231	232	463	714	651	1.365	258	193	451	48	52	100	152
Ciputri	44	53	97	279	263	542	883	772	1.655	360	277	637	71	80	151	231
Sukanagalih	58	62	120	373	403	776	1.131	971	2.102	395	292	687	57	74	131	205
TANGGEUNG	110	99	209	455	496	951	1.470	1.338	2.808	644	563	1.207	143	184	327	5.502
Margaluyu	31	26	57	143	158	301	460	414	874	179	154	333	42	40	82	122
Padaluyu	33	25	58	155	158	313	457	406	863	210	182	392	41	66	107	173
Pasirjambu	46	48	94	157	180	337	553	518	1.071	255	227	482	60	78	138	216
TOTAL	926	980	1.906	5.274	5.387	10.661	15.551	14.539	30.090	6.304	5.394	11.698	1.625	1.877	3.502	57.857

Sumber : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, 2024

3.2.2.3 Jumlah Anak Bersekolah dan Tidak Bersekolah Usia 7 hingga 18 Tahun di Kabupaten Cianjur

Berdasarkan wilayah, Kecamatan/Kelurahan/Desa dengan usia sekolah 7-18 tahun per Kelurahan di Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada Tabel 3.4. Di Kabupaten Cianjur penduduk usia sekolah 7-18 tahun yaitu sebanyak 20.072 jiwa yang tersebar di setiap kelurahan/desa. Sebanyak 13.819 jiwa penduduk bersekolah pada jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Adapun sebanyak 5.201 jiwa penduduk usia 7-18 tahun tidak/belum pernah sekolah dan tidak bersekolah lagi. Artinya sebanyak 25,91% penduduk usia 7-18 tahun tidak dapat mengakses pendidikan di atasnya atau mengalami putus sekolah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Partisipasi Sekolah Anak Bersekolah dan Tidak Bersekolah Usia 7-18 Tahun per Kelurahan di Kabupaten Cianjur

Kecamatan/ Kelurahan/Desa	Usia 7-18 Tahun (Jiwa)		
	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Tidak Bersekolah Lagi	Bersekolah
BOJONGPICUNG	537	85	1495
1. Cibarengkok	88	30	294
2. Jati	339	40	896
3. Neglasari	110	15	305
CAMPAKA	451	141	1315
1. Margaluyu	116	50	296
2. Mekarjaya	135	59	380
3. Susukan	200	32	639
CIANJUR	893	148	2836
1. Babakan karet	337	79	868
2. Pamoyanan	145	23	550
3. Sayang	411	46	1418
CIBEBER	482	175	1047
1. Karangnunggal	159	61	306
2. Peteuycondong	163	79	433
3. Sukamanah	160	35	308
CIDAUN	422	54	1223
1. Cidamar	110	18	329
2. Karyabakti	134	11	252
3. Kertajati	178	25	642
CIPANAS	459	127	1378
1. Ciloto	161	60	457
2. Cipanas	127	33	428
3. Palasari	171	34	493
MANDE	519	102	1263
1. Jamali	254	43	624



Kecamatan/ Kelurahan/Desa	Usia 7-18 Tahun (Jiwa)		
	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Tidak Bersekolah Lagi	Bersekolah
2. Kademangan	80	30	255
3. Sukamanah	185	29	384
PACET	925	180	2124
1. Cibodas	225	70	575
2. Ciputri	278	42	625
3. Sukanagalih	422	68	924
TANGGEUNG	513	40	1138
1. Margaluyu	171	16	367
2. Padaluyu	134	9	366
3. Pasirjambu	208	15	405
TOTAL	5201	1052	13819

Sumber : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, 2024

3.2.2.4 Jumlah Individu yang Bekerja dan Tidak Bekerja Menurut Usia di atas 15 tahun di Kabupaten Cianjur

Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2024 menunjukkan jumlah usia kepala rumah tangga diatas 15 tahun di Kabupaten Cianjur sebanyak 61.133 jiwa. Adapun jumlah penduduk dengan status bekerja yaitu sebanyak 22.825 jiwa, sedangkan dengan status tidak bekerja yaitu sebanyak 38.308 jiwa. Artinya sebanyak 62,66% penduduk di Kabupaten Cianjur dengan usia produktif tidak bekerja, sementara 37,34% penduduk telah berstatus bekerja. Artinya secara demografi penduduk yang tidak bekerja merupakan beban bagi penduduk yang bekerja. Hal ini pun mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan daya saing wilayah di Kabupaten Cianjur. Adapun penduduk dengan status tidak bekerja paling banyak di Kecamatan Cianjur yaitu di Kelurahan Sayang sebanyak 4.795 jiwa dan Kelurahan Babakan Karet 3.536 jiwa, di Kecamatan Pacet yaitu di Desa Sukanagalih sebanyak 3.980 jiwa, di Kecamatan Campaka yaitu di Desa Susukan sebanyak 2.937 jiwa, berikut ini secara lebih detail dijelaskan pada **Tabel 3.5**.

Tabel 3.5 Jumlah Kepala Rumah Tangga yang Bekerja dan Tidak Bekerja Menurut Kelompok Usia diatas 15 Tahun per Kelurahan di Kabupaten Cianjur

Kecamatan/ Kelurahan/Desa	Status Bekerja (Jiwa)		Total
	Bekerja	Tidak Bekerja	
BOJONGPICUNG	2175	4201	6376
1. Cibarengkok	505	860	1365
2. Jati	1229	2435	3664
3. Neglasari	441	906	1347
CAMPAKA	2941	4038	6979



LAPORAN AKHIR*Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029*

Kecamatan/ Kelurahan/Desa	Status Bekerja (Jiwa)		Total
	Bekerja	Tidak Bekerja	
1. Margaluyu	933	935	1868
2. Mekarjaya	945	1229	2174
3. Susukan	1063	1874	2937
CIANJUR	3532	6706	10238
1. Babakan karet	1274	2262	3536
2. Pamoyanan	615	1292	1907
3. Sayang	1643	3152	4795
CIBEBER	1930	3274	5204
1. Karangnunggal	720	1094	1814
2. Peteuycondong	725	1312	2037
3. Sukamanah	485	868	1353
CIDAUN	2349	3237	5586
1. Cidamar	584	903	1487
2. Karyabakti	622	683	1305
3. Kertajati	1143	1651	2794
CIPANAS	1796	3623	5419
1. Ciloto	607	1219	1826
2. Cipanas	560	1117	1677
3. Palasari	629	1287	1916
MANDE	1932	3639	5571
1. Jamali	1019	1737	2756
2. Kademangan	378	771	1149
3. Sukamanah	535	1131	1666
PACET	3670	6084	9754
1. Cibodas	1016	1565	2581
2. Ciputri	1278	1915	3193
3. Sukanagalih	1376	2604	3980
TANGGEUNG	2500	3506	6006
1. Margaluyu	657	1140	1797
2. Padaluyu	803	1094	1897
3. Pasirjambu	1040	1272	2312
TOTAL	22825	38308	61133

Sumber : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, 2024

3.2.2.5 Jumlah Individu Usia 15 hingga 64 Tahun yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan

Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan desil 1 s/d desil 4 di Kabupaten Cianjur dengan usia produktif 15-64 tahun yaitu sebanyak 61.133 jiwa. Dominasi penduduk dengan lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Cianjur yaitu merupakan pekerja lepas sebesar 10.862 jiwa. Adapun lapangan pekerjaan peringkat kedua di Kabupaten Cianjur yaitu



LAPORAN AKHIR*Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029*

sebanyak 5.002 jiwa sebagai petani dan swasta sebanyak 3.763 jiwa. Sementara itu, yang belum/tidak bekerja sebanyak 38.308 jiwa. Secara lebih detail status kedudukan dalam pekerjaan utama individu usia produktif yaitu ada pada **Tabel 3.6**.

Tabel 3.6 Status Kedudukan Dalam Pekerjaan Utama (Individu Usia Produktif 15-64 Tahun)

Kecamatan/Kelurahan /Desa	Belum/Tidak Bekerja	Nelayan	Pedagang	Pekerja Lepas	Pensiunan	Petani	Swasta	Total
BOJONGPICUNG	4.201	1	224	1.287	51	241	371	6.376
1. Cibarengkok	860	-	40	314	11	50	90	1.365
2. Jati	2.435	-	144	671	27	169	218	3.664
3. Neglasari	906	1	40	302	13	22	63	1.347
CAMPAKA	4.038	1	265	1.037	45	1.318	275	6.979
1. Margaluyu	935	1	79	135	12	650	56	1.868
2. Mekarjaya	1.229	-	100	345	11	448	41	2.174
3. Susukan	1.874	-	86	557	22	220	178	2.937
CIANJUR	6.706	1	767	1.702	49	149	864	10.238
1. Babakan karet	2.262	-	185	750	14	140	185	3.536
2. Pamoyanan	1.292	-	173	206	25	2	209	1.907
3. Sayang	3.152	1	409	746	10	7	470	4.795
CIBEBER	3.274	3	187	1.189	1	397	153	5.204
1. Karangnunggal	1.094	3	74	370	-	262	11	1.814
2. Peteuycondong	1.312	-	70	476	-	89	90	2.037
3. Sukamanah	868	-	43	343	1	46	52	1.353
CIDAUN	3.237	98	163	573	2	1.257	256	5.586
1. Cidamar	903	94	36	67	2	324	61	1.487
2. Karyabakti	683	-	48	143	-	404	27	1.305
3. Kertajati	1.651	4	79	363	-	529	168	2.794
CIPANAS	3.623	1	226	699	115	144	611	5.419
1. Ciloto	1.219	1	67	206	25	62	246	1.826
2. Cipanas	1.117	-	96	176	51	47	190	1.677
3. Palasari	1.287	-	63	317	39	35	175	1.916
MANDE	3.639	2	189	848	55	234	604	5.571
1. Jamali	1.737	-	109	414	19	121	356	2.756
2. Kademangan	771	-	25	172	20	52	109	1.149
3. Sukamanah	1.131	2	55	262	16	61	139	1.666
PACET	6.084		488	1.916	2	789	475	9.754
1. Cibodas	1.565	-	107	603	2	202	102	2.581
2. Ciputri	1.915	-	149	567	-	379	183	3.193
3. Sukanagalih	2.604	-	232	746	-	208	190	3.980
TANGGEUNG	3.506	1	258	1.611	3	473	154	6.006
1. Margaluyu	1.140	-	112	422	1	85	37	1.797
2. Padaluyu	1.094	-	53	662	2	76	10	1.897
3. Pasirjambu	1.272	1	93	527	-	312	107	2.312
TOTAL	38.308	108	2.767	10.862	323	5.002	3.763	61.133

Sumber : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, 2024



3.3 ANALISIS KARAKTERISTIK PERMASALAHAN KEMISKINAN KONSUMSI

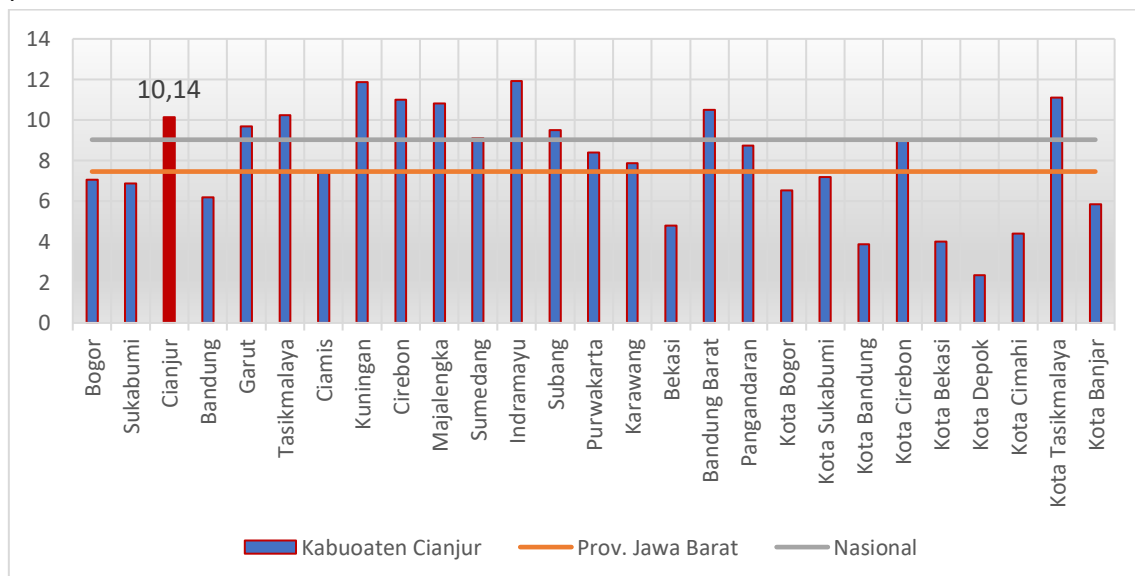
3.3.1 Permasalahan Kemiskinan Dalam Dimensi Kemiskinan Konsumsi

3.3.1.1 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan bawah garis kemiskinan. Berikut ini dijabarkan kondisi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cianjur dalam kurun waktu tertentu dan posisi relatif terhadap Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

A. Posisi Relatif

Berdasarkan data BPS yang disajikan pada Gambar 3.9 menunjukkan capaian Kabupaten Cianjur ini masih lebih baik dari capaian nasional dan provinsi. Capaian Persentase Penduduk Miskin masih di bawah capaian Nasional secara keseluruhan yaitu sebesar 9,03 di tahun 2023. Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Barat, persentase penduduk miskin Kabupaten Cianjur menduduki peringkat ke 8 teratas. Adapun persentase penduduk miskin terbanyak di Provinsi Jawa Barat adalah Kabupaten Indramayu dengan persentase penduduk miskin sebesar 11,93%, sedangkan kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin paling sedikit adalah Kota Depok dengan persentase penduduk miskin sebesar 2,38%.



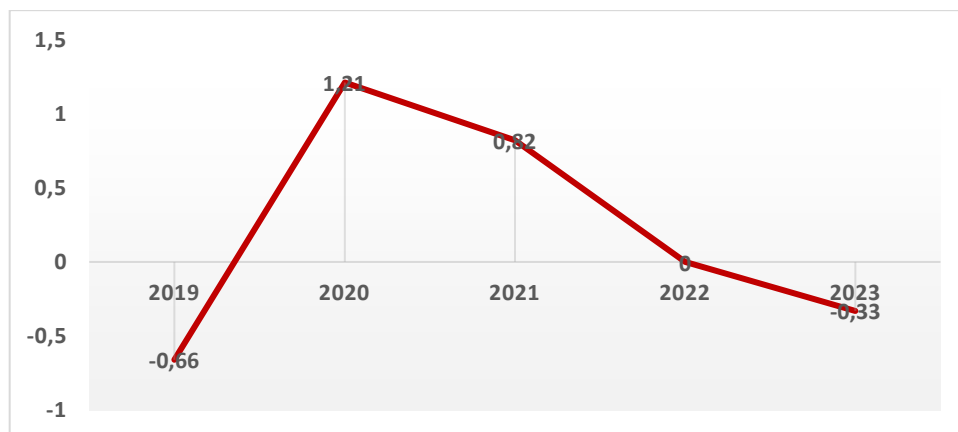
Gambar 3. 8 Grafik Posisi Relatif Penduduk Miskin Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional (%) Tahun 2023

Sumber: BPS Nasional, 2024



B. Perkembangan Time Series

Pada tahun 2019 tingkat kemiskinan Kabupaten Cianjur pada titik 0,66%. Pada tahun 2020 tingkat kemiskinan Kabupaten Cianjur sebesar 1,21% atau mengalami kenaikan sebanyak 0,23% dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2021 tingkat kemiskinan Kabupaten Cianjur pada titik 0,82% atau berkurang 0,39% dibandingkan pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2022 tingkat kemiskinan Kabupaten Cianjur sebesar 0,63% atau turun sebesar 0,19%. Namun pada awal tahun 2023 tingkat kemiskinan Kabupaten Cianjur sebesar 0,33% dan mengalami penurunan kembali sebesar 0,30%. Kenaikan persentase penduduk miskin pada tahun 2020 dan 2021 disebabkan karena adanya Pandemi Covid 19, yang menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat sehingga pendapatannya menjadi berkurang. Hal ini berakibat pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun non makanan menjadi terganggu. Pada Gambar 3.8 menunjukkan perkembangan antar waktu persentase penduduk miskin di Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023.



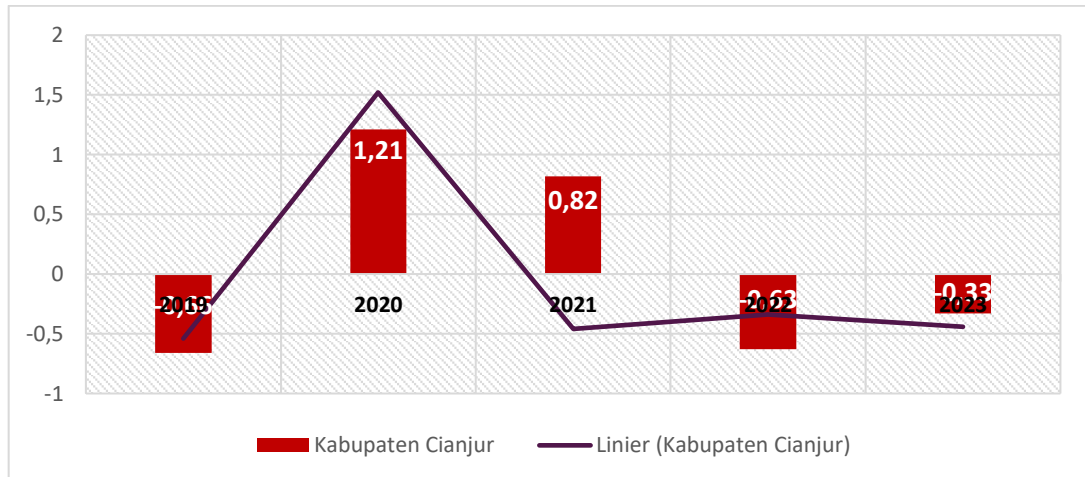
Gambar 3. 9 Grafik Perkembangan Antar Waktu Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Cianjur (%) Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2024

C. Efektivitas

Gambar 3.10 menggambarkan persentase penduduk miskin Kabupaten Cianjur Tahun 2019 - 2023 menunjukkan tren yang fluktuatif, awalnya naik hingga tahun 2020, kemudian turun sejak tahun 2021. Hal ini sebagai akibat adanya Pandemi COVID 19 yang berdampak luas pada berbagai aspek terutama ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang diinisiasi pemerintah Kabupaten Cianjur terbukti efektif menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin. Namun demikian, sejak adanya pandemi yang berdampak multidimensi, program pengentasan kemiskinan terkendala pandemi, sehingga persentase penduduk miskin belum berjalan efektif.



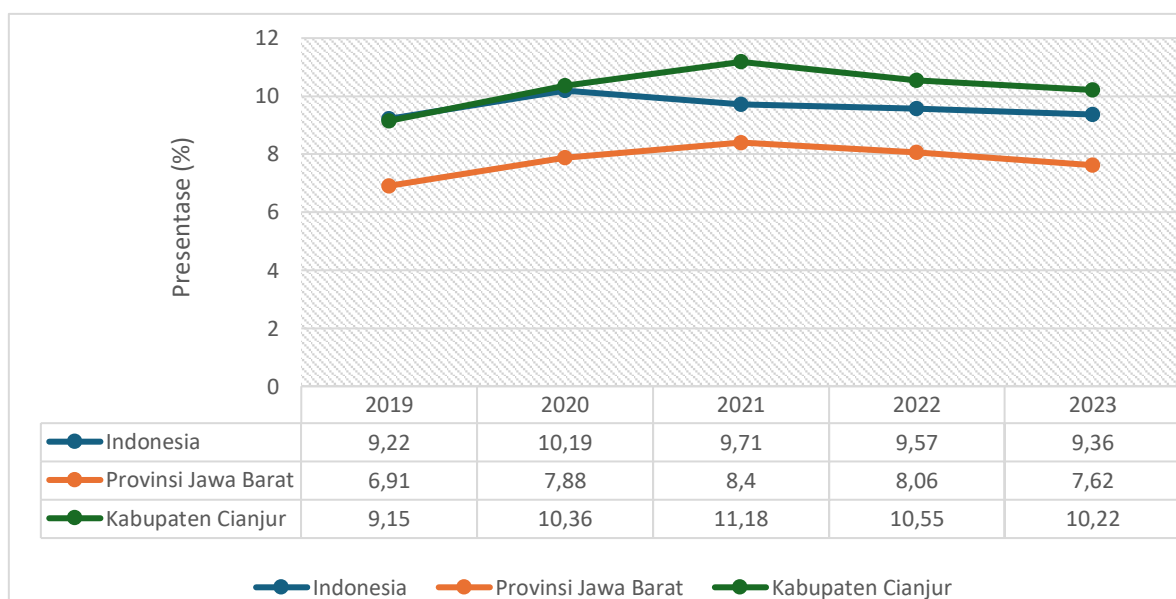


Gambar 3. 10 Grafik Analisis Efektivitas Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Cianjur (%) Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2024

D. Relevansi

Persentase penduduk miskin Kabupaten Cianjur tahun 2019 – 2023 menunjukkan fluktuasi, dimana kecenderungan menurun hingga tahun 2019, dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebagai dampak dari Pandemi COVID 19. Kecenderungan penurunan ini relevan dengan capaian persentase penduduk miskin Nasional dan Provinsi yang juga mengalami penurunan hingga tahun 2019 dan mengalami kenaikan pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan Kabupaten Cianjur berkontribusi positif bagi penurunan kemiskinan Nasional. Berikut ini secara lebih jelas pada **Gambar 3.11**.



Gambar 3. 11 Grafik Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Cianjur (%) Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Nasional, 2024

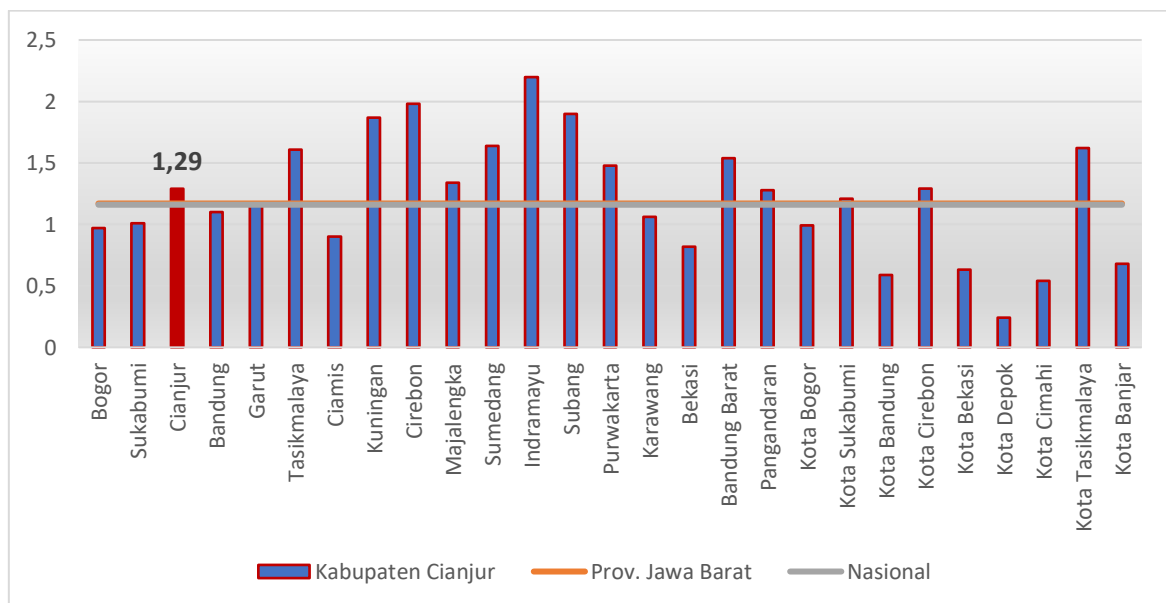


3.3.1.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan

Tingkat kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Berikut ini dijabarkan kondisi tingkat kedalaman kemiskinan di Kabupaten Cianjur dalam kurun waktu tertentu dan posisi relatif terhadap Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

A. Posisi Relatif

Berdasarkan data BPS yang disajikan pada Gambar ... menunjukkan capaian Kabupaten Cianjur ini masih lebih baik dari capaian nasional dan provinsi. Capaian Persentase Penduduk Miskin masih di bawah capaian Nasional secara keseluruhan yaitu sebesar 1,29 di tahun 2023. Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Barat, persentase penduduk miskin Kabupaten Cianjur menduduki peringkat ke 10 dari nilai teratas. Adapun persentase penduduk miskin terbanyak di Provinsi Jawa Barat adalah Kabupaten Indramayu dengan persentase penduduk miskin sebesar 2,20%, sedangkan kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin paling sedikit adalah Kota Depok dengan persentase penduduk miskin sebesar 0,24%.



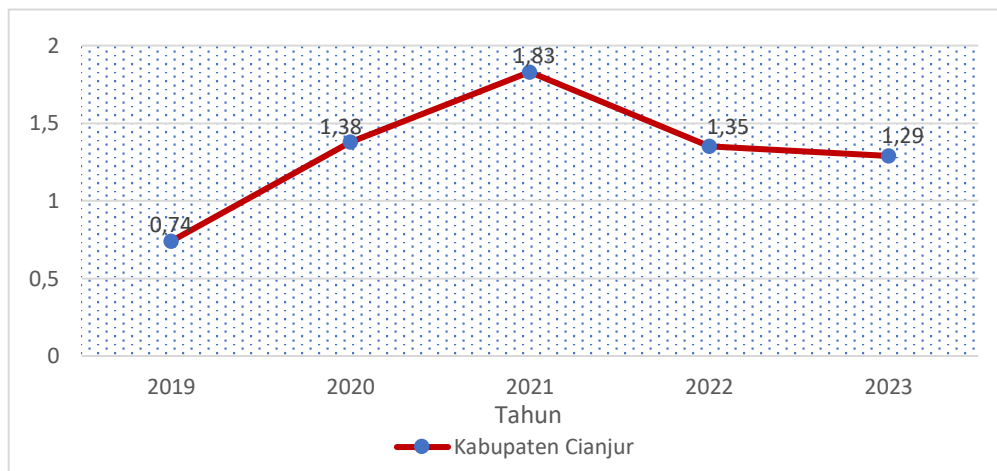
Gambar 3. 12 Grafik Posisi Relatif Tingkat Kedalaman Penduduk Miskin (P1) Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2023

Sumber: BPS Nasional, 2024



B. Perkembangan Time series

Berdasarkan data BPS, perkembangan antar waktu Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) tahun 2019 – 2023 menunjukkan fluktuatif, pada tahun 2020, P1 Kabupaten Cianjur mengalami kenaikan 0,64 poin menjadi 1,38 dibandingkan tahun 2019 dimana P1 Kabupaten Cianjur sebesar 0,74. Sedangkan pada tahun 2021 P1 Kabupaten Cianjur Kembali mengalami kenaikan sebesar 0,45 poin menjadi 1,83 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan, yaitu sebesar 0,48 poin menjadi 1,35 dan kembali mengalami penurunan yaitu sebesar 0,06 poin menjadi 1,29. Pada tahun 2023, sebagai dampak dari COVID 19 tingkat kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Cianjur juga menunjukkan peningkatan. Peningkatan Tingkat Kedalaman Kemiskinan ini menunjukkan bahwa Pandemi COVID 19 berdampak pada merosotnya pendapatan masyarakat miskin, terutama yang ada di perkotaan sehingga daya belinya menurun drastis. Berikut ini perkembangan tingkat kedalaman kemiskinan Kabupaten Cianjur selama kurun waktu 2019-2023 (**Gambar 3.13**).



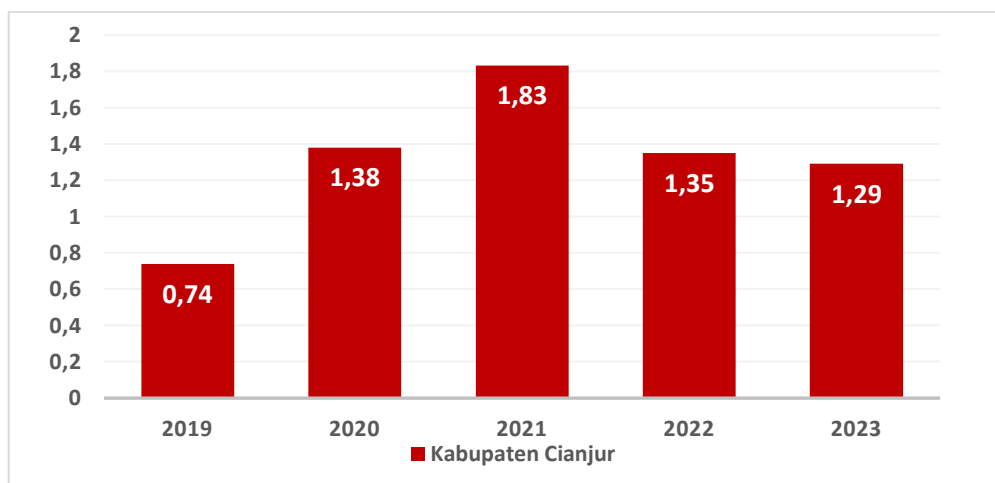
Gambar 3. 13 Grafik Perkembangan Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023

Sumber : BPS Kabupaten Cianjur, 2024

C. Efektivitas

Tingkat kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Cianjur periode 2019 – 2021 menunjukkan mengalami kenaikan penurunan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan masih cukup efektif untuk menurunkan tingkat kedalaman kemiskinan, walaupun pada tahun 2021 ada peningkatan yang disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu pandemi COVID-19 (**Gambar 3.14**).



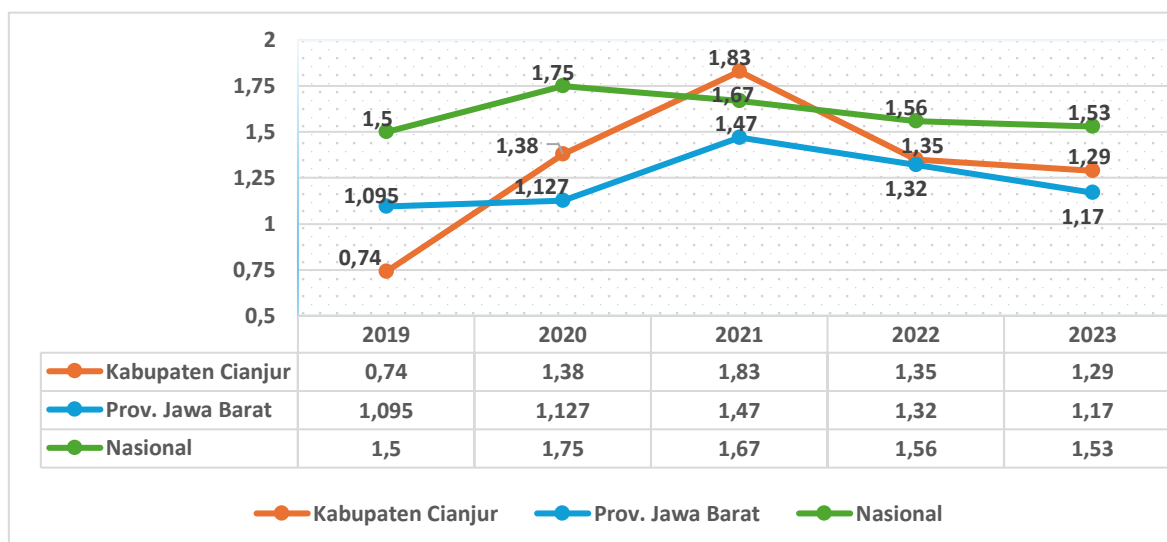


Gambar 3. 14 Grafik Analisis Efektivitas Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) Tahun 2019-2023

Sumber : BPS Kabupaten Cianjur, 2024

D. Relevansi

Berdasarkan Gambar 3.16 menunjukkan capaian tingkat kedalaman kemiskinan Kabupaten Cianjur tahun 2019 – 2023 cukup relevan dengan capaian tingkat kedalaman kemiskinan (P1) Nasional dan Provinsi. Tahun 2019 dan 2020 menunjukkan kondisi kedalaman kemiskinan yang mengalami kenaikan di Kabupaten Cianjur maupun provinsi dan nasional. Namun, terdapat kondisi yang berbeda pada tahun 2021 dan 2023. Tahun 2021 P1 Kabupaten Cianjur mengalami kenaikan begitu juga dengan P1 provinsi dan nasional mengalami kenaikan. Tahun 2022, P1 Kabupaten Cianjur mengalami penurunan, begitu juga dengan P1 provinsi dan nasional mengalami penurunan (**Gambar 3.15**).



Gambar 3. 15 Grafik Tingkat Relevansi Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Nasional, 2024

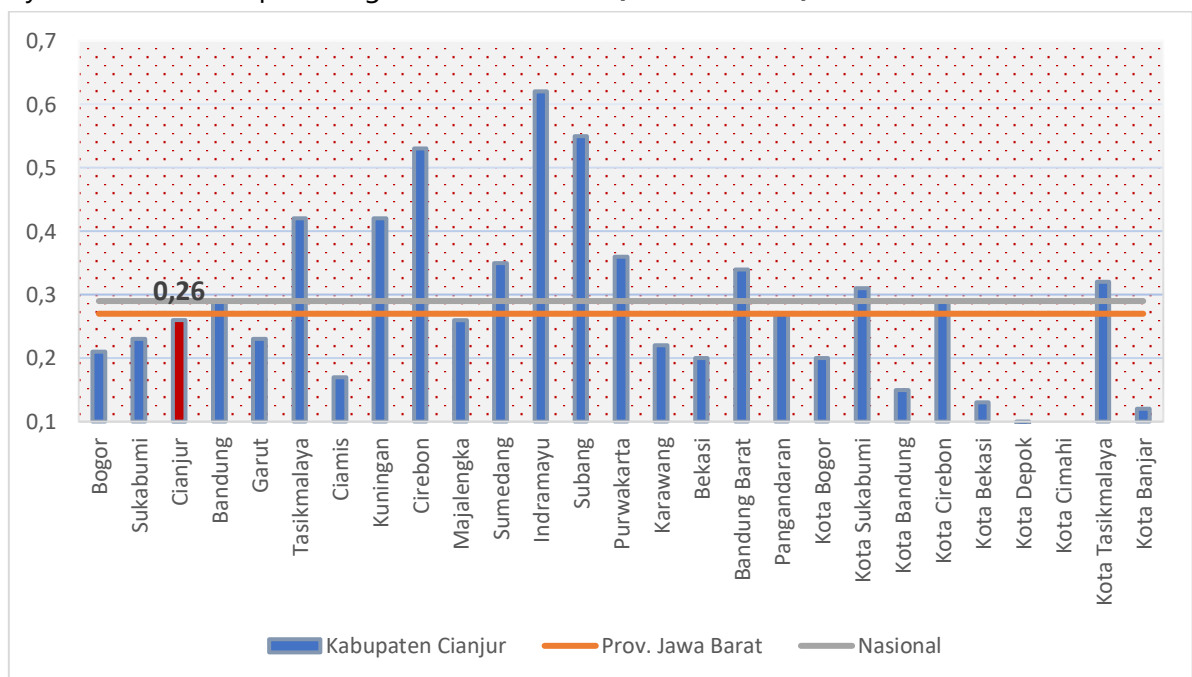


3.3.1.3 Tingkat Keparahannya Kemiskinan

Indeks Keparahannya Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Adapun berikut ini dijabarkan kondisi tingkat keparahannya kemiskinan Kabupaten Cianjur dalam posisi relatif terhadap Provinsi Jawa Barat dan Nasional dan dalam kurun waktu tertentu.

A. Posisi Relatif

Tingkat keparahannya kemiskinan (P2) menunjukkan adanya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Berdasarkan data BPS 2024, P2 Kabupaten Cianjur sebesar 0,26. Capaian ini mendekati dari capaian Nasional dan Provinsi, yaitu sebesar 0,29. Tingkat keparahannya kemiskinan (P2) yang semakin kecil semakin baik, begitupun sebaliknya semakin besar maka semakin tidak baik karena ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin melebar. Berdasarkan provinsi tingkat keparahannya kemiskinan (P2) Kabupaten Cianjur berada pada peringkat ke-12 teratas (nilai besar). Kabupaten/kota dengan tingkat keparahannya kemiskinan (P2) paling kecil adalah Kota Depok, yaitu sebesar 0,1. Sedangkan Provinsi dengan P2 tertinggi adalah Kabupaten Indramayu, yaitu sebesar 0,62. Capaian P2 Kabupaten Cianjur termasuk dalam posisi pertengahan di Jawa Barat yang paling kecil P2-nya adalah Kota Depok dengan P2 sebesar 0,1 (**Gambar 3.16**).



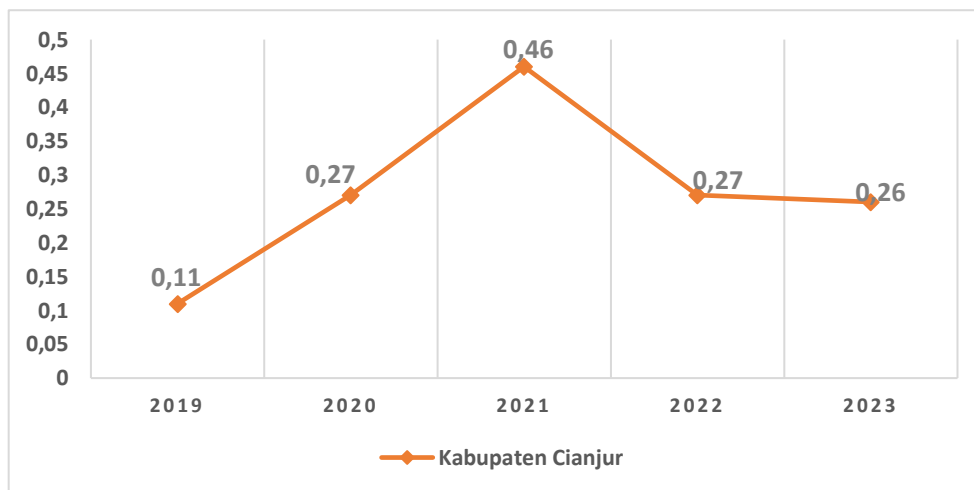
Gambar 3. 16 Grafik Posisi Relatif Tingkat Keparahannya Kemiskinan (P2) Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2023

Sumber: BPS Nasional, 2024



B. Perkembangan time series

Perkembangan tingkat keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Cianjur tahun 2019 – 2023 menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Tahun 2021 tingkat keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Cianjur sebesar 0,46 atau mengalami kenaikan 0,19 poin dibandingkan tahun 2020 dimana P2 sebesar 0,27. Kenaikan P2 ini sejalan dengan kenaikan P0 dan P1 sebagai dampak dari Pandemi Covid-19. Penurunan selama periode 2019 – 2023 terjadi pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022 P2 turun dari 0,46 tahun 2021 menjadi 0,27. Sedangkan tahun 2023 mengalami penurunan dari 0,27 menjadi 0,26 tahun 2022 (**Gambar 3.17**).



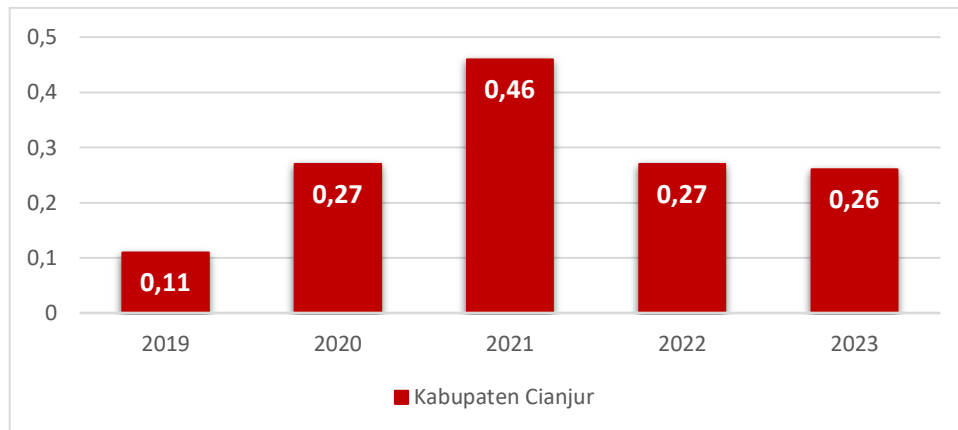
Gambar 3. 17 Grafik Perkembangan Antar Waktu Tingkat Keparahannya Kemiskinan (P2) Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2024

C. Efektivitas

Tingkat keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Cianjur periode 2019 – 2023 menunjukkan kecenderungan penurunan meskipun sifatnya fluktuatif, naik dan turun. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan masih cukup efektif untuk menurunkan tingkat keparahan kemiskinan, walaupun pada tahun 2021 ada peningkatan yang disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu pandemi COVID-19. Secara lebih detail dapat dilihat pada **Gambar 3.18**.





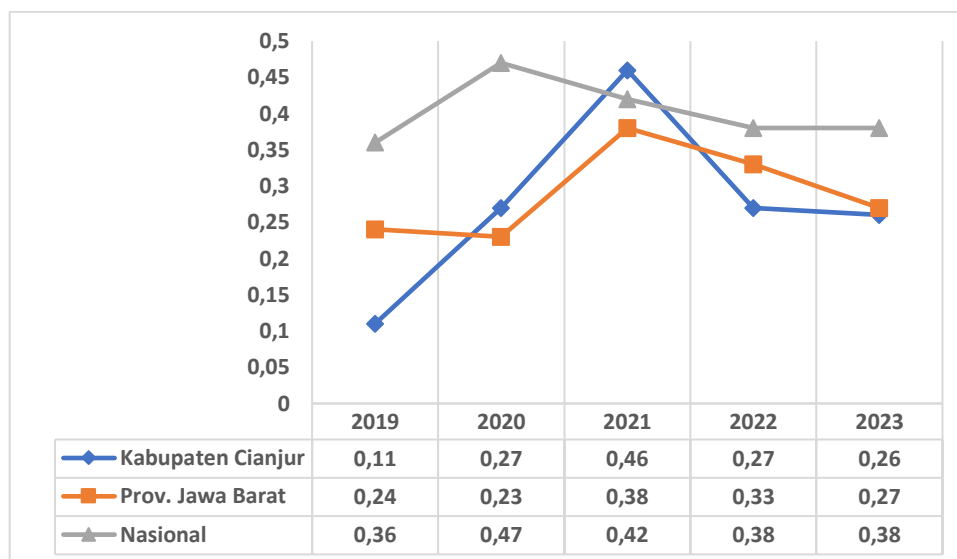
Gambar 3. 18 Grafik Perkembangan Antar Waktu Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2024

D. Relevansi

Capaian tingkat keparahan kemiskinan Kabupaten Cianjur tahun 2019 – 2023 relevan dengan capaian tingkat keparahan kemiskinan (P2) Nasional dan provinsi yang cenderung menurun walaupun fluktuatif yang ditunjukkan pada Gambar 3.20. Ketika terjadi kenaikan atau penurunan tingkat keparahan kemiskinan Nasional, hal ini juga diikuti oleh adanya kenaikan atau penurunan P2 Provinsi Jawa Barat, termasuk Kabupaten Cianjur. Tahun 2019, 2020 menunjukkan kondisi keparahan kemiskinan yang mengalami kenaikan baik di Kabupaten Cianjur maupun nasional, tetapi provinsi mengalami penurunan. Namun, terdapat kondisi yang berbeda pada tahun 2020 dan 2021. Tahun 2020, P2 Kabupaten Cianjur mengalami kenaikan, sedangkan P2 provinsi mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan pada tahun 2020 dan 202q kontribusi poin di Kabupaten Cianjur cukup mempengaruhi kondisi P2 nasional dan provinsi, karena sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Barat mengalami kondisi kenaikan pada tahun 2020 dan naik tahun 2021.





Gambar 3. 19 Grafik Relevansi Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Nasional, 2024

3.3.2 Prioritas Permasalahan Kemiskinan Dalam Dimensi Kemiskinan Konsumsi

Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan jumlah penduduk miskin, tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan meningkat, artinya semakin tinggi jumlah penduduk miskin dan/atau nilai indeks maka menunjukkan semakin jauh dari rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Adapun selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir Kabupaten Cianjur mengalami ketidakstabilan kondisi kemiskinan konsumsi namun program dan kegiatan yang ada di Kabupaten Cianjur dinilai efektif dan cukup relevan dengan kebijakan di tingkat Provinsi maupun nasional. Tabel berikut menjabarkan analisis karakteristik kemiskinan dalam dimensi kemiskinan konsumsi.

Tabel 3.7 Masalah Kemiskinan Konsumsi

No	Indikator Utama	Aspek Yang Dianalisis			
		Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi
1	Presentase dan Jumlah Penduduk Miskin	Lebih Baik (8 teratas dari urutan nilai teratas)	Fluktuatif	Efektif	Cukup Relevan (perbedaan pada tahun 2019 dan 2021)
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	Lebih Baik (peringkat ke 10 dari nilai teratas)	Fluktuatif	Efektif	Cukup Relevan (perbedaan pada tahun 2019 dan 2021)
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)	Lebih Baik (12 teratas dari urutan nilai teratas)	Fluktuatif	Efektif	Cukup Relevan (perbedaan pada tahun 2019 dan 2021)

Sumber : Analisis, 2024.



3.4 ANALISIS KARAKTERISTIK PERMASALAHAN KEMISKINAN KETENAGAKERJAAN

3.4.1 Permasalahan Kemiskinan Dalam Dimensi Ketenagakerjaan

3.4.1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

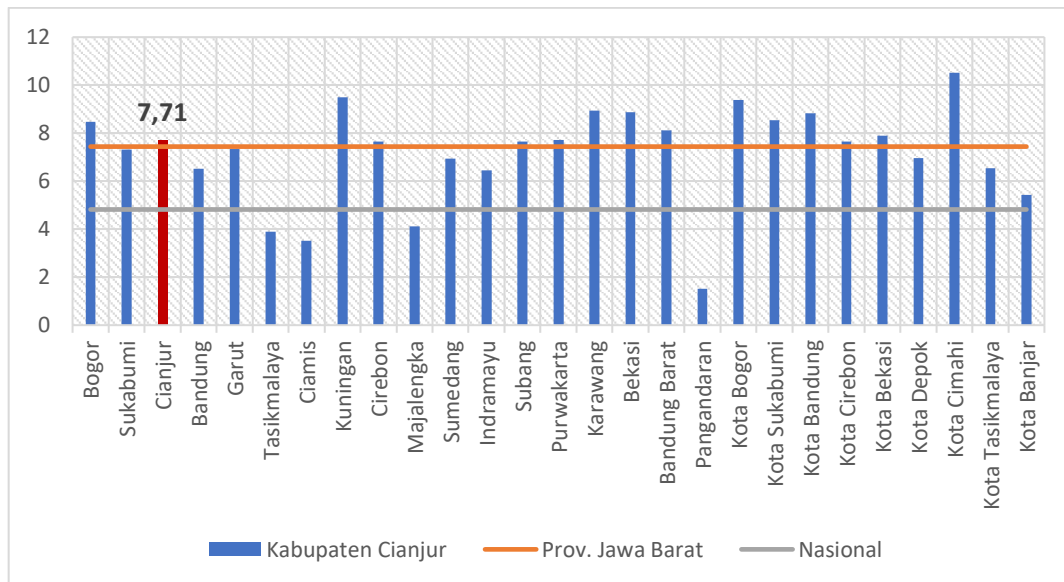
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan persentase jumlah pengangguran dibanding dengan jumlah angkatan kerja dalam suatu wilayah. Nilai TPT menunjukkan besar/kecilnya jumlah pasokan tenaga kerja yang belum termanfaatkan. Sedangkan pengertian pengangguran menurut BPS meliputi penduduk yang tidak bekerja tetapi dalam status mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Beberapa kategori yang termasuk dalam pengangguran terbuka adalah tidak punya pekerjaan dan yang mencari pekerjaan, tidak punya pekerjaan dan yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang sudah mempunyai pekerjaan tapi belum mulai bekerja.

Berikut ini posisi relatif, perkembangan antar waktu, efektivitas dan relevansi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Cianjur.

A. Posisi Relatif

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Cianjur pada tahun 2023 sebesar 7,71%. Capaian ini menunjukkan TPT Kabupaten Cianjur lebih tinggi sekitar 2,39% dibandingkan dengan capaian TPT Nasional, yaitu sekitar 5,32%. Dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Jawa Barat, Kabupaten Cianjur menduduki peringkat ke-11 TPT tertinggi dan yang capaiannya lebih tinggi dari nasional. Kota/Kabupaten di Jawa Barat yang memiliki TPT tertinggi, yaitu Kabupaten Kuningan dan Kota Cimahi sebesar 10,52%. Sedangkan kota/kabupaten yang memiliki TPT terendah, yaitu, Kabupaten Pangnandaran sebesar 1,52%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di Kabupaten Cianjur lebih tinggi, sehingga peluang masyarakat untuk meningkatkan pendapatan rendah dan mendorong timbulnya permasalahan sosial di Kabupaten Cianjur. Hal tersebut karena semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka, semakin rendah peluang masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan mendorong timbulnya permasalahan sosial. Lihat **Gambar 3.20**.





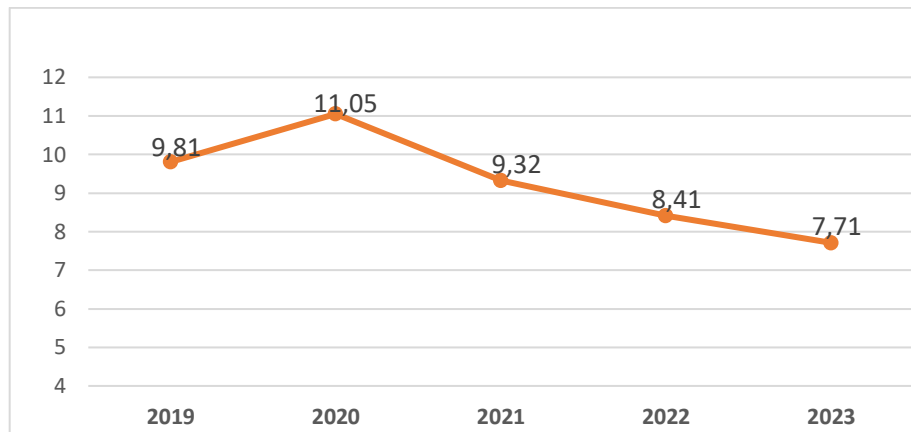
Gambar 3. 20 Grafik Posisi Relatif Pengangguran Terbuka Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Nasional, 2024

B. Perkembangan Time Series

Secara time series atau dari periode 2019-2023 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Cianjur cenderung naik turun, dimana pada periode tahun 2019 – 2020 TPT Kabupaten Cianjur cenderung mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2021-2023 TPT Kabupaten Cianjur mengalami penurunan. Adapun peningkatan paling signifikan berada pada tahun 2020 yakni meningkat sebesar 1,24% menjadi 11,05% dibanding tahun 2019 sebesar 9,81% Tahun 2021 TPT Kabupaten Cianjur mengalami penurunan kembali sebesar 1,73%. Tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya diakibatkan faktor eksternal, yakni pandemi COVID-19 dan pemerintah membuat suatu kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang menyebabkan menurunnya kebutuhan tenaga kerja dan penurunan jam kerja yang menyebabkan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Tahun 2023 kembali mengalami penurunan karena kondisi pandemi COVID-19 yang juga sudah mulai membaik, sehingga berbagai sektor termasuk ketenagakerjaan perlahan membaik pula, sehingga penyerapan tenaga kerja mulai bertambah lagi (**Gambar 3.21**).



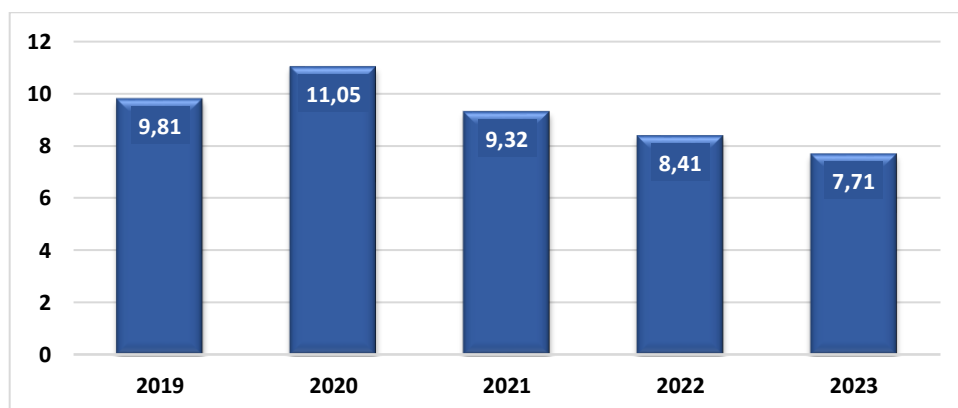


Gambar 3. 21 Grafik Perkembangan Antar Waktu Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2024

C. Efektivitas

Jika dilihat dari tren waktu ke waktu dari **Gambar 3.22**, maka dapat dikatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Cianjur hingga tahun 2020 memiliki tren yang cenderung naik. Hal ini menunjukkan berbagai program pembangunan meliputi pembangunan sektor ekonomi (UMKM) dan IKM pada tahun 2019-2020 masih kurang efektif untuk menurunkan angka pengangguran. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan dibanding 2021. Hal ini menunjukkan program pemulihan ekonomi dan ketenagakerjaan di Kabupaten Cianjur akibat pandemi COVID-19 cukup efektif menurunkan angka pengangguran yang sebelumnya pada tahun 2020 meningkat drastis dibanding 2019.



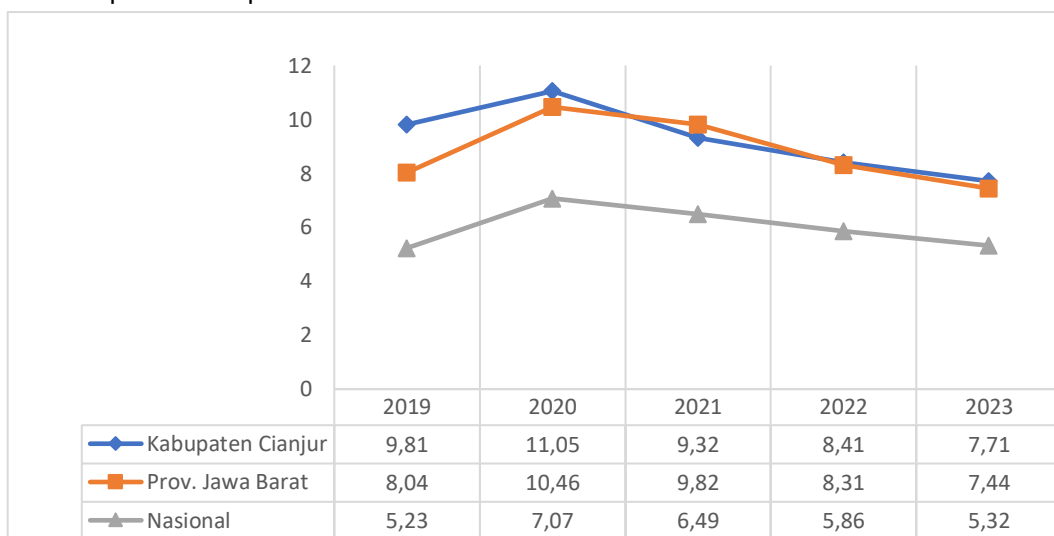
Gambar 3. 22 Grafik Perkembangan Antar Waktu Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2024



D. Relevansi

Capaian tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Cianjur tahun 2019 – 2023 relevansi dengan capaian tingkat pengangguran terbuka Nasional dan provinsi yang cenderung naik pada tahun 2020 dibanding 2019, dan turun pada tahun 2021 dibanding 2020. Kenaikan tahun 2020 yang relevan terjadi akibat pandemi COVID19 yang menyebabkan menurunnya semua sektor, termasuk ketenagakerjaan karena banyak yanam kerja turun dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Penurunan tahun 2021 tersebut juga menunjukkan kondisi yang relevan karena pada tahun 2021 pandemi COVID-19 sudah mulai membaik, dan keadaan perlahan-lahan juga ikut membaik, termasuk sektor ketenagakerjaa. Relevansi dapat dilihat pada **Gambar 3.23**.



Gambar 3. 23 Grafik Analisis Relevansi Pengangguran Terbuka Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Nasional, 2024

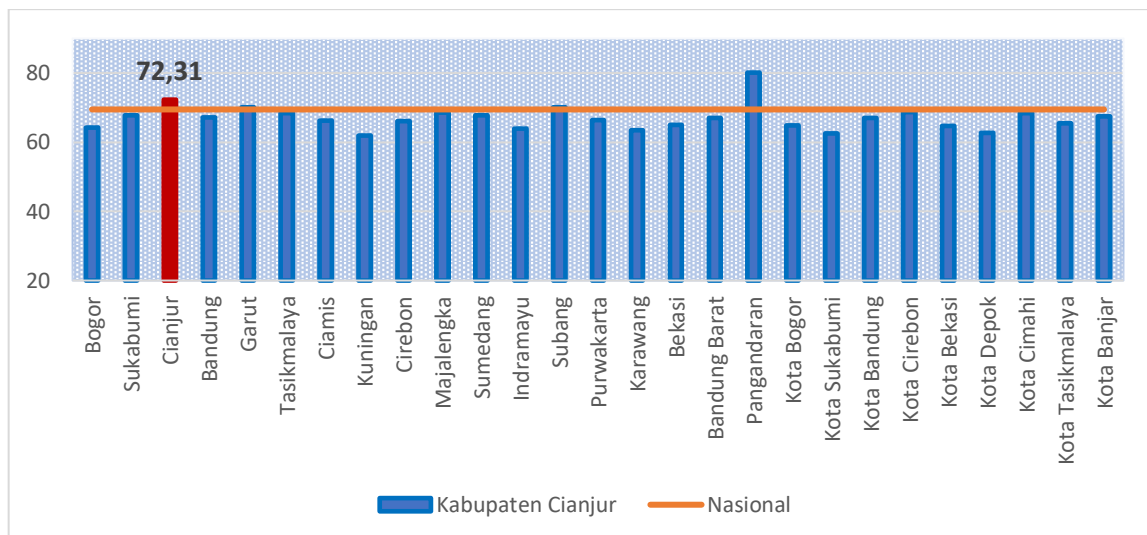
3.4.1.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menggambarkan secara persentase banyaknya penduduk usia diatas 15 tahun yang termasuk dalam angkatan kerja. Nilai TPAK menggambarkan besar-kecilnya pasokan atau ketersediaan tenaga kerja untuk mendukung aktivitas ekonomi. TPAK bermanfaat untuk melihat penduduk yang potensial memproduksi barang dan jasa. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu. Berikut ini posisi relatif, perkembangan time series, efektivitas, relevansi Kabupaten Cianjur.



A. Posisi Relatif

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan menganggur) terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK bermanfaat untuk melihat penduduk yang potensial memproduksi barang dan jasa. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu. Tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Cianjur pada tahun 2023 sebesar 72,31%. Capaian ini menunjukkan TPAK Kabupaten Cianjur lebih tinggi atau lebih baik sekitar 2,83% dibandingkan dengan capaian TPAK Nasional, yaitu sekitar 69,48%. Dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Jawa Barat, Kabupaten Cianjur menduduki peringkat ke-2 TPAK tertinggi dan yang capaiannya lebih tinggi/lebih baik dari nasional. Kota/Kabupaten di Jawa Barat yang memiliki TPAK tertinggi, yaitu Kabupaten Pangandaran sebesar 80,15%. Sedangkan kota/kabupaten yang memiliki TPAK terendah, yaitu Kabupaten Kuningan sebesar 61,95%. Berikut ini secara lebih rinci dapat dilihat pada **Gambar 3.24.**



Gambar 3. 24 Grafik Posisi Relatif Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2019-2023

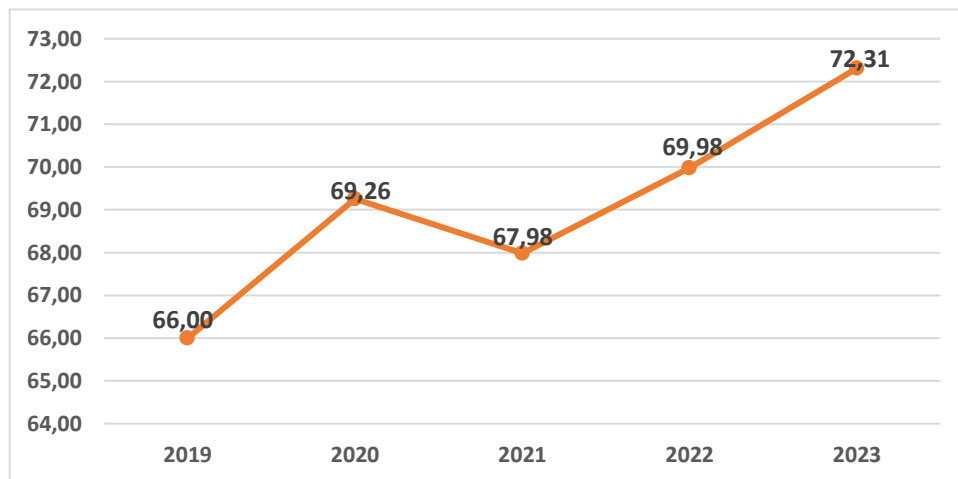
Sumber: BPS Nasional, 2024

B. Perkembangan time series

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Cianjur pada kurun waktu 2019-2023 mengalami kondisi yang cenderung fluktuatif. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir TPAK tahun 2020 mengalami kenaikan 3,26% dibanding 2019 dari 66,00% menjadi 69,26%. Tahun 2021 TPAK Kabupaten Cianjur mengalami penurunan sebesar 1,28% menjadi 67,98% dari 69,26%. Tahun 2021 hingga 2023 TPAK Kabupaten Cianjur terus mengalami kenaikan dibanding tahun 2021. Adapun kenaikan pada tahun 2022 yakni sebesar 2%



menjadi 69,98%. Tahun 2023 TPAK masih mengalami kenaikan yang signifikan, yakni hanya 2,33%.

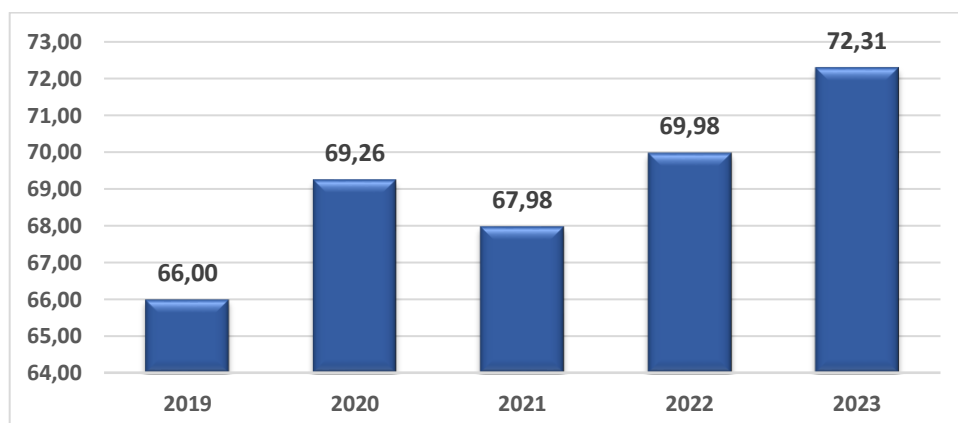


Gambar 3. 25 Grafik Perkembangan Antar Waktu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Kabupaten Cianjur, Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2024

C. Efektivitas

Jika dilihat dari tren waktu ke waktu, maka dapat dikatakan TPAK di Kabupaten Cianjur memiliki tren yang naik, namun fluktuatif. Hal ini menunjukkan berbagai program pembangunan meliputi pembangunan sektor ekonomi (UMKM) dan IKM, serta pemberdayaan di Kabupaten Cianjur cukup efektif untuk meningkatkan TPAK di Kabupaten Cianjur (**Gambar 3.26**).



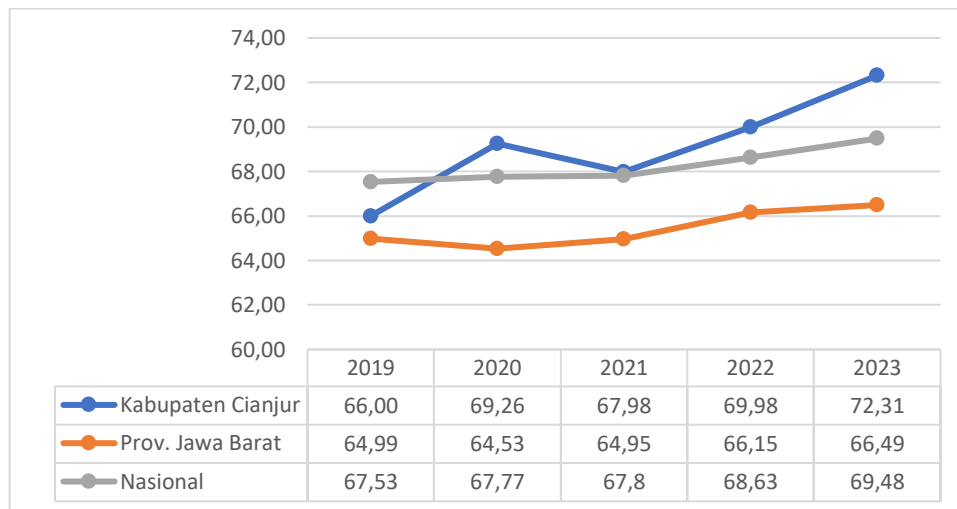
Gambar 3. 26 Grafik Efektivitas Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Kabupaten Cianjur, Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2024



D. Relevansi

Relevansi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Cianjur memiliki kecenderungan yang tidak sama dengan nilai TPAK Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Kabupaten Cianjur memiliki TPAK yang cenderung fluktuatif, sedangkan provinsi cenderung meningkat, namun pada tahun 2020 menurun dibanding 2019. Adapun TPAK Nasional dari tahun 2019-2023 cenderung meningkat. **(Gambar 3.27)**



Gambar 3. 27 Grafik Relevansi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Nasional, 2024

3.4.2 Prioritas Permasalahan Kemiskinan Dalam Dimensi Ketenagakerjaan

Dimensi ketenagakerjaan merupakan salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan, tetapi disisi lain merupakan salah satu penyebab penghambat pembangunan yakni dengan munculnya permasalahan sosial di bidang ketenagakerjaan. Adanya permasalahan seperti pengangguran, menjadi bentuk pendorong peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Cianjur. Adapun di Kabupaten Cianjur pengangguran dari tahun 2017-2021 mengalami kenaikan. Sementara itu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan Kabupaten Cianjur lebih baik dari nasional karena penduduk usia kerja telah terlibat dan berusaha dalam kegiatan produktif. Berikut ini secara lebih jelas masalah dan kondisi Kabupaten Cianjur terhadap masing-masing aspek.



Tabel 3.8 Masalah Kemiskinan Bidang Ketenagakerjaan

No	Indikator Utama	Aspek Yang Dianalisis			
		Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Lebih Baik (11 teratas dari urutan nilai teratas)	Fluktuatif	Efektif	Cukup Relevan (perbedaan pada tahun 2019 dan 2021)
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Lebih Baik (peringkat ke 2 dari nilai teratas)	Fluktuatif	Efektif	Cukup Relevan (perbedaan pada tahun 2019 dan 2021)

Sumber : Hasil Analisis, 2024.

3.5 ANALISIS KARAKTERISTIK PERMASALAHAN KEMISKINAN KESEHATAN

3.5.1 Permasalahan Kemiskinan Dalam Dimensi Kesehatan

3.5.1.1 Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas(42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Dengan perhitungan angka kematian ibu digunakan untuk memonitor kematian terkait dengan kehamilan, persalinan, dan nifas. Berikut ini perkembangan antar waktu angka kematian ibu di Kabupaten Cianjur.

Empat Strategi Intervensi penurunan angka kematian ibu di Kabupaten Cianjur, diantaranya adalah :

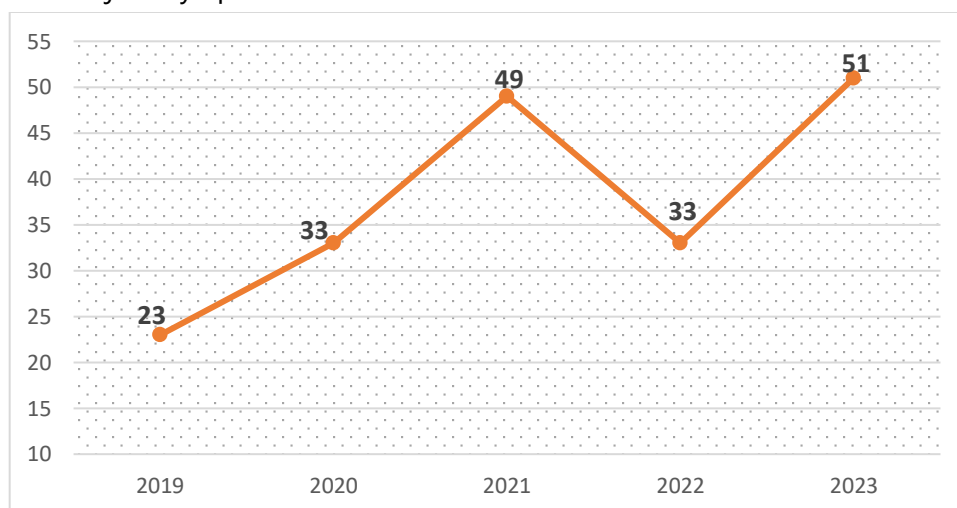
1. **PENGUATAN TATA KELOLA**, Penguatan upaya promotif dan preventif di Puskesmas, pelacakan-pencatatan-pelaporan kematian ibu dan bayi, audit maternal perinatal (AMP), pemantauan wilayah setempat, pengawasan implementasi regulasi.
2. **PENINGKATAN AKSES LAYANAN BAGI IBU DAN BAYI**, Meningkatkan jumlah kunjungan ANC dari 4x menjadi 6x, persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, meningkatkan kunjungan PNC dari 3x menjadi 4x.
3. **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**, Pemanfaatan Buku Kesehatan Ibu dan Anak, Pemberdayaan masyarakat dlm persiapan kehamilan, Kelas ibu hamil dan ibu balita, Posyandu, pemanfaatan dana desa, peran PKK perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (ambulan desa, donor darah).
4. **PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN**, Penguatan antenatal, persalinan, dan postnatal termasuk pelayanan KB PP, pelayanan kes bayi sesuai standar,



peningkatan kapasitas dokter umum terkait ibu dan bayi, pengampunan dan pembinaan dari 13 RS Vertikal dan 4 RSUD terpilih, peningkatan skrining masalah kesehatan ibu dan bayi.

A. Perkembangan time series

Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada periode tahun 2019 – 2023 AKI Kabupaten Cianjur cenderung naik. Pada tahun 2019 AKI Kabupaten Cianjur sebesar 23 dan naik menjadi 33 pada tahun 2020. Tahun 2021 AKI mengalami kenaikan yang sangat drastis, dimana berdasarkan perhitungan absolut terdapat 19 kasus kematian ibu yang disebabkan oleh COVID-19 AKI ini terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2021 menjadi 49. Pandemi COVID-19 yang mulai terjadi pada pertengahan 2019 di Indonesia dan Kabupaten Cianjur khususnya mengalami puncak kasus pada tahun 2021 mengakibatkan kelompok rentan banyak mengalami kematian akibat terkena COVID-19, termasuk ibu hamil banyak yang menjadi korban Tahun 2022 Angka Kematian Ibu mengalami penurunan menjadi 33 dan kembali naik di tahun 2023 menjadi 51. Untuk lebih jelasnya pada **Gambar 3.28**.



Gambar 3. 28 Grafik Perkembangan Antar Waktu Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023

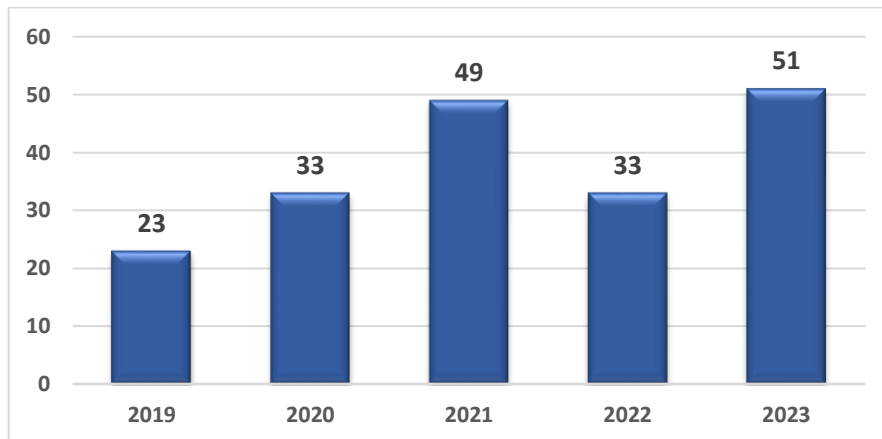
Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2024

C. Efektivitas

Pandemi COVID-19 merupakan kondisi yang menyebabkan adanya pembatasan aktivitas masyarakat, sarana transportasi dan kekhawatiran akan tertular dapat menghambat perempuan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak dalam hal akses dan kualitas layanan. Adapun analisis efektivitas angka kematian ibu pada periode tahun 2019-2023 mengalami fluktuatif dengan jumlah terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu 23 kasus.



Selanjutnya pada tahun 2023, jumlah kasus kematian ibu meningkat 18 kasus dari tahun 2022 yang mencapai 33 kasus. Hal ini perlu menjadi perhatian serius terkait penyebab meningkatnya jumlah kematian ibu. Berdasarkan hasil evaluasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, penyebab 3 (tiga) terbesar kematian ibu yang pertama adalah sebesar 29,4 persen dari hipertensi dengan 15 kasus, kemudian komplikasi non obstetrik sebesar 21,6 persen dan 19,6 persen pendarahan. Hal ini menunjukkan adanya efektivitas karena capaian indikator kinerja peningkatan keselamatan ibu melahirkan, Untuk lebih jelasnya pada **Gambar 3.29**.



Gambar 3. 29 Grafik Analisis Efektivitas Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2024

3.5.1.2 Angka Kematian Bayi

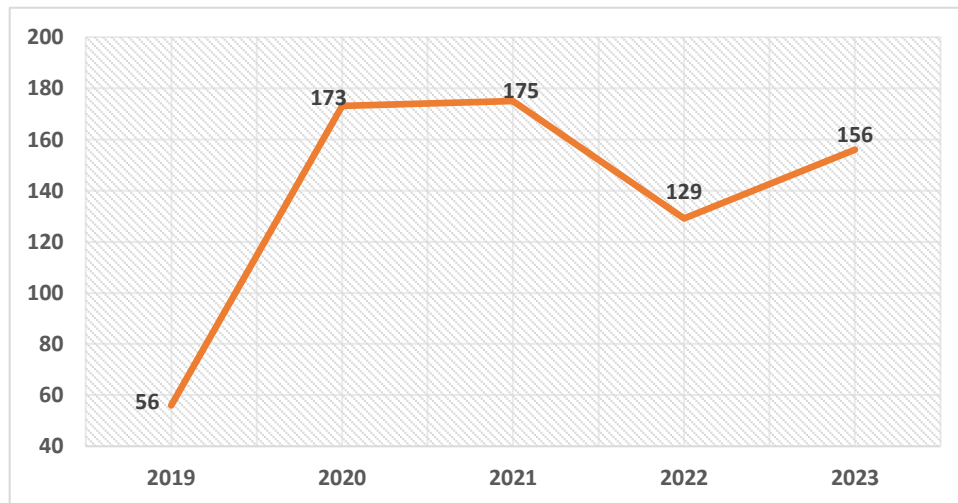
Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator penting sebagai cerminan tingkat kesehatan masyarakat, karena bayi sangat sensitif terhadap kondisi lingkungan tempat tinggal serta kondisi status sosial orang tuanya terutama terkait dengan kesehatan reproduksi. Tingkat kematian bayi dihitung dari banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 (satu) tahun pada waktu tertentu per seribu kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Berikut ini perkembangan antar waktu angka kematian bayi di Kabupaten Cianjur dalam kurun waktu tertentu terhadap angka kematian bayi di Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

B. Perkembangan time series

Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada periode tahun 2019 – 2023 AKB Kabupaten Cianjur cenderung naik. Pada tahun 2019 AKB Kabupaten Cianjur sebesar 56 dan naik menjadi 173 pada tahun 2020 dan meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi 175 kasus. Selanjutnya pada tahun 2023, jumlah



kasus kematian bayi meningkat menjadi 27 kasus dari tahun 2022 yang mencapai 129 kasus. Pandemi COVID-19 yang mulai terjadi pada pertengahan 2019 di Indonesia dan Kabupaten Cianjur khususnya mengalami puncak kasus pada tahun 2021 mengakibatkan kelompok rentan banyak mengalami kematian akibat terkena COVID-19, termasuk kematian bayi banyak yang menjadi korban Tahun 2023 Angka Kematian Bayi mengalami kenaikan menjadi 156. Untuk lebih jelasnya pada **Gambar 3.30**



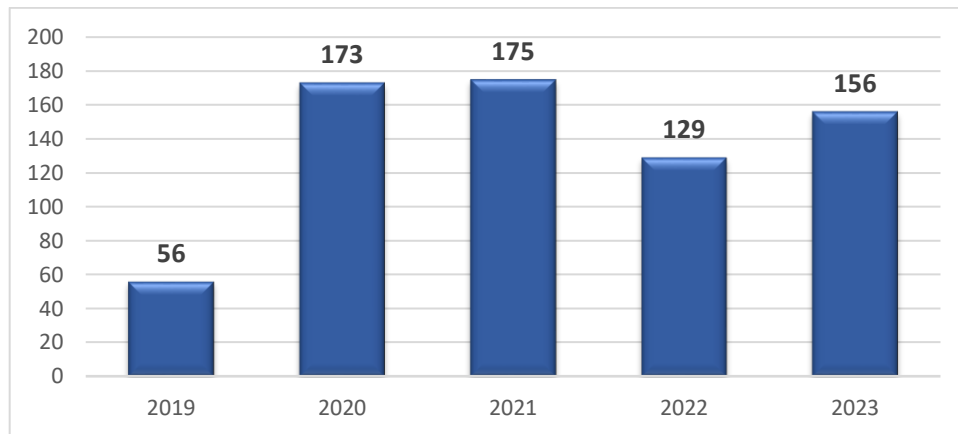
Gambar 3. 30 Grafik Perkembangan Antar Waktu Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2024

C. Efektivitas

Pandemi COVID-19 merupakan kondisi yang menyebabkan adanya pembatasan aktivitas masyarakat, sarana transportasi dan kekhawatiran akan tertular dapat menghambat perempuan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak dalam hal akses dan kualitas layanan. Adapun analisis efektivitas angka kematian ibu pada periode tahun 2019-2023 mengalami fluktuatif dengan jumlah terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu 23 kasus. Selanjutnya pada tahun 2023, jumlah kasus kematian ibu meningkat 18 kasus dari tahun 2022 yang mencapai 33 kasus. Hal ini perlu menjadi perhatian serius terkait penyebab meningkatnya jumlah kematian ibu. Berdasarkan hasil evaluasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, penyebab 3 (tiga) terbesar kematian ibu yang pertama adalah sebesar 29,4 persen dari hipertensi dengan 15 kasus, kemudian komplikasi non obstetrik sebesar 21,6 persen dan 19,6 persen pendarahan. Hal ini menunjukkan adanya efektivitas karena capaian indikator kinerja peningkatan keselamatan ibu melahirkan, Untuk lebih jelasnya pada **Gambar 3.31**.





Gambar 3. 31 Grafik Analisis Efektivitas Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2024

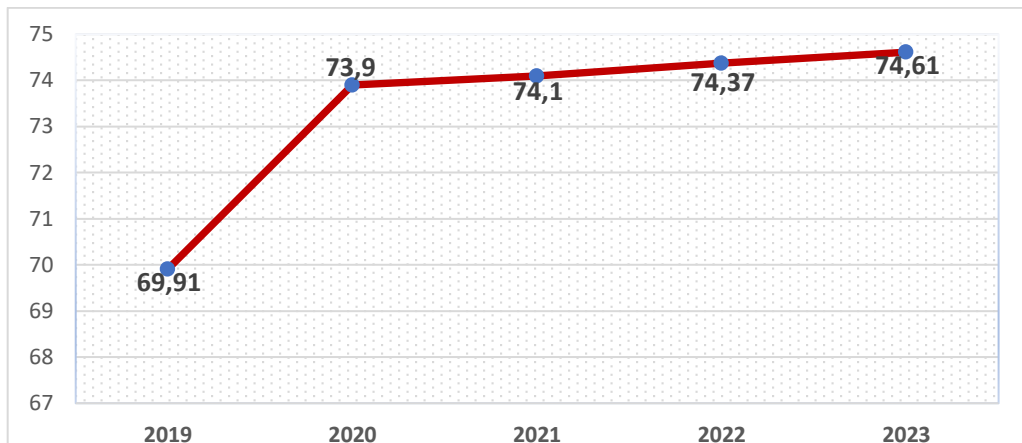
3.5.1.3 Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup atau disingkat AHH adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Data AHH di suatu daerah berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai maka semakin tinggi derajat kesehatannya. AHH menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yang mencerminkan “lamanya hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat. Berikut ini menunjukkan angka harapan hidup Kabupaten Cianjur dalam kurun waktu tertentu dan posisi relatif terhadap Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Berikut ini angka harapan hidup di Kabupaten Cianjur pada periode waktu tertentu.

A. Perkembangan Time Series

Perkembangan Angka Harapan Hidup cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada periode tahun 2019 – 2023 AHH Kabupaten Cianjur cenderung naik. Pada tahun 2019 AHH Kabupaten Cianjur sebesar 69,91 tahun dan naik menjadi 73,9 tahun 2020. AHH ini terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2023 menjadi 74,61 tahun. Angka Harapan Hidup yang cenderung naik menunjukkan kebijakan yang dilakukan oleh Kabupaten Cianjur berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk lebih jelasnya pada **Gambar 3.32**.



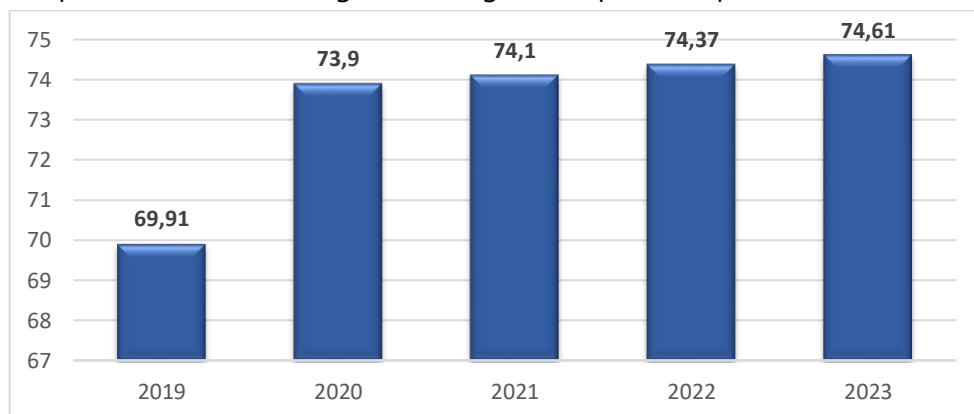


Gambar 3. 32 Grafik Perkembangan Antar Waktu Angka Harapan Hidup (tahun) Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2024

B. Efektivitas

Berdasarkan **Gambar 3.33** di bawah tentang analisis efektivitas Angka Harapan Hidup Kabupaten Cianjur dari tahun 2019 – 2023. Dari data series tentang AHH menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup Kabupaten Cianjur cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Cianjur sudah cukup efektif untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup.



Gambar 3. 33 Grafik Perkembangan Antar Waktu Angka Harapan Hidup (tahun) Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023

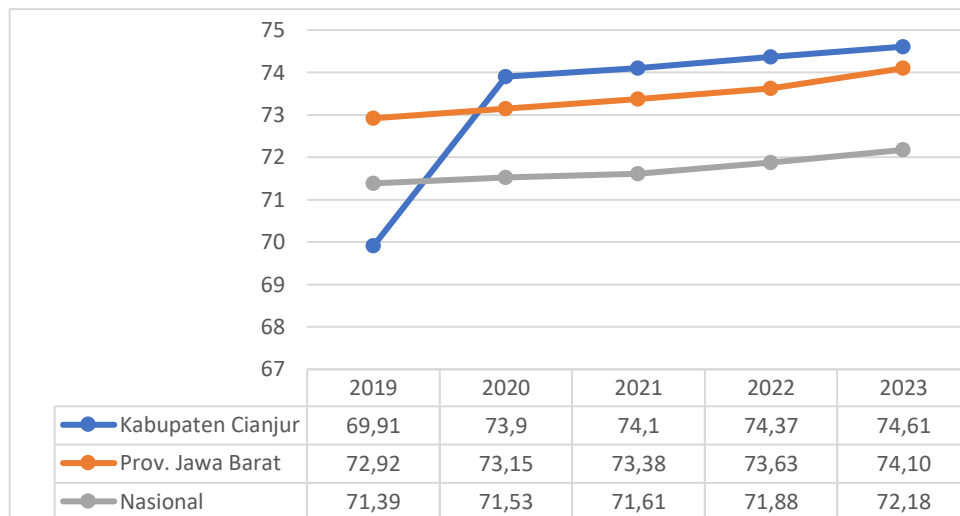
Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2024

C. Relevansi

Berdasarkan Analisis Relevansi Angka Harapan Hidup Kabupaten Cianjur tahun 2019 – 2023 menunjukkan bahwa capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Cianjur berada di atas capaian AHH Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Sedangkan, capaian AHH nasional paling



rendah dibanding Provinsi Jawa Barat dan nasional. Berdasarkan grafik Angka Harapan Hidup Kabupaten Cianjur relevan dengan Angka Harapan Hidup tingkat nasional dan provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional cukup relevan dalam meningkatkan AHH. **Gambar 3.34.**



Gambar 3. 34 Grafik Relevansi Angka Harapan Hidup Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023

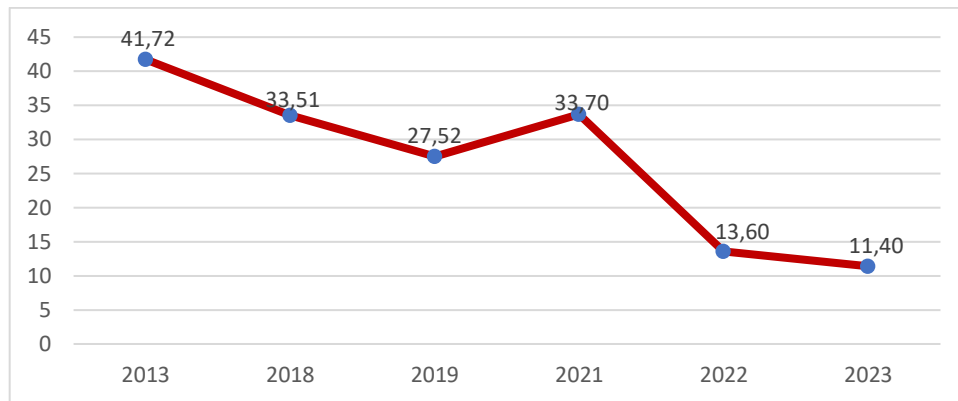
Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2024

3.5.1.4 Stunting

A. Perkembangan time series

Berdasarkan dari hasil Riskesdas Kementerian Kesehatan, angka prevalensi stunting di Kabupaten Cianjur tahun 2013 sebesar 41,72 persen mengalami peningkatan sebesar 6.3 persen dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar 35.4 persen. Namun pada tahun 2018 berdasarkan dari Survey Status Gizi Indonesia Kementerian Kesehatan mengalami penurunan sebesar 8,2 persen dengan capaian sebesar 33,5 persen. Penurunan angka prevalensi stunting pada tahun 2018 merupakan adanya aksi konvergensi stunting dan pada tahun 2019 terjadi penurunan kembali sebesar 6 persen dari tahun 2018. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 6,2 persen dari tahun 2019 yang mencapai 33, 7 persen, pada tahun 2022 dilakukan upaya strategi percepatan penurunan stunting melalui konsep hexahelix percepatan penurunan stunting dan pada tahun 2022, tercapai penurunan sebesar 20,1 persen atau capaian tahun 2022 sebesar 13,6 persen. Kemudian pada tahun 2023, Kabupaten Cianjur berhasil menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 2,2 persen dari tahun 2022 yang mencapai hasil 11,4 persen. Untuk leboh jelasnya pada **Gambar 3.35.**



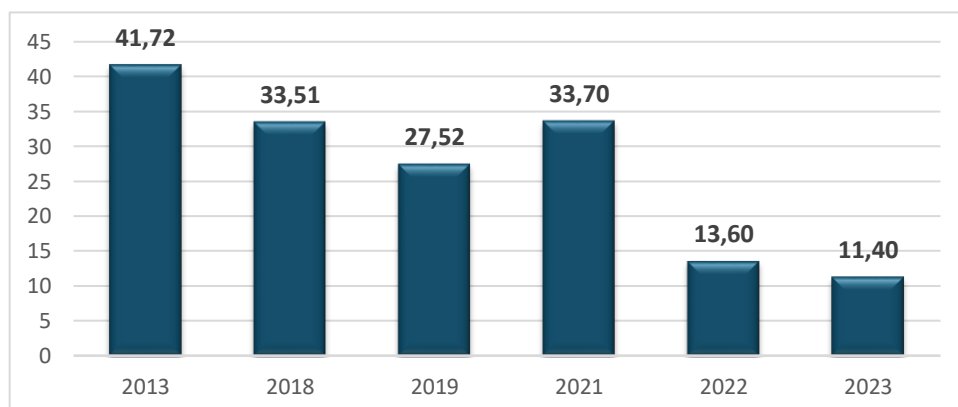


Gambar 3. 35 Grafik Perkembangan Antar Waktu Stunting Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2024

B. Efektivitas

Dari Gambar 3.41 tentang analisis efektivitas stunting Kabupaten Cianjur tahun 2018-2021 menunjukkan grafik yang cenderung menurun. Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa penurunan lebih banyak terjadi dibanding kenaikan. Selain itu, intervensi (%) penurunan juga lebih besar terjadi dibanding yang mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa program daerah berupa program upaya kesehatan masyarakat cukup efektif untuk menurunkan persentase atau nilai intervensi stunting di Kabupaten Cianjur. Berikut **Gambar 3.36** efektivitas intervensi stunting di Kabupaten Cianjur.



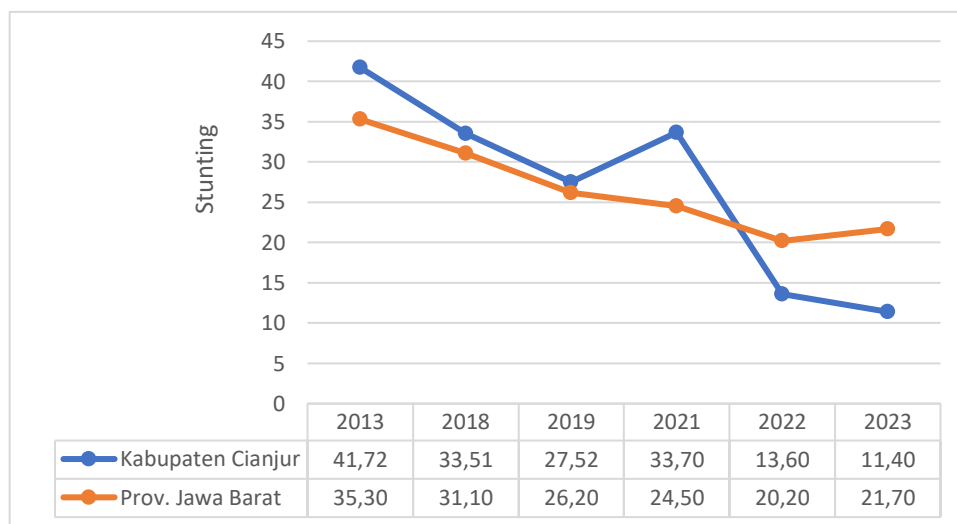
Gambar 3. 36 Grafik Efektivitas Intervensi Stunting Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2024



C. Relevansi

Gambar 3.37 terkait analisis relevansi stunting Kabupaten Cianjur menunjukkan bahwa capaian angka stunting Kabupaten Cianjur pada tahun 2021 pada posisi angka 9,20% lebih baik dari capaian angka stunting provinsi yaitu 24,50%, namun pada tahun 2022 capaian angka stunting berbanding terbalik yaitu capaian angka stunting di Kabupaten Cianjur turun menjadi 13,60%, sedangkan capaian stunting provinsi mengalami penurunan menjadi 20,20%. Namun, pada perbedaan tersebut kondisi stunting di Kabupaten Cianjur masih tetap lebih baik dibanding provinsi. Pada tahun 2023 kembali relevan, yaitu mengalami penurunan baik di Kabupaten Cianjur, dimana capaian stunting Kabupaten Cianjur pada angka 11,40% sedangkan provinsi yaitu 27,70 %. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan untuk menurunkan angka stunting antara Kabupaten Cianjur dan provinsi cukup relevan.



Gambar 3. 37 Grafik Relevansi Perkembangan Antar Waktu Stunting Kabupaten Cianjur dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2023

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

3.5.2 Prioritas Permasalahan Kemiskinan Dalam Dimensi Kesehatan

Menjaga kesehatan merupakan kewajiban setiap masyarakat, upaya pencegahan terhadap suatu penyakit harus dimiliki oleh setiap individu. Walaupun merupakan tanggung jawab setiap masyarakat, namun hal itu harus mendapat dukungan dari pemerintah yang berwenang. Pemerintah tersebut mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Pemerintah hanya mendukung masyarakat dengan membuat suatu kebijakan – kebijakan yang berpihak untuk meningkatkan derajat kesehatan. Jadi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat harus dimulai dari masyarakat itu sendiri dan mendapat dukungan program – program yang berasal dari kebijakan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah yang berwenang untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah Dinas Kesehatan.



Adapun permasalahan kemiskinan dalam dimensi kesehatan dilihat dari masing-masing aspek yang dianalisis ditunjukkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.9 Masalah Kemiskinan Bidang Kesehatan

No	Indikator Utama	Aspek Yang Dianalisis			
		Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi
1	Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)	-	Cenderung fluktuatif	Tidak Efektif	-
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	-	Cenderung fluktuatif	Tidak Efektif	-
3	Angka Harapan Hidup (AHH)	Lebih baik dari nasional dan provinsi (persentase paling tinggi)	Cenderung naik	Efektif	Cukup Relevan (perbedaan pada tahun 2020 dan 2023)
4	Stunting	Lebih baik dari provinsi (persentase paling rendah).	Cenderung turun	Efektif	Cukup Relevan (perbedaan pada tahun 2021 dan 2023)

Sumber : Hasil Analisis, 2024

3.6 ANALISIS KARAKTERISTIK PERMASALAHAN KEMISKINAN PENDIDIKAN

3.6.1 Permasalahan Kemiskinan Dalam Dimensi Pendidikan

3.6.1.1 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan yaitu SD, SMP, SMA. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Dengan mengidentifikasi APK maka dapat mengukur daya serap penduduk usia sekolah masing-masing jenjang pendidikan. Lebih detail APK tiap jenjang pendidikan dijelaskan berikut ini.

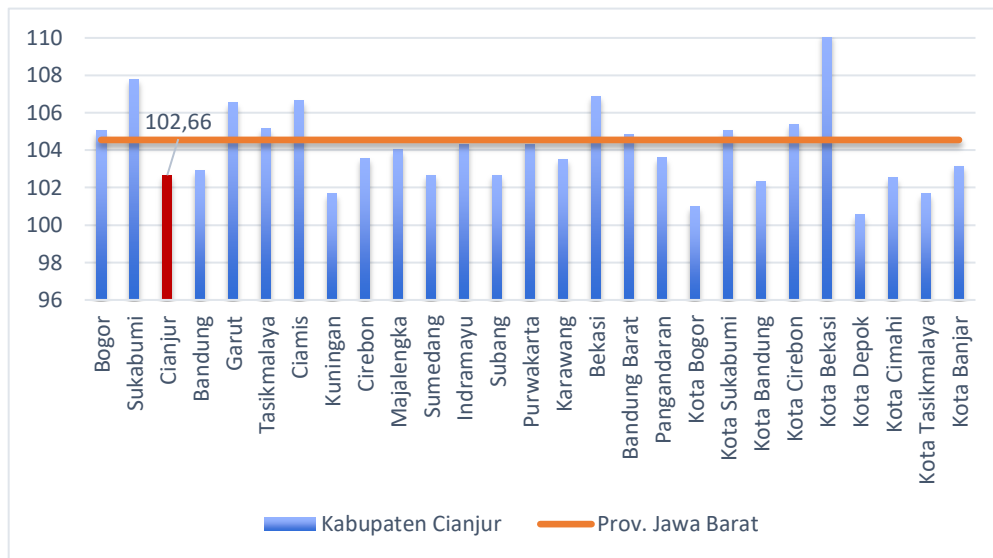
3.6.1.1.1 Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah merupakan persentase penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan sekolah dasar.



A. Posisi Relatif

Berdasarkan posisi relatif APK SD/MI di Kabupaten Cianjur Tahun 2022 yaitu 102,66%. Angka tersebut berada di bawah capaian Provinsi Jawa Barat yaitu 104,55%. Adapun Kabupaten Sukabumi yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Cianjur memiliki angka lebih tinggi yaitu sebesar 107,79% dengan selisih 5,13%. Artinya Capaian APK SD/MI Kabupaten Cianjur lebih rendah jika dibandingkan Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Secara lebih detail posisi relatif Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada **Gambar 3.38**.



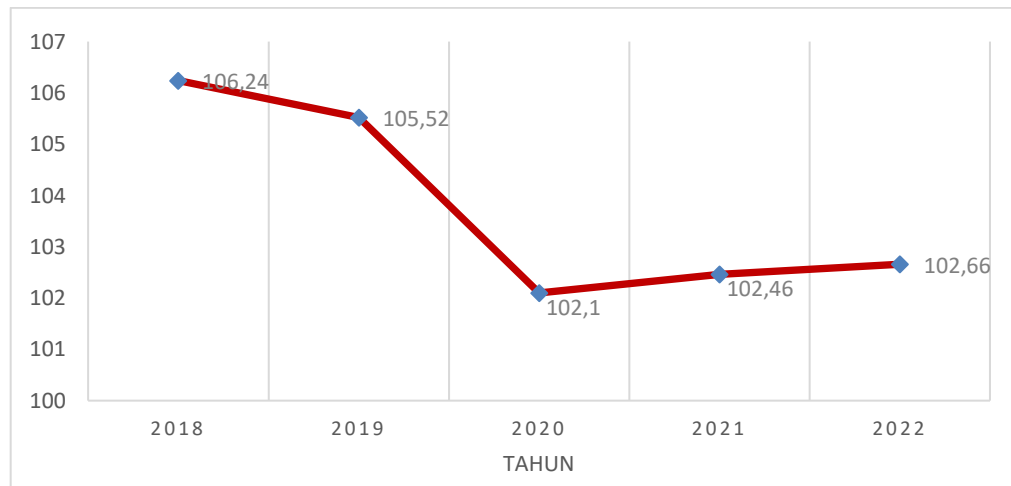
Gambar 3. 38 Grafik Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

Sumber: BPS Provinsi, 2023

B. Perkembangan Time Series

Perkembangan APK SD/MI dari tahun 2018-2022 di Kabupaten Cianjur. Berdasarkan grafik tersebut di bawah menunjukkan angka partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan pada tahun 2018 sebesar 106,24, angka tersebut cenderung lebih tinggi dibandingkan periode waktu yang lainnya. Periode tahun 2018-2022 Angka partisipasi terus mengalami penurunan. Adapun persentase APK SD/MI di Kabupaten Cianjur tetap berada di atas capaian Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Sekolah Dasar yang dilaksanakan di Kabupaten Cianjur masih berjalan dengan baik. Lihat **Gambar 3.39**.



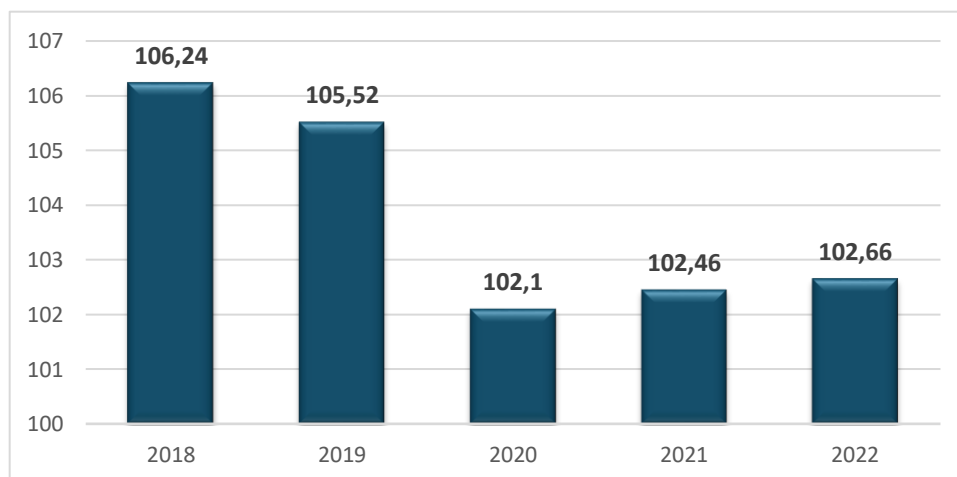


Gambar 3. 39 Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2024

C. Efektivitas

Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kabupaten Cianjur tahun 2018-2022 menunjukkan tren turun. Dengan tren yang turun capaian APK SD/MI di Kabupaten Cianjur Tahun 2022, maka Pemerintah Kabupaten Cianjur harus melakukan perbaikan program dan kegiatan dengan tetap menargetkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Paket A tetap berada di atas 100 dan berada di atas capaian Provinsi Jawa Barat dan Nasional sesuai dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2022. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Gambar 3.40**.



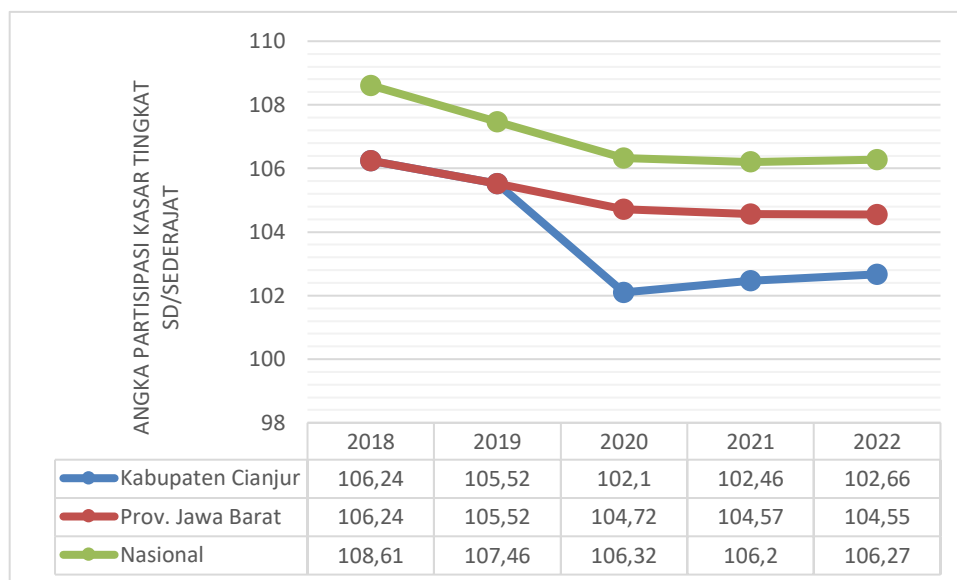
Gambar 3. 40 Grafik Efektivitas Angka Partisipasi Kasar SD/MI Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2024



D. Relevansi

Analisis Relevansi menunjukkan tren APK SD/MI Nasional dari tahun 2018-2022 cenderung mengalami kenaikan, diikuti dengan capaian APK SD/MI Provinsi Jawa Barat dan nasional. Pada ahun 2019-2021 capaian APK SD/MI meningkat dan tidak diikuti oleh capaian APK SD/MI Provinsi Jawa Barat dan nasional yaitu meningkat sebesar 0,33% di tahun 2020.. Sementara itu di tahun 2022, APK SD/MI Kabupaten Cianjur mengalami peningkatan. Artinya terdapat keberhasilan program pembangunan pendidikan di Kabupaten Cianjur dan berada di atas capaian nasional dan provinsi. Di Tahun 2022, Kabupaten Cianjur mengalami kenaikan ketercapaian APK SD/MI hingga 1,20% dari tahun sebelumnya. Namun, selama5 tahun terakhir, Kabupaten Cianjur berkontribusi positif terhadap peningkatan APK SD/MI Nasional dan Provinsi Jawa Barat.



Gambar 3. 41 Grafik Analisa Relevansi Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022

Sumber : BPS Provinsi, 2023

3.6.1.1.2 Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

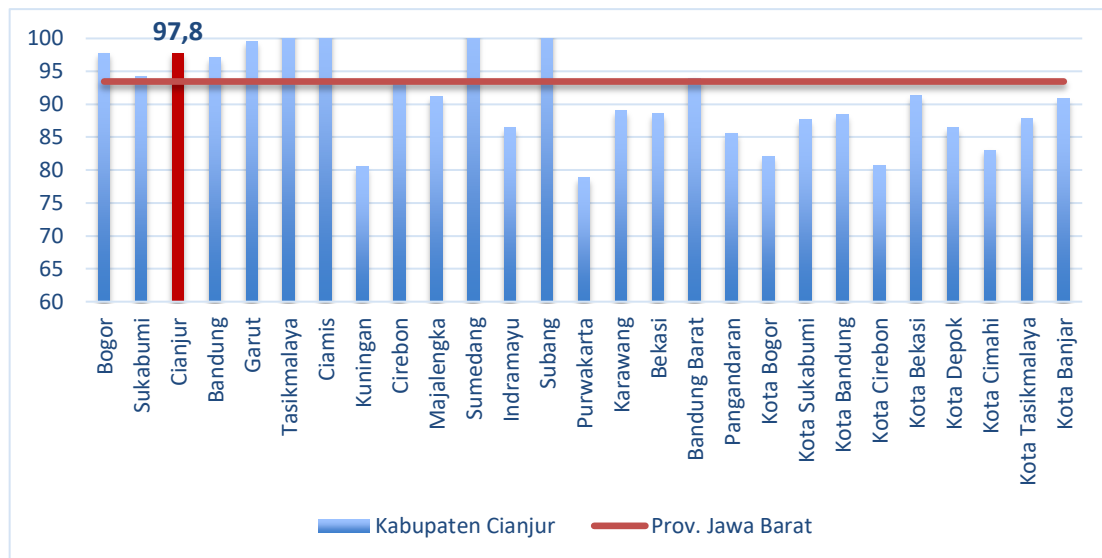
Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah merupakan persentase penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan sekolah SLTP dibagi dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun.

A. Posisi Relatif

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Kabupaten Cianjur pada pada tahun 2022 sebesar 97,8%. Artinya, persentase tersebut lebih tinggi 4,34% dibandingkan Provinsi Jawa Barat



dengan nilai 95,46%. Adapun secara interregional, wilayah di sekitar Kabupaten Cianjur seperti Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bogor memiliki persentase lebih baik dibandingkan Kabupaten Cianjur yaitu berada di atas APK SMP/MTs Provinsi Jawa Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 3.42**.



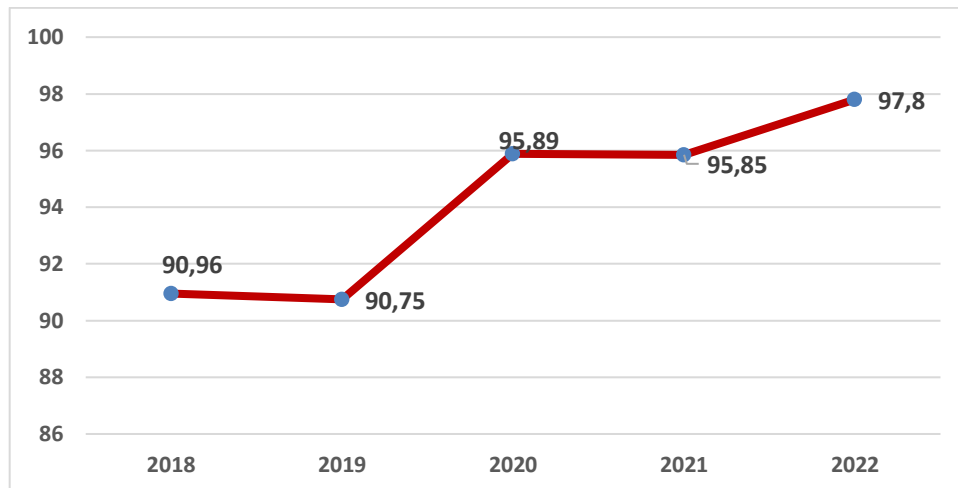
Gambar 3. 42 Grafik Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Pprovinsi Jawa Barat Tahun 2022

Sumber : BPS Provinsi, 2023

B. Perkembangan Time Series

Perkembangan APK SD/MI dari tahun 2018-2022 di Kabupaten Cianjur. Berdasarkan grafik tersebut di bawah menunjukkan angka partisipasi kasar penduduk yang sedang mengenyam pendidikan pada tahun 2018 sebesar 90,96, angka tersebut cenderung lebih rendah dibandingkan periode waktu yang lainnya. Periode tahun 2018-2022 Angka partisipasi terus mengalami peningkatan. Adapun persentase APK SD/MI di Kabupaten Cianjur tetap berada di atas capaian Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Sekolah Dasar yang dilaksanakan di Kabupaten Cianjur masih berjalan dengan baik.





Gambar 3. 43 Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2024

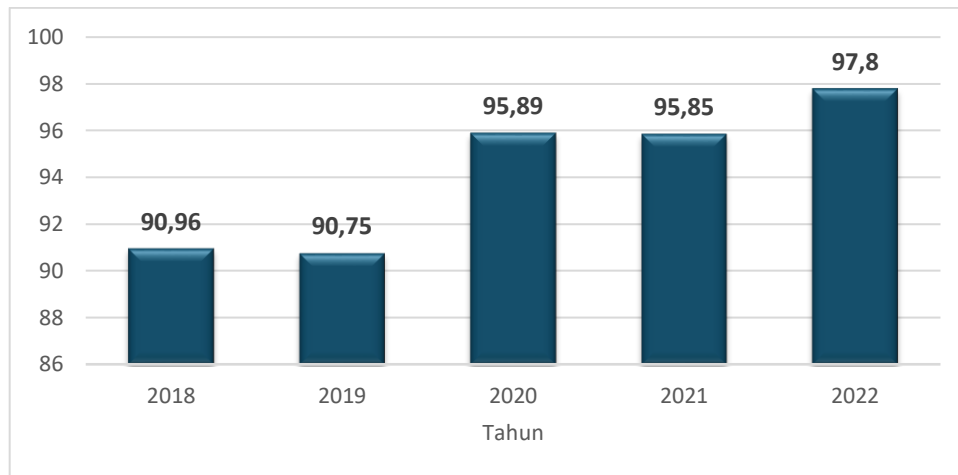
C. Efektivitas

Analisis efektivitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022 menunjukkan tren cenderung meningkat pada tahun 2022. Peningkatan angka partisipasi penduduk yang bersekolah di jenjang SMP dari tahun 2019 menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Di samping masih ada anak putus sekolah dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan di atasnya, Pemerintah Kabupaten Cianjur terus meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dengan cara meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar dan pendidikan non formal bagi masyarakat. Kecenderungan peningkatan capaian APK SMP/MTs menandakan kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur telah diperbaiki, sehingga dapat meningkat di tahun berikutnya. Oleh karena itu, berdasarkan Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2022, Kabupaten Cianjur menargetkan APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B untuk dapat mencapai target hingga 100 persen.



LAPORAN AKHIR

Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029

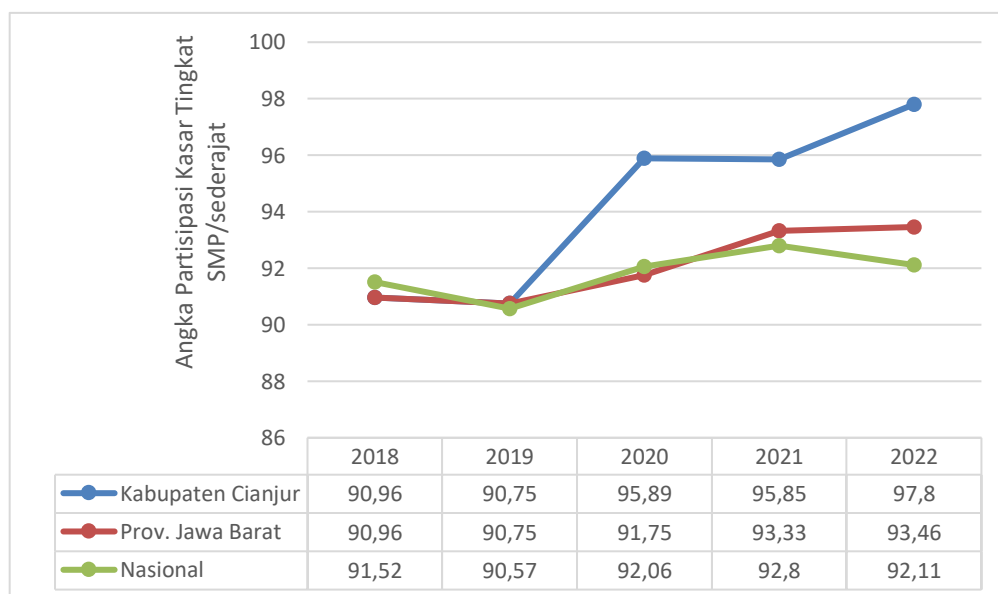


Gambar 3. 44 Grafik Efektivitas Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2024

D. Relevansi

Berbeda dengan APK SD/MI, persentase APK SMP/MTs di Kabupaten Cianjur dari Tahun 2018-2022 cenderung berada di bawah garis capaian Provinsi. Persentase penduduk yang sedang bersekolah di tingkat SMP di Kabupaten Cianjur lebih rendah dibandingkan capaian APK di Provinsi. Upaya Kabupaten Cianjur untuk melakukan peningkatan APK SMP/MTs perlu ditingkatkan agar dapat memberikan kontribusi positif pada peningkatan capaian APK SMP/MTs.



Gambar 3. 45 Grafik Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%) Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022

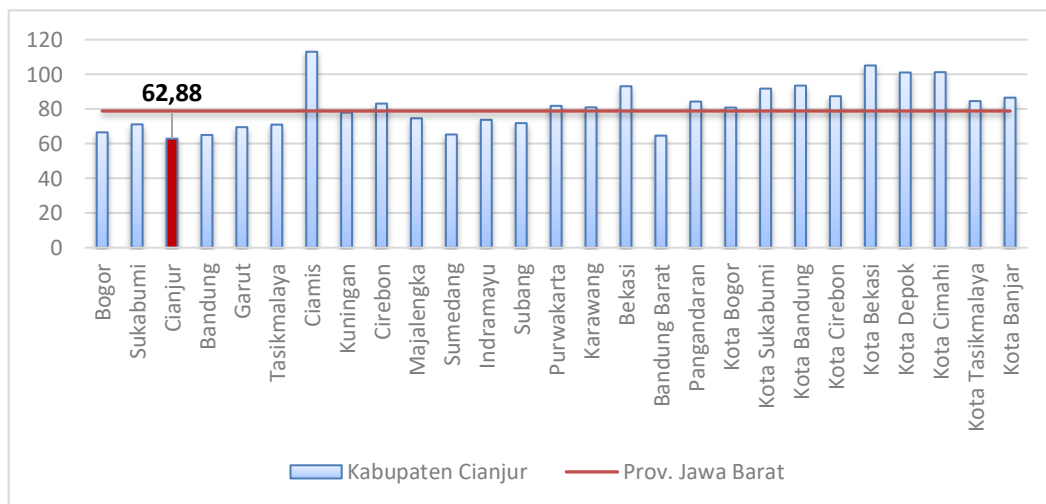
Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2024



3.6.1.1.3 Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah

A. Posisi Relatif

Angka partisipasi kasar (APK) SMA/MA yaitu perbandingan jumlah murid pada tingkat pendidikan SLTA dibagi dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun. Pada tahun 2022, APK SMA/MA Kabupaten Cianjur sebesar 62,88%, capaian ini lebih rendah dibandingkan tingkat provinsi yaitu sebesar 78,86%. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur menduduki capaian APK SMA/MA terendah yang disusul oleh Kabupaten Bandung Barat dan Sumedang dengan selisih nilai sekitar 2,42%. Adapun secara inter-regional, Kabupaten Sukabumi yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Cianjur memiliki nilai 71,15%, angka tersebut berada di atas Kabupaten Cianjur dan capaian provinsi. Artinya nilai APK SMA/MA Kabupaten Cianjur dalam kondisi lebih baik dan berkontribusi positif terhadap peningkatan APK SMA/MA. Secara lebih rinci, **Gambar 3.46** menunjukkan posisi relatif APK SMA/MA Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat .



Gambar 3. 46 Grafik Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

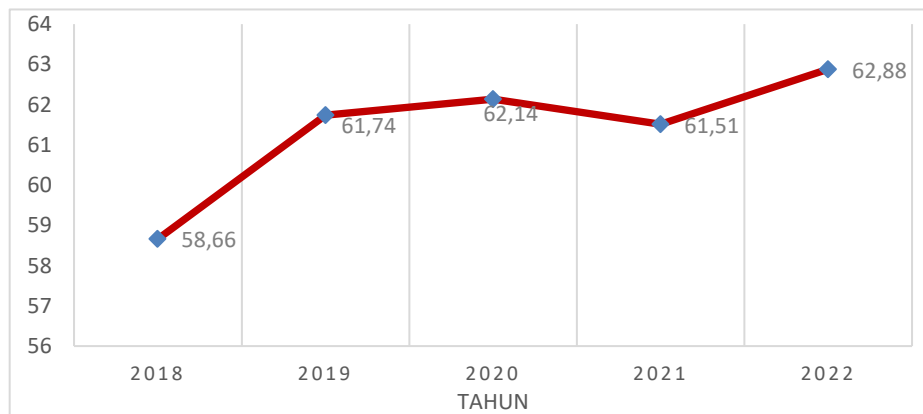
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

B. Perkembangan Time Series

Berdasarkan periode waktu APK SMA/MA tahun 2018 hingga 2022 cenderung mengalami peningkatan pada periode 2019-2020 dan kembali turun pada periode 2021. Pada Tahun 2018, APK SMA/MA Kabupaten Cianjur mengalami kenaikan sebesar 58,66 % menjadi 61,74 % di tahun 2019. Meskipun mengalami penurunan, APK SMA/MA Kabupaten Cianjur mengalami peningkatan hingga 3,08% pada tahun 2019. Kemudian dari periode waktu 5 tahun tersebut, capaian APK SMA/MA tertinggi berada di tahun 2022 yaitu sebesar 62,88



% Persentase capaian APK SMA/MA Kabupaten Cianjur cenderung tinggi. Artinya, jumlah penduduk usia 16-18 tahun banyak yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan SLTA.

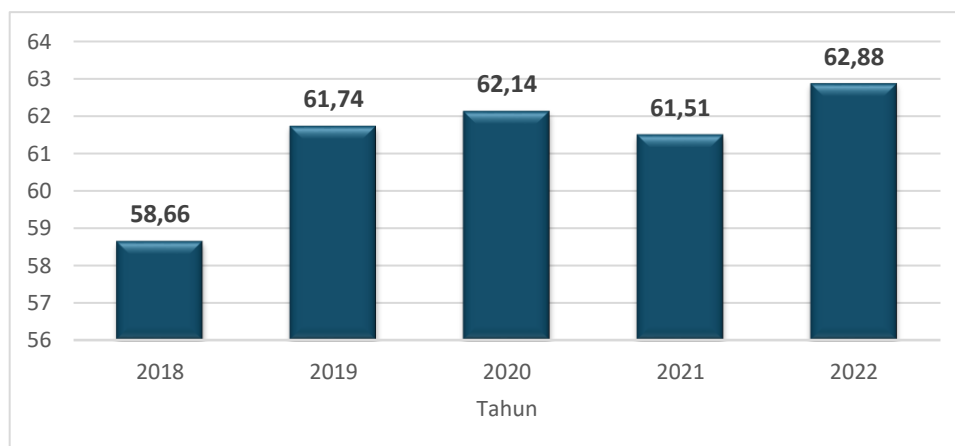


Gambar 3. 47 Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kabupaten Cianjur Tahun 2022

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2024

C. Efektivitas

Perkembangan APK SMA/MA cenderung mengalami ketidakstabilan atau fluktuatif dari tahun 2018-2022. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai program yang dijalankan pemerintah Kabupaten Cianjur efektif pada periode tahun 2018-2020, dan mengalami penurunan APK/kurang efektif di tahun 2021. Walaupun secara tren menunjukkan kecenderungan naik pada tahun terakhir, APK SMA/MA memiliki tingkat keefektifan lebih baik jika dibandingkan pada capaian provinsi dan nasional. Tentunya, kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur perlu diperbaiki kembali agar tahun berikutnya dapat mengalami kenaikan.



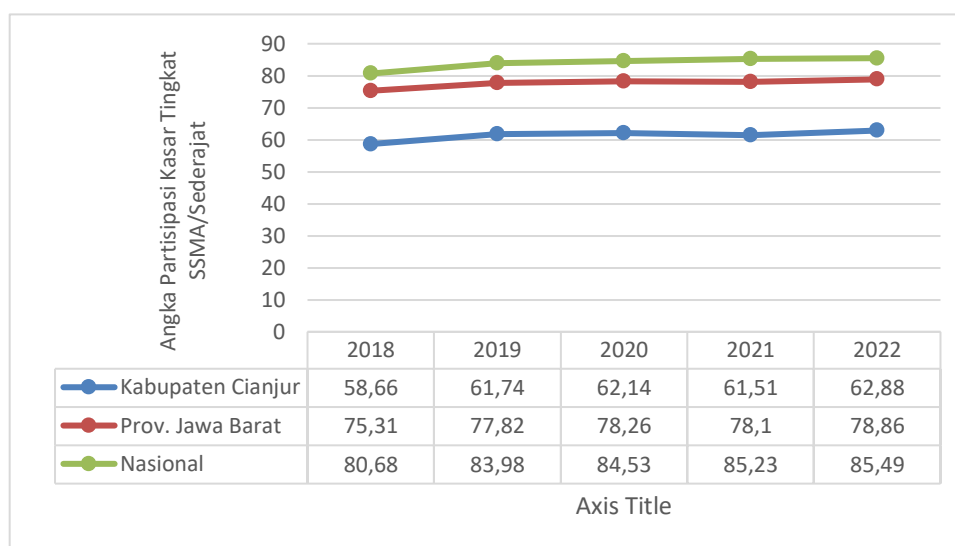
Gambar 3. 48 Grafik Efektivitas Angka Partisipasi Kasar SMA/MA Kabupaten Cianjur Tahun 2022

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2024



D. Relevansi

Pada periode tahun 2018-2022 capaian APK SMA/MA Kabupaten Cianjur sudah relevan dengan capaian APK SMA/MA tingkat nasional dan Provinsi Jawa Barat. Terlihat pada periode waktu 5 tahun, Kabupaten Cianjur memiliki capaian APK SMA/MA masih di bawah capaian nasional dan capaian provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa capaian peningkatan APK SMA/MA Kabupaten Cianjur belum memiliki kontribusi yang positif pada peningkatan capaian APK Nasional dan Kebijakan Pendidikan Kabupaten Cianjur dalam upaya meningkatkan APK SMA/MA belum sinkron dengan kebijakan pendidikan nasional.



Gambar 3. 49 Grafik Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2024

3.6.1.2 Angka Partisipasi Murni

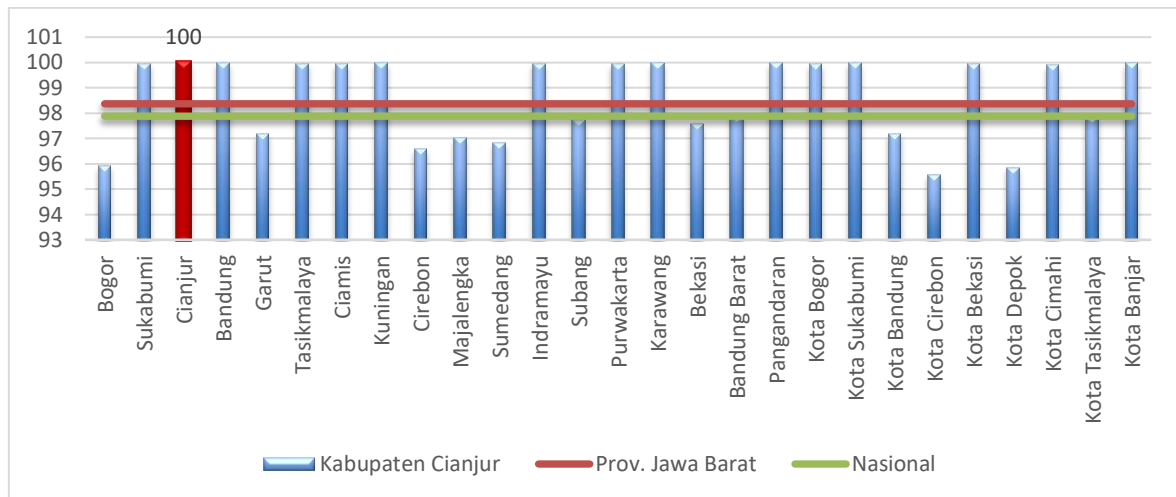
3.6.1.2.1 Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah merupakan persentase penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan sekolah dasar.

A. Posisi Relatif

Berdasarkan posisi relatif APM SD/MI di Kabupaten Cianjur Tahun 2022 yaitu 100%. Angka tersebut berada di atas capaian Provinsi Jawa Barat yaitu 98,37% dan Nasional yaitu 97,88%. Adapun Kabupaten Sukabumi yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Cianjur memiliki angka lebih rendah yaitu sebesar 99,96% dengan selisih 0,04%. Artinya Capaian APM SD/MI Kabupaten Cianjur lebih tinggi jika dibandingkan Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Secara lebih detail posisi relatif Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada **Gambar 3.50**.



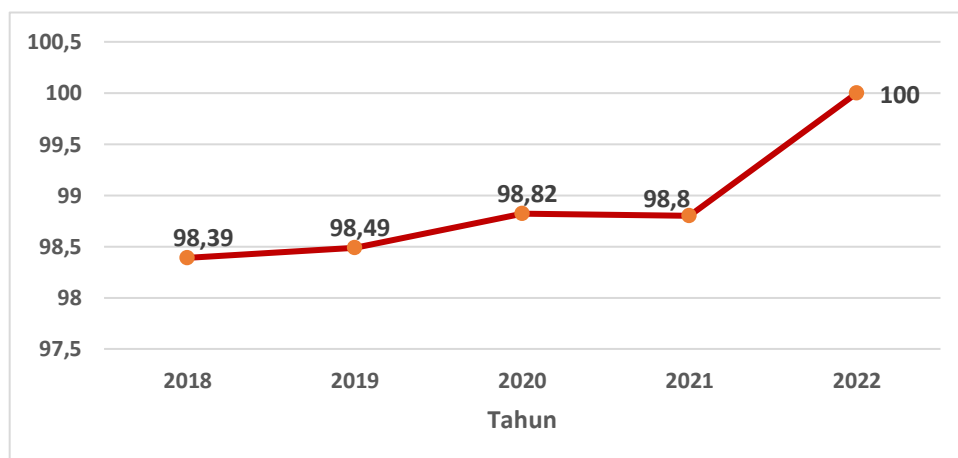


Gambar 3. 50 Grafik Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

Sumber : BPS Provinsi, 2023

B. Perkembangan Time Series

Perkembangan APM SD/MI dari tahun 2018-2022 di Kabupaten Cianjur. Berdasarkan grafik tersebut di bawah menunjukkan angka partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan pada tahun 2018 sebesar 98,39, angka tersebut cenderung lebih rendah dibandingkan periode waktu yang lainnya. Periode tahun 2018-2022 Angka partisipasi terus mengalami peningkatan. Adapun persentase APM SD/MI di Kabupaten Cianjur tetap berada di atas capaian Provinsi Jawa Barat dan nasional . Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Sekolah Dasar yang dilaksanakan di Kabupaten Cianjur masih berjalan dengan baik.



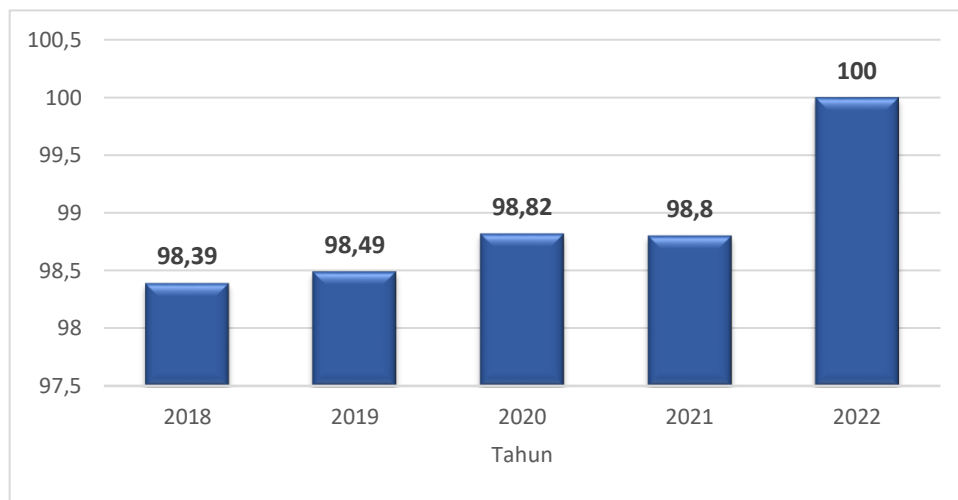
Gambar 3. 51 Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2024



C. Efektivitas

Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kabupaten Cianjur tahun 2018-2022 menunjukkan tren naik. Dengan tren yang naik capaian APK SD/MI di Kabupaten Cianjur Tahun 2022, maka Pemerintah Kabupaten Cianjur tetap melakukan perbaikan program dan kegiatan dengan tetap menargetkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB/Paket A tetap berada di atas 100 dan berada di atas capaian Provinsi Jawa Barat dan Nasional sesuai dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2022. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Gambar 3.52**.



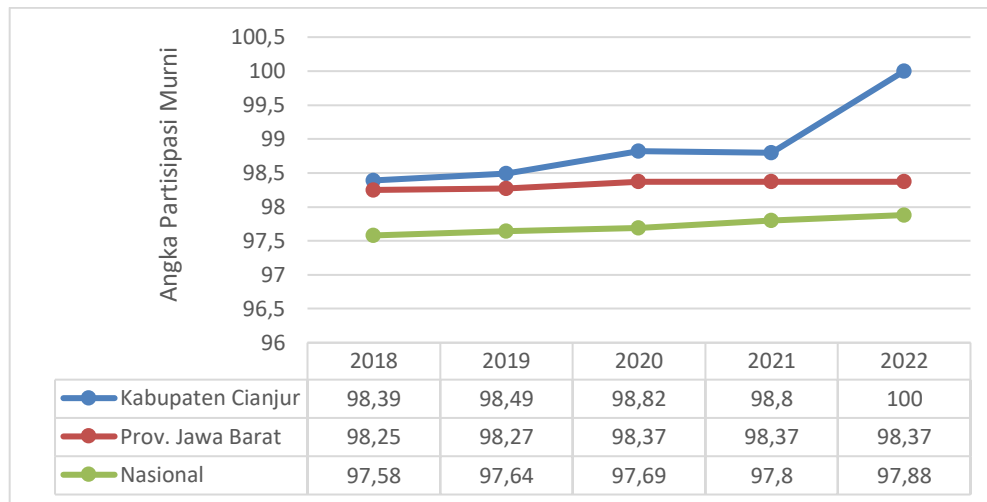
Gambar 3. 52 Grafik Efektivitas Angka Partisipasi Murni SD/MI Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2024

D. Relevansi

Analisis Relevansi menunjukkan tren APM SD/MI Nasional dari tahun 2018-2022 cenderung mengalami kenaikan, diikuti dengan capaian APK SD/MI Provinsi Jawa Barat dan nasional. Pada ahun 2019-2021 capaian APK SD/MI meningkat dan tidak diikuti oleh capaian APM SD/MI Provinsi Jawa Barat dan nasional yaitu meningkat sebesar 0,33% di tahun 2020.. Sementara itu di tahun 2022, APK SD/MI Kabupaten Cianjur mengalami peningkatan. Artinya terdapat keberhasilan program pembangunan pendidikan di Kabupaten Cianjur dan berada di atas capaian nasional dan provinsi. Di Tahun 2022, Kabupaten Cianjur mengalami kenaikan ketercapaian APM SD/MI hingga 1,20% dari tahun sebelumnya. Namun, selama 6 tahun terakhir, Kabupaten Cianjur berkontribusi positif terhadap peningkatan APK SD/MI Nasional dan Provinsi Jawa Barat.





Gambar 3. 53 Grafik Analisa Relevansi Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Provinsi, 2023

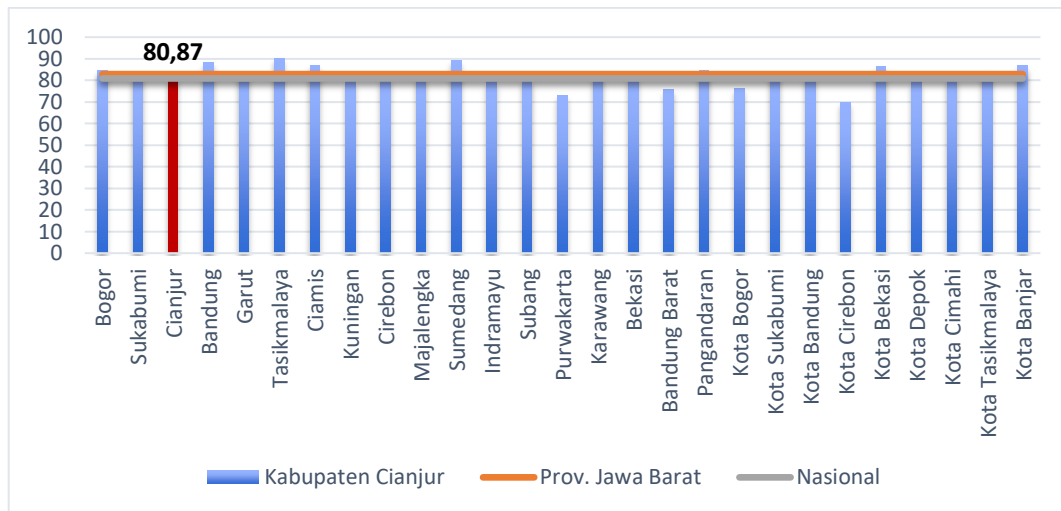
3.6.1.2.2 Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah merupakan persentase penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan sekolah SLTP dibagi dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun.

A. Posisi Relatif

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kabupaten Cianjur pada tahun 2022 sebesar 80,87%. Artinya, persentase tersebut lebih tinggi 1,55% dibandingkan Provinsi Jawa Barat dengan nilai 82,88%. Secara Nasional, capaian APM SMP/MTs berada pada 80,89%, maka nilai APM SMP/MTs Kabupaten Cianjur tidak lebih baik. Adapun secara interregional, wilayah di sekitar Kabupaten Cianjur seperti Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bogor memiliki persentase lebih baik dibandingkan Kabupaten Cianjur yaitu berada di atas APM SMP/MTs Provinsi Jawa Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.54.



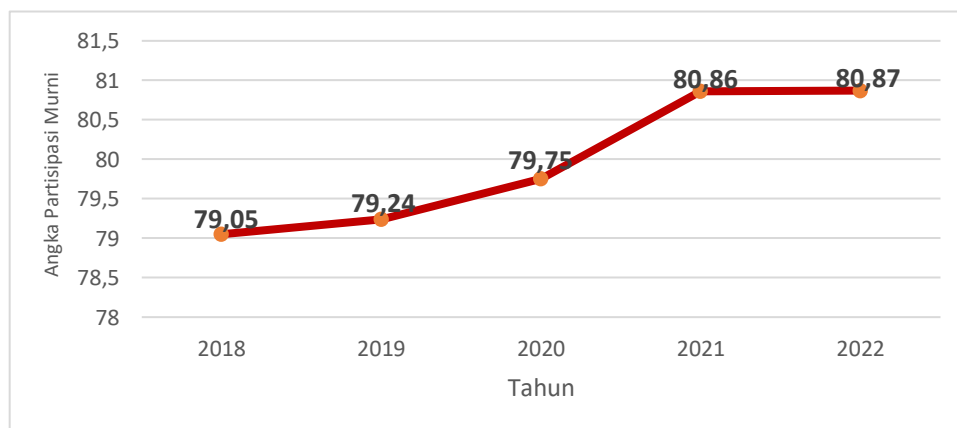


Gambar 3. 54 Grafik Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Pprovinsi Jawa Barat Tahun 2022

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

B. Perkembangan Time Series

Perkembangan APM SMP/Mts dari tahun 2018-2022 di Kabupaten Cianjur. Berdasarkan grafik tersebut di bawah menunjukkan angka partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan pada tahun 2018 sebesar 79,05, angka tersebut cenderung lebih rendah dibandingkan periode waktu yang lainnya. Periode tahun 2018-2022 Angka partisipasi terus mengalami peningkatan. Adapun persentase APM SD/MI di Kabupaten Cianjur tetap berada di atas capaian nasional dan di bawah Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Sekolah Dasar yang dilaksanakan di Kabupaten Cianjur masih berjalan dengan baik.



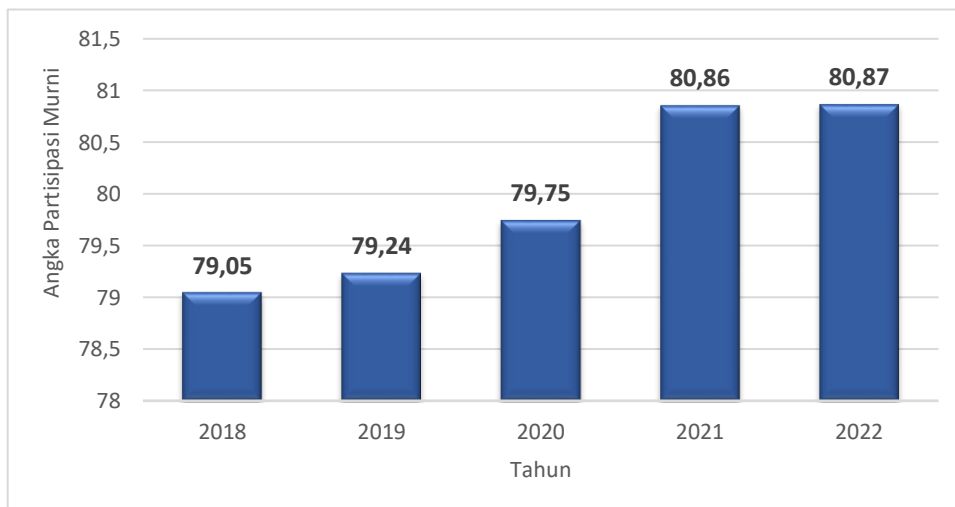
Gambar 3. 55 Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2023



C. Efektivitas

Analisis efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022 menunjukkan tren cenderung meningkat pada tahun 2022. Peningkatan angka partisipasi penduduk yang bersekolah di jenjang SMP dari tahun 2019 menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Di samping masih ada anak putus sekolah dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan di atasnya, Pemerintah Kabupaten Cianjur terus meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dengan cara meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar dan pendidikan non formal bagi masyarakat. Kecenderungan peningkatan capaian APM SMP/MTs menandakan kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur telah diperbaiki, sehingga dapat meningkat di tahun berikutnya. Oleh karena itu, berdasarkan Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2022, Kabupaten Cianjur menargetkan APM SMP/MTs/SMPLB/Paket B untuk dapat mencapai target hingga 100 persen.



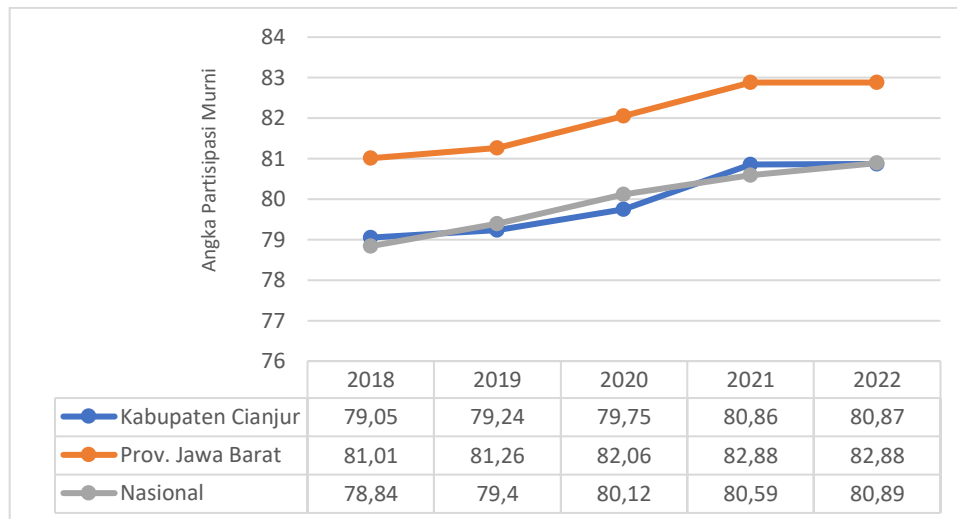
Gambar 3. 56 Grafik Efektivitas Angka Partisipasi Kasar SMP/MtsKabupaten Cianjur Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2023

D. Relevansi

Berbeda dengan APK SD/MI, persentase APK SMP/MTs di Kabupaten Cianjur dari Tahun 2018-2022 cenderung berada di bawah garis capaian Provinsi. Persentase penduduk yang sedang bersekolah di tingkat SMP di Kabupaten Cianjur lebih rendah dibandingkan capaian APM di Provinsi. Upaya Kabupaten Cianjur untuk melakukan peningkatan APM SMP/MTs perlu ditingkatkan agar dapat memberikan kontribusi positif pada peningkatan capaian APK SMP/MTs.





Gambar 3. 57 Grafik Relevansi Angka Partisipasi Murni (APK) SMP/MTs (%) Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022

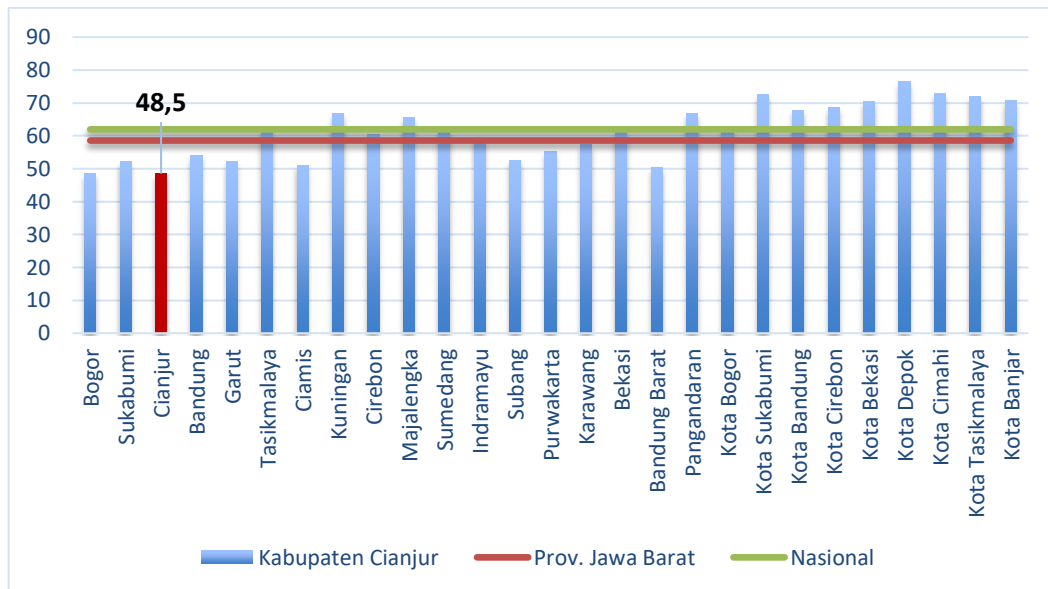
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

3.6.1.2.3 Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Atas /Madrasah Aliyah

A. Posisi Relatif

Angka partisipasi kasar (APM) SMA/MA yaitu perbandingan jumlah murid pada tingkat pendidikan SLTA dibagi dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun. Pada tahun 2021, APM SMA/MA Kabupaten Cianjur sebesar 48,5%, capaian ini lebih rendah dibandingkan tingkat Provinsi Jawa Barat sebesar 58,58% dan nasional yaitu sebesar 61,97%. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur menduduki capaian APM SMA/MA terendah kedua setelah Kabupaten Bogor sebesar 48,44%. Adapun secara inter-regional, Kabupaten Sukabumi yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Cianjur memiliki nilai 52,25%%, angka tersebut berada di atas Kabupaten Cianjur dan capaian provinsi. Artinya nilai APM SMA/MA Kabupaten Cianjur dalam kondisi baik dan berkontribusi positif terhadap peningkatan APM SMA/MA. **Gambar 3.58** menunjukkan posisi relatif APK SMA/MA Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat).





Gambar 3. 58 Grafik Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

B. Perkembangan Time Series

Perkembangan APM SMA/MA Kabupaten Cianjur tahun 2018-2022 menunjukkan performa yang baik yaitu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2018 sebesar 44,78%. Pada tahun 2021-2022 kenaikan sekitar 3,44% hingga mencapai angka 48,5% di tahun 2023. Tren kenaikan tersebut menunjukkan jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan SMA/MA telah sesuai dengan usia 16-18 tahun terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah tersebut.



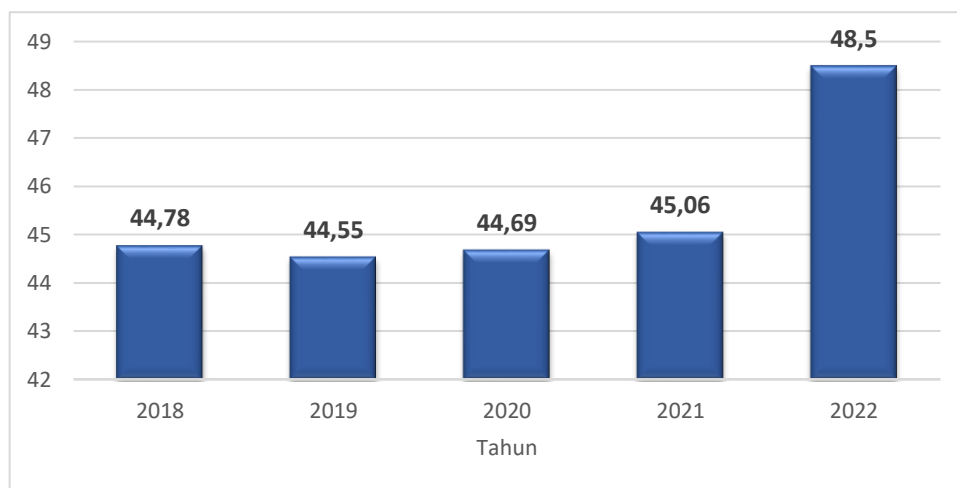
Gambar 3. 59 Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022

Sumber : BPS Kabupaten Cianjur, 2023



C. Efektivitas

Perkembangan APM SMA/MA Kabupaten Cianjur cenderung mengalami tren naik dari tahun 2018-2022. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai program yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam upaya peningkatan APM SMA/MA telah efektif. Oleh karena itu, mutu pendidikan MA terus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur dari tahun ke tahun sehingga penduduk mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan jenjang SMA. Adapun upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Cianjur harus tetap ditingkatkan agar dapat berkontribusi positif dalam peningkatan capaian APM SMA/MA .



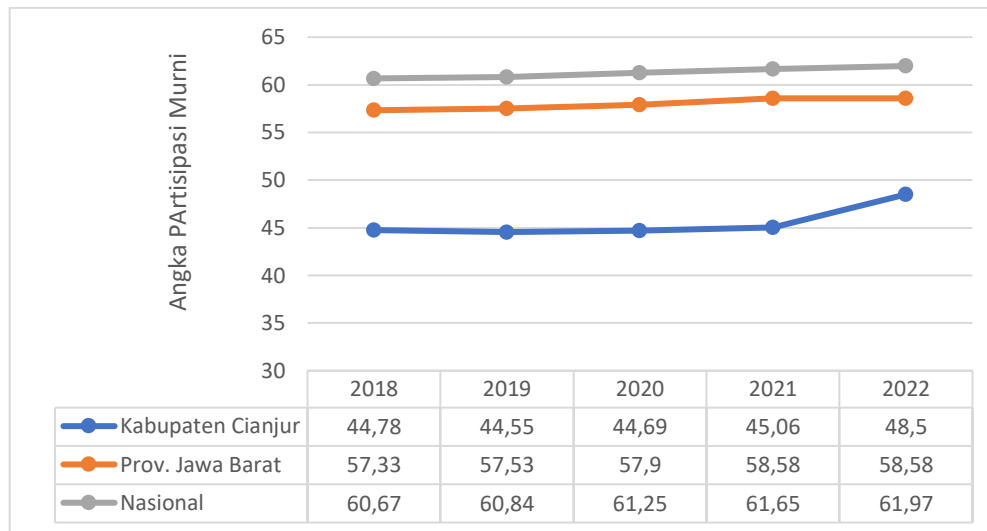
Gambar 3. 60 Grafik Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022

Sumber : BPS Kabupaten Cianjur, 2023

D. Relevansi

Capaian APM SMA/MA Kabupaten Cianjur relevan dengan capaian APM SMA/MA Nasional pada periode tahun 2019-2021 berada di bawah capaian nasional dan provinsi. Namun, pada tahun 2018-2022, seiring dengan kenaikan capaian APM SMA/MA tingkat nasional dan provinsi, Kabupaten Cianjur-pun cenderung meningkat. Artinya dengan adanya relevansi tersebut, berbagai program/kegiatan pendidikan seperti beasiswa miskin, bantuan operasional sekolah dan pemenuhan prasarana sarana penunjang pendidikan Kabupaten Cianjur telah sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.





Gambar 3. 61 Grafik Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2022

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

3.6.1.3 Angka Harapan Lama Sekolah

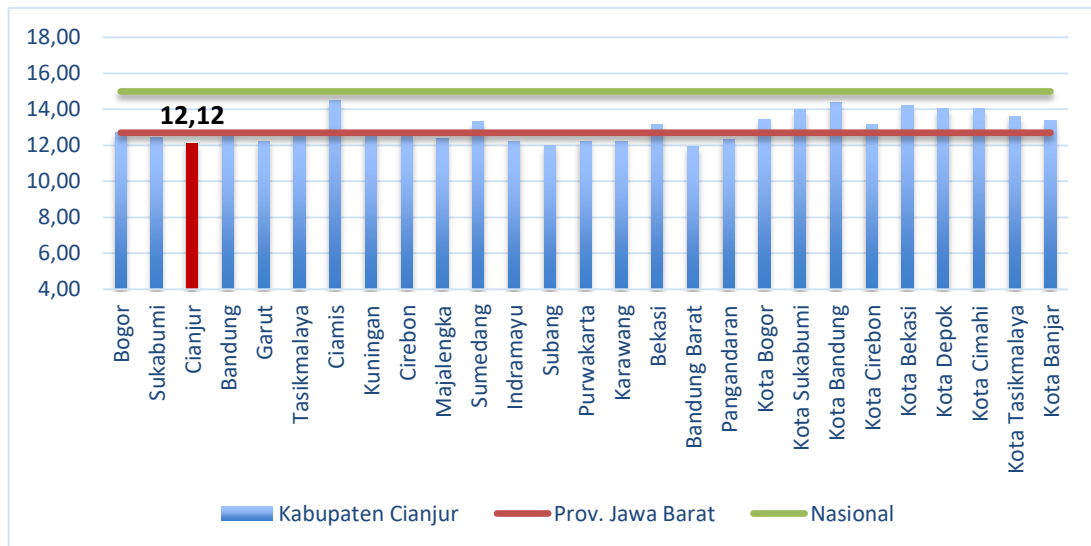
Dimensi pendidikan yang merupakan komponen IPM dihitung dengan menggunakan indeks pendidikan terbentuk dari komponen Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol).

A. Posisi Relatif

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) menunjukkan peluang usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. AHLS Kabupaten Cianjur tahun 2020-2023 meningkat 0,17 tahun dari 11,96 pada tahun 2020, sehingga capaian tahun 2023 harapan lama sekolah tercapai 12,12 tahun atau Tingkat SMA atau sederajat. Masih rendahnya capaian harapan lama sekolah di Kabupaten Cianjur selama tahun 2020-2023 adalah berdasarkan dari hasil evaluasi bahwa siswa yang melanjutkan Pendidikan tinggi masih berpusat diluar Kabupaten Cianjur karena berdasarkan perhitungan BPS adalah siswa yang melanjutkan pendidikan tinggi seminggu lalu dan tercatat di wilayah Kabupaten Cianjur. Capaian Angka Harapan Sekolah Kabupaten Cianjur tahun 2023 lebih rendah



daripada capaian nasional sebesar 13,15 tahun. Sedangkan di tingkat provinsi, Angka HLS Kabupaten Cianjur menduduki peringkat ketiga dengan Angka HLS terendah dan berada di bawah rata-rata capaian provinsi Jawa Barat sebesar 12,68 tahun. Untuk mengetahui perkembangan Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dengan kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada **Gambar 3.62** berikut.



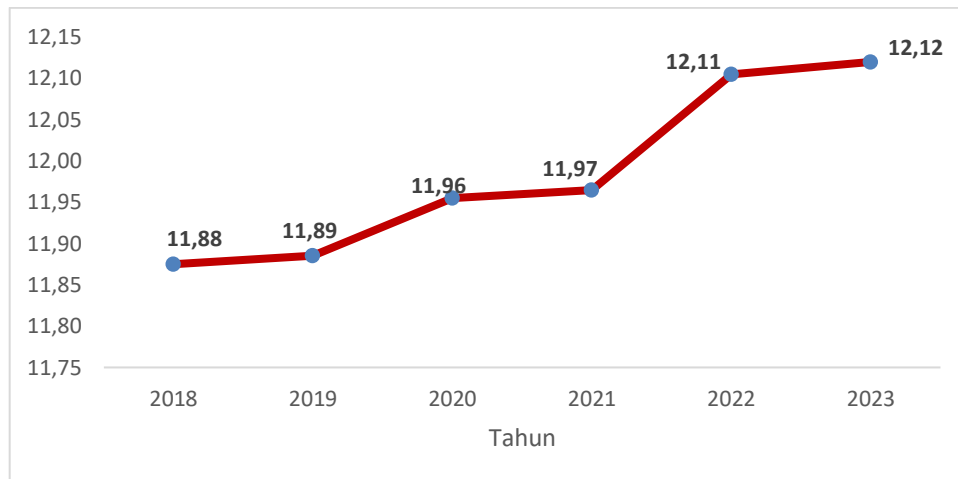
Gambar 3. 62 Grafik Posisi Relatif Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

B. Perkembangan Time Series

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Cianjur dalam periode waktu 6 tahun (2016-2021) menunjukkan perkembangan positif. Hal ini menunjukkan adanya tren peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Pada tahun 2016 hingga tahun 2018, capaian HLS Kabupaten Cianjur cenderung stabil, kemudian di tahun 2019 capaian HLS meningkat hingga 0,34% menjadi 15,34% dan kembali meningkat pada dua tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan perkembangan positif selaras dengan kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur. Secara lebih jelas dapat dilihat pada **Gambar 3.63**.



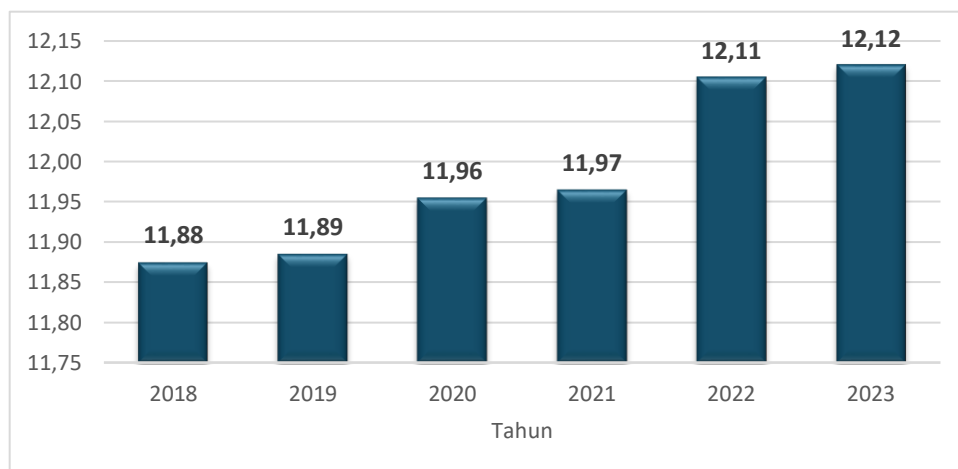


Gambar 3. 63 Grafik Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2021

Sumber : BPS Kabupaten Cianjur, 2024

C. Efektivitas

Angka Harapan Lama Sekolah dari tahun 2018-2023 menunjukkan tren meningkat, dapat dilihat pada **Gambar 3.64**. Hal ini menunjukkan bahwa program pendidikan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur berjalan efektif di dalam peningkatan harapan lama sekolah Kabupaten Cianjur. Adapun hal iniberkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar di bidang pendidikan mengenai efektivitas kegiatan dan program pengelolaan pendidikan di jenjang PAUD, SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/MA/Paket C serta program pengembangan kurikulum.



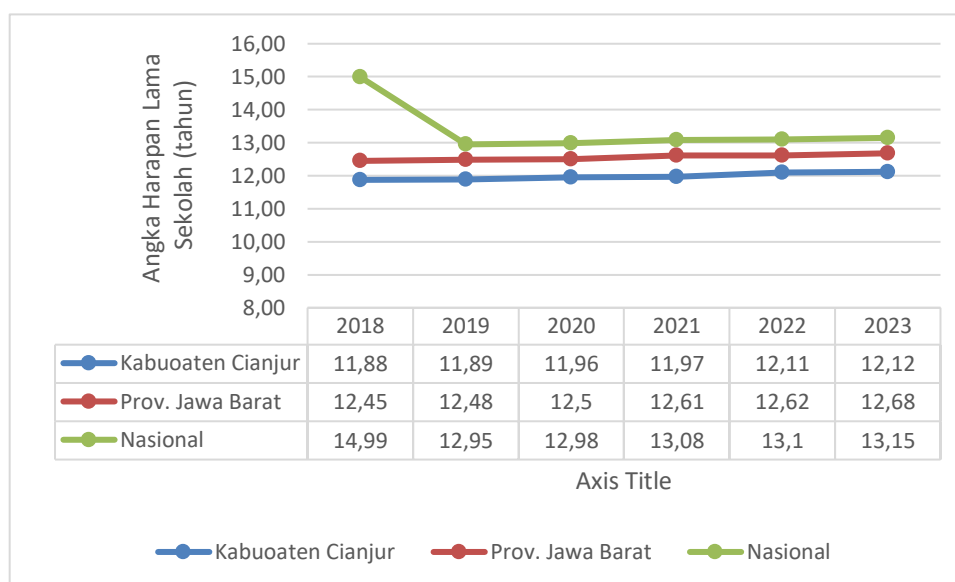
Gambar 3. 64 Grafik Efektivitas Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2023

Sumber : BPS Kabupaten Cianjur, 2024



D. Relevansi

Pada periode tahun 2018-2023 capaian HLS Kabupaten Cianjur sudah relevan dengan capaian HLS tingkat nasional dan Provinsi Jawa Barat. Terlihat pada periode waktu 6 tahun, Kabupaten Cianjur memiliki capaian HLS di bawah capaian nasional dan capaian provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Cianjur perlu meningkatkan capaian HLS agar selaras dengan capaian HLS provinsi maupun nasional, maka Kebijakan Pendidikan Kabupaten Cianjur dalam upaya meningkatkan angka Harapan Lama Sekolah harus sinkron dengan kebijakan pendidikan Nasional.



Gambar 3. 65 Grafik Relevansi Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2023

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

3.6.2 Prioritas Permasalahan Kemiskinan Dalam Dimensi Pendidikan

Berdasarkan uraian permasalahan kemiskinan dalam dimensi pendidikan, maka dihasilkan matriks masalah kemiskinan bidang pendidikan yang membuat indikator angka partisipasi kasar (APK) tiap jenjang pendidikan, Angka partisipasi murni (APM) tiap jenjang pendidikan dan Harapan lama sekolah (HLS). Sebagian besar indikator bidang pendidikan yang belum tercapai yaitu pada kategori SMP/MTs/Paket B, hal ini dikarenakan selama kurun waktu 6 tahun, partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan SMP dan persentase anak pada kelompok usia 13-15 tahun menunjukkan angka negatif. Maka dari itu, program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Cianjur perlu ditingkatkan mengingat porsi anak yang bersekolah di jenjang SMP menunjukkan angka tidak tepat waktu, disamping harapan lama sekolah Kabupaten Cianjur belum mencapai kondisi yang baik.



Tabel 3.10 Masalah Kemiskinan Bidang Pendidikan

No	Indikator Utama	Aspek Yang Dianalisis			
		Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Lebih rendah dari provinsi	Cenderung turun	Tidak Efektif	Tidak Relevan
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Lebih baik dari provinsi	Cenderung naik	Efektif	Relevan
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA	Lebih rendah dari provinsi	Cenderung naik, namun fluktuatif	Tidak Efektif	Relevan
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Lebih baik dari provinsi dan nasional (persentase paling tinggi).	Cenderung meningkat	Efektif	Relevan
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Lebih baik	Cenderung meningkat	Efektif	Relevan
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA	Lebih rendah dari provinsi dan nasional	Cenderung naik, namun melambat	Efektif	Relevan
7	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Lebih rendah dari provinsi dan nasional	Cenderung meningkat	Efektif	Relevan

Sumber : Hasil Analisis, 2024.

3.7 ANALISIS KARAKTERISTIK PERMASALAHAN KEMISKINAN INFRASTRUKTUR DASAR

3.7.1 Permasalahan Kemiskinan Dalam Dimensi Infrastruktur Dasar

3.7.1.1 Persentase Rumah Tangga Mamiliki Akses terhadap Sanitasi Layak (%)

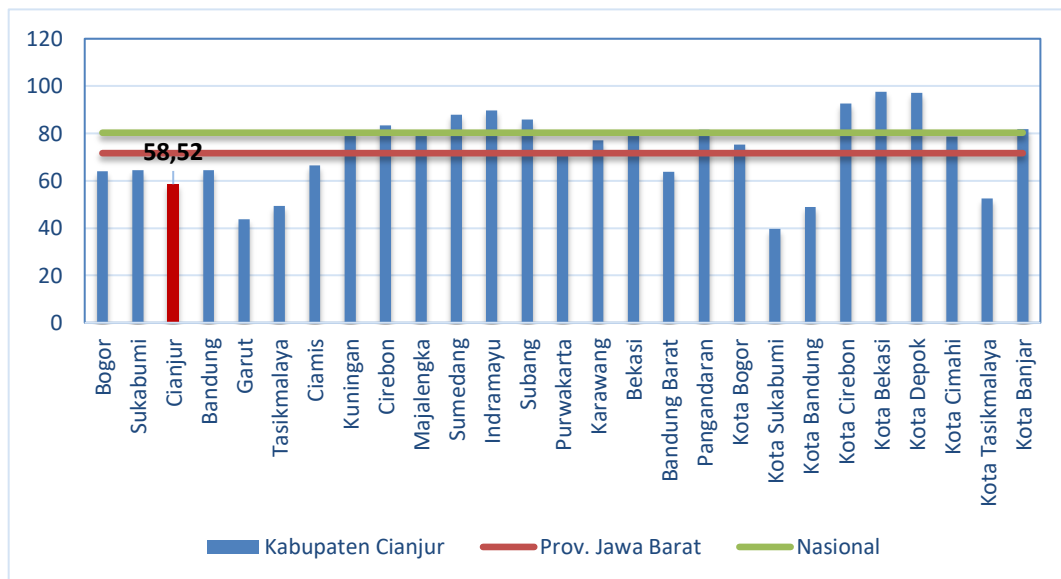
Sanitasi masih menjadi permasalahan, terutama di permukiman padat yang belum memiliki sanitasi tidak layak dan masih terdapatnya luasan kawasan kumuh perkotaan yang belum terselesaikan. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga, dinyatakan dalam persen (%). Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Berikut ini dijelaskan posisi relatif, perkembangan time series, efektivitas dan relevansi Kabupaten Cianjur dengan Provinsi dan Nasional.

A. Posisi Relatif

Berdasarkan grafik posisi relatif Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak (%) Kabupaten Cianjur menunjukkan sanitasi layak pada tahun 2021 berada di bawah angka Provinsi Jawa Barat dan nasional yaitu sebesar 58,52%. Bila dibandingkan dengan kabupaten



di sekitar Kabupaten Cianjur, selisih persentase 5,83% dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bandung dengan persentase 64,51%. Oleh karena itu, dengan capaian persentase rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi layak yang rendah dibandingkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, Kabupaten Cianjur terindikasi belum mewujudkan sarana dan prasarana perumahan, permukiman dan sanitasi perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup. **Gambar 3.66** berikut ini merupakan grafik posisi relatif akses terhadap sanitasi layak Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan Tingkat nasional.



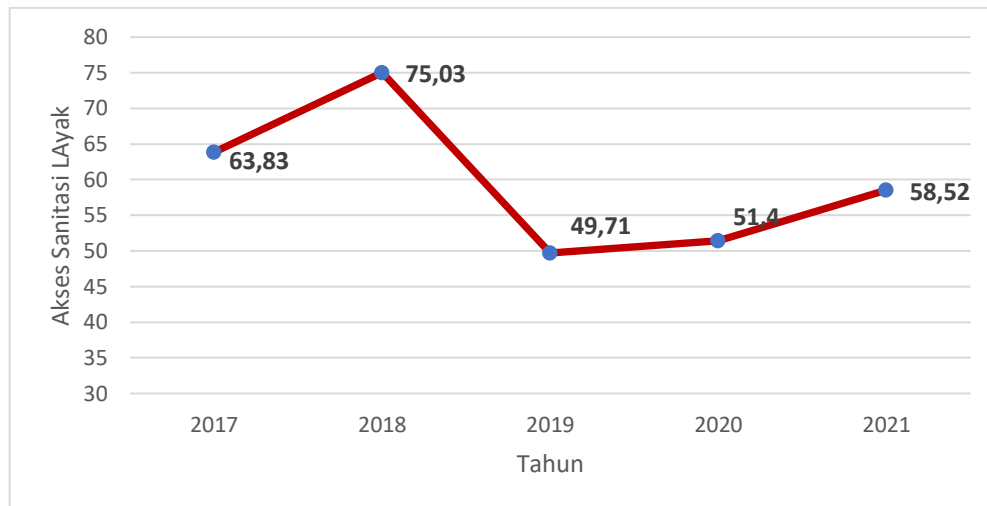
Gambar 3. 66 Grafik Posisi Relatif Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak (%) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

B. Perkembangan Time Series

Perkembangan antar waktu persentase Rumah Tangga memiliki akses terhadap sanitasi layak pada periode waktu 5 tahun, menunjukkan tren ketidakstabilan atau fluktuatif. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2017-2018, akses sanitasi layak Kabupaten Cianjur mengalami kenaikan hingga 11,2%. Namun, menurun di tahun 2019 secara drastis sekitar 25,32% di tahun 2019, dan kembali berangsur-angsur naik di tahun 2020-2021. Meski dalam kurun waktu dua tahun persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak turun, Kabupaten Cianjur kembali meningkatkan akses sanitasi layak kepada masyarakat sehingga di tahun 2021 dapat tercapai angka 58,52%. Konsistensi Pemerintah Kabupaten Cianjur perlu ditingkatkan untuk dapat memfasilitasi sanitasi layak kepada masyarakat, sehingga dapat melanjutkan kebijakan yang sudah ada dan membuat program baru di masa yang akan datang.



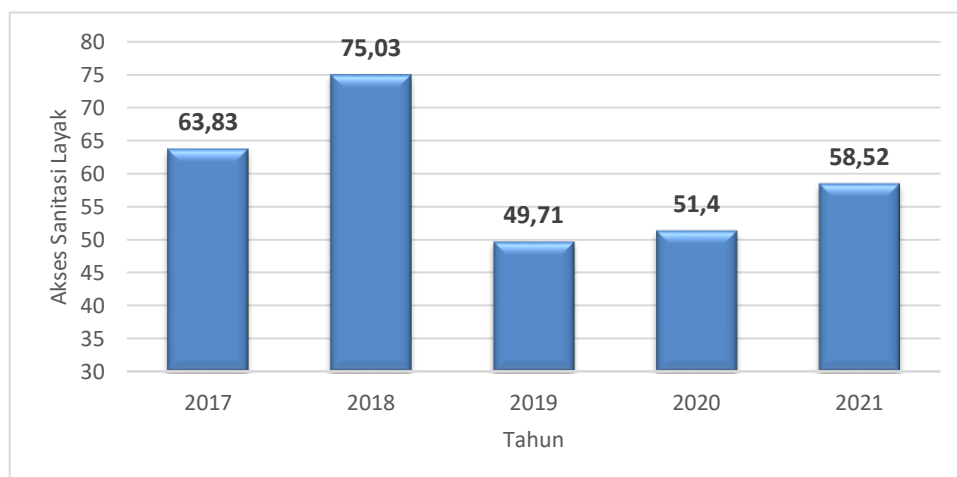


Gambar 3. 67 Grafik Perkembangan Antar Waktu Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak (%) Ksbupaten Cianjur Tahun 2017-2021

Sumber : BPS Kabupaten Cianjur, 2022

C. Efektivitas

Berdasarkan perkembangan rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Cianjur pada kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak memiliki tren yang cenderung naik pada tahun 2017-2018. Perlunya dilakukan monitoring dan evaluasi kepada semua pihak pemangku kebijakan dalam meningkatkan persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak. Program urusan pekerjaan umum di tingkat Kabupaten Cianjur bersinergi untuk meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan lingkungan permukiman kota. Untuk lebih jelasnya pada **Gambar 3.68** berikut.



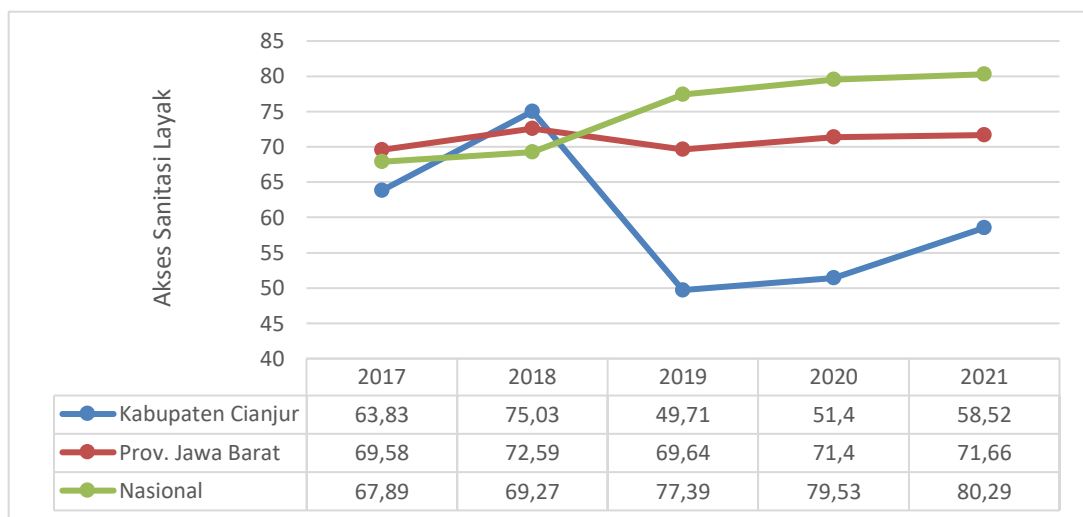
Gambar 3. 68 Grafik Efektifitas Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak (%) Ksbupaten Cianjur Tahun 2017-2021

Sumber : BPS Kabupaten Cianjur, 2022



D. Relevansi

Analisis relevansi persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Provinsi Jawa Barat dan Nasional pada tahun 2017 -2018 cenderung naik, namun pada kurun waktu tahun 2010-2021 mengalami penurunan dan berangsur naik. Persentase tersebut diikuti oleh capaian Kabupaten Cianjur dengan persentase capaian tertinggi di tahun 2018 yaitu 75,03 %. Oleh karena itu, terdapat relevansi kebijakan antara Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan tingkat provinsi dan nasional yaitu pada kurun waktu 5 tahun. Pada periode tersebut persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak Kabupaten Cianjur mengalami penurunan sehingga terdapat kontribusi Kabupaten Cianjur untuk pembangunan pelayanan dasar pada periode waktu tersebut serta adanya peningkatan akses terhadap sanitasi layak. Lebih rinci dapat dilihat pada **Gambar 3.69**.



Gambar 3. 69 Grafik Relevasi Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak (%) Ksbutan Cianjur Tahun 2017-2021

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2022

3.7.1.2 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak (%)

Rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak mengacu pada konsep terbaru tahun 2019 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Adapun konsep sumber Air minum yang layak dikonsumsi memiliki beberapa indikator, di antaranya:

- Tidak berwarna atau terlihat jernih
- Tidak berbau
- Tidak memiliki rasa
- Bebas dari pasir, debu, lumpur, sampah, busa, dan kotoran lainnya
- Bebas dari bahan kimia beracun

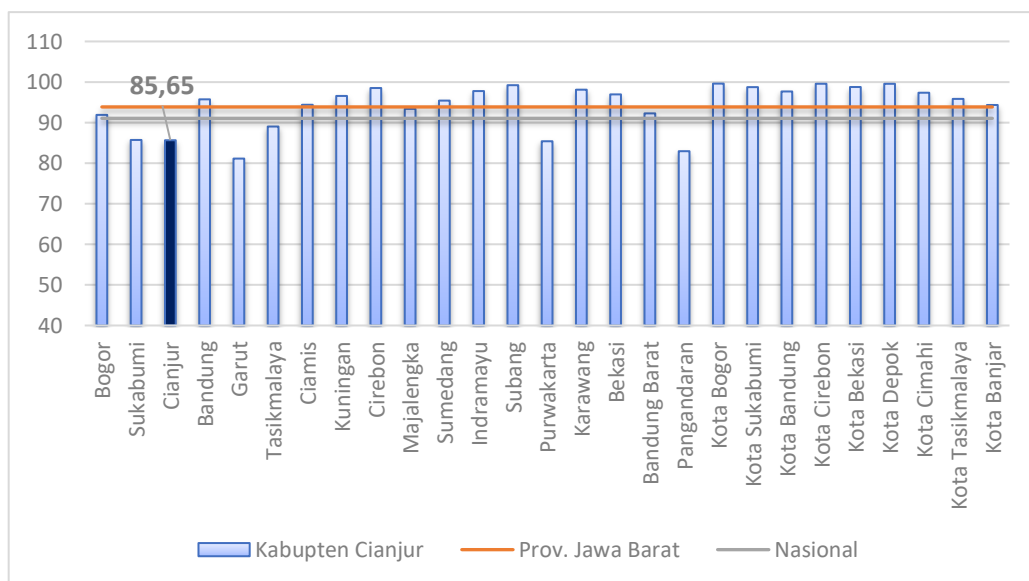


- Tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya
- Tidak mengandung logam berat

Air minum yang tidak memenuhi kriteria-kriteria tersebut bisa terkontaminasi kuman, bakteri, atau bahan kimia berbahaya yang dapat menimbulkan penyakit. Menurut Studi kualitas air minum rumah tangga di Indonesia tahun 2020, secara nasional akses air minum layak telah mencapai 93,0% sedangkan akses air minum tidak aman yang dinilai dari kontaminasi bakteri E Coli ada 81,9% dan 18,1% dinyatakan aman jika dinilai dari kontaminasi bakteri E Coli secara nasional. Berikut ini kondisi Kabupaten Cianjur berdasarkan Rumah Tangga dengan sumber air minum layak.

A. Posisi Relatif

Berdasarkan posisi relatif persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak (%) Kabupaten Cianjur berada di bawah capaian provinsi dan nasional. Di tingkat provinsi dan nasional, persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak tingkat provinsi 93,86% selisih 8,21% dan tingkat nasional sebesar 91,05%, selisih 5,4% dengan Kabupaten Cianjur. Di tingkat inter-regional, Kabupaten Cianjur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukabumi juga memiliki selisih tidak jauh yaitu hanya 0,07% di atas capaian Kabupaten Cianjur. Sementara itu, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung yang secara kewilayahan relatif dekat dengan Kabupaten Cianjur memiliki capaian rumah tangga dengan sumber air minum layak lebih tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 3.70** berikut.



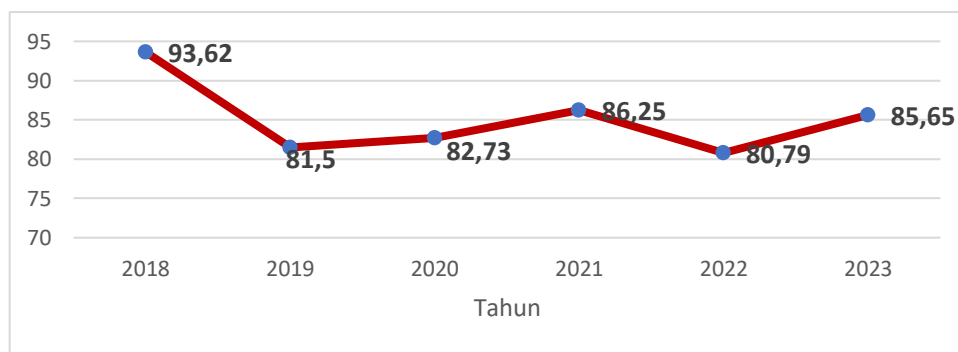
Gambar 3. 70 Grafik Posisi Relatif Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak (%) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2022



B. Perkembangan Time Series

Selama periode waktu 2018 hingga 2023, kondisi rumah tangga dengan air minum layak di Kabupaten Cianjur memiliki kecenderungan fluktuatif dari tahun ke tahun. Adapun ketercapaian air minum layak di Tahun 2019 mengalami penurunan yang semula 93,62% di tahun 2018 menjadi 81,5% di tahun 2018, tetapi Pemerintah Kabupaten Cianjur dapat meningkatkan fasilitas akses air minum layak kepada penduduknya yang dibuktikan dari tahun 2018 hingga tahun 2020 cenderung meningkat. Akan tetapi, kondisi akses sumber air minum layak di Kabupaten Cianjur kembali menurun hingga 5,46% di Tahun 2022. Meskipun mengalami penurunan, namun capaian Kabupaten Cianjur masih berada pada kondisi baik. Secara lebih detail dapat dilihat pada **Gambar 3.17** berikut ini.

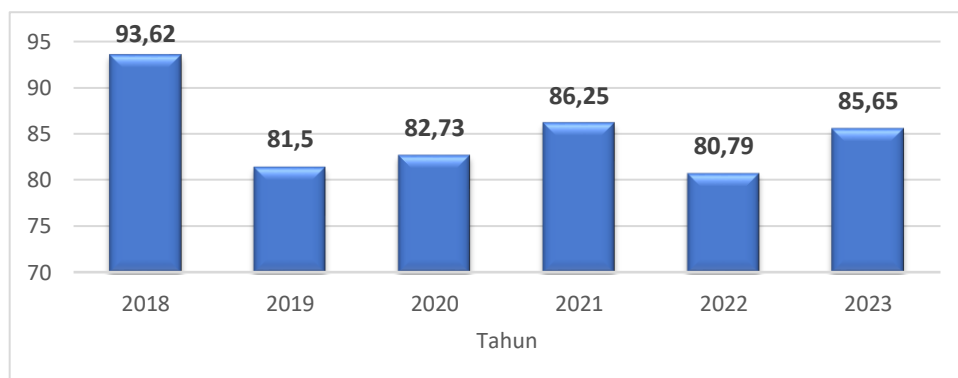


Gambar 3. 71 Grafik Perkembangan Antar Waktu Persentase Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2023

Sumber : BPS Kabupaten Cianjur, 2024

C. Efektivitas

Analisis efektivitas program dan kegiatan terkait akses air minum layak dapat diidentifikasi dari perkembangan persentase rumah tangga dengan air minum layak di Kabupaten Cianjur yang menunjukkan kecenderungan fluktuatif. Untuk jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 3.72** berikut.



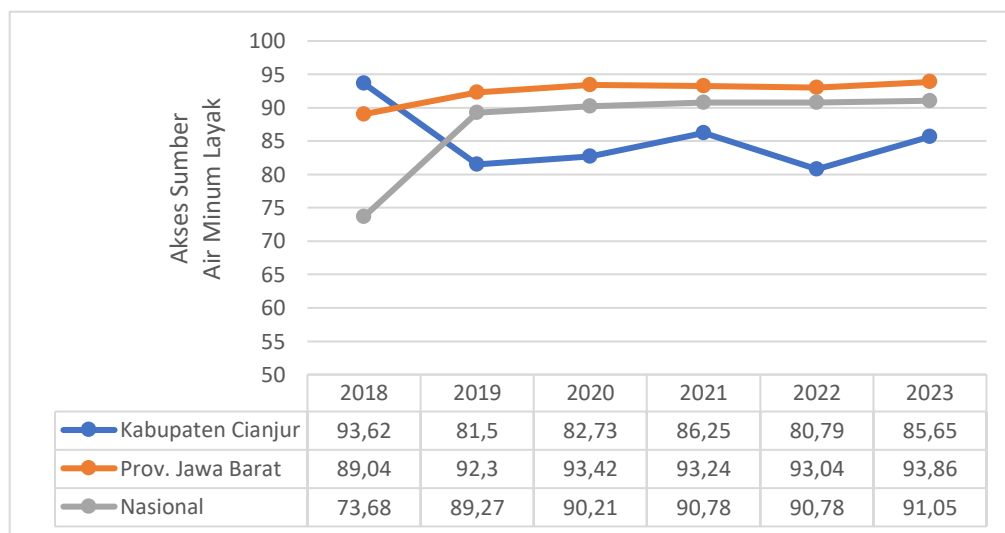
Gambar 3. 72 Grafik Perkembangan Antar Waktu Persentase Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2023

Sumber : BPS Kabupaten Cianjur, 2024



D. Relevansi

Pada grafik analisis relevansi persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak (%) Kabupaten Cianjur Tahun 2018 menunjukkan bahwa ada kebijakan yang relevan antara Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan tingkat provinsi dan nasional yaitu pada tahun 2015 hingga tahun 2020. Pada periode tersebut, persentase rumah tangga dengan air minum layak Kabupaten Cianjur terus mengalami peningkatan diikuti dengan capaian di tingkat nasional dan provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa capaian Kabupaten Cianjur pada kurun waktu 6 tahun telah cukup relevan dan sinkron dengan capaian nasional dan program yang ada di Kabupaten Cianjur telah berkontribusi untuk pembangunan nasional. Berikut ini merupakan analisis relevansi persentase rumah tangga dengan air minum layak di tingkat Kabupaten Cianjur, Provinsi dan Nasional pada periode waktu 6 tahun, seperti pada **Gambar 3.73** berikut :



Gambar 3. 73 Grafik Perkembangan Antar Waktu Persentase Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2023

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

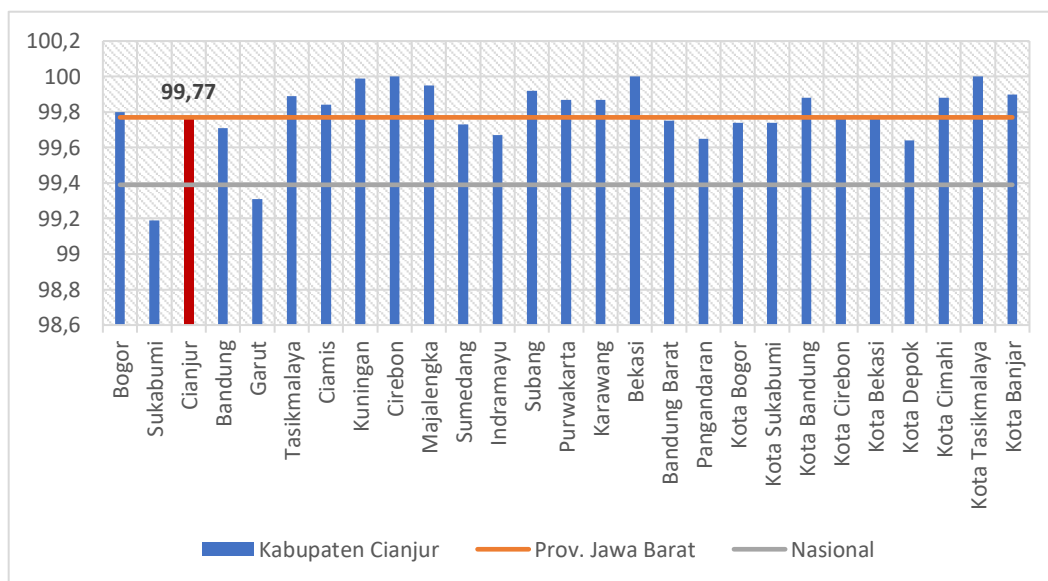
3.7.1.3 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan dari Listrik (%)

Sumber penerangan rumah tangga merupakan kebutuhan vital dari perumahan. Bahkan akses sumber penerangan berupa indikator elektrifikasi menjadi salah satu indikator kemajuan suatu wilayah. Sumber penerangan yang berkelanjutan memiliki kontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan kualitas hidup penduduk. Adanya fungsi sumber penerangan tidak hanya berfungsi untuk penerangan atau pencahayaan saja, namun berkaitan dengan produktivitas perekonomian rumah tangga. Adapun berikut ini kondisi Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan Nasional terkait Rumah Tangga dengan sumber penerangan dari listrik



A. Posisi Relatif

Berdasarkan posisi relatif persentase rumah tangga dan sumber penerangan dari listrik (%) Kabupaten Cianjur Tahun 2019 menunjukkan angka ketercapaian 99,88% angka ini masih lebih baik dibandingkan dengan capaian tingkat nasional sebanyak 98,85%. Dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur berkontribusi positif untuk peningkatan capaian persentase rumah tangga dengan sumber penerangan dari listrik PLN maupun listrik Non PLN. Dari rata-rata capaian Provinsi Jawa Barat, hanya 9 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang angkanya berada di bawah capaian provinsi Jawa Barat, namun dari level nasional menunjukkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat telah berkontribusi positif atau berada di atas garis capaian nasional. Artinya akses sumber penerangan dari Listrik di Provinsi Jawa Barat sangat baik atau sebagian besar penduduknya telah memiliki sumber penerangan baik dari PLN maupun non PLN.



Gambar 3. 74 Grafik Posisi Relatif Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan dari Listrik (%) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

B. Perkembangan Time Series

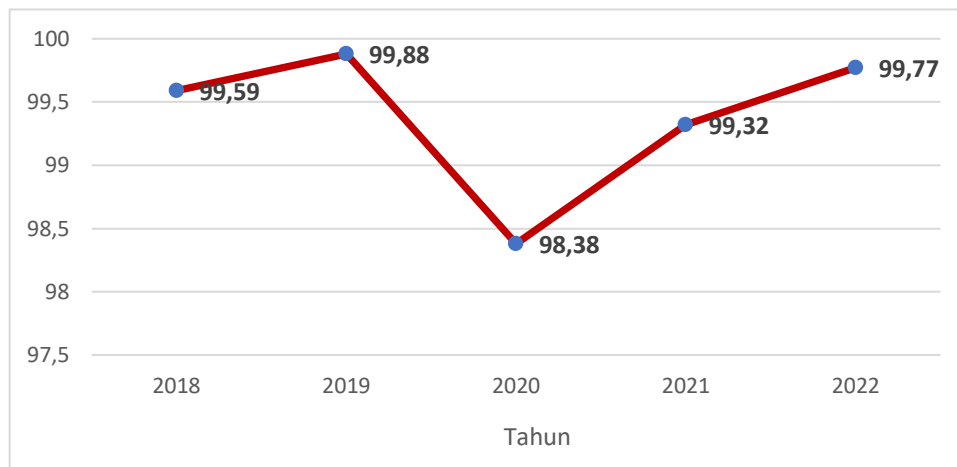
Rumah tangga dengan sumber penerangan dari listrik (%) Kabupaten Cianjur dalam kurun waktu 2018-2019 menunjukkan bahwa perkembangan antar waktu cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, ketercapaian rumah tangga dengan sumber penerangan dari listrik berada pada 99,88%. Artinya ada 0,12% rumah tangga di Kabupaten Cianjur tidak menggunakan sumber penerangan listrik PLN dan/atau non PLN sebagai penerangan utama. Akan tetapi, pada tahun 2020 dan tahun 2021, Kabupaten Cianjur telah meningkatkan akses sumber penerangan dari listrik untuk warganya, sehingga telah



LAPORAN AKHIR

Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029

mencapai nilai 100%. Secara lebih rinci, perkembangan antar waktu persentase rumah tangga dengan sumber penerangan dari listrik dapat dilihat pada **Gambar 3.75**.

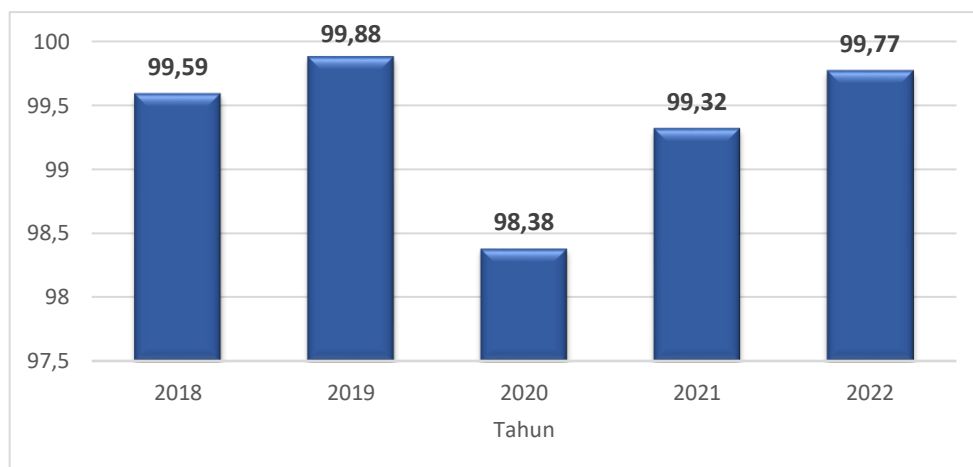


Gambar 3. 75 Grafik Perkembangan Antar Waktu Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan dari Listrik (%) Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2023

Sumber : BPS Kabupaten Cianjur, 2024

C. Efektivitas

Berdasarkan grafik analisis efektivitas persentase rumah tangga dengan sumber penerangan dari listrik Kabupaten Cianjur menunjukkan tren cenderung meningkat, kecuali di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,2 % dari tahun 2019 sebesar 99,88% menjadi 98,38%. Hal ini menunjukkan bahwa program penyediaan komponen instalasi listrik dan penyediaan jasa sumber daya listrik cukup efektif untuk peningkatan persentase rumah tangga dengan sumber penerangan dari listrik.



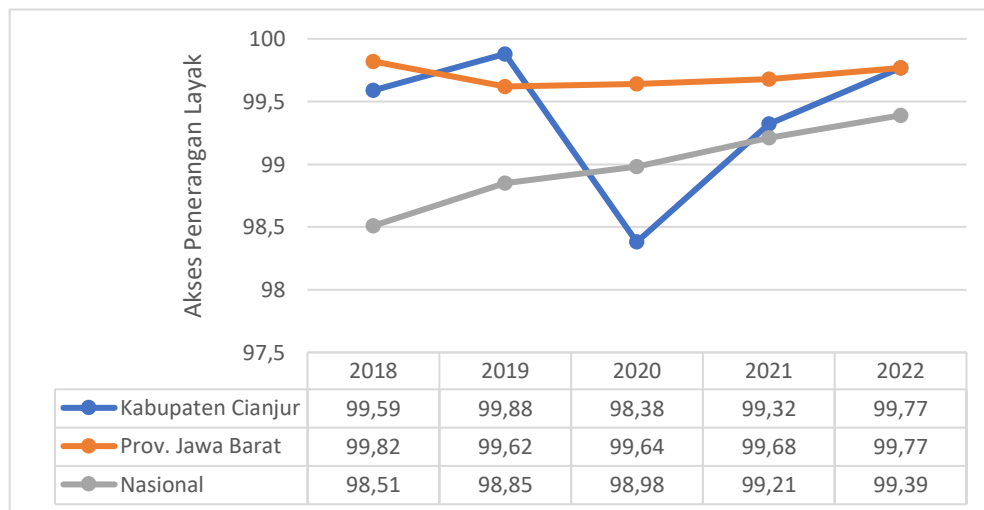
Gambar 3. 76 Grafik Efektivitas Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan dari Listrik (%) Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2023

Sumber : BPS Kabupaten Cianjur, 2023



D. Relevansi

Berdasarkan grafik analisis relevansi perkembangan persentase rumah tangga dengan sumber penerangan dari listrik (%) Kabupaten Cianjur tahun 2019-2020 memiliki kecenderungan yang kurang relevan pada capaian provinsi Jawa Barat pada tahun 2019, namun capaian cenderung relevan pada tahun 2020-2021, baik dengan capaian nasional maupun provinsi. Hal ini karena capaian rumah tangga dengan sumber penerangan dari listrik Kabupaten Cianjur tahun 2019 berada di bawah capaian Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi, di tingkat nasional, capaian Kabupaten Cianjur pada periode 2019-2021 berada di atas garis capaian nasional, artinya kebijakan Pemerintah Kabupaten Cianjur telah relevan dengan kebijakan pemerintah Pusat. Berikut ini analisis relevansi persentase rumah tangga dengan sumber penerangan dari listrik Kabupaten Cianjur dan perbandingan perkembangan di tingkat nasional dan provinsi tahun 2018-2022 dapat dilihat pada **Gambar 3.77** berikut.



Gambar 3. 77 Grafik Relevansi Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan dari Listrik (%) Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2023

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2023

3.7.1.4 Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau (%)

Indikator hunian layak adalah kriteria yang digunakan untuk menilai apakah suatu rumah layak huni atau tidak. Beberapa indikator hunian layak, antara lain:

1. Luas bangunan: Rumah layak huni jika luasnya mencukupi kebutuhan minimum per orang, yaitu 7,2 meter persegi.
2. Ketahanan bangunan: Rumah layak huni jika bangunannya kokoh dan kuat. Ketahanan bangunan rumah tangga diukur melalui bahan bangunan atap, dinding,



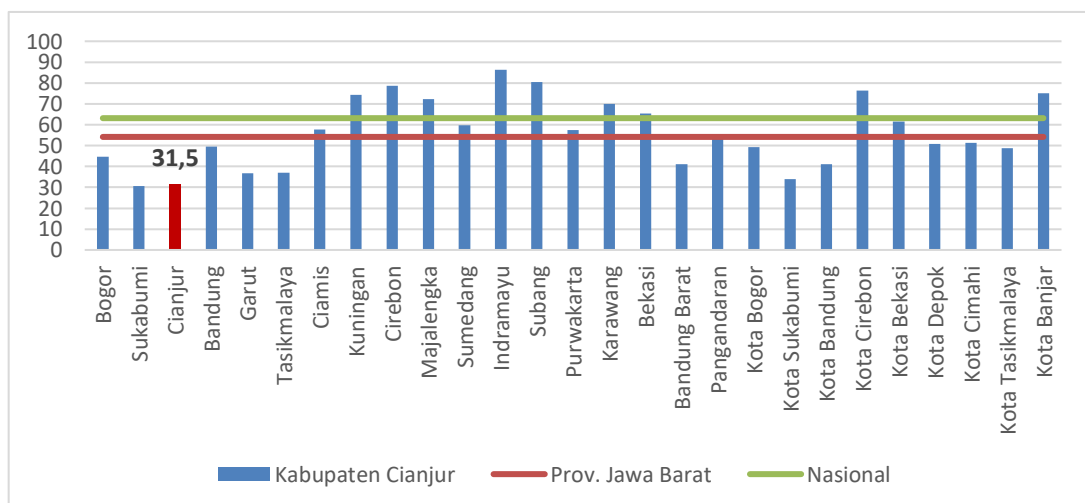
dan lantai rumah. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi agar bangunan atap, dinding, dan lantai rumah dinyatakan tahan, yaitu Bahan bangunan atap rumah terluas berupa beton, genteng, kayu/sirap, atau seng. Bahan bangunan dinding rumah terluas berupa tembok, plesteran, anyaman bambu/kawat, kayu/papan, atau batang kayu. Bahan bangunan lantai rumah terluas berupa marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, atau semen/bata merah.

3. Akses air minum: Rumah layak huni jika air minum bersih dan berkualitas mudah dijangkau dari lingkungan rumah.
4. Akses sanitasi: Rumah layak huni jika memiliki akses sanitasi yang layak.

Selain itu, rumah layak huni juga harus memenuhi standar tertentu dalam hal keamanan, kesehatan, keberlanjutan, dan aksesibilitas. Berikut ini lebih jelas persentase rumah tangga memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau di Kabupaten Cianjur.

A. Posisi Relatif

Berdasarkan posisi relatif persentase rumah tangga memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023 menunjukkan angka dibawah baik dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi maupun nasional. Dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur walaupun kenaikannya tidak signifikan tetapi di tahun 2022 mencapai 36,57% walaupun masih dibawah dari angka capaian tingkat provinsi dan nasional, sehingga Kabupaten Cianjur ikut serta mendorong capaian pembangunan nasional di bidang hunian layak dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.



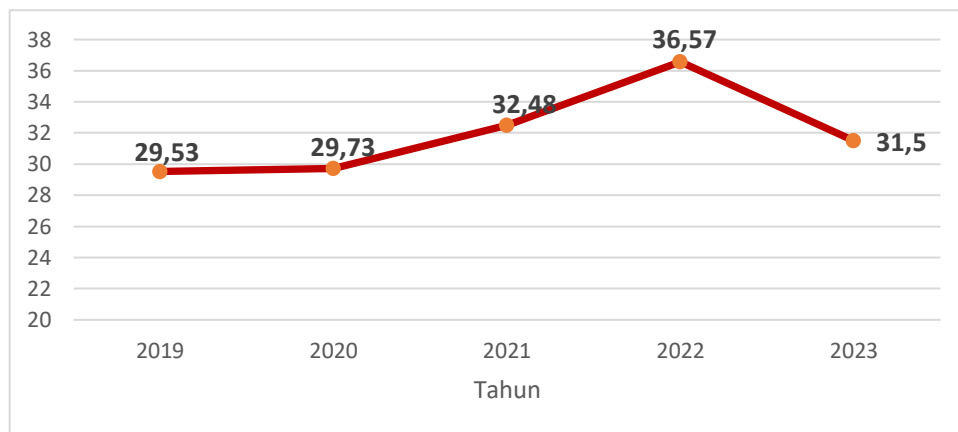
Gambar 3. 78 Grafik Posisi Relatif Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau (%) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2023



B. Perkembangan Time Series

Berdasarkan grafik perkembangan antar waktu persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (%) tahun 2019 – 2023 menunjukkan bahwa pada periode perkembangan antar waktu tersebut mengalami kecenderungan peningkatan, walaupun terdapat kondisi penurunan pada periode 2022-2023. Tahun 2021 persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau mengalami peningkatan sebesar 2,75% menjadi 32,48%. Tahun 2022 kembali mengalami peningkatan sebesar 4,09% menjadi 36,57%. Untuk jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 3.79**.



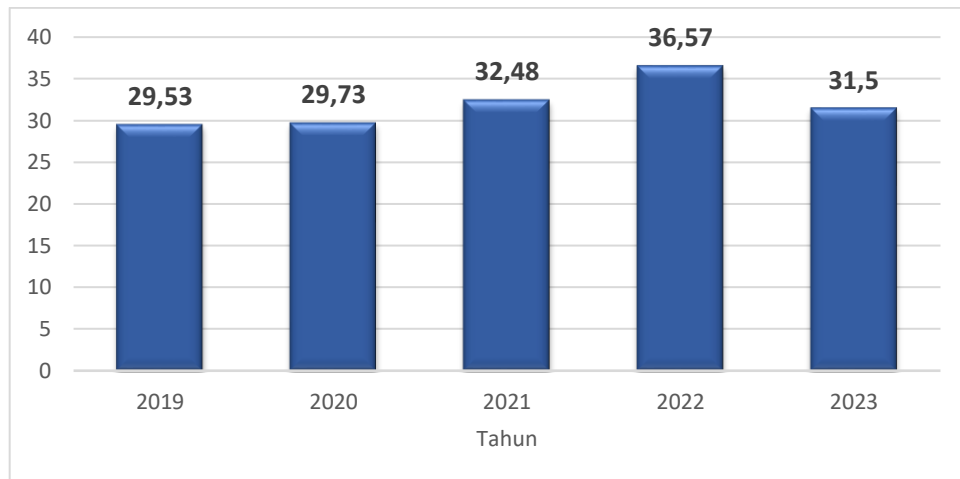
Gambar 3. 79 Grafik Perkembangan Antar Waktu RT Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau di Kabupaten Cianjur Tahun 2023

Sumber : BPS Kabupaten Cianjur, Tahun 2024

C. Efektivitas

Berdasarkan grafik perkembangan antar waktu persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (%) tahun 2019 – 2023 menunjukkan bahwa pada periode perkembangan antar waktu tersebut mengalami kecenderungan peningkatan, walaupun terdapat kondisi penurunan pada periode 2022-2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan untuk meningkatkan hunian yang layak dan terjangkau sudah sangat efektif.



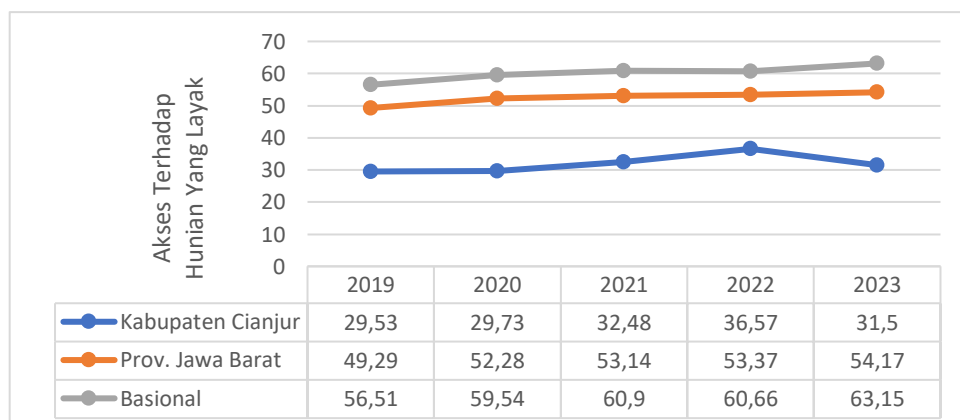


Gambar 3. 80 Grafik Efektivitas Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau di Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023

Sumber : BPS Kabupaten Cianjur, Tahun 2024

D. Relevansi

Berdasarkan grafik analisis relevansi perkembangan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (%) Kabupaten Cianjur, provinsi, dan nasional tahun 2019 – 2023 menunjukkan kecenderungan yang relevan. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai program yang dilakukan oleh Kabupaten Cianjur bidang infrastruktur dasar khususnya rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau sudah relevan/sejalan dan sinergi dengan capaian nasional dan provinsi serta turut mendorong meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang layak.



Gambar 3. 81 Grafik Efektivitas Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau di Kabupaten Cianjur, Provinsi, dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2024



3.7.2 Prioritas Permasalahan Kemiskinan Dalam Dimensi Infrastruktur Dasar

Berdasarkan uraian permasalahan kemiskinan dalam dimensi infrastruktur dasar, maka dihasilkan matriks masalah kemiskinan non konsumsi bidang infrastruktur dasar yang membuat indikator rumah layak huni. Sebagian besar indikator bidang infrastruktur dasar telah relatif baik dilihat dari posisi capaian di tingkat provinsi dan nasional, perkembangan waktu, efektivitas program dan relevansinya. Namun, dari indikator tersebut, persentase rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi layak memiliki perkembangan waktu yang cenderung fluktuatif atau ada ketidakstabilan persentase penduduk yang dapat mengakses sanitasi layak. Untuk tetap mempertahankan kestabilan capaian indikator bidang infrastruktur dasar, pemerintah perlu tetap meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dalam mendukung pertumbuhan wilayah di Kabupaten Cianjur secara merata. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.11 Masalah Kemiskinan Bidang Infrastruktur Dasar

No	Indikator Utama	Aspek Yang Dianalisis			
		Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi
1	Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak (%)	Lebih rendah dari provinsi	Cenderung turun	Tidak Efektif	Tidak Relevan
2	Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak (%)	Lebih rendah dari provinsi dan nasional	Cenderung turun	Tidak Efektif	Relevan
3	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan dari Listrik (%)	Lebih baik dari nasional	Cenderung naik, namun fluktuatif	Tidak Efektif	Relevan
4	Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau (%)	Lebih rendah dari provinsi dan nasional (persentase paling tinggi).	Cenderung meningkat	Efektif	Relevan

Sumber : Hasil Analisis, 2024

3.8 ANALISIS KARAKTERISTIK PERMASALAHAN KEMISKINAN KETAHANAN PANGAN

3.8.1 Permasalahan Kemiskinan dalam Dimensi Ketahanan Pangan**3.8.1.1 Perkembangan Harga Beras**

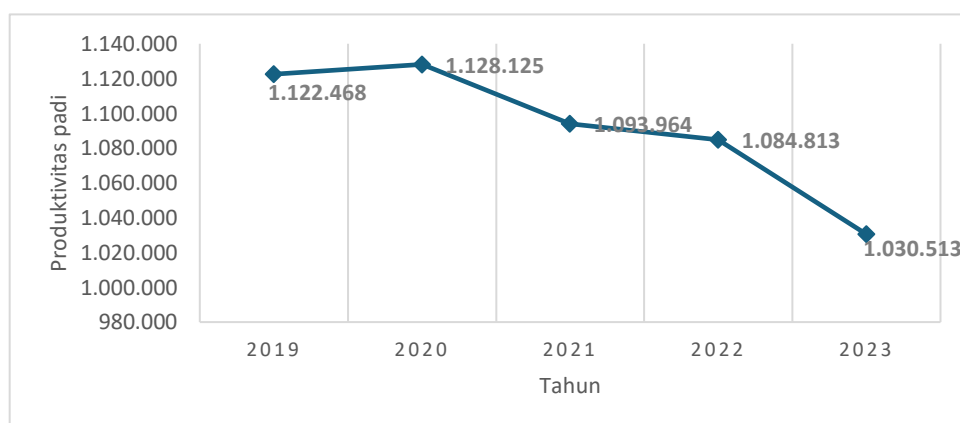
Perkembangan harga beras di Indonesia relatif tidak stabil. Kenaikan dan penurunan harga dipengaruhi oleh harga secara umum atau inflasi. Perkembangan harga beras di Indonesia dan di Kabupaten Cianjur secara khusus sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan



peningkatan konsumsi beras, di sisi lain adanya konversi lahan pertanian menjadi permukiman atau industri lain menyebabkan luas lahan pertanian akan menjadi berkurang. Hal ini tentunya akan mempengaruhi produktivitas padi. Produktivitas padi yang berkurang akan mempengaruhi stok beras dan harga beras. Adapun kemampuan pemerintah dalam mengendalikan harga beras akan berdampak terhadap upaya untuk menjaga agar tingkat inflasi tetap rendah, sebab kenaikan harga beras memiliki kontribusi yang signifikan dalam menyumbang inflasi.

3.8.1.2 Produktivitas Padi

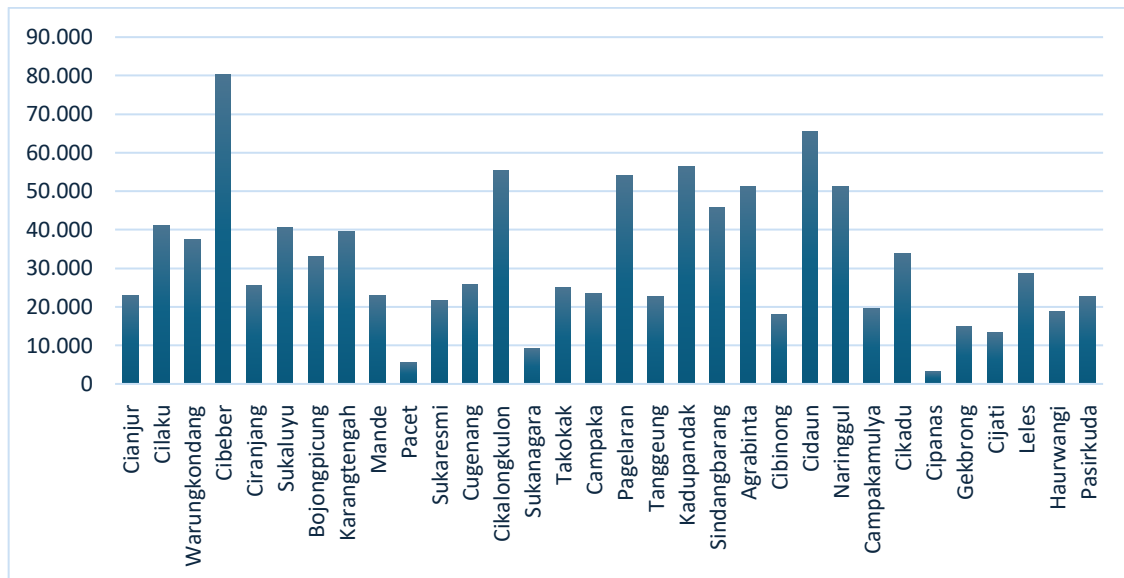
Sektor pertanian merupakan penunjang utama masyarakat Indonesia, mengingat Indonesia merupakan Negara agraris. Penyediaan pangan bagi penduduk di Indonesia yang selalu bertambah memerlukan upaya nyata peningkatan produksi padi. Sebagian besar petani di Indonesiamengusahakan padi dengan program intensifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan produksipadi dan pendapatan petani. Faktor yang mempengaruhi naik turunnya rata-rata produktivitas padiper hektar antara lain kesuburan tanah, pemakaian pupuk, bibit, cara bercocok tanam, jasadpenganggu dan sebagainya. Adapun aspek anomali seperti kelembaban dan curah hujan berpengaruh terhadap produksi padi. Berikut ini kondisi produktivitas padi Kabupaten Cianjur. Produksi padi pada tingkat kecamatan di Kabupaten Cianjur selama 5 tahun terakhir (2019-2023), Produksi padi mengalami penurunan sebesar 8,19% dalam 5 tahun terakhir dari 1.122.468 ton pada tahun 2019 menjadi 1.030.513 ton pada tahun 2023. Penurunan produksi padi tertinggi dalam 5 tahun terakhir di Kec. Pagelaran dari 78.956 ton (tahun 2019) menjadi 54.102 ton (tahun 2023). Laju pertumbuhan produksi padi dala lima tahun terakhir mengalami peningkatan di 10 kecamatan. Produksi padi tertinggi pada tahun 2023 di kecamatan Cibeber sebesar 80.340 ton dan terendah di Kecamatan Cipanas sebesar 3.290 ton.



Gambar 3. 82 Produktivitas Padi Kabupaten Cianjur Tahun 2019-2023

Sumber : FVSA Kabupaten Cianjur, Tahun 2024



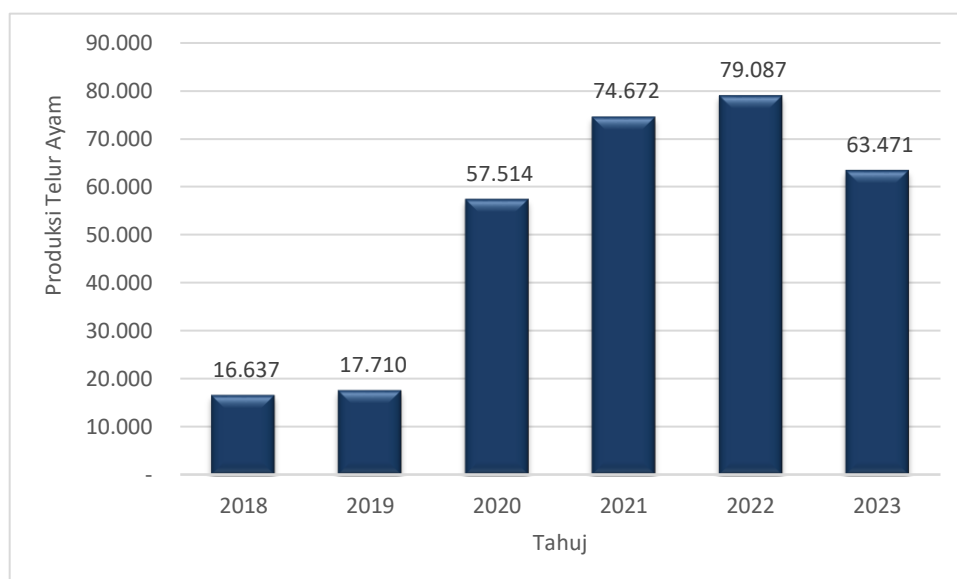


Gambar 3. 83 Produktivitas Padi Per Kecamatan Tahun 2023

Sumber : FVSA Kabupaten Cianjur, Tahun 2024

3.8.1.3 Produksi Telur Ayam Ras

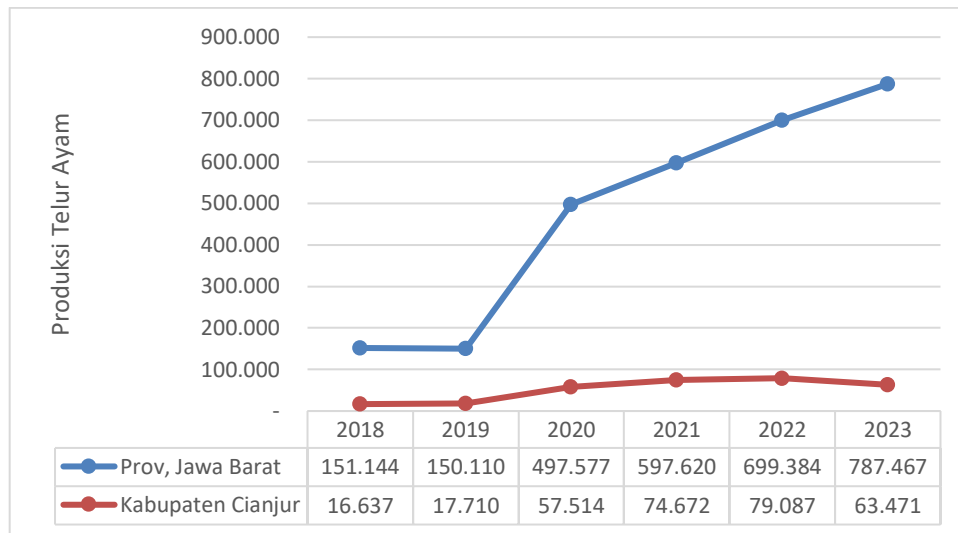
Telur ayam ras saat ini masih mendominasi pasar konvensional. Selama bertahun-tahun penyajian telur di pasar konvensional tidak mengalami perubahan yaitu dalam bentuk curah. Bentuk telur ayam ras spesifik yang dikemas dalam kotak plastik ataupun dikemas dengan penambahan vitamin dan mineral masih jarang terlihat di pasar konvensional. Umumnya telur ayam ras petelur dijadikan bahan industri atau komoditas ekspor, Indonesia memiliki kontribusi besar dalam konsumsi telur dari ayam ras petelur. Produksi telur ayam di Kabupaten Cianjur dapat di lihat pada **Gambar 3.85 dan Gambar 3.86** berikut.



Gambar 3. 84 Produksi Telur Ayam Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2023

Sumber : BPS Kabupaten Cianjur Tahun 2024



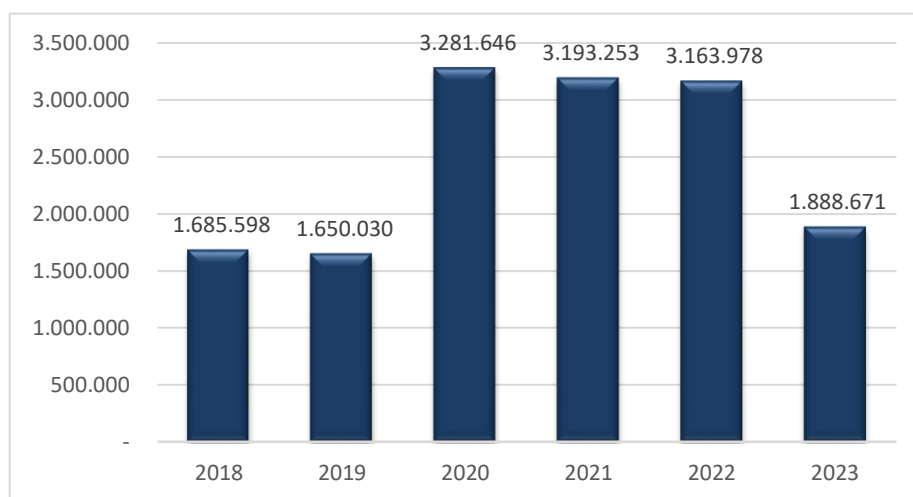


Gambar 3. 85 Produksi Telur Ayam Kabupaten Cianjur dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Sumber : BPS Kabupaten Cianjur Tahun 2024

3.8.1.4 Produksi Ayam Ras

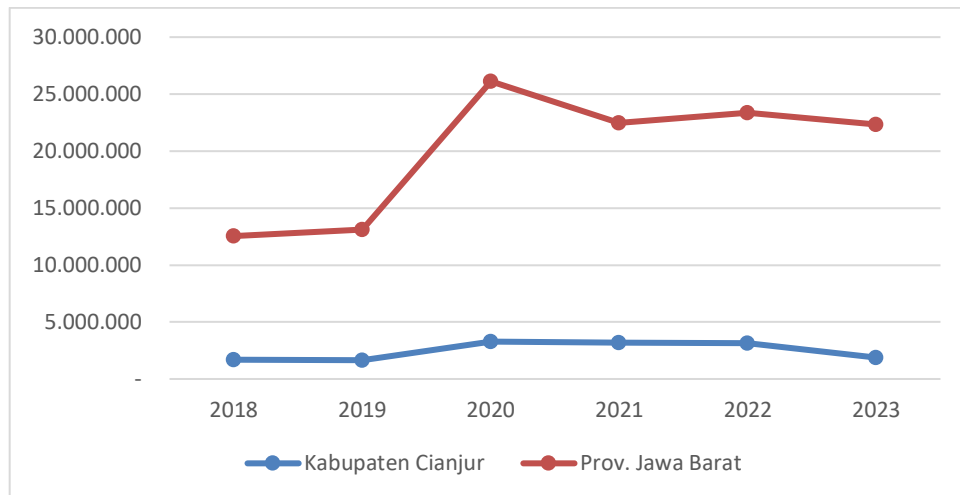
Salah satu sumber protein hewani yang mudah diperoleh adalah daging ayam ras pedaging atau yang sering disebut sebagai ayam broiler (selanjutnya dipakai istilah ayam broiler). Selain harganya yang relatif lebih terjangkau, daging ayam broiler mudah diolah menjadi berbagai macam masakan sehingga banyak digunakan dalam rumah tangga maupun rumah makan karena dagingnya yang empuk dan tebal. Produksi ayam ras di Kabupaten Cianjur dapat di lihat pada **Gambar 3.87 dan Gambar 3.88** berikut.



Gambar 3. 86 Produksi Ayam Ras Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2023

Sumber : BPS Kabupaten Cianjur Tahun 2024





Gambar 3. 87 Produksi Ayam Ras Kabupaten Cianjur dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Sumber : BPS Kabupaten Cianjur Tahun 2024

3.8.1.5 Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

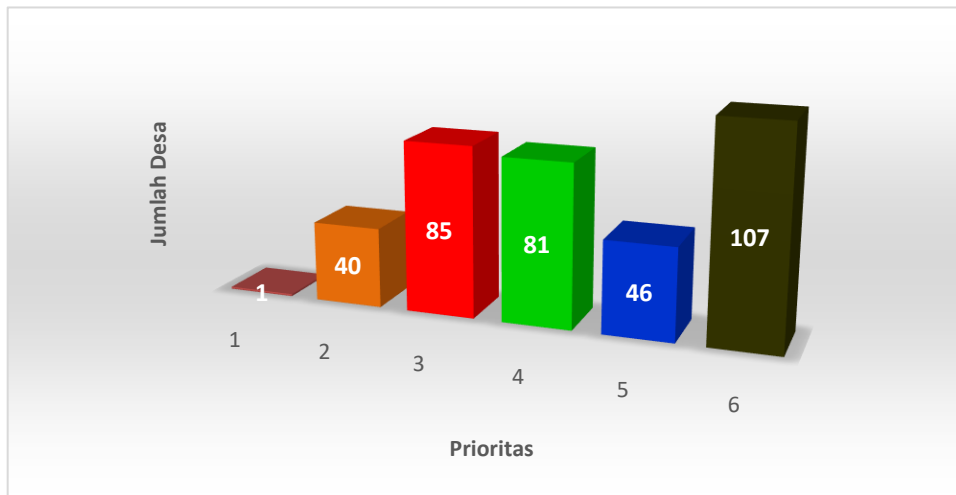
Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dengan jumlah rumah tangga di desa. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpanan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di desa maka diasumsikan semakin baik Tingkat ketersediaan pangan di desa tersebut. Berdasarkan rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga, dari 360 desa di Kabupaten



LAPORAN AKHIR

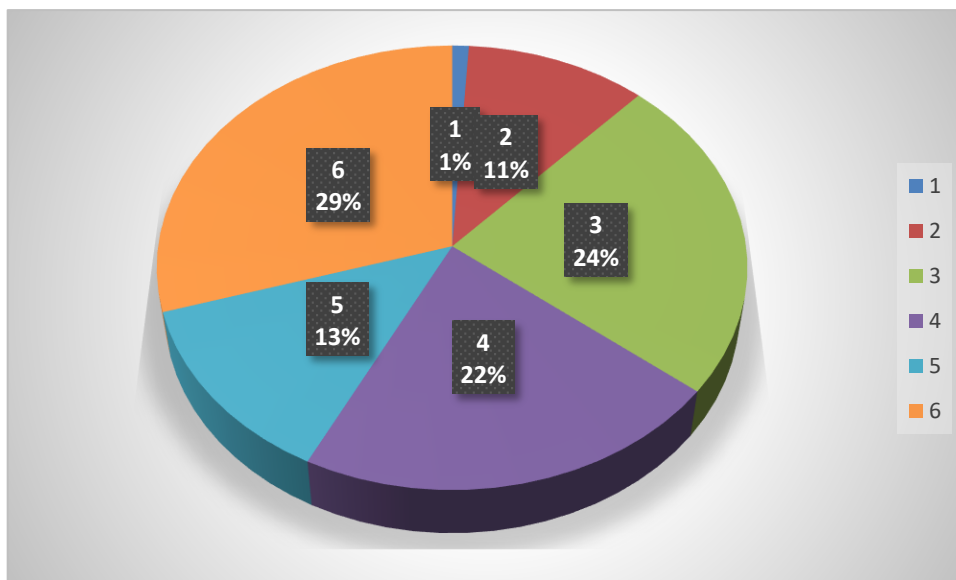
Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029

Cianjur terdapat 1 desa masuk dalam prioritas 1 (1%), 40 desa prioritas 2 (11%), dan 85 desa prioritas 3 (24%). Rincian sebaran rasio sarana dan prasarana penyedia Pangan.



Gambar 3. 88 Sebaran Rasio Sarana Prasarana Penyedia Pangan berdasarkan Prioritas Tahun 2019

Sumber : FSVA Kabupaten Cianjur Tahun 2024



Gambar 3. 89 Grafik Rasio Sarana Prasarana Penyedia Pangan Tahun 2019

Sumber : FSVA Kabupaten Cianjur Tahun 2024

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Cianjur dari tahun 2019-2023 mencapai 3% per tahun sementara laju pertumbuhan produksi padi turun 2,05%/tahun, Rasio lahan pertanian (sawah dan non sawah) dibandingkan luas lahan total adalah sebesar 90,80%. Namun tidak semua lahan merupakan lahan produktif. Jumlah desa rentan rawan pangan pada prioritas 1-3 berdasarkan Rasio sarana prasarana penyedia pangan pada prioritas 1-3 sebesar 35%



sama seperti tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan tidak adanya peningkatan jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan.

Strategi untuk Meningkatkan Ketersediaan Pangan.

Strategi dan Kebijakan Kabupaten Cianjur mengenai ketersediaan pangan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021-2026 dengan tujuan dan strategi sebagai berikut:

1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter religius :
 - a. Peningkatan ketahanan (ketersediaan dan konsumsi) pangan Masyarakat
2. Meningkatnya perekonomian daerah :
 - a. Meningkatkan produksi pertanian (dalam arti luas);
 - b. Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman, dan halal.





BAB 4

PROGRAM PRIORITAS

Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029

4.1 ANALISIS DETERMINAN KEMISKINAN

4.1.1 Prioritas Intervensi Bidang Kemiskinan Konsumsi

Kemiskinan dalam aspek konsumsi dapat dilihat melalui tingkat pengeluaran serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan minuman. Suatu kelompok masyarakat dikategorikan sebagai miskin jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan mereka berada di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan penjelasan pada Bab III, terdapat tiga indikator utama yang menjadi perhatian dalam bidang konsumsi, yaitu Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

Tabel 4.1 memperlihatkan **Tren Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin** yaitu data menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin mengalami fluktuasi dari 2019 hingga 2023. Pada 2019 dan 2020, persentasenya tetap stabil di angka 10,36%, kemudian meningkat signifikan pada 2021 menjadi 11,18%. Namun, tren ini mulai menurun lagi menjadi 10,55% pada 2022 dan 10,22% pada 2023. Meskipun persentasenya menurun dalam dua tahun terakhir, jumlah penduduk miskin justru meningkat dari 350.760 jiwa (2019) hingga mencapai 437.327 jiwa pada 2023. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun proporsi penduduk miskin terhadap total populasi menurun, pertumbuhan populasi secara keseluruhan mendorong peningkatan jumlah absolut penduduk miskin.

Kedalaman Kemiskinan (P1) yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang mencerminkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, menunjukkan peningkatan signifikan dari 0,74 pada 2019 ke puncaknya di 1,83 pada 2021. Penurunan mulai terlihat pada 2022 (1,35) dan terus berlanjut hingga 2023 (1,29). Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kondisi ekonomi sebagian penduduk miskin, meskipun tantangan masih terlihat pada jumlah penduduk miskin yang terus bertambah.



Keparahan Kemiskinan (P2) yaitu Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), yang mengukur distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin, mengalami sedikit perubahan selama periode lima tahun. Dari 0,36 pada 2019, terjadi peningkatan menjadi 0,47 pada 2020, lalu menurun lagi ke 0,42 pada 2021, dan stabil di angka 0,38 pada 2022 hingga 2023. Stabilitas ini menunjukkan bahwa distribusi kemiskinan di kalangan penduduk miskin relatif tidak banyak berubah, meskipun ada perbaikan dalam kedalaman kemiskinan. Artinya, ketimpangan di antara penduduk miskin tetap menjadi tantangan.

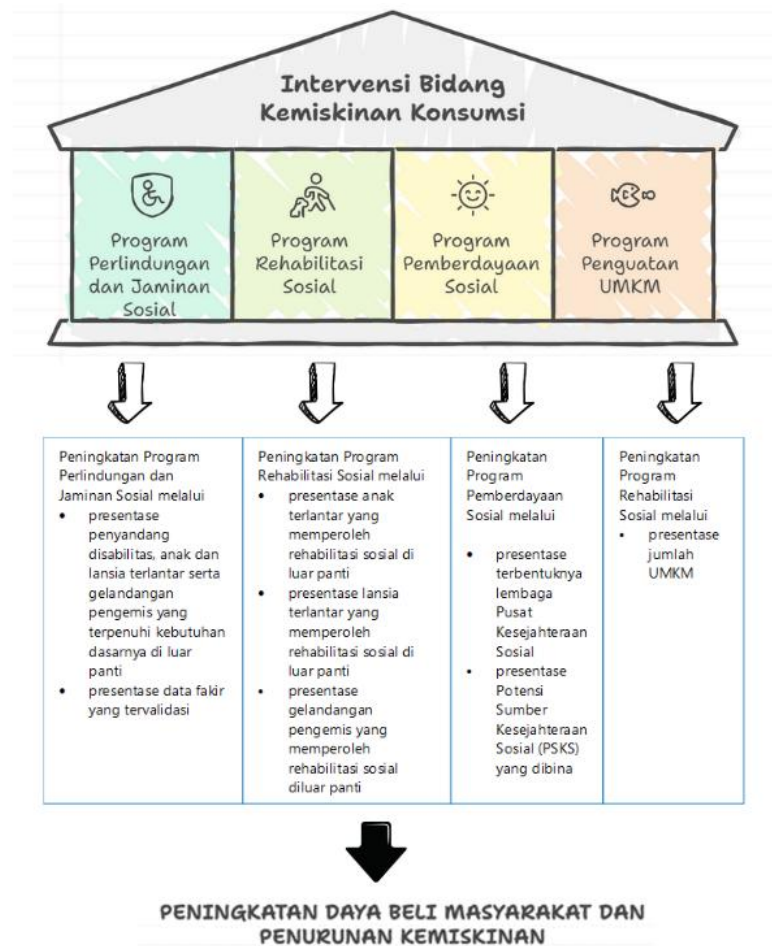
Tabel 4.1 Parameter Bidang Kemiskinan Konsumsi

Parameter	Tahun					Keterangan
	2019	2020	2021	2022	2023	
Persentase Penduduk Miskin (%)	10,36	10,36	11,18	10,55	10,22	Penurunan (+)
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	350.760	371.699	387.631	406.289	437.327	Peningkatan (-)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,74	1,38	1,83	1,35	1,29	Penurunan (+)
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,36	0,47	0,42	0,38	0,38	Penurunan (-)

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka (data diolah), 2024

Untuk menangani kemiskinan di bidang konsumsi, intervensi perlu difokuskan pada upaya menurunkan berbagai parameter terkait. Oleh karena itu, tujuan utama intervensi adalah mengurangi jumlah penduduk miskin, meningkatkan daya beli masyarakat untuk mengatasi kedalaman kemiskinan, serta mengurangi ketimpangan pada tingkat keparahan kemiskinan. Sasaran ini dapat dicapai melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan makro dan mikro. Pada pendekatan makro, langkah yang dilakukan mencakup mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengendalikan inflasi, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta memperluas peluang kerja. Sementara itu, pada skala mikro, upaya yang dilakukan meliputi pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin dan rentan, serta peningkatan pendapatan rumah tangga miskin dan rentan.





Gambar 4.1 Analisis Intervensi Bidang Kemiskinan Konsumsi

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Gambar 4.1 menjelaskan strategi penanganan kemiskinan di bidang konsumsi melalui empat program utama, yaitu Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Pemberdayaan Sosial, dan Program Penguatan UMKM. Setiap program memiliki fokus intervensi spesifik, seperti pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan, perluasan cakupan rehabilitasi sosial, pengembangan lembaga pemberdayaan sosial, serta peningkatan jumlah dan kapasitas UMKM. Keseluruhan program ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan secara berkelanjutan.



4.1.2 Prioritas Intervensi Bidang Kemiskinan Ketenagakerjaan

Tabel 4.3 memperlihatkan *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)* mengalami tren penurunan dari 9,81% pada tahun 2019 menjadi 7,71% pada tahun 2023. Sebaliknya, *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)* menunjukkan kenaikan signifikan dari 66,00% pada tahun 2019 menjadi 72,31% pada tahun 2023. Penurunan TPT bersamaan dengan kenaikan TPAK mencerminkan kondisi pasar kerja yang semakin membaik, di mana lebih banyak penduduk usia kerja yang aktif mencari pekerjaan atau bekerja. Penurunan TPT yang cukup konsisten setiap tahun menunjukkan adanya upaya pemerintah atau pelaku ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih efektif.

Kenaikan TPAK menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk usia produktif yang masuk ke pasar tenaga kerja. Namun, hal yang menarik adalah penurunan TPT yang tetap terjadi meskipun TPAK terus meningkat, terutama pada periode 2020–2023. Hal ini dapat mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor, terutama setelah pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Sektor informal dan formal mungkin sama-sama berkontribusi, meskipun keberlanjutan tren ini akan sangat tergantung pada kualitas pekerjaan yang ditawarkan. Jika lapangan kerja yang tercipta adalah pekerjaan produktif dengan pendapatan layak, maka dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat akan lebih besar.

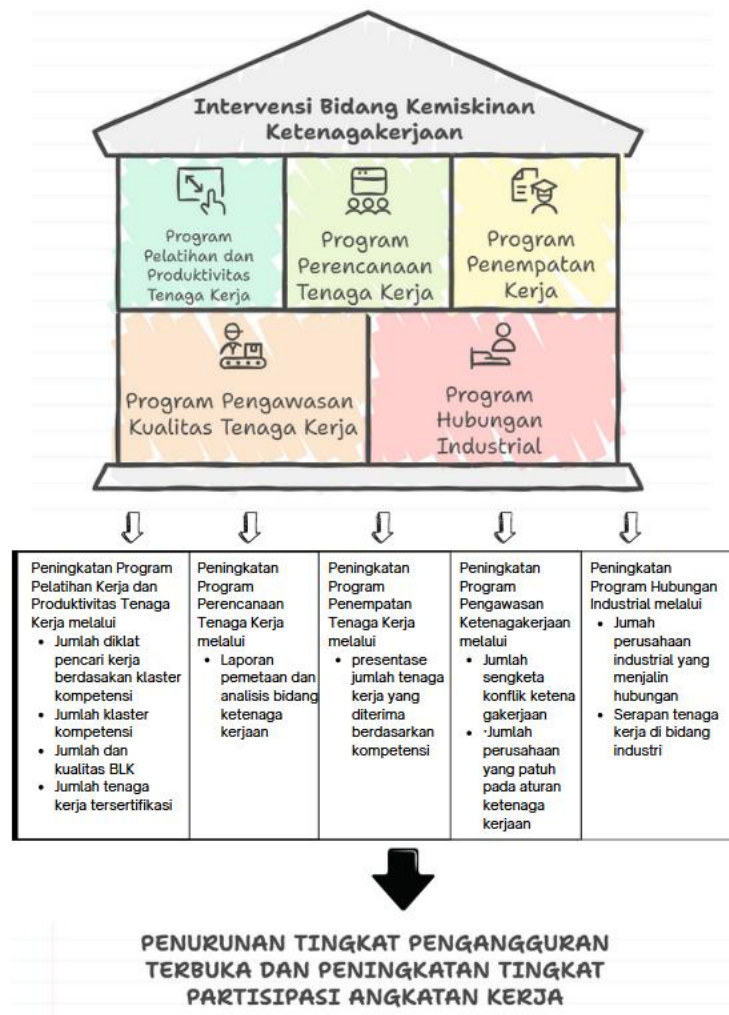
Tren data ini memberikan sinyal positif, tetapi perlu penguatan kebijakan untuk menjaga keberlanjutan penurunan TPT dan kenaikan TPAK. Pemerintah dapat meningkatkan investasi di sektor padat karya seperti manufaktur dan agribisnis untuk menyerap tenaga kerja yang lebih besar. Selain itu, program pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja akan membantu meningkatkan kualitas tenaga kerja, sehingga mereka lebih mudah diserap di sektor formal. Kebijakan inklusif juga diperlukan untuk mendorong partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam angkatan kerja, sehingga TPAK dapat meningkat lebih lanjut tanpa meningkatkan ketimpangan sosial.

Untuk mengatasi kemiskinan tenaga kerja, diperlukan kebijakan yang tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan kualitas pekerjaan yang ada. Pemerintah perlu mendorong program peningkatan keterampilan tenaga kerja agar mereka dapat masuk ke sektor dengan produktivitas tinggi dan pendapatan yang lebih baik, seperti manufaktur, teknologi, dan jasa. Selain itu, penguatan upah minimum, perluasan jaminan sosial, dan perlindungan bagi pekerja informal adalah langkah penting untuk mendorong kesejahteraan tenaga kerja. Dengan pendekatan ini, penurunan TPT dan kenaikan TPAK dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pengentasan kemiskinan tenaga kerja.

Tabel 4.2 Parameter Bidang Kemiskinan Ketenagakerjaan

Parameter	Tahun					Keterangan
	2019	2020	2021	2022	2023	
Tingkat Pengangguran Terbuka	9,81	11,05	9,32	8,41	7,71	Penurunan (+)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	66,00	69,26	67,989	69,98	72,31	Kenaikan (+)

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka (data diolah), 2024



Gambar 4.2 Analisis Intervensi Bidang Kemiskinan Ketenagakerjaan

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Gambar 4.2 menggambarkan strategi penanganan kemiskinan di bidang ketenagakerjaan melalui lima program utama, yaitu Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Penempatan Kerja, dan Program Pengawasan

Kualitas Tenaga Kerja dan Program Hubungan Industrial. Setiap program memiliki fokus intervensi spesifik, seperti jumlah diklat pencari kerja berdasarkan kluster kompetensi, laporan pemetaan dan analisis bidang ketenagakerjaan, presentase jumlah tenaga kerja yang diterima berdasarkan kompetensi, jumlah sengketa konflik ketenagakerjaan, serta jumlah serapan tenaga kerja di bidang industri. Keseluruhan program ini bertujuan untuk penurunan tingkat pengangguran terbuka dan terjadi peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja secara berkelanjutan.

4.1.3 Prioritas Intervensi Bidang Kemiskinan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya penanganan kemiskinan di Kabupaten Cianjur. Beberapa parameter utama yang menjadi fokus intervensi program di bidang kesehatan meliputi Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Harapan Hidup (AHH), serta prevalensi Stunting. Parameter-parameter ini menjadi indikator krusial dalam menentukan prioritas kebijakan kesehatan di wilayah tersebut.

Tabel 4.5 memperlihatkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) mengalami fluktuasi dengan kecenderungan peningkatan, terutama pada AKI yang naik dari 23 pada 2019 menjadi 51 pada 2023, serta AKB yang mencapai angka tertinggi 175 pada 2021. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya tantangan serius dalam sistem kesehatan, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Kemiskinan kesehatan sering kali terkait dengan akses yang terbatas terhadap fasilitas medis, nutrisi yang buruk, dan kurangnya layanan kesehatan ibu dan anak. Meski terjadi penurunan *Angka Stunting* secara signifikan dari 33,51% pada 2019 menjadi 11,40% pada 2023, peningkatan AKI dan AKB menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam pelayanan kesehatan, terutama pada populasi rentan.

Angka Harapan Hidup (AHH) terus meningkat dari 69,91 tahun pada 2019 menjadi 74,61 tahun pada 2023. Tren ini mencerminkan perbaikan umum dalam kondisi kesehatan masyarakat, seperti akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat. Namun, peningkatan AHH tidak selalu mencerminkan pemerataan akses layanan kesehatan. Di kelompok masyarakat miskin, khususnya yang tinggal di daerah terpencil, akses terhadap layanan kesehatan berkualitas masih menjadi tantangan, yang pada akhirnya berkontribusi pada tingginya AKI dan AKB. Ketimpangan ini memperkuat hubungan antara kemiskinan dan kesenjangan kesehatan.

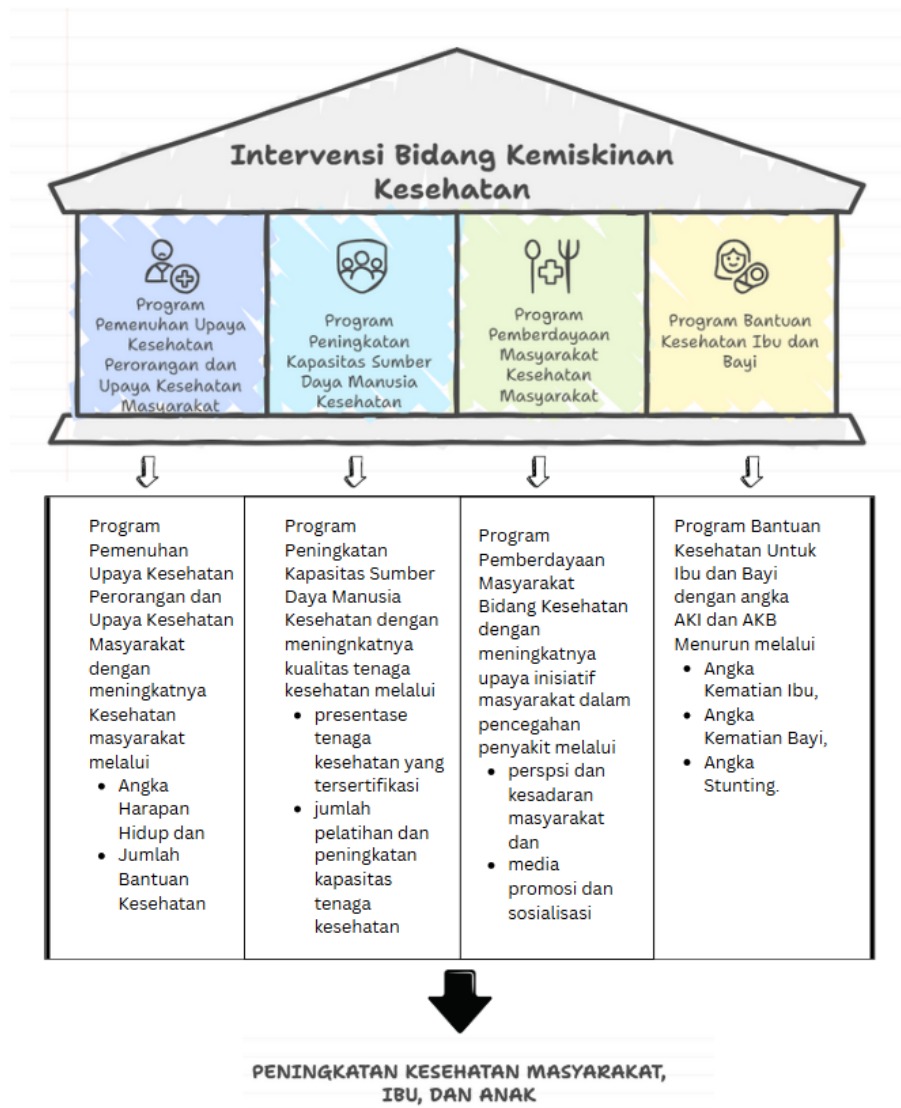
Kemiskinan kesehatan dapat diatasi dengan pendekatan terintegrasi yang berfokus pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi kelompok rentan. Pemerintah perlu memperkuat program kesehatan ibu dan anak, termasuk penyediaan layanan prenatal dan

postnatal yang lebih terjangkau dan berkualitas. Selain itu, intervensi stunting yang telah menunjukkan hasil positif perlu dipertahankan dengan pendekatan holistik, termasuk perbaikan gizi, air bersih, dan sanitasi. Penyediaan asuransi kesehatan yang mencakup seluruh lapisan masyarakat juga dapat mengurangi beban biaya medis dan meningkatkan akses layanan kesehatan. Dengan pendekatan ini, upaya pengurangan kemiskinan kesehatan dapat memberikan dampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 4.3 Parameter Bidang Kemiskinan Kesehatan

Parameter	Tahun					Keterangan
	2019	2020	2021	2022	2023	
Angka Kematian Ibu (AKI)	23	33	49	33	51	Kenaikan (-)
Angka Kematian Bayi (AKB)	56	173	175	129	156	Kenaikan (-)
Angka Harapan Hidup (AHH)	69,91	73,90	74,10	74,37	74,61	Kenaikan (+)
Angka Stunting	33,51	27,52	33,70	13,60	11,40	Penurunan (+)

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka, Dinas Kesehatan, (data diolah), 2024



Gambar 4.3 Analisis Intervensi Bidang Kemiskinan Kesehatan

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Kerangka intervensi bidang kemiskinan kesehatan pada Gambar 4.3 tersebut menunjukkan pendekatan holistik untuk mengatasi tantangan kesehatan masyarakat, terutama yang terkait dengan kelompok rentan seperti ibu dan anak. Program pertama, yaitu pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat, bertujuan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan melalui peningkatan angka harapan hidup dan jumlah bantuan kesehatan yang diterima masyarakat. Hal ini mencerminkan fokus pada aksesibilitas layanan kesehatan dasar sebagai langkah awal untuk mengurangi kesenjangan kesehatan. Sementara itu, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan menitikberatkan pada penguatan kualitas tenaga kesehatan dengan menyediakan pelatihan dan sertifikasi, yang pada akhirnya mendukung perbaikan pelayanan kesehatan kepada



masyarakat. Kombinasi antara aksesibilitas dan kualitas layanan ini menjadi fondasi penting dalam mendukung kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Program pemberdayaan masyarakat menekankan peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit melalui peningkatan kesadaran kesehatan dan promosi media. Ini mencerminkan pendekatan berbasis komunitas, di mana masyarakat menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar penerima manfaat. Selain itu, program bantuan kesehatan untuk ibu dan bayi berfokus pada indikator kesehatan yang spesifik, seperti menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta angka stunting, yang masih menjadi tantangan besar di banyak wilayah. Dengan mengintegrasikan keempat program ini, strategi intervensi tersebut tidak hanya menargetkan peningkatan indikator kesehatan secara langsung, tetapi juga membangun ekosistem kesehatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kombinasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok rentan, serta mendorong pencapaian tujuan kesehatan nasional.

4.1.4 Prioritas Intervensi Bidang Kemiskinan Pendidikan

Kemiskinan pendidikan merupakan salah satu tantangan utama yang menghambat pembangunan sumber daya manusia, di mana anak-anak dari keluarga kurang mampu sering kali menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, fasilitas belajar, dan dukungan ekonomi. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi sekolah, tingginya angka putus sekolah, serta terbatasnya peluang untuk meningkatkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu, prioritas intervensi dalam bidang kemiskinan pendidikan perlu difokuskan pada penyediaan akses pendidikan yang inklusif dan merata, program beasiswa dan bantuan finansial bagi siswa dari keluarga miskin, serta peningkatan kualitas guru dan infrastruktur pendidikan, sehingga dapat memutus lingkaran kemiskinan antar-generasi dan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih berdaya.

Berdasarkan Tabel 4.7, Angka Partisipasi Kasar (APK) mengalami penurunan dari 106,24 pada 2019 menjadi 102,10 pada 2021, sebelum kembali menunjukkan sedikit peningkatan menjadi 102,66 pada 2023. Penurunan APK dapat mengindikasikan adanya tantangan dalam sistem pendidikan, seperti tingginya angka putus sekolah atau penurunan minat anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan. Namun, kenaikan yang terjadi setelah 2021 menunjukkan adanya upaya pemulihan, mungkin melalui kebijakan pemerintah seperti program wajib belajar atau bantuan pendidikan untuk kelompok rentan.

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan tren stabil dengan peningkatan bertahap, dari 98,39 pada 2019 menjadi 100 pada 2023. Kenaikan APM mengindikasikan bahwa semakin banyak anak usia sekolah yang terdaftar sesuai dengan jenjang pendidikannya, yang mencerminkan perbaikan dalam aksesibilitas dan kesadaran akan pentingnya pendidikan formal. Namun, peningkatan APM yang tidak diikuti oleh kenaikan signifikan pada APK



menunjukkan adanya populasi siswa yang lebih tua atau lebih muda dari usia sekolah ideal yang masih tercatat dalam sistem pendidikan, yang memengaruhi APK secara keseluruhan.

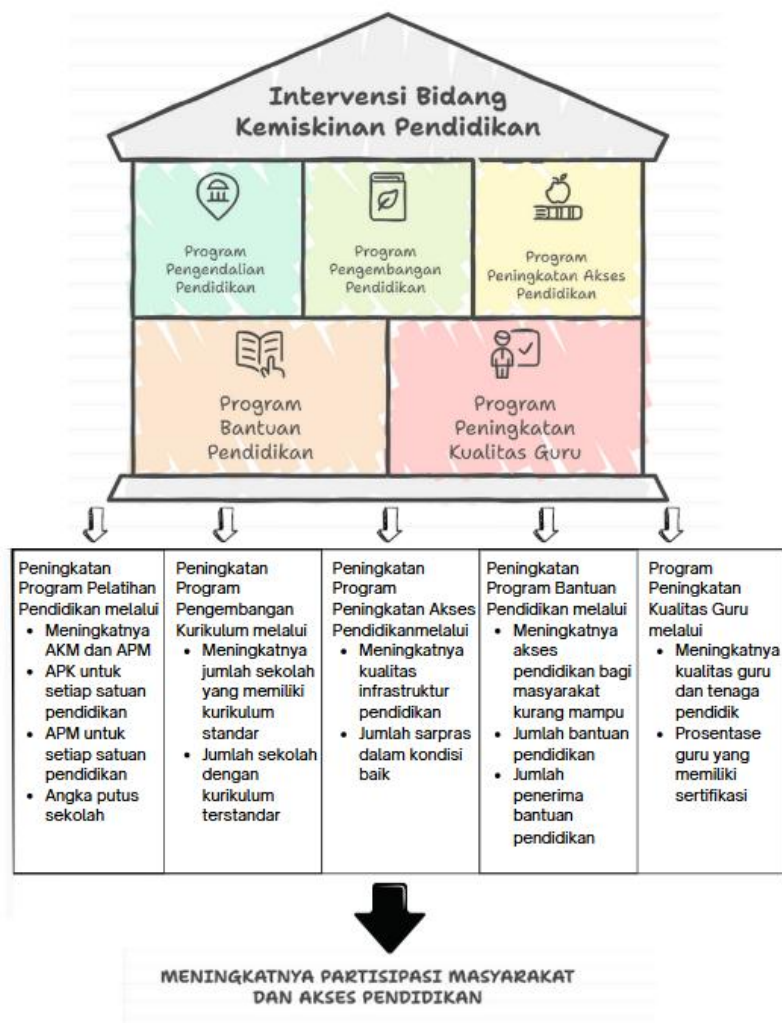
Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) yang meningkat dari 11,89 tahun pada 2019 menjadi 12,12 tahun pada 2023 menunjukkan harapan masyarakat yang lebih tinggi terhadap pendidikan anak-anak mereka. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan akses pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi, meskipun perlu dicatat bahwa kenaikan AHLS harus diikuti oleh peningkatan kualitas pendidikan. Secara keseluruhan, hubungan antara APK, APM, dan AHLS menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem pendidikan, tetapi masih memerlukan intervensi strategis, seperti program peningkatan mutu pendidikan, penguatan infrastruktur sekolah, dan pengurangan kesenjangan akses di wilayah terpencil, untuk memastikan seluruh anak dapat mengakses pendidikan berkualitas tanpa hambatan.

Tabel 4.4 Parameter Bidang Kemiskinan Pendidikan

Parameter	Tahun					Keterangan
	2019	2020	2021	2022	2023	
Angka Partisipasi Kasar (APK)	106,24	105,52	102,10	102,46	102,66	Kenaikan (+)
Angka Partisipasi Murni (APM)	98,39	98,49	98,82	98,80	100	Kenaikan (+)
Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	11,89	11,96	11,97	12,11	12,12	Kenaikan (+)

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka, (data diolah), 2024





Gambar 4.4 Analisis Intervensi Bidang Kemiskinan Pendidikan

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Kerangka intervensi bidang kemiskinan pendidikan dalam **Gambar 4.4** menunjukkan pendekatan strategis melalui lima program utama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan akses pendidikan. Program pertama adalah pengendalian pendidikan, yang berfokus pada peningkatan angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), dan menekan angka putus sekolah di setiap jenjang pendidikan. Program ini bertujuan memastikan aksesibilitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, program pengembangan pendidikan menitikberatkan pada peningkatan jumlah sekolah dengan kurikulum standar dan kualitas pendidikan yang merata melalui penyediaan fasilitas yang sesuai standar. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran tetapi juga mengurangi kesenjangan antar sekolah, terutama di wilayah terpencil.



Program lainnya, seperti peningkatan akses pendidikan dan bantuan pendidikan, menekankan pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana-prasarana (sarpras) pendidikan yang layak. Bantuan pendidikan diarahkan untuk kelompok masyarakat kurang mampu melalui beasiswa atau subsidi, yang bertujuan mengurangi hambatan ekonomi dalam mengakses pendidikan. Terakhir, program peningkatan kualitas guru menjadi komponen penting untuk menjamin keberhasilan intervensi ini. Melalui pelatihan dan sertifikasi, program ini meningkatkan kompetensi guru sehingga mampu memberikan pendidikan berkualitas. Kombinasi dari semua program ini menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan, yang berkontribusi pada peningkatan aksesibilitas serta partisipasi pendidikan, sekaligus memutus rantai kemiskinan generasi mendatang.

4.1.5 Prioritas Intervensi Bidang Kemiskinan Infrastruktur Dasar

Kemiskinan infrastruktur dasar merupakan salah satu penyebab utama ketimpangan sosial dan ekonomi, terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang. Akses yang terbatas terhadap infrastruktur seperti jalan, air bersih, sanitasi, listrik, dan perumahan layak menghambat mobilitas, produktivitas, dan kualitas hidup masyarakat miskin. Kondisi ini tidak hanya memperburuk kemiskinan tetapi juga menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, prioritas intervensi dalam bidang ini perlu diarahkan pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar yang inklusif, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur, serta sinergi antara pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan akses yang merata dan berkelanjutan.

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa akses terhadap sanitasi mengalami peningkatan dari 49,71% pada 2019 menjadi 58,52% pada 2021. Meskipun data untuk 2022 dan 2023 belum tersedia, tren ini menunjukkan adanya kemajuan dalam penyediaan layanan sanitasi yang lebih baik, yang sangat penting untuk mengurangi risiko penyakit berbasis lingkungan. Sementara itu, akses terhadap air minum juga menunjukkan peningkatan dari 81,50% pada 2019 menjadi 85,65% pada 2023, meskipun sempat menurun menjadi 80,79% pada 2022. Fluktuasi pada akses air minum dapat mengindikasikan tantangan dalam mempertahankan infrastruktur distribusi yang memadai, terutama di wilayah terpencil atau selama masa krisis seperti pandemi. Akses sanitasi dan air minum yang memadai adalah elemen penting dalam upaya mengentaskan kemiskinan infrastruktur dasar karena berdampak langsung pada kesehatan dan produktivitas masyarakat.

Penerangan listrik menunjukkan tingkat akses yang sangat tinggi, yaitu mencapai 99,88% pada 2019 dan relatif stabil hingga 2022 meskipun mengalami sedikit penurunan pada 2020 (98,38%). Tingginya angka ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam memperluas akses energi listrik ke hampir seluruh populasi. Namun, penting untuk memastikan bahwa



akses ini tidak hanya kuantitatif tetapi juga berkualitas, seperti penyediaan pasokan listrik yang stabil dan terjangkau. Penerangan listrik yang memadai berkontribusi langsung terhadap peningkatan produktivitas rumah tangga dan menciptakan peluang pendidikan serta usaha kecil yang lebih baik, terutama di wilayah pedesaan.

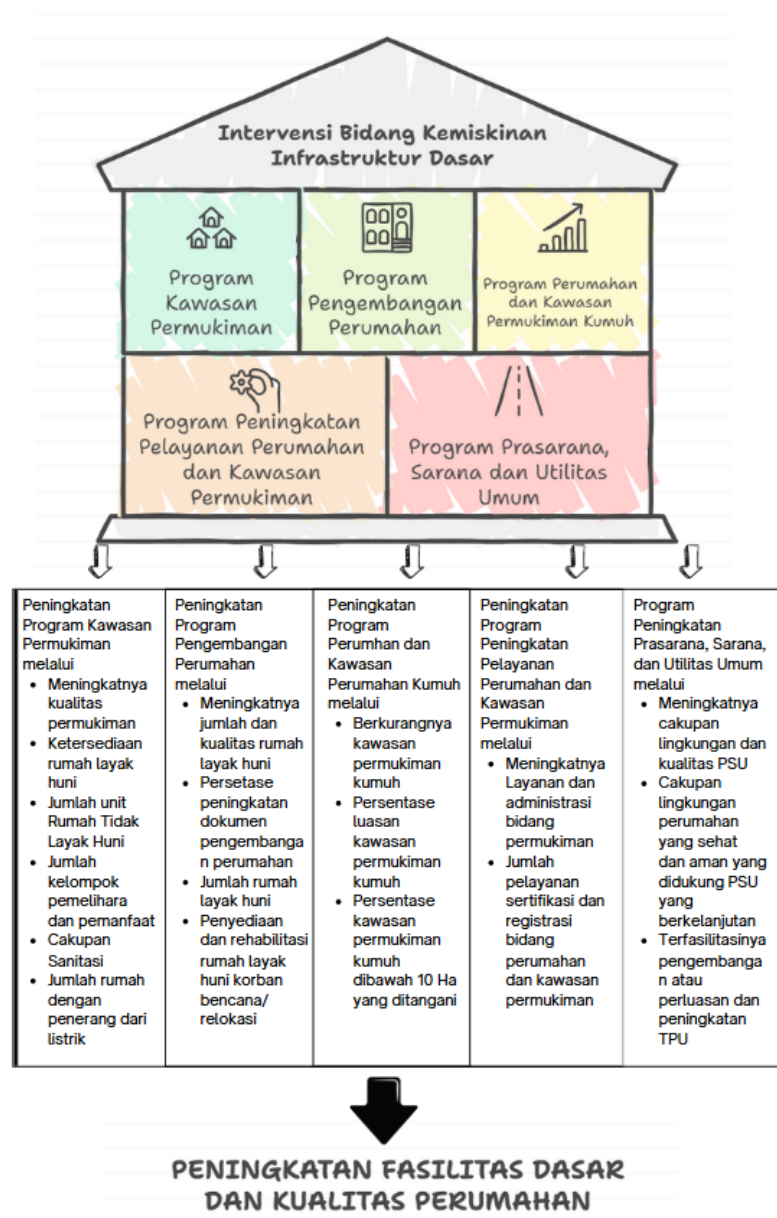
Berbeda dengan tren positif pada sanitasi, air minum, dan listrik, akses terhadap hunian layak menunjukkan pola yang tidak konsisten. Setelah mengalami peningkatan dari 29,53% pada 2019 menjadi 36,57% pada 2022, angka ini menurun kembali menjadi 31,50% pada 2023. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan serius dalam mempertahankan penyediaan perumahan yang memenuhi standar layak huni, seperti akses air bersih, ventilasi yang memadai, dan kondisi struktural yang aman. Situasi ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih terarah, seperti subsidi perumahan bagi masyarakat miskin, peningkatan program renovasi rumah, serta penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pembangunan hunian layak. Penyediaan hunian layak yang konsisten adalah langkah kunci untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Tabel 4.5 Parameter Bidang Kemiskinan Infrastruktur Dasar

Parameter	Tahun					Keterangan
	2019	2020	2021	2022	2023	
Sanitasi	49,71	51,40	58,52	-	-	Kenaikan (+)
Air Minum	81,50	82,73	86,25	80,79	85,65	Kenaikan (+)
Penerang Listrik	99,88	98,38	99,32	99,77	-	Kenaikan (+)
Hunian Layak	29,53	29,73	32,48	36,57	31,50	Penurunan (-)

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka, (data diolah), 2024





Gambar 4.5 Analisis Intervensi Bidang Kemiskinan Infrastruktur Dasar

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Kerangka intervensi bidang kemiskinan infrastruktur dasar pada Gambar 4.5 mencakup lima program utama yang bertujuan untuk meningkatkan fasilitas dasar dan kualitas perumahan. Program kawasan permukiman menekankan pada penyediaan rumah layak huni, cakupan sanitasi, serta pemenuhan kebutuhan listrik dan penerangan. Fokus ini sangat penting untuk memastikan lingkungan hidup yang layak bagi masyarakat, terutama di wilayah yang masih minim infrastruktur dasar. Program ini juga mengidentifikasi pemeliharaan dan pemanfaatan rumah sebagai langkah keberlanjutan. Selain itu, program pengembangan perumahan mencakup peningkatan jumlah dan kualitas rumah layak huni, termasuk



rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi. Hal ini menunjukkan perhatian pada kebutuhan perumahan yang responsif terhadap bencana dan permasalahan sosial.

Program pengentasan kawasan permukiman kumuh menjadi prioritas dengan target pengurangan luas kawasan kumuh melalui rehabilitasi dan peningkatan layanan. Bersamaan dengan itu, program pelayanan perumahan dan kawasan permukiman menitikberatkan pada peningkatan administrasi dan sertifikasi layanan perumahan untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan. Program terakhir, yakni peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum, mendukung perbaikan kualitas lingkungan perumahan yang sehat dan berkelanjutan. Dengan cakupan pembangunan fasilitas publik yang aman dan berfungsi baik, strategi ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga membangun lingkungan yang mendukung kesejahteraan secara holistik. Kombinasi program ini dirancang untuk mempercepat pengurangan kesenjangan infrastruktur dasar dan mendorong pembangunan perumahan yang inklusif serta berkelanjutan.

4.1.6 Prioritas Intervensi Bidang Kemiskinan Ketahanan Pangan

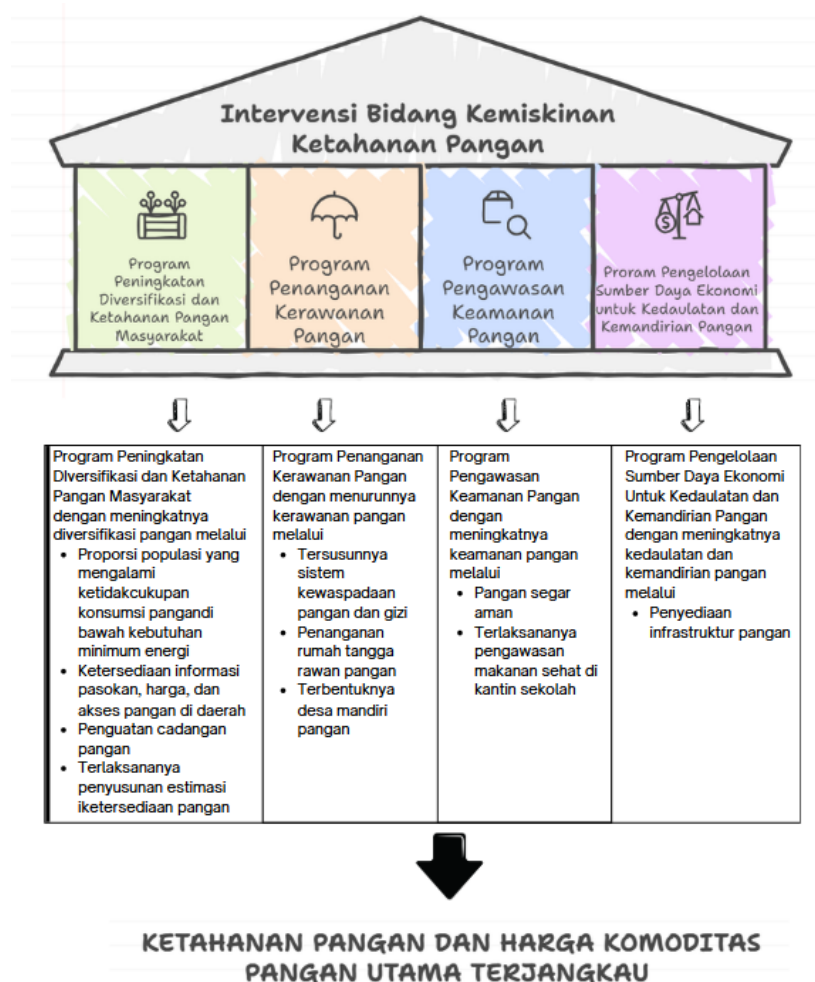
Pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan merupakan prioritas utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Kemiskinan yang berkepanjangan dapat memperburuk ketidakamanan pangan, sementara ketahanan pangan yang lemah memperparah kerentanan rumah tangga miskin terhadap guncangan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, intervensi strategis diperlukan untuk memutus lingkaran kemiskinan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan terjangkau. Pendekatan yang terintegrasi meliputi penguatan sistem produksi pangan lokal, diversifikasi sumber pendapatan, serta peningkatan akses terhadap program bantuan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Gambar 4.6 menjelaskan tentang intervensi di bidang kemiskinan untuk mencapai ketahanan pangan melalui empat pilar utama: Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan, dan Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan. Setiap program memiliki fokus dan tujuan yang saling melengkapi untuk mengatasi masalah pangan di tingkat masyarakat, dengan hasil akhir berupa ketahanan pangan yang kokoh serta harga komoditas pangan utama yang terjangkau. Strategi ini mencakup pengelolaan pasokan, peningkatan kesadaran keamanan pangan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui infrastruktur pangan.

Secara rinci, program-program ini bekerja secara terintegrasi. Seperti Program Peningkatan Diversifikasi Pangan bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan dengan mempromosikan berbagai jenis makanan yang bernilai gizi tinggi. Sementara itu, Program Penanganan Kerawanan Pangan berfokus pada pengurangan risiko kerawanan



pangan melalui pengawasan dan pembentukan desa mandiri pangan. Dalam hal keamanan, pengawasan terhadap pangan segar dan makanan sehat di kantin sekolah menjadi fokus utama untuk memastikan pangan yang dikonsumsi aman. Terakhir, Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi bertujuan menciptakan kemandirian pangan melalui penguatan infrastruktur seperti fasilitas penyimpanan dan distribusi. Sinergi keempat program ini merupakan langkah strategis untuk menjamin stabilitas pangan secara berkelanjutan.



Gambar 4.6 Analisis Intervensi Bidang Kemiskinan Ketahanan Pangan

Sumber : Hasil Analisis, 2024

4.2 ANALISIS KONDISI FISKAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN

4.2.1 Kondisi Umum Fiskal

Berdasarkan Tabel 4.13 APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Cianjur Tahun 2020–2023, terlihat bahwa Pendapatan Daerah mengalami tren peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2020, Pendapatan Daerah tercatat sebesar Rp3,84 triliun dan meningkat hingga Rp4,27 triliun pada tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan adanya



perbaikan dalam kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan, baik dari pajak daerah, retribusi, maupun sumber lainnya. Peningkatan signifikan terutama terlihat pada tahun 2021 ke 2022, dengan pertumbuhan hampir Rp156 miliar. Hal ini dapat mencerminkan kebijakan daerah yang lebih efektif dalam meningkatkan pendapatan, termasuk melalui optimalisasi pengelolaan aset dan kebijakan fiskal.

Sementara itu, Belanja Daerah juga meningkat secara konsisten dari Rp3,91 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,48 triliun pada tahun 2023. Tren peningkatan ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam memperbesar alokasi belanja untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Namun, peningkatan belanja ini juga harus diimbangi dengan efektivitas penggunaan anggaran agar tidak terjadi pemborosan. Lonjakan terbesar terlihat pada tahun 2023, dengan peningkatan belanja sebesar Rp231 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini kemungkinan mencerminkan peningkatan program pembangunan atau penyesuaian akibat inflasi dan kebutuhan mendesak lainnya.

Dari sisi Pembiayaan Daerah, terlihat fluktuasi signifikan. Pada tahun 2020, pembiayaan mencapai Rp254 miliar, kemudian menurun drastis menjadi Rp166 miliar pada 2021, dan kembali naik menjadi Rp260 miliar pada 2023. Angka pembiayaan ini mencerminkan peran pinjaman atau penerimaan pembiayaan lain dalam menutup defisit anggaran. Penurunan tajam pada tahun 2022 yang hanya Rp37,5 miliar mengindikasikan pengelolaan fiskal yang lebih efisien, di mana pendapatan daerah dapat lebih banyak menutupi belanja tanpa memerlukan pembiayaan tambahan besar. Namun, peningkatan kembali pada tahun 2023 perlu dianalisis lebih lanjut apakah karena kebutuhan mendesak atau proyek strategis tertentu.

Tabel 4.6 APBD Kabupaten Cianjur Tahun 2020-2023

APBD	2020	2021	2022	2023
Pendapatan Daerah	3.840.501.662.318	4.055.699.463.229	4.211.169.635.470	4.278.538.821.201
Belanja Daerah	3.907.923.809.123,74	3.901.614.454.481,01	4.248.669.635.470	4.480.308.758.301
Pembiayaan Daerah	254.383.711.457,77	166.961.564.652,69	37.500.000.000	260.279.644.000,00

Sumber : Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

4.2.2 Analisis Kemandirian Fiskal

Berdasarkan **Tabel 4.7** PAD (Pendapatan Asli Daerah) 2021–2023, terlihat adanya tren peningkatan signifikan pada beberapa komponen utama, khususnya pada Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah. Pajak Daerah meningkat dari Rp193,9 miliar pada 2021 menjadi Rp267,2 miliar pada 2023. Ini mencerminkan perbaikan dalam pengelolaan pajak daerah,



termasuk optimalisasi penagihan dan perluasan basis pajak. Peningkatan ini sangat penting bagi daerah karena pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan utama yang stabil.

Retribusi Daerah juga mengalami lonjakan signifikan, terutama dari Rp17,9 miliar pada 2021 menjadi Rp55,1 miliar pada 2023. Hal ini menunjukkan peningkatan dalam pemanfaatan layanan publik yang dikenai retribusi, atau adanya perubahan tarif yang lebih sesuai dengan kebutuhan pendapatan daerah. Namun, kontribusi Retribusi Daerah terhadap total PAD masih relatif kecil dibandingkan komponen lainnya, sehingga masih ada potensi untuk ditingkatkan lebih lanjut melalui pengembangan pelayanan publik yang lebih luas dan efisien.

Komponen Lain-lain PAD yang Sah menunjukkan fluktuasi signifikan, dari Rp570,7 miliar pada 2021 turun menjadi Rp365,2 miliar pada 2022, kemudian melonjak tajam ke Rp743,9 miliar pada 2023. Peningkatan ini kemungkinan besar mencerminkan adanya sumber pendapatan baru atau peningkatan signifikan dari sumber-sumber seperti hibah, pendapatan dari aset daerah, atau pendapatan non-pajak lainnya. Secara keseluruhan, total PAD meningkat dari Rp792,9 miliar pada 2021 menjadi Rp1,09 triliun pada 2023, mencerminkan keberhasilan daerah dalam memperluas basis pendapatan dan meningkatkan kemandirian fiskal. Namun, fluktuasi pada beberapa komponen, terutama pada 2022, menunjukkan perlunya konsistensi dalam perencanaan dan eksekusi anggaran.

Tabel 4.7 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2023

APBD	2021	2022	2023
Pajak Daerah	193.906.627.727,00	236.235.443.330,00	267.248.060.043,00
Retribusi Daerah	17.925.556.338,00	23.163.031.163,00	55.180.180.159,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.321.223.500,00	10.273.583.496,00	25.152.779.924,00
Lain-lain PAD yang sah	570.754.299.352,00	365.295.105.323,29	743.393.491.949,00
Jumlah	792.907.706.917,00	634.967.163.312,29	1.090.974.512.075,00

Sumber : Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

4.2.3 Analisis Kondisi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan

Anggaran dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cianjur Tahun 2023, sebagai bentuk upaya intervensi dalam bentuk program dan kegiatan serta pekerjaan strategis Kabupaten Cianjur Tahun 2023 berdasarkan dari Rencana Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:



Tabel 4.8 Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Cianjur Tahun 2023

No	Penanggulangan Kemiskinan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	203.572.939.688	193.726.044.008	95,16
2	Meningkatkan Pendapatan	7.921.033.130	7.629.129.600	96,31
3	Menurunkan Beban Pengeluaran	600.766.315.252	594.384.124.948	98,94
	Total	812.260.288.070	795.739.298.556	97,97

Sumber: TKPKD Kabupaten Cianjur, 2023

Jumlah anggaran kemiskinan di Kabupaten Cianjur tahun 2023 sebesar Rp 812.260.288.070 yang bersumber baik dari APBD Kabupaten Cianjur maupun bersumber dari APBN. Dari anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp795.739.298.556 atau dengan nilai capaian 97,97 persen. Berdasarkan jumlah realisasi anggaran kemiskinan paling banyak dialokasikan untuk menurunkan beban pengeluaran sebesar Rp 600.766.315.252 dari total anggaran diikuti oleh strategi Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan sebesar Rp 193.726.044.008 dan Meningkatkan Pendapatan dengan Rp7.629.129.600.

Tabel 4.9 Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Cianjur Menurut Program Tahun 2023

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	6.818.370.929	6.818.370.929	100,00
2	Program Hubungan Industrial	1.145.931.600	1.140.396.600	99,52
3	Program Kawasan Permukiman	3.302.699.450	3.246.514.838	98,30
4	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.468.260.100	1.456.162.620	99,18
5	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	347.540.000	347.340.000	99,94
6	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.556.102.000	1.556.102.000	100,00
7	Program Pemberdayaan Sosial	1.871.370.000	1.860.377.200	99,41
8	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	3.001.500.000	2.796.000.000	93,15
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	32.688.100	32.688.100	100,00
10	Program Pembinaan Perpustakaan	142.562.980	142.555.480	99,99
11	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	67.852.000	67.852.000	100,00
12	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	132.727.499.576	132.341.418.670	99,71
13	Program Penanganan Bencana	10.386.650.000	9.298.368.000	89,52



LAPORAN AKHIR*Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029*

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
14	Program Penanganan Kerawanan Pangan	265.362.110	264.082.248	99,52
15	Program Penanggulangan Bencana	2.695.642.450	2.684.955.900	99,60
16	Program Pencatatan Sipil	10.001.000	9.810.000	98,09
17	Program Penempatan Tenaga Kerja	656.152.200	655.642.200	99,92
18	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	26.603.481.709	25.524.945.066	95,95
19	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.900.167.189	8.452.103.285	94,97
20	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	64.429.000	64.190.000	99,63
21	Program Pengelolaan Pendidikan	487.269.234.966	480.648.387.228	98,64
22	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	672.475.750	664.258.350	98,78
23	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	193.000.000	174.487.850	90,41
24	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	10.463.500	10.463.500	100,00
25	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	16.823.983.556	15.803.210.335	93,93
26	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	205.088.000	204.398.700	99,66
27	Program Pengembangan UMKM	126.180.000	126.080.000	99,92
28	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	185.072.500	167.492.000	90,50
29	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	225.480.000	222.989.350	98,90
30	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.141.396.000	1.141.178.420	99,98
31	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	82.666.934.672	77.674.907.687	93,96
32	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	10.063.708.433	9.869.365.850	98,07
33	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.005.200.000	963.266.000	95,83
34	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	631.477.900	626.973.150	99,29
35	Program Penyuluhan Pertanian	802.567.000	780.979.800	97,31
36	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	3.455.735.000	3.347.692.000	96,87
37	Program Perlindungan Perempuan	225.500.000	208.565.000	92,49
38	Program Rehabilitasi Sosial	4.444.489.400	4.301.025.800	96,77
39	Prpgram Pembangunan Kawasan Transmigrasi	48.039.000	43.702.400	90,97
Grand Total		812.260.288.070	795.739.298.556	97,97

Sumber: TKPKD Kabupaten Cianjur, 2023



Berdasarkan program, tiga program dengan nilai realisasi anggaran terbesar adalah Program Pengelolaan Pendidikan dengan Rp480.648.387.228, diikuti oleh Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan Rp132.341.418.670 dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan total Rp77.674.907.687.

Tabel 4.10 Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Cianjur Menurut OPD Penyelenggara Tahun 2023

No	OPD	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Arpusda	142.562.980,00	142.555.480,00	99,99
2	BPBD	2.695.642.450,00	2.684.955.900,00	99,60
3	Dinas kesehatan	132.727.499.576,00	132.341.418.670,00	99,71
4	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	487.269.234.966,00	480.648.387.228,00	98,64
5	Dinas Perhubungan	631.477.900,00	626.973.150,00	99,29
6	Dinas Pertanian	13.216.394.043,00	12.939.454.518,00	97,90
7	Dinas Peternakan	1.542.955.750,00	1.513.044.050,00	98,06
8	Dinas Sosial	20.158.244.400,00	18.807.463.000,00	93,30
9	Disdukcapil	74.430.000,00	74.000.000,00	99,42
10	Diskoperdagin	3.127.680.000,00	2.922.080.000,00	93,43
11	Disnakertrans	3.318.382.900,00	3.295.903.820,00	99,32
12	DPMD	8.374.472.929,00	8.374.472.929,00	100,00
13	DPPKBP3A	684.043.600,00	666.908.600,00	97,50
14	Perkimtan	121.473.283.020,00	114.898.470.876,00	94,59
15	PUTR	16.823.983.556,00	15.803.210.335,00	93,93
Grand Total		812.260.288.070,00	795.739.298.556,00	97,97

Sumber: TKPKD Kabupaten Cianjur, 2023

OPD dengan jumlah anggaran kemiskinan terbesar ditempati oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan Rp480.648.387.228,00 diikuti oleh Dinas Kesehatan dengan Rp132.341.418.670,00 dan Dinas Perkimtan dengan 114.898.470.876,00.

Tabel 4.11 Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Cianjur Menurut Strategi dan OPD Penyelenggara Tahun 2023

Startegi dan OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	203.572.939.688	193.726.044.008	95,16%
Dinas Pendidikan Pemudan dan Olahraga	47.157.974.850	45.109.848.468	95,66%
Dinas Perhubungan	631.477.900	626.973.150	99,29%



LAPORAN AKHIR*Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029*

Startegi dan OPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pertanian	10.063.708.433	9.869.365.850	98,07%
Disnakertrans	48.039.000	43.702.400	90,97%
DPMD	7.374.472.929	7.374.472.929	100,00%
Perkimtan	121.473.283.020	114.898.470.876	94,59%
PUTR	16.823.983.556	15.803.210.335	93,93%
Meningkatkan Pendapatan	7.921.033.130	7.629.129.600	96,31%
Arpusda	142.562.980	142.555.480	99,99%
Dinas Pertanian	553.200.000	511.957.500	92,54%
Dinas Peternakan	1.317.475.750	1.290.054.700	97,92%
Diskoperdagin	3.127.680.000	2.922.080.000	93,43%
Disnakertrans	2.769.650.900	2.752.018.420	99,36%
DPPKBP3A	10.463.500	10.463.500	100,00%
Menurunkan Beban Pengeluaran	600.766.315.252	594.384.124.948	98,94%
BPBD	2.695.642.450	2.684.955.900	99,60%
Dinas kesehatan	132.727.499.576	132.341.418.670	99,71%
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	440.111.260.116	435.538.538.760	98,96%
Dinas Pertanian	2.599.485.610	2.558.131.168	98,41%
Dinas Peternakan	225.480.000	222.989.350	98,90%
Dinas Sosial	20.158.244.400	18.807.463.000	93,30%
Disdukcapil	74.430.000	74.000.000	99,42%
Disnakertrans	500.693.000	500.183.000	99,90%
DPMD	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00%
DPPKBP3A	673.580.100	656.445.100	97,46%
Grand Total	812.260.288.070	795.739.298.556	97,97%

Sumber: TKPKD Kabupaten Cianjur, 2023

Gambar 4.7 menggambarkan Program Pengentasan Kemiskinan dengan tiga pilar utama:

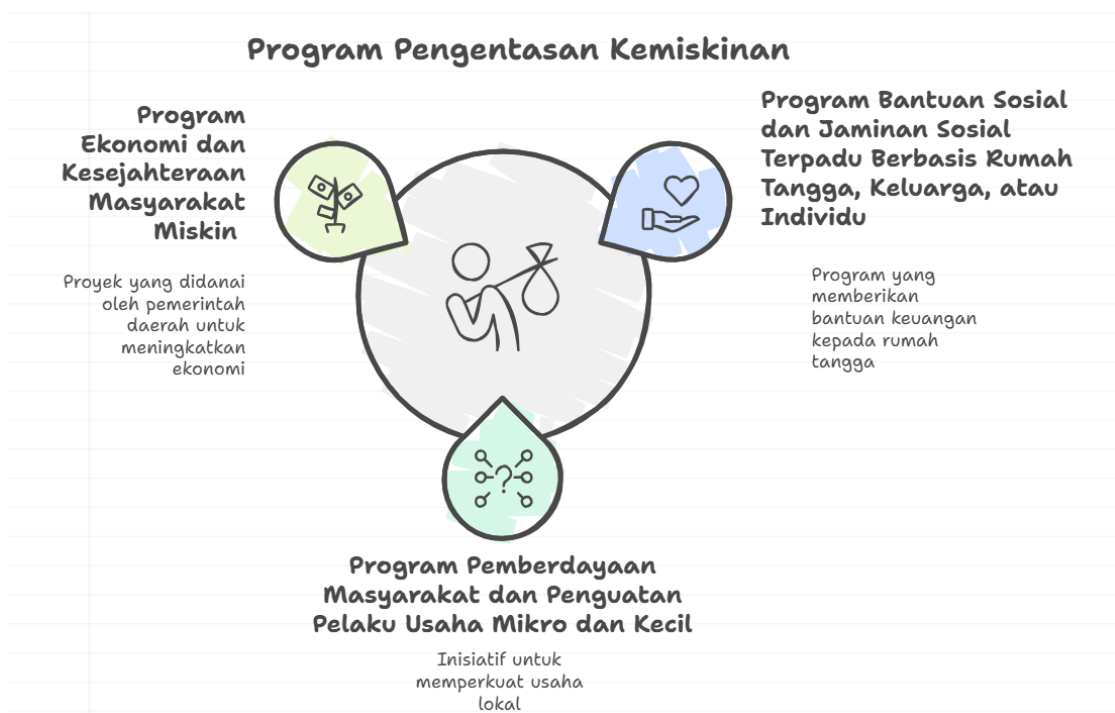
1. Program Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Miskin: Pilar ini berfokus pada proyek-proyek yang didanai pemerintah daerah untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Tujuannya adalah menyediakan akses terhadap kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan membuka peluang kerja atau usaha baru bagi kelompok miskin.
2. Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu: Program ini memberikan bantuan langsung kepada rumah tangga, keluarga, atau individu yang membutuhkan, dalam bentuk keuangan atau perlindungan sosial. Langkah ini bertujuan untuk memberikan



rasa aman sekaligus mengurangi tekanan ekonomi dalam jangka pendek bagi keluarga miskin.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Usaha Mikro dan Kecil: Pilar ini menitikberatkan pada inisiatif untuk memperkuat usaha kecil lokal, baik melalui pelatihan, akses permodalan, maupun pembinaan lainnya. Pendekatan ini dirancang agar masyarakat dapat mandiri secara ekonomi dan tidak bergantung pada bantuan sosial.

Ketiga pilar ini saling melengkapi untuk menciptakan solusi jangka panjang dalam mengatasi kemiskinan, dengan memberikan bantuan langsung sekaligus membangun kapasitas ekonomi masyarakat.



Gambar 4.7 Program Pengentasan Kemiskinan

Sumber : Permendagri No. 53/2020

Tabel 4.12 berikut memperlihatkan distribusi anggaran per kelompok program pengentasan kemiskinan Tahun 2023.



Tabel 4.12 Distribusi Anggaran Per Kelompok Program Pengentasan Kemiskinan Tahun 2023

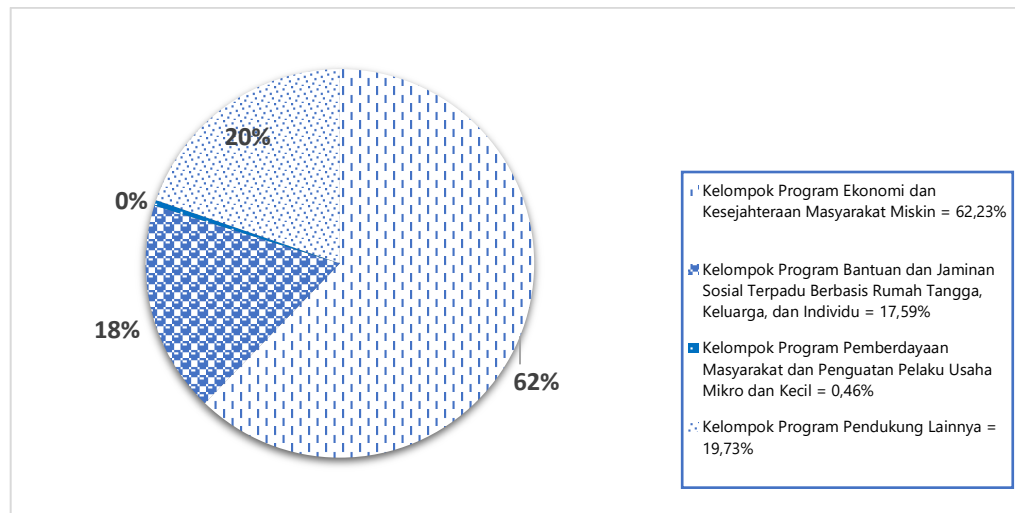
No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Persentase Kelompok Program (%)
1	Kelompok Program Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Miskin				
	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	3.001.500.000	2.796.000.000	93,15	
	2. Program Penanganan Kerawanan Pangan	265.362.110	264.082.248	99,52	
	3. Program Penempatan Tenaga Kerja	656.152.200	655.642.200	99,92	
	4. Program Pengelolaan Pendidikan	487.269.234.966	480.648.387.228	98,64	
	5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	672.475.750	664.258.350	98,78	
	6. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	193.000.000	174.487.850	90,41	
	7. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	185.072.500	167.492.000	90,5	
	8. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	225.480.000	222.989.350	98,9	
	9. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.141.396.000	1.141.178.420	99,98	
	10. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	10.063.708.433	9.869.365.850	98,07	
	11. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.005.200.000	963.266.000	95,83	
	12. Program Penyuluhan Pertanian	802.567.000	780.979.800	97,31	
	Jumlah	505.481.148.959	498.348.129.296	98,59	62,23
2	Kelompok Program Bantuan dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga, dan Individu				
	1. Program Pemberdayaan Sosial	1.871.370.000	1.860.377.200	99,41	
	2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	32.688.100	32.688.100	100	
	3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	132.727.499.576	132.341.418.670	99,71	
	4. Program Pencatatan Sipil	10.001.000	9.810.000	98,09	
	5. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	64.429.000	64.190.000	99,63	
	6. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	10.463.500	10.463.500	100	
	7. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	3.455.735.000	3.347.692.000	96,87	
	8. Program Perlindungan Perempuan	225.500.000	208.565.000	92,49	
	9. Program Rehabilitasi Sosial	4.444.489.400	4.301.025.800	96,77	
	Jumlah	142.842.175.576	142.176.230.270	99,53	17,59



LAPORAN AKHIR*Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029*

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Persentase Kelompok Program (%)
3	Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil				
	1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.468.260.100	1.456.162.620	99,18	
	2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	347.540.000	347.340.000	99,94	
	3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.556.102.000	1.556.102.000	100	
	4. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	205.088.000	204.398.700	99,66	
	5. Program Pengembangan UMKM	126.180.000	126.080.000	99,92	
	Jumlah	3.703.170.100	3.690.083.320	99,65	0,46
4	Kelompok Program Pendukung Lainnya				
	1. Program Administrasi Pemerintahan Desa	6.818.370.929	6.818.370.929	100	
	2. Program Hubungan Industrial	1.145.931.600	1.140.396.600	99,52	
	3. Program Kawasan Permukiman	3.302.699.450	3.246.514.838	98,3	
	4. Program Pembinaan Perpustakaan	142.562.980	142.555.480	99,99	
	5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	67.852.000	67.852.000	100	
	6. Program Penanganan Bencana	10.386.650.000	9.298.368.000	89,52	
	7. Program Penanggulangan Bencana	2.695.642.450	2.684.955.900	99,6	
	8. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	26.603.481.709	25.524.945.066	95,95	
	9. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.900.167.189	8.452.103.285	94,97	
	10. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	16.823.983.556	15.803.210.335	93,93	
	11. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	82.666.934.672	77.674.907.687	93,96	
	12. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	631.477.900	626.973.150	99,29	
	13. Prpgram Pembangunan Kawasan Transmigrasi	48.039.000	43.702.400	90,97	
	Jumlah	160.233.793.435	151.524.855.670	94,56	19,73
	Grand Total	812.260.288.070	795.739.298.556	97,97%	100,00%

Sumber : Hasil Analisis, 2024



Gambar 4.8 Persentase Distribusi Anggaran Per Kelompok Program Pengentasan Kemiskinan Tahun 2023

Sumber : Analisis, 2024

Gambar 4.8 memperlihatkan distribusi alokasi sumber daya atau fokus program dalam Program Pengentasan Kemiskinan. Mayoritas perhatian diberikan pada Kelompok Program Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Miskin, yang mencakup 62,23% dari total alokasi digunakan untuk membantu orang miskin mendapatkan pekerjaan atau menjalankan usaha agar hidup mereka lebih baik.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah atau pihak terkait sangat berfokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui proyek atau inisiatif yang mendukung masyarakat miskin secara langsung. Sementara itu, Kelompok Program Bantuan dan Jaminan Sosial Terpadu mendapat alokasi sebesar 17,59%, yang menunjukkan pentingnya memberikan bantuan langsung untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat seperti uang tunai, kepada keluarga yang sangat membutuhkan.

Namun, Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil hanya memperoleh 0,46% dari total alokasi, yang sangat kecil dibandingkan kelompok lainnya. Hal ini dapat menjadi perhatian, mengingat pemberdayaan usaha mikro dan kecil memiliki potensi besar untuk mendukung kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, Kelompok Program Pendukung Lainnya mencakup 19,73%, yang kemungkinan berisi program-program tambahan yang bersifat melengkapi. Rasio alokasi ini menggambarkan prioritas yang lebih besar pada dampak ekonomi langsung dibandingkan dengan pemberdayaan jangka panjang.



4.3 ANALISIS FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT INTERVENSI

Faktor pendorong yang mendukung intervensi penanganan kemiskinan di berbagai sektor mencakup berbagai program yang telah dirancang untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Dalam bidang kemiskinan konsumsi, bantuan dasar seperti sembako, bantuan pangan non-tunai, dan program pemberdayaan usaha kecil menjadi upaya signifikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Di sektor ketenagakerjaan, program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB) dapat membuka peluang kerja baru. Sedangkan di bidang pendidikan, adanya program subsidi biaya sekolah dan peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat tidak mampu menjadi langkah penting dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Program kesehatan seperti pelayanan rehabilitasi sosial dan jaminan sosial kesehatan juga menjadi pendorong dalam mengatasi kemiskinan kesehatan, terutama dalam menurunkan angka stunting, angka kematian ibu, dan angka kematian bayi. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti jalan lingkungan, fasilitas sanitasi, dan akses air bersih mendukung penanganan kemiskinan infrastruktur. Di bidang ketahanan pangan, program bantuan pangan dan penyediaan fasilitas pendukung pertanian berkontribusi terhadap stabilitas pasokan pangan bagi masyarakat.

Namun, terdapat pula berbagai hambatan yang perlu segera diatasi. Dalam kemiskinan konsumsi, tantangan seperti data penerima bantuan yang tidak valid dan kurangnya monitoring menjadi kendala distribusi bantuan yang tepat sasaran. Di sektor ketenagakerjaan, keterbatasan SDM terampil dan kurangnya kesempatan kerja formal menjadi hambatan dalam mengatasi pengangguran. Sementara itu, di bidang pendidikan, ketidaksinkronan antara kurikulum terstandarisasi dan akses ke fasilitas pendidikan yang merata menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan. Dalam kemiskinan kesehatan, keterbatasan layanan kesehatan yang memadai, terutama di wilayah terpencil, serta dampak pandemi Covid-19, menjadi tantangan besar. Untuk kemiskinan infrastruktur, minimnya anggaran pembangunan di daerah-daerah tertentu memperlambat pengembangan fasilitas dasar. Sedangkan pada ketahanan pangan, ketergantungan masyarakat pada bantuan pangan tanpa solusi jangka panjang seperti pemberdayaan sektor pertanian menghambat keberlanjutan ketahanan pangan. Dengan demikian, intervensi yang lebih terintegrasi dan berbasis data yang valid sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut secara menyeluruh. Lihat tabel berikut.

Tabel 4.13 Faktor Pendorong dan Penghambat

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1. Bidang Kemiskinan Konsumsi	
Terdapat bantuan dasar hidup (sembako rutin) untuk masyarakat miskin dan rentan.	Terbatasnya SDM yang memiliki keahlian khusus secara teknis dalam penanganan PMKS.



LAPORAN AKHIR

Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
- Adanya bantuan dari Dinsos seperti bantuan Covid-19. - Bantuan untuk kelompok usaha bersama/KUB untuk UMKM.	Belum optimalnya upaya pemberdayaan PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.
2. Bidang Ketenagakerjaan	
Pemberdayaan 10.000 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), diarahkan untuk meningkatkan kegiatan UMKM di Kabupaten Cianjur di berbagai sektor ekonomi baik sektor pertanian, pariwisata, perikanan, industri dengan basis potensi lokal yang ada di Kabupaten Cianjur.	- Perlunya upaya/inovasi dalam mengatasi dampak Covid-19 dalam pemulihan kondisi ekonomi dan reformasi sosial yang menyebabkan meningkatnya angka pengangguran. - Belum adanya kesesuaian antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kompetensi pencari kerja.
3. Bidang Kesehatan	
- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Terlaksananya kemitraan asuransi kesehatan masyarakat.	Masih adanya kasus balita <i>stunting</i> karena kurangnya kesadaran orang tua dalam pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, kurangnya pengetahuan ibu dalam pemberian makanan pada bayi dan balita, adanya penyakit infeksi pada balita, masih ada kasus anemia dan KEK pada ibu hamil, dan kondisi sanitasi yang kurang baik.
4. Bidang Pendidikan	
- Program Pengelolaan Pendidikan - Adanya pemberian beasiswa kurang mampu - Terdapat penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs	- Rendahnya motivasi diri anak untuk sekolah yang disebabkan faktor keluarga serta kurang maksimalnya pendataan ATS. - Kurangnya kesadaran Orang Tua untuk menyekolahkan anaknya di jenjang PAUD . - Rendahnya persentase penduduk usia 4-6 tahun yang bersekolah di TK/RA
5. Bidang Infrastruktur Dasar	
- Pembangunan 1.000 KM Jalan Beton - Peningkatan jalan sepanjang 25 km dan pemeliharaan jalan sepanjang 516 km. - Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan di permukiman sepanjang 14 km. - Terdapat bantuan pembangunan irigasi dan penataan kawasan kumuh dari Program KOTAKU. - Terdapat program pavingisasi sebagai resapan air agar tidak terjadi banjir	- Masih rendahnya cakupan ketersediaan rumah layak huni yang sehat, aman dan terjangkau yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran daerah, dan rendahnya kemampuan swadaya masyarakat penerima bantuan. - Belum ada kelurahan yang menerapkan 5 pilar STBM, terkait dengan Cakupan SPAL masih rendah dan Pengelolaan sampah di masyarakat belum optimal.
6. Bidang Ketahanan Pangan	
- Program penyediaan sarana dan prsarana pertanian - Program Pemanfaatan Pekarangan Rumah Untuk Penyediaan Pangan Masyarakat - Program budidaya ternak - Program budidaya perikanan	Jumlah rumah tangga miskin yang masuk dalam daftar penerima beras sejahtera di Kabupaten Cianjur adalah $\pm$ 239.300 jiwa. Di luar jumlah tersebut masih ada rumah tangga lain yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.



Sumber :

- Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025
- Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024
- Data diolah, 2024

4.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

4.2.1 Strategi Dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Nasional

A. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun (RPJMN) 2020-2024 yang dilegal formalkan di Perpres 18/2020. Secara umum, terdapat dua kerangka kebijakan untuk tujuan penanggulangan kemiskinan yakni kerangka kebijakan makro dan kerangka kebijakan mikro. Perbedaan mendasar dari keduanya adalah sasaran dan skala dari strategi yang hendak diimplementasikan. Dalam skala kebijakan makro, pemerintah berperan dalam beberapa hal yakni:

1. Menjaga stabilitas inflasi
2. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
3. Menciptakan lapangan kerja produktif
4. Menjaga iklim investasi dan regulasi perdagangan
5. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian,
6. Mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal.

Sedangkan dalam kerangka mikro, sasaran utamanya ditujukan langsung ke masyarakat. Upaya mengurangi kemiskinan dalam skala mikro dikelompokkan dalam dua strategi utama, yaitu:

1. penyempurnaan kebijakan bantuan sosial yang bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran dan
2. peningkatan pendapatan kelompok miskin dan rentan melalui program ekonomi produktif.

Strategi kedua ini perlu dikembangkan pemerintah dalam upaya menjadikan kelompok miskin dan rentan lebih produktif dan berdaya secara ekonomi sehingga tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah. Selain itu, pemerintah mengupayakan pendanaan bagi inisiatif-inisiatif masyarakat yang terbukti memiliki dampak sosial ekonomi. Dalam



jangka menengah kombinasi dari berbagai skema tersebut diharapkan dapat mendorong kelompok rentan untuk dapat meningkat menjadi kelompok ekonomi menengah.

B. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Dalam skala nasional, salah satu kerangka yang digunakan sebagai justifikasi adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di mana target tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) memuat komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem.

SDGs sendiri menentukan ketercapaian target pada tahun 2030 namun kemudian Presiden menginstruksikan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem dapat dipercepat menjadi tahun 2024, lebih awal dari target SDGs di tahun 2030. Instruksi tersebut dituangkan ke dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2022 dan mengamanatkan kepada 22 (dua puluhdua) Kementerian, 6 (enam) Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kabupaten Cianjur sendiri termasuk ke dalam daerah yang termasuk ke dalam daerah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan Lampiran II Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024.

Agar tercapai target yang diharapkan, terdapat tiga kegiatan kunci, yaitu:

1. Melalui bantuan sosial dan subsidi yaitu kelompok program/kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrem.
2. Melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat miskin ekstrem.
3. Membangun infrastruktur pelayanan dasar dalam rangka penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Dalam level teknis, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama yang kemudian diturunkan ke dalam program-program, yaitu: (i) penurunan beban pengeluaran masyarakat; (ii) peningkatan pendapatan masyarakat; serta (iii) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.



Uraian program untuk setiap strategi sebagai berikut

1. Penurunan beban pengeluaran masyarakat

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial, yaitu:

- a) Bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako.
- b) Bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden, Top Up bansos reguler.
- c) Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.
- d) Bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak, dan penyandang disabilitas.

2. Peningkatan pendapatan masyarakat

Strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui:

- a) Peningkatan akses pekerjaan, melalui program padat karya, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana.
- b) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan.
- c) Peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal, dan akses penggunaan lahan.
- d) Pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan.
- e) Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha ultra mikro dan mikro

3. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui:

- a) Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak.
- b) Peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.



4.2.2 Strategi Dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Jawa Barat

A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 diarahkan untuk mewujudkan visi RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, yaitu **"Dengan Iman Dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju Di Indonesia"**, selain itu juga sebagai awal atau fondasi dari RPJPD Tahun 2025-2045 dengan visi **"Termaju, Berdaya Saing Dunia dan Berkelanjutan"**, dengan semangat tersebut maka diharapkan keberlanjutan visi tersebut dapat terwujud. Adapun tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, yang sekaligus menjadi tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Barat pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1, Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan sasaran:

1. Meningkatnya akses pendidikan masyarakat;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya taraf hidup masyarakat
4. Meningkatnya pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, serta pembangunan pemuda;
5. Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk.

Tujuan 2, Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan;
2. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan dan ketahanan pangan;
3. Meningkatnya pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makanan dan minum;
4. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja

Tujuan 3, Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur;
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur;
3. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman;
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;



5. Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana;
6. Meningkatnya pemerataan pembangunan di wilayah perdesaan

Tujuan 4, Terciptanya Demokrasi dan Birokrasi yang Berkualitas dan Didukung oleh Inovasi Daerah, dengan sasaran:

1. Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi;
2. Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah;
3. Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan

B. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Di Daerah Provinsi Jawa Barat

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2017 disusun untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat melalui pelaksanaan kebijakan yang terkoordinasi dan terintegrasi di tingkat daerah. Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi angka kemiskinan melalui program-program yang berbasis pada data yang valid serta melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Dalam peraturan ini, strategi percepatan penanggulangan kemiskinan mencakup pemberian bantuan sosial, pengembangan akses terhadap layanan dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, serta penguatan koordinasi dan integrasi program antarinstansi.

Selain itu, peraturan ini menekankan pentingnya penguatan tata kelola pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten/kota. Pemerintah daerah diinstruksikan untuk membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan serta program pengentasan kemiskinan. TKPKD juga memiliki tanggung jawab untuk memonitor implementasi program agar berjalan sesuai sasaran, termasuk memastikan sinergi antara program yang dilaksanakan oleh pemerintah, lembaga swasta, dan organisasi masyarakat.

Lebih jauh, peraturan ini memberikan pedoman bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi daerah dalam mengurangi kemiskinan, seperti melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Ditekankan pula bahwa keberhasilan penanggulangan kemiskinan membutuhkan kolaborasi lintas sektor serta penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dapat berjalan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di wilayah tersebut.



Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. terwujudnya perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat;
- b. tercapainya proses percepatan penurunan jumlah penduduk miskin di Daerah Provinsi;
- c. tercapainya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin di Daerah Provinsi;
- d. tercapainya penurunan jumlah pengangguran; dan
- e. terjaminnya konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan masalah kemiskinan.

Strategi yang ditempuh Daerah Provinsi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan adalah :

- b. strategi perlindungan sosial menyeluruh, dilakukan untuk memberi jaminan rasa aman dan perlindungan kepada penduduk miskin yang disebabkan karena dampak negatif krisis ekonomi, dan peningkatan beban pengeluaran masyarakat akibat kebijakan pemerintah, ditujukan pada kelompok
 - kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
 - kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan;
 - kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha kecil; dan
 - kelompok program bersama dunia usaha yaitu melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan serta Tanggung Jawab Sosial Lingkungan.
- c. strategi perluasan dan peningkatan pelayanan dasar, dilakukan untuk mendorong penduduk miskin memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dan peningkatan taraf hidupnya secara berkelanjutan;
- d. strategi pengembangan penghidupan berkelanjutan, dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada penduduk miskin untuk mengembangkan potensi, infrastruktur ekonomi dan kemampuan berusahnya, pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan peran kelembagaan di masyarakat; dan
- e. strategi kemitraan, dilakukan dengan maksud untuk mengembangkan hubungan kerja sama lokal, regional, nasional, dan internasional dalam upaya penanganan dan penanggulangan masalah kemiskinan.



Program Penanggulangan Kemiskinan dibagi berdasarkan strategi penanggulangan kemiskinan yaitu:

- a. Strategi perlindungan sosial menyeluruh, dengan program:
 1. Jaminan ketersediaan pangan;
 2. Jaminan Kesehatan/Jamkesda; dan
 3. Jaminan sosial bagi lanjut usia tidak mampu dan penyandang disabilitas;
- b. Strategi perluasan dan peningkatan pelayanan dasar, dengan program:
 1. Perbaikan rumah/tempat tinggal masyarakat tidak mampu;
 2. Perbaikan gizi masyarakat tidak mampu;
 3. Perbaikan sanitasi lingkungan; dan
 4. Jaminan memperoleh pendidikan bagi masyarakat tidak mampu.
- c. Strategi pengembangan penghidupan berkelanjutan, dengan program:
 1. Pemberdayaan ekonomi perempuan;
 2. Pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja;
 3. Pelatihan wirausaha bagi kelompok masyarakat; dan
 4. Pemberdayaan kelompok tani, peternak, dan nelayan.
- d. Strategi kemitraan, dengan program pengembangan kerja sama dengan dunia usaha melalui optimalisasi pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan.

4.2.3 Strategi Dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Cianjur

A. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Bantuan Sosial Dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Cianjur

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 32 Tahun 2023 mengatur tentang tata cara pemberian bantuan sosial sebagai bagian dari percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Cianjur. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan sosial yang tepat sasaran kepada kelompok rentan dan miskin. Bantuan sosial ini mencakup bantuan langsung tunai, bantuan pangan, serta bantuan lainnya yang relevan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin ekstrem. Peraturan ini juga menetapkan kriteria penerima bantuan, mekanisme penyaluran, dan pengawasan agar pelaksanaannya berjalan transparan dan akuntabel.



Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah, peraturan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk perangkat daerah, desa, dan instansi terkait dalam pelaksanaannya. Pemerintah Kabupaten Cianjur mengintegrasikan program ini dengan kebijakan nasional untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem. Peraturan ini juga mendorong sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam memberikan kontribusi terhadap upaya penghapusan kemiskinan. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan terjadi pengurangan signifikan jumlah penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Cianjur, sejalan dengan target nasional.

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pemberian, validasi dan pelaporan kemiskinan ekstrem daerah, meliputi: (1) Pemerintah Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Cianjur. (2) Belanja Wajib Perlindungan Sosial akan diberikan kepada penerima manfaat yaitu Bantuan Sosial pada lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Cianjur yang selanjutnya disebut belanja bantuan sosial miskin ekstrem adalah bantuan sosial berupa uang barang atau jasa kepada seseorang atau keluarga yang diberikan kepada masyarakat desa diwilayah berdasarkan data sading Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Cianjur.

B. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 84 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022-2026

Kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Cianjur pada dasarnya sinergi dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Ada tiga kebijakan dasar adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan menurunkan kantong-kantong kemiskinan. Strategi ini dapat berjalan bila didukung oleh 3 pilar utama yaitu:

1. Komitmen pemerintah,
2. Keterpaduan program, anggaran dan sasaran; dan
3. pemantauan dan evaluasi.

Strategi dilakukan dengan cara

1. pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
3. pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil, dan
4. sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.



Pemerintah harus berkomitmen untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dengan menggulirkan program dan kegiatan yang berfokus pada penanggulangan kemiskinan serta melalui penetapan regulasi yang mengikat. Komitmen itu kemudian harus diikuti dengan langkah nyata berupa alokasi APBD yang pro poor, dukungan program, inovasi daerah, penguatan kapasitas kelembagaan dan penguatan kemitraan. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki menuntut pemda untuk berkolaborasi dengan pihak lain seperti lembaga masyarakat, filantropi bisnis dan entitas lain. Selanjutnya TKPKD harus berperan pada proses monitoring dan evaluasi pencapaian target-target indikator kemiskinan sekaligus melakukan pengendalian secara berkala.

Berdasarkan Permendagri 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelerasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, program penanggulangan kemiskinan dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu;
2. Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil;
3. Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

C. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Cianjur Tahun 2025

Perwujudan visi dan misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 sangat ditentukan oleh penjabaran ke tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, merupakan tahun keempat pelaksanaan dari Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Cianjur tahun 2021-2026 adalah **"CIANJUR MANJUR BERAKHLAK MULIA"**.

Tema atau fokus pembangunan Kabupaten Cianjur Tahun 2025 adalah **"Pemantapan Daya Saing Daerah Menuju Cianjur Mandiri, Maju, Religius dan Berakhlak Mulia"**. Tema



tersebut memiliki makna bahwa pemantapan daya saing daerah diarahkan untuk mewujudkan Cianjur MANJUR dan berakhlak mulia dengan fokus pembangunan pada

1. peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta peningkatan dukungan kehidupan beragama;
2. penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
3. peningkatan ekonomi melalui penguatan sektor pertanian, perkebunan, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;
4. peningkatan infrastruktur wilayah;
5. peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana; dan
6. peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur serta penataan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan ke-II, kebijakan ekonomi daerah dan kapasitas fiskal anggaran, serta isu strategis Kabupaten Cianjur Tahun 2025, maka prioritas pembangunan daerah tahun 2025 akan difokuskan pada percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, meliputi:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan (PPD1);
2. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan (PPD2);
3. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial (PPD3);
4. Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, perikanan dan peternakan (PPD4);
5. Penguatan UMKM dan koperasi (PPD5);
6. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal (PPD6);
7. Peningkatan kualitas kehidupan sosial keagamaan masyarakat (PPD7);
8. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur (PPD8);
9. Pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup (PPD9);
10. Peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik (PPD10).

Secara umum prioritas pembangunan daerah Kabupaten Cianjur seluruhnya relevan dengan upaya penanggulangan kemiskinan, namun yang secara langsung ada pada prioritas daerah no 1,2,3,4, 5 dan 8. Selain itu, berikut ini disajikan program-program unggulan atau program MANJUR yang merupakan janji-janji politik Kepala dan wakil kepala daerah yang relevan dengan penanggulangan kemiskinan:



1. KM Jalan Beton
2. Pemberdayaan 10.000 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
3. Peningkatan Produktivitas 1.000 Hektar Lahan Pertanian
4. Pemberdayaan 1.000 Pesantren /Kobong
5. "CIANJUR CAANG" 1.000 Kampung

D. Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025

Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan kemiskinan Kabupaten Cianjur pada tahun 2025, selain mengacu kepada strategi yang termuat dalam RPKD Kabupaten Cianjur 2022-2026 dan memperhatikan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Barat, juga memperhatikan kebijakan/instruksi dari pemerintah pusat.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan nasional, Presiden RI menyelenggarakan Rapat Terbatas strategi percepatan pengentasan kemiskinan pada tanggal 4 Maret 2021 dilanjutkan pada tanggal 21 Juli 2021 dan menghasilkan arahan antara lain:

1. Strategi percepatan pengentasan kemiskinan yang dilakukan adalah upaya konvergensi penanggulangan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen di akhir periode RPJMN pada tahun 2025 agar dapat mencapai 0 persen dilakukan validasi data identitas penduduk sangat miskin, dimana validasi data mencakup nama dan lokasi.
2. Strategi pengentasan kemiskinan harus terkonsolidasi, terintegrasi dan tepat sasaran dimana Kementerian Sosial dan pihak terkait berkoordinasi mengelola dan memutakhirkan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
3. Walaupun menghadapi pandemi, upaya penanganan kemiskinan ekstrem tidak boleh berhenti dengan melaksanakannya secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi.
4. Memastikan intervensi di sektor Pendidikan, Kesehatan, dan air bersih dapat diterima.
5. Pertajam basis data untuk ketepatan target dan upaya percepatan.
6. Melibatkan sektor swasta untuk berperan sebagai off taker produk kelompok miskin ekstrem sehingga dapat meningkatkan pendapatan.



4.2.4 Program Penanggulangan Kemiskinan

Analisis data dalam tabel program, anggaran, dan OPD penanggung jawab menunjukkan adanya perhatian yang signifikan terhadap upaya penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan multisektor. Program-program seperti peningkatan kualitas pendidikan, akses kesehatan, pemberdayaan UMKM, dan penguatan infrastruktur memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di berbagai dimensi. Alokasi anggaran yang tercantum memberikan gambaran prioritas pemerintah daerah terhadap setiap program, dengan penugasan OPD yang spesifik memastikan tanggung jawab pelaksanaan berada di tangan instansi yang relevan.

Namun, data ini juga mengindikasikan adanya tantangan yang perlu diatasi. Beberapa program mungkin memiliki alokasi anggaran yang terbatas dibandingkan dengan skala masalah yang ingin diselesaikan. Sebagai contoh, program-program infrastruktur atau pemberdayaan ekonomi sering membutuhkan investasi besar, tetapi jika anggaran yang disediakan tidak memadai, efektivitas pelaksanaannya dapat terganggu. Selain itu, peran OPD dalam implementasi harus didukung oleh kapasitas yang memadai baik dalam aspek sumber daya manusia maupun teknis. Tanpa hal tersebut, program yang dirancang dengan baik berisiko tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Ke depan, langkah strategis yang dapat diambil adalah meningkatkan kolaborasi antar-OPD dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada. Perlu adanya monitoring dan evaluasi yang terintegrasi agar implementasi program dapat berjalan efektif dan efisien. Selain itu, penting untuk fokus pada program yang memiliki dampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan, seperti pemberdayaan kelompok rentan dan peningkatan akses ke layanan dasar. Dengan demikian, keberlanjutan program dapat terjamin dan hasilnya dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4.15 memperlihatkan program pendukung penurunan kemiskinan tahun 2025. Tabel 4.22 memperlihatkan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Paket Pekerjaan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025. Tabel 4.23 menjabarkan Pekerjaan Strategis Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi Dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025.

Tabel 4.14 Program Pendukung Penurunan Kemiskinan Tahun 2025

Program	Anggaran	OPD Penanggungjawab
Program Pengelolaan Pendidikan	183,507,423,471	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	229,556,125,680	Dinas Kesehatan



LAPORAN AKHIR*Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029*

Program	Anggaran	OPD Penanggungjawab
Program Penanggulangan Bencana	8,037,615,510	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Rehabilitasi Sosial	4,994,507,640	Dinas Sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	5,918,960,320	Dinas Sosial
Program Penanganan Bencana	1,432,530,320	Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Sosial	2,106,490,400	Dinas Sosial
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1,756,115,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	35,252,288,250	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2,828,863,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1,874,430,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pencatatan Sipil	414,988,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1,968,967,950	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1,302,000,000	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	8,735,834,440	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1,550,000,000	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3,245,800,000	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1,331,000,000	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	1,289,522,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	17,509,625,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	493,057,000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Program Penyuluhan Pertanian	2,792,435,750	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan



LAPORAN AKHIR*Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029*

Program	Anggaran	OPD Penanggungjawab
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	3,302,214,500	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	11,019,311,250	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	6,450,715,920	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1,870,000,000	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi
Program Hubungan Industrial	639,042,000	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi
Program Penempatan Tenaga Kerja	3,450,837,530	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	200,317,800	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi
Program Pembinaan Perpustakaan	932,447,000	Dinas Arsip dan Perpustakaan
Program Kawasan Permukiman	8,233,576,430	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	56,452,120,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	49,423,450,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	238,157,392,139	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	109,233,074,437	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	48,026,216,320	Dinas Perhubungan
Program Administrasi Pemerintahan Desa	8,318,835,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1,664,744,500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sumber : Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025, Bapperida.

**Tabel 4.15 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Paket Pekerjaan
Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025**

URAIAN ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH BELANJA (Rp)
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	82,254,824,721
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	82,254,824,721
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	37,471,000,000
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5,200,000,000
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0
Pembangunan Ruang Kelas Baru	12,175,000,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	20,096,000,000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	39,894,554,721
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	11,891,865,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	15,036,000,000
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	0
Pembangunan Ruang Kelas Baru	12,966,689,721
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	0
Pengelolaan Dana BOP PAUD	0
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4,889,270,000
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	0
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	4,889,270,000
DINAS KESEHATAN	170,515,574,600
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	170,515,574,600
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	106,130,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	106,130,000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	170,409,444,600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	276,878,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	492,140,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	36,595,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	118,480,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	116,585,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	160,400,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	196,278,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	117,470,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	102,085,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	142,830,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	77,645,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	301,350,000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	880,515,000
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	167,390,193,600
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	45,340,986,700
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	45,340,986,700



LAPORAN AKHIR*Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029*

URAIAN ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH BELANJA (Rp)
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,869,161,250
Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	1,869,161,250
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	43,471,825,450
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	19,670,000,000
Rehabilitasi Bendung Irigasi	22,799,938,750
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1,001,886,700
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	112,348,111,080
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	17,790,000,000
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	17,790,000,000
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	17,790,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	37,575,000,000
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	37,575,000,000
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	16,312,500,000
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	21,262,500,000
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	5,146,101,360
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	5,146,101,360
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	5,146,101,360
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	51,837,009,720
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	51,837,009,720
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	51,837,009,720
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2,751,595,200
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2,751,595,200
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	601,595,200
Penyusunan Rencana Kontijensi	351,595,200
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	250,000,000
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2,150,000,000
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1,650,000,000
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	500,000,000
DINAS SOSIAL	13,992,331,500
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1,654,340,400
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1,654,340,400



LAPORAN AKHIR*Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029*

URAIAN ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH BELANJA (Rp)
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1,110,840,400
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	543,500,000
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4,574,730,140
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	4,330,951,860
Penyediaan Permakanan	267,782,500
Penyediaan Alat Bantu	3,361,620,000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	701,549,360
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	243,778,280
Penyediaan Permakanan	46,650,000
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	197,128,280
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	6,793,140,640
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5,823,020,320
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	5,823,020,320
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	970,120,320
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	970,120,320
Penyediaan Makanan	970,120,320
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2,882,635,800
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1,795,000,000
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1,695,000,000
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1,695,000,000
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100,000,000
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100,000,000
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	790,318,000
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	131,500,000
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	131,500,000
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	153,827,000
Job Fair/Bursa Kerja	153,827,000
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	504,991,000
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	504,991,000
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	137,000,000
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	137,000,000
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	137,000,000
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	160,317,800
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	160,317,800
Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	160,317,800



LAPORAN AKHIR*Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029*

URAIAN ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH BELANJA (Rp)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2,401,973,000
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	38,044,000
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	38,044,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	38,044,000
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1,207,531,000
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1,207,531,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1,207,531,000
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	0
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	0
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1,156,398,000
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1,156,398,000
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	1,156,398,000
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	115,376,000
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	39,988,000
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	39,988,000
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	39,988,000
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	75,388,000
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	75,388,000
Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	75,388,000
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8,830,727,000
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	7,755,727,000
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	7,755,727,000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	7,281,927,000
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	473,800,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1,075,000,000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,075,000,000



LAPORAN AKHIR*Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029*

URAIAN ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH BELANJA (Rp)
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	100,000,000
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	975,000,000
DINAS PERHUBUNGAN	650,000,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	650,000,000
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	650,000,000
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	650,000,000
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	5,036,430,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	5,036,430,000
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	5,036,430,000
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	3,003,000,000
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	2,033,430,000
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	270,000,000
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	270,000,000
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	270,000,000
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	270,000,000
DINAS PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN	12,700,634,440
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	600,000,000
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	600,000,000
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	600,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1,964,800,000
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	1,164,800,000
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	1,164,800,000
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	800,000,000
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	800,000,000
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	400,000,000
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	400,000,000
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	400,000,000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	8,735,834,440



LAPORAN AKHIR*Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029*

URAIAN ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH BELANJA (Rp)
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	8,735,834,440
Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	650,000,000
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	8,085,834,440
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1,000,000,000
Pembangunan Prasarana Pertanian	1,000,000,000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1,000,000,000
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	11,303,116,500
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3,018,487,750
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1,157,000,000
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1,157,000,000
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1,861,487,750
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1,861,487,750
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	89,719,000
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	89,719,000
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	89,719,000
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	283,824,000
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	283,824,000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2,621,285,000
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2,621,285,000
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2,621,285,000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3,562,062,000
Pembangunan Prasarana Pertanian	3,562,062,000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3,562,062,000
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	402,762,000
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	402,762,000
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	402,762,000
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1,608,800,750
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1,608,800,750
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1,608,800,750
Jumlah Total	471,394,316,541

Sumber : Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025, Bapperida.



Tabel 4.16 Pekerjaan Strategis Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi Dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025

No.	Rincian Pekerjaan	Anggaran (Rp)	OPD
KEMISKINAN			
1	Pendidikan dan Pelatihan hard Skill melalui Kegiatan Pijar Permata (Keahlian Tata boga (memasak dan membuat kue, Menjahit, Potong rambut dan pengelolaan sampah) untuk 250 orang perempuan di 3 Kecamatan	620,906,000	DPPKB3A
2	Pengadaan alat UUPKA untuk ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan meningkatkan keluarga acceptor fokus keluarga miskin	400,000,000	DPPKB3A
3	Bantuan Sosial berupa uang untuk modal usaha bagi masyarakat miskin ekstrem	2,100,000,000	DINSOS
4	verifikasi dan validasi data calon penerima manfaat bansos 2025	100,000,000	DINSOS
5	Monitoring penyaluran bantuan sosial	100,000,000	DINSOS
6	Bantuan Sosial berupa Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas kategori miskin ekstrem	150,000,000	DINSOS
7	Bantuan Sosial bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	100,000,000	DINSOS
8	Pemberian Bantuan Alat Bantu Kursi Roda bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	900,000,000	DINSOS
9	Validasi Fasilitasi NIB untuk Bantuan Sosial Kemiskinan Ekstrem	200,000,000	DINSOS
10	Penyaluran alat bantu bagi penyandang disabilitas kategori keluarga miskin	50,000,000	DINSOS
11	Beasiswa bagi siswa pada keluarga miskin ekstrem yang mempunyai anak usia sekolah tingkat SD	450,000,000.00	DISDIKPORA
12	Beasiswa bagi siswa pada keluarga miskin ekstrem yang mempunyai anak usia sekolah tingkat SMP	385,500,000.00	DISDIKPORA
13	Konvensasi/Transport Peserta didik umur 25 tahun ke atas Pendidikan kesetaraan	5,156,250,000.00	DISDIKPORA
14	Alat pembelajaran bagi siswa Pendidikan kesetaraan	687,500,000.00	DISDIKPORA
15	Honor tutor pendidikan Kesetaraan	5,197,500,000.00	DISDIKPORA
16	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	1,400,000,000	DISPERKIM
17	Pembangunan SPAM dan Sumur Bor	600,000,000	DISPERKIM
18	Pembangunan MCK	350,000,000	DISPERKIM
19	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal Tangki Septik Komunal dan IPAL Komunal	1,250,000,000	DISPERKIM
20	Pembangunan MCK Individu	3,750,000,000	DISPERKIM
21	Pemberian bantuan benih ikan untuk di ternakan di kolam kelompok dalam rangka meningkatkan pendapatan untuk kelompok ternak dan masyarakat kurang mampu	400,000,000	DPKHP
22	Bantuan penebaran benih ikan untuk di ternakan di kolam kelompok dalam rangka meningkatkan pendapatan untuk kelompok ternak dan masyarakat sekitar	50,000,000	DPKHP



LAPORAN AKHIR

Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029

No.	Rincian Pekerjaan	Anggaran (Rp)	OPD
23	Pemberian bibit domba kepada kelompok tani baru yang masuk kriteria penduduk miskin	700,000,000	DPKHP
24	Pengadaan pakan ternak hijauan serta konsentrat ruminansia untuk kelompok ternak dalam rangka mengantisipasi kematian ternak	5,000,000	DPKHP
25	Subsidi kebutuhan pangan bagi keluarga kurang mampu melalui kegiatan operasi pasar murah	500,000,000	DISKOPERDAGIN
26	Monitoring, evaluasi, pembinaan serta penyusunan laporan triwulanan penggunaan BLT-DD untuk masyarakat miskin di setiap desa	100,000,000	DPMD
27	Bantuan (domba dan kandangnya) bagi masyarakat kurang mampu di daerah krisis pangan (bencana rawan pangan)	22 orang petani miskin ekstrem	DTPHPKP
28	Gerakan Pangan Murah bagi masyarakat	181,000,000	DTPHPKP
29	Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja melalui perbengkelan, menjahit, barista dan lainnya	715,000,000	DISNAKERTRANS
30	Fasilitasi penyandang disabilitas pencari kerja untuk bekerja di sektor formal	155,490,200	DISNAKERTRANS

Sumber : Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025, Bapperida.

Tabel 4.17 membagi strategi pengentasan kemiskinan menjadi empat fokus utama: **pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil, dan sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.** Strategi pertama melibatkan kebijakan seperti bantuan sosial, jaminan sosial terpadu, dan pemberdayaan individu serta keluarga miskin. Sementara itu, strategi kedua lebih fokus pada pengembangan kapasitas masyarakat melalui pelatihan kerja, pengelolaan sumber daya lokal, dan penguatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pendekatan ini menunjukkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana kemiskinan tidak hanya terkait dengan kekurangan pendapatan tetapi juga beban pengeluaran.

Program-program dalam tabel mencakup berbagai inisiatif, mulai dari bantuan langsung seperti jaminan kesehatan, penyediaan akses pendidikan, hingga program berbasis pemberdayaan seperti pengembangan keterampilan dan pendampingan usaha kecil. Contohnya, program pemberdayaan sosial dan jaminan kesehatan diarahkan untuk mengurangi beban pengeluaran, sedangkan pelatihan kerja dan pengembangan UMKM bertujuan meningkatkan penghasilan masyarakat miskin. Dengan sumber dana yang berasal dari APBD, CSR, dan partisipasi masyarakat, program ini menunjukkan kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat.



Tabel 4.17 Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029

Strategi	Kebijakan	Program	Sumber Dana
Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	- Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga, atau Individu - Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil - Program Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Miskin	- Program Pemberdayaan Sosial - Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Pencatatan Sipil - Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial - Program Perlindungan Perempuan - Program Rehabilitasi Sosial	APBD, CSR, Masyarakat
Peningkatan Kemampuan dan Pendapatan Masyarakat Miskin	- Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga, atau Individu - Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil - Program Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Miskin	- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat - Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan - Program Pengembangan UMKM	APBD, CSR, Masyarakat
Pengembangan dan Menjamin Keberlanjutan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil	- Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga, atau Individu - Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil - Program Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Miskin	- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) - Program Penanganan Kerawanan Pangan - Program Penempatan Tenaga Kerja - Program Pengelolaan Pendidikan - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap - Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan - Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	APBD, CSR, Masyarakat



Strategi	Kebijakan	Program	Sumber Dana
		- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyuluhan Pertanian	
Sinergitas Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan	- Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga, atau Individu - Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil - Program Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Miskin	- Program Administrasi Pemerintahan Desa - Program Hubungan Industrial - Program Kawasan Permukiman - Program Pembinaan Perpustakaan - Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) - Program Penanganan Bencana - Program Penanggulangan Bencana - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) - Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	APBD, CSR, Masyarakat

Sumber :

- Hasil Analisis, 2024
- Program mengacu pada Permendagri No 050-5889 Tahun 2021

4.2.5 Target Penurunan Angka Kemiskinan

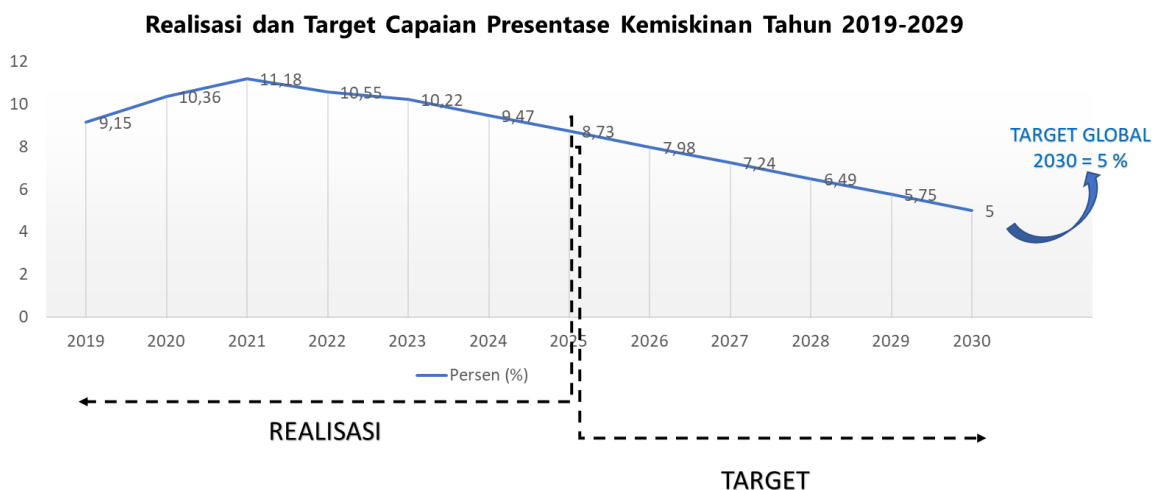
Gambar 4.9 menunjukkan realisasi dan target capaian persentase kemiskinan di Indonesia untuk periode 2019-2029. Pada 2019, tingkat kemiskinan berada di angka 9,15%. Angka ini mengalami kenaikan signifikan hingga mencapai puncaknya pada 2021 di angka 11,18%. Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang mulai terasa sejak 2020, sehingga mengganggu stabilitas ekonomi nasional, terutama bagi masyarakat rentan. Pada 2022, persentase kemiskinan mulai menurun menjadi 10,55%, mengindikasikan adanya pemulihan ekonomi secara bertahap.

Selanjutnya, proyeksi dan target yang ditetapkan menunjukkan tren penurunan yang konsisten mulai dari 2023 (10,22%) hingga 2029 (5,75%). Upaya ini menggambarkan langkah-langkah strategis pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan dengan memanfaatkan berbagai kebijakan sosial-ekonomi. Fokus program-program ini kemungkinan melibatkan peningkatan akses pekerjaan, pengentasan kemiskinan ekstrem,



dan bantuan sosial yang lebih terarah. Pada 2025, target tingkat kemiskinan adalah 8,73%, yang menjadi titik tengah dari rencana jangka panjang tersebut.

Namun, tantangan yang signifikan tetap ada untuk mencapai target global sebesar 5% pada 2030, sebagaimana ditunjukkan oleh grafik. Pencapaian target ini membutuhkan kerja sama berbagai pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat sipil. Faktor eksternal seperti stabilitas ekonomi global, ketahanan pangan, dan perubahan iklim juga perlu diperhatikan agar program pengentasan kemiskinan dapat berjalan sesuai harapan. Pencapaian target ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan Cianjur dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 4.9 Realisasi dan Target Capaian Presentase Kemiskinan Tahun 2019-2029

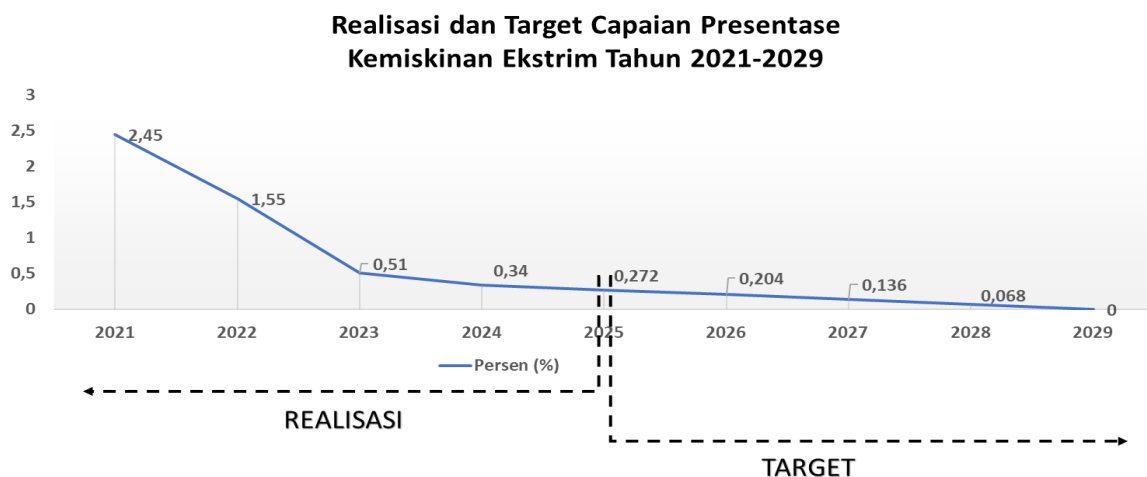
Sumber : Analisis, 2024

Gambar 4.10 memperlihatkan Tren Penurunan Kemiskinan Ekstrem (2021-2025). Pada periode 2021 hingga 2025, terdapat tren penurunan signifikan dalam persentase kemiskinan ekstrem di Indonesia. Dimulai dari 2,45% pada tahun 2021, angka ini menurun tajam menjadi 1,55% pada 2022 dan terus menurun hingga 0,51% di tahun 2023. Target yang direncanakan untuk 2025 adalah mencapai angka 0,272%. Penurunan ini menunjukkan adanya upaya serius pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui berbagai program sosial, bantuan langsung, dan pemberdayaan masyarakat.

Target Zero Kemiskinan Ekstrem (2029), setelah 2025, tren penurunan terus diarahkan untuk mencapai "nol persen" kemiskinan ekstrem pada tahun 2029. Target antara yang terlihat adalah 0,204% pada 2026, 0,136% pada 2027, dan 0,068% pada 2028. Upaya ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya target untuk menghapus kemiskinan dalam segala bentuknya. Namun, penurunan angka yang semakin kecil menjelang nol menunjukkan tantangan yang lebih besar dalam menangani kelompok paling rentan yang mungkin memerlukan intervensi lebih terfokus.



Tantangan dan Evaluasi Keberlanjutan, walaupun target yang ambisius ini memberikan gambaran positif, keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, efektivitas program pemerintah, dan kondisi ekonomi nasional maupun global. Faktor seperti inflasi, perubahan iklim, dan ketimpangan sosial bisa menjadi kendala signifikan. Penting juga bagi pemerintah untuk terus memonitor dan mengevaluasi implementasi program pengentasan kemiskinan agar bantuan sampai kepada kelompok sasaran secara tepat waktu dan efisien.



**Gambar 4.10 Realisasi dan Target Capaian Presentase
Kemiskinan Ekstrem Tahun 2019-2029**

Sumber : Analisis, 2024

Tabel 4.18 menggambarkan upaya strategis dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) terkait pengentasan kemiskinan di Indonesia, khususnya pada **Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun**. Dengan mencantumkan target, indikator, realisasi, dan proyeksi hingga tahun 2029, dokumen ini menjadi panduan penting untuk mengukur efektivitas program pengentasan kemiskinan yang mencakup perlindungan sosial, penyediaan layanan dasar, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data ini juga menyoroti progres dan tantangan dalam memastikan bahwa upaya pengurangan kemiskinan ekstrem berjalan secara terukur dan berkelanjutan.

Setiap indikator diberi nomor seperti 1.2.1*, 1.3.1(a), hingga 1.4.1(d). Indikator ini mencakup dimensi yang beragam, seperti cakupan perlindungan sosial, tingkat kemiskinan ekstrem, serta tingkat penyediaan layanan dan fasilitas dasar yang mendukung pengurangan kemiskinan. Target yang ditetapkan hingga tahun 2029 mengindikasikan pendekatan bertahap dalam pencapaian indikator-indikator tersebut.



Realisasi dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan hasil yang bervariasi tergantung pada indikatornya. Indikator 1.3.1(a) menunjukkan tren peningkatan cakupan perlindungan sosial dari 89,28% pada 2025 menjadi 93,86% pada 2029. Ini mencerminkan usaha yang konsisten dalam memperluas jangkauan program sosial untuk kelompok rentan. Di sisi lain, beberapa indikator mungkin stagnan atau belum menunjukkan data realisasi, menandakan perlunya evaluasi lebih lanjut atas implementasi kebijakan.

Proyeksi target hingga 2029 memberikan gambaran optimis tentang keberlanjutan upaya pengentasan kemiskinan. Indikator 1.4.1(a) mematok target 70% secara konsisten untuk beberapa tahun. Konsistensi ini mengindikasikan bahwa fokus pemerintah adalah menjaga standar layanan minimum untuk kesejahteraan dasar. Target yang menunjukkan peningkatan bertahap, seperti 1.4.1(d) yang naik dari 91,70% pada 2025 menjadi 98,34% pada 2029, menggambarkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat.

Walaupun target dan progres terlihat positif, beberapa tantangan masih perlu diperhatikan. Ketersediaan data yang tidak lengkap pada beberapa indikator dapat menghambat evaluasi menyeluruh. Selain itu, pelaksanaan di lapangan membutuhkan koordinasi lintas sektor yang kuat, khususnya dari OPD pelaksana yang disebutkan dalam tabel tersebut. Pemerintah perlu memastikan alokasi sumber daya yang memadai, pengawasan yang ketat, serta keterlibatan masyarakat secara aktif untuk mendukung pencapaian target. Evaluasi berkala sangat penting untuk memastikan bahwa target TPB tetap relevan dan implementasinya efektif.



Tabel 4.18 Indikator dan Target Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029

Target	Nomor Indikator	Indikator	Target Perpres 59/2017	Realisasi				2024	Status Capaian TPB 2024	OPD Pelaksana	Target				
				2020	2021	2022	2023				2025	2026	2027	2028	2029
TUJUAN 1 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN															
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	10,36	11,18	10,55	10,22	9,76	Sudah Dilaksanakan Belum mencapai Target (SB)	BPS	9,30	8,84	8,38	7,92	7,46
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkat menjadi 95%	2.026.787	2.031.574	2.183.067	2.183.067	88,14	Sudah Dilaksanakan Mencapai Target (SS)	DINKES	89,28	90,43	91,57	92,71	93,86
	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	38,25	46,60	63,47	72,10	Meningkat	Sudah Dilaksanakan Mencapai Target (SS)	DISNAKER	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkat menjadi 17,12%	90	90	90	100		Sudah Dilaksanakan Mencapai Target (SS)	DINSOS	17,12	17,12	17,12	17,12	17,12
	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Menurun menjadi 2,8 juta	135.326	140.419	127.881	120.381	Menurun	Sudah Dilaksanakan Mencapai Target (SS)	DINSOS	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan tanah dan bentuk kepemilikan lain,	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 70%	88,72	98,37	95,54	95,54		Sudah Dilaksanakan Mencapai Target (SS)	DINKES	70	70	70	70	70
	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Meningkat menjadi 63%.	90,1	98,2	92,2	92,4		Sudah Dilaksanakan Mencapai Target (SS)	DINKES	63	63	63	63	63
	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	72,34	72,08	66,2	71,24		Sudah Dilaksanakan Mencapai Target (SS)	DPPKBP3A	65	65	65	65	65



Target	Nomor Indikator	Indikator	Target Perpres 59/2017	Realisasi				2024	Status Capaian TPB 2024	OPD Pelaksana	Target				
				2020	2021	2022	2023				2025	2026	2027	2028	2029
warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	85,1	85,09	87,3	88	90,04	Sudah Dilaksanakan Belum mencapai Target (SB)	DISPERKIM	91,70	93,36	95,02	96,68	98,34
	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	76,94	83,77	85,79	86,88	88,75	Sudah Dilaksanakan Mencapai Target (SS)	DISPERKIM	90,63	92,50	94,38	96,25	98,13
	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Meningkat menjadi 94,78%	98,82	98,8	100	99,9		Sudah Dilaksanakan Mencapai Target (SS)	DISDIKPORA	94,78	94,78	94,78	94,78	94,78
	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkat menjadi 82,2%	79,75	80,86	80,87	80,89	81,34	Sudah Dilaksanakan Mencapai Target (SS)	DISDIKPORA	81,49	81,63	81,77	81,91	82,06
	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Meningkat menjadi 77,4%.	78,39	79,05	96,6	98,17		Sudah Dilaksanakan Mencapai Target (SS)	DISDUKCAPIL	77,4	77,4	77,4	77,4	77,4
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	0	0	0	0,00225	Menurun	Sudah Dilaksanakan Mencapai Target (SS)	BPBD	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkat menjadi 39 daerah	0	0		10		Sudah Dilaksanakan Belum mencapai Target (SB)	BPBD	39	39	39	39	39
	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 151 ribu	100	100	100	100	100	Sudah Dilaksanakan Mencapai Target (SS)	DINSOS	100	100	100	100	100
	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 81,5 ribu	76	N/A	N/A	N/A		Tidak Ada Data	DINSOS					
	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB= Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Meningkat menjadi 450	0	0	0	1	20	Sudah Dilaksanakan Belum mencapai Target (SB)	BPBD	20	20	20	20	20
	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	0	0	0	3	3	Sudah Dilaksanakan Belum mencapai Target (SB)	BPBD	3	3	3	3	3



Target	Nomor Indikator	Indikator	Target Perpres 59/2017	Realisasi				2024	Status Capaian TPB 2024	OPD Pelaksana	Target				
				2020	2021	2022	2023				2025	2026	2027	2028	2029
1.a Penjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Meningkat	0	0	0	180	Meningkat	Belum dilaksanakan Belum Mencapai Target (BB)	BPBD	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat

- Sumber :
- KLHS RPJMD Kabupaten Cianjur 2025-2029
 - Data diolah, 2024





BAB 5

PENUTUP

Kajian Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025-2029

Sebagai penutup, pembahasan mengenai tingkat kemiskinan di Kabupaten Cianjur dari berbagai aspek, seperti jumlah dan persentase penduduk miskin, kedalaman dan keparahan kemiskinan, garis kemiskinan, hingga kemiskinan ekstrem, menunjukkan adanya dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dampak pandemi COVID-19 dan upaya penanggulangan yang dilakukan. Meskipun tantangan masih ada, capaian seperti penurunan kemiskinan ekstrem yang signifikan memberikan gambaran positif terhadap efektivitas program pemerintah dan potensi perbaikan di masa depan. Bab ini menjadi landasan penting untuk merumuskan langkah strategis dalam mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.

Beberapa hal yang menjadi perhatian adalah

- **Kemiskinan Makro,** Dari tahun 2019 hingga 2023, Kabupaten Cianjur mengalami fluktuasi tingkat kemiskinan dengan peningkatan 2,03 persen selama pandemi COVID-19 (2019-2021) dan penurunan menjadi 10,22 persen pada 2023 seiring berakhirnya pandemi. Jumlah penduduk miskin turun sebesar 6.700 jiwa, menjadi 240.100 jiwa, mencakup 6,17 persen penduduk miskin di Jawa Barat. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) tertinggi terjadi pada 2021 (1,83) dan terendah pada 2019 (0,74), sementara Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) tertinggi juga terjadi pada 2021 (0,46). Garis kemiskinan 2023 mencatat pengeluaran minimum Rp437.327 per kapita per bulan, masih di bawah rata-rata Jawa Barat. Kemiskinan ekstrem di Cianjur turun signifikan dari 57,04 ribu orang pada 2021 menjadi 12,92 ribu orang pada 2023 (0,51 persen), didukung program pengurangan beban dan pemberdayaan ekonomi oleh pemerintah.
- **Kemiskinan Mikro,** Berdasarkan Data Kesejahteraan Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2023 (Data P3KE) menunjukkan bahwa penduduk dengan status kesejahteraan terendah (Desil 1 hingga 4) mencakup berbagai kelompok usia dan kondisi sosial-ekonomi. Sebanyak 42.512 individu dalam 18.623 rumah tangga berada dalam kategori ini, dengan mayoritas penduduk tersebar di wilayah perkotaan seperti Kecamatan Cianjur.



Penduduk usia produktif (15-64 tahun) mendominasi kelompok ini, namun 62,66% dari mereka tidak bekerja, menunjukkan tantangan besar dalam peningkatan kesejahteraan. Sebanyak 25,91% anak usia sekolah 7-18 tahun tidak/belum bersekolah, mencerminkan akses pendidikan yang masih terbatas. Sementara itu, mayoritas penduduk usia produktif bekerja di sektor informal sebagai pekerja lepas, petani, dan pekerja swasta. Kondisi ini menggarisbawahi perlunya peningkatan akses pendidikan, peluang kerja, dan pemberdayaan ekonomi di Kabupaten Cianjur.

- **Kemiskinan Konsumsi,** Kemiskinan di Kabupaten Cianjur dalam dimensi konsumsi selama 2019–2023 mengalami fluktuasi, dengan persentase penduduk miskin pada tahun 2019 sebesar 0,66%, meningkat menjadi 1,21% pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, namun menurun secara bertahap menjadi 0,33% pada tahun 2023. Tingkat kedalaman kemiskinan (P1) juga mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 1,38 dan mencapai puncaknya di 1,83 pada 2021, sebelum turun ke 0,29 pada 2023. Tingkat keparahan kemiskinan (P2) menunjukkan pola serupa, naik dari 0,27 pada 2020 ke 0,46 pada 2021, kemudian menurun ke 0,26 pada 2023. Secara relatif, Kabupaten Cianjur menunjukkan capaian lebih baik dibandingkan rata-rata nasional dan provinsi, dengan posisi P2 berada di peringkat ke-12 dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Program penanggulangan kemiskinan terbukti efektif dan relevan, meskipun pandemi memberikan dampak multidimensi yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi masyarakat miskin.
- **Kemiskinan Ketenagakerjaan,** Dimensi ketenagakerjaan di Kabupaten Cianjur menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2023 sebesar 7,71%, lebih tinggi 2,39% dibandingkan dengan TPT Nasional (5,32%) dan menempatkan Cianjur di peringkat ke-11 tertinggi di Jawa Barat. Meski sempat meningkat signifikan pada 2020 akibat pandemi COVID-19 (11,05%), TPT terus menurun hingga 2023 seiring pemulihan ekonomi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Cianjur pada 2023 mencapai 72,31%, lebih tinggi 2,83% dari rata-rata nasional (69,48%) dan menduduki peringkat ke-2 tertinggi di Jawa Barat, menunjukkan peran besar penduduk usia kerja dalam kegiatan produktif. Meskipun demikian, pengangguran tetap menjadi salah satu tantangan utama, berkontribusi pada peningkatan angka kemiskinan dan masalah sosial, sementara efektivitas program pemulihan ekonomi telah membantu memperbaiki kondisi ketenagakerjaan secara bertahap.
- **Kemiskinan Kesehatan,** Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Cianjur mengalami fluktuasi pada periode 2019–2023, dengan kenaikan signifikan dari 23 kasus pada 2019 menjadi 49 kasus pada 2021, sebagian besar akibat dampak COVID-19, kemudian turun menjadi 33 kasus pada 2022 namun meningkat kembali menjadi 51 kasus pada 2023. Angka Kematian Bayi (AKB) juga meningkat drastis dari 56 kasus pada 2019 menjadi 175 kasus pada 2021, dengan penurunan menjadi 129 kasus pada 2022, tetapi kembali naik



menjadi 156 kasus pada 2023. Sebaliknya, Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan tren peningkatan dari 69,91 tahun pada 2019 menjadi 74,61 tahun pada 2023, mengindikasikan perbaikan kualitas hidup. Prevalensi stunting berhasil diturunkan dari 33,7% pada 2021 menjadi 11,4% pada 2023, berkat strategi percepatan penurunan stunting. Meski terjadi perbaikan pada beberapa indikator, lonjakan AKI dan AKB membutuhkan perhatian serius melalui peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan.

- **Kemiskinan Pendidikan,** Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Cianjur menunjukkan dinamika perkembangan pendidikan selama periode 2018-2022 pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. APK SD/MI tetap tinggi meski mengalami penurunan, sedangkan APM SD/MI meningkat stabil, menunjukkan efektivitas kebijakan pendidikan dasar. Pada jenjang SMP/MTs, APK dan APM menunjukkan tren meningkat, meskipun capaian APM masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, APK dan APM SMA/MA terus mengalami kenaikan, tetapi masih tertinggal dibanding provinsi dan nasional, mengindikasikan perlunya perbaikan akses dan kualitas pendidikan. Secara keseluruhan, meski terdapat kemajuan, Pemerintah Kabupaten Cianjur perlu terus memperkuat kebijakan, sarana, dan program pendidikan agar capaian partisipasi lebih merata dan sejalan dengan target provinsi dan nasional.
- **Kemiskinan Infrastruktur Dasar,** Permasalahan kemiskinan dalam dimensi infrastruktur dasar di Kabupaten Cianjur mencakup akses sanitasi, air minum layak, penerangan listrik, dan hunian layak. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak masih rendah, fluktuatif, dan tertinggal dibandingkan tingkat provinsi dan nasional. Akses air minum layak juga menunjukkan fluktuasi, meski tren peningkatan telah terlihat sejak 2020. Akses penerangan listrik mencapai 100% pada 2021, mencerminkan program elektrifikasi yang efektif. Namun, akses terhadap hunian layak masih rendah meski menunjukkan peningkatan bertahap. Meski beberapa indikator telah sejalan dengan kebijakan provinsi dan nasional, konsistensi dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Cianjur
- **Kemiskinan Ketahanan Pangan,** Permasalahan kemiskinan dalam dimensi ketahanan pangan di Kabupaten Cianjur mencakup fluktuasi harga beras yang dipengaruhi inflasi, penurunan produktivitas padi akibat konversi lahan dan faktor alam, serta kebutuhan peningkatan produksi untuk memenuhi konsumsi. Selama lima tahun terakhir (2019-2023), produksi padi menurun sebesar 8,19%, sementara sektor protein hewani, seperti telur dan ayam broiler, tetap mendominasi pasar. Ketahanan pangan juga dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana penyedia pangan, di mana 35% desa tergolong rentan rawan pangan dengan rasio fasilitas yang tidak meningkat. Laju pertumbuhan penduduk 3% per tahun memperparah kesenjangan antara kebutuhan pangan dan



ketersediaan, sehingga diperlukan kebijakan terintegrasi untuk mengatasi tantangan tersebut.

Rencana tindak lanjut penanganan kemiskinan berfungsi sebagai panduan strategis untuk mengatasi masalah kemiskinan secara efektif berdasarkan profil kemiskinan daerah. Profil kemiskinan daerah memberikan gambaran tentang karakteristik, tingkat, dan penyebab kemiskinan di wilayah tertentu. Informasi ini menjadi dasar untuk merumuskan intervensi yang spesifik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Data tentang kelompok rentan, tingkat pengangguran, atau akses terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi landasan untuk menentukan jenis program yang paling relevan dan berdampak langsung.

Selain itu, rencana ini menetapkan prioritas program dan lokasi prioritas sebagai bagian dari upaya untuk mengoptimalkan sumber daya. Program prioritas dirancang untuk menjawab akar permasalahan kemiskinan, seperti peningkatan akses layanan dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penguatan infrastruktur di daerah tertinggal. Penentuan lokasi prioritas, seperti wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi atau yang terkena dampak bencana, memastikan bahwa upaya penanganan dilakukan secara terfokus dan memiliki dampak maksimal. Dengan pendekatan ini, rencana tindak lanjut tidak hanya menjadi alat perencanaan, tetapi juga sarana pengukuran keberhasilan dalam menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan tindak lanjut dari pekerjaan ini sebagai berikut :

- **Penambahan** data yang belum lengkap
- **Tambahkan Prioritas Intervensi** untuk setiap kategori kemiskinan
- **Faktor Pendorong dan Penghambat dipertajam**
- Sasaran dan Kebijakan yang **selaras** dengan permasalahan yang ada
- **Penentuan Lokasi Prioritas** perlu didukung dengan Isu dan Indikator yang jelas untuk mempertajam dalam penentuan lokasi.
- Penentuan Lokasi Prioritas **harus mempertimbangkan lokasi terpilih pada kajian terdahulu.**
- **Perlu mempertimbangkan** data/lokasi kecamatan dan kelurahan/desa dari P3KE dari tahun-tahun sebelumnya sebagai pembanding (Desil).
- **Melakukan survei** langsung ke lokasi-lokasi terpilih untuk mendapatkan data yang lebih akurat.
- **Melakukan koordinasi** dengan dinas terkait agar laporan yang dihasilkan lebih komprehensif.

